

Ibnu Syamsi

# *Pendidikan Kewirausahaan*

*Bagi Penyandang Difabel  
dalam Konteks Pendidikan Karakter Bangsa*

*Pendidikan Kewirausahaan bagi Penyandang Difabel  
dalam Konteks Pendidikan Karakter Bangsa*

*Ibnu Syamsi*

 **IKAPI**

 **Appti**

 **My Press**



**PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN  
BAGI PENYANDANG DIFABEL**  
dalam Konteks Pendidikan Karakter Bangsa

Ibnu Syamsi



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

**Pasal 2**

Undang-Undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
  1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
  2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

**BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 112**

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PENYANDANG DIFABEL

Dalam Konteks Pendidikan Karakter Bangsa

Oleh:  
**Ibnu Syamsi**

**ISBN: 978-602-6338-53-2**  
Edisi Pertama

**Diterbitkan dan dicetak oleh:**  
**UNY Press**

Jl. Gejayan, Gg. Alamanda, Komplek Fakultas Teknik UNY  
Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta 55281  
Telp: 0274 – 589346  
Mail: [unypress.yogyakarta@gmail.com](mailto:unypress.yogyakarta@gmail.com)  
© 2017 Ibnu Syamsi

*Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)*  
*Anggota Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)*

Penyunting Bahasa: Septi Prameswari  
Desain Sampul & Tata Letak : : Pudji Triwibowo

*Isi di luar tanggung jawab percetakan*

**Ibnu Syamsi**

PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PENYANDANG DIFABEL  
dalam Konteks Pendidikan Karakter Bangsa

*-Ed.1, Cet.1.- Yogyakarta: UNY Press 2017*

*x + 255 hlm; 16 x 23 cm*

**ISBN: 978-602-6338-53-2**

1. PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PENYANDANG DIFABEL  
dalam Konteks Pendidikan Karakter Bangsa

*1.judul*



## **Prakata**

Buku dengan judul Pendidikan Kewirausahaan untuk Penyandang Difabel diperuntukan untuk masyarakat luas. Buku ini untuk memperluas cakrawala masyarakat dalam mendalami kaum difabel bagaimana mereka berwirausaha. Masyarakat juga akan mengetahui kaum difabel dalam konteks yang sebenarnya. Buku ini berisi gambaran atau diskripsi mengenai kaum difabel dan kewirausahaan.

Buku ini juga bertujuan, menyediakan bahan bacaan untuk masyarakat mengenai kewirausahaan yang lebih spesifik. Bahan bacaan masyarakat yang berisi mengenai ide-ide yang lebih menggelitik antara kaum difabel dan kewirausahaan, juga nilai dan sikap terhadap penerapan kewirausahaan di masyarakat oleh kaum difabel.

Sasaran penggunaan buku ini masyarakat luas yang mempunyai ketertarikan dengan kaum difabel dan kewirausahaan, kaum intelektual, komunitas pengusaha. Buku ini berusaha untuk membongkar potensi yang terkandung dalam kaum difabel. Masyarakat juga akan mengetahui filosofis yang terkandung di dalam kaum difabel ini.

Ruang lingkup penulisan buku ini disusun dan dikembangkan dengan berpedoman pada difabel dan kewirausahaan secara cerdas dan smart, maka disusunlah buku ini, diawali pendahuluan dan kemudian dikemas ke dalam tujuh bab, yang terdiri atas bab 1 penyandang difabel dan kewirausahaan, bab 2 penyandang difabel dan masalah pekerjaan, bab 3 konsep dasar kewirausahaan dan praktik bagi difabel, bab 4 kewirausahaan dalam konteks karakter, bab 5 kesempatan berwirausaha bagi penyandang difabel, bab 6 pengelolaan penyandang difabel di tempat kerja, bab 7 peraturan standar tentang persamaan kesempatan kerja bagi penyandang difabel (Resolusi PBB No. 48/96 Tahun 1993). Dalam setiap bab terdapat diskripsi yang mendiskripsikan bahan bacaan ini sesuai dengan kebutuhan

masyarakat.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa buku ini belum sempurna. Saran dan kritik untuk perbaikan dan penyempurnaan akan selalu diterima dengan terbuka. Semoga segala bantuan dan pengorbanan dari pembaca menjadi amal baik dan dilimpahkan rahmat Allah SWT. Semoga buku ini memberikan manfaat pada kita semua. Amin ...

Penulis

## Daftar Isi

	Halaman
Halaman Sampul	i
Prakata	v
Daftar Isi	vii
<b>BAB I</b>	
<b>PENYANDANG DIFABEL DAN KEWIRAUSAHAAN</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Penyandang Difabel	1
B. Klasifikasi Penyandang Difabel	2
C. Karakteristik Penyandang Difabel	3
D. Dasar Pemikiran Pendidikan Kewirausahaan	10
E. Program Kewirausahaan di Perguruan Tinggi	20
F. Tujuan Kewirausahaan	31
<b>BAB II</b>	
<b>PENYANDANG DIFABEL DAN MASALAH PEKERJAAN</b>	<b>33</b>



A. Penyandang Difabel dan Diskriminasi	44
B. Bursa Kerja Bagi Penyandang Difabel	35
C. Kesempatan Kerja bagi Penyandang Difabel masih Minim	37
D. Penyandang Difabel tidak Ingin Dikasihani	39
E. Perusahaan Wajib Berikan Kesempatan Kerja Penyandang Difabel	43
F. Penghargaan kepada Perusahaan yang Peduli Penyandang Difabel	44
G. Pemberdayaan Penyandang Difabel dalam Lapangan Kerja	46
H. Pengembangan Teknik Adaptif dalam Karir Penyandang Difabel	49

### **BAB III**

KONSEP DASAR KEWIRAUSAHAAN DAN PRAKTIK BAGI DIFABEL	59
A. Pengertian Kewirausahaan	59
B. Peranan dan Fungsi Kewirausahaan	63
C. Ciri-ciri Kewirausahaan	64
D. Prinsip-prinsip Kewirausahaan	66
E. Kendala-kendala dalam Kegiatan Kewirausahaan	67
F. Masalah Tingkat Pendidikan	70
G. Kurangnya Semangat Kepeloporan	71
H. Perencanaan Usaha, Produksi, dan Pemasaran	73
I. Jenis Usaha dan Cara Pengembangannya	74
J. Memilih Jenis Usaha yang Sesuai dengan Minat Siswa	75
K. Pemasaran (Marketing)	81

### **BAB IV**

PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DALAM KONTEKS KARAKTER	85
A. Penerapan Semangat Kewirausahaan di Sekolah	85

B. Bentuk Kewirausahaan di Sekolah	86
C. Kiat Menerapkan Inovasi dalam Wirausaha	88
D. Tindakan Pembelajaran Membangun KWU di Sekolah	89
E. Membangun Jiwa KWU di Sekolah dalam Konteks Karakter	91
F. Unsur yang Membentuk Kewirausahaan Kepala Sekolah	107
G. Dimensi Kepala Sekolah dalam Membangun Jiwa KWU	110
H. Kepala Sekolah Sebagai Pelaku Wirausaha	112
I. Manfaat Kewirausahaan bagi Kepala Sekolah	113
J. Pendorong Tumbuhnya Kewirausahaan di Sekolah	115
K. Kiat Menggalang Sumber Daya	118

## **BAB V**

### **KESEMPATAN BERWIRAUSAHA BAGI PENYANDANG DIFABEL**

	123
A. Program Kewirausahaan untuk Penyandang Difabel	123
B. Orientasi Kewirausahaan untuk Penyandang Difabel	127
C. Karena Realita Penyandang Difabel Bekerja	130
D. Pentingnya Membekali Diri Penyandang Difabel	131
E. Sikap Mandiri bagi Penyandang Difabel	133
F. Bagi Penyandang Difabel Gunakan yang Sempurna	135
G. Menyemangati Hidup bagi Penyandang Difabel	136
H. Menjaga Kebugaran bagi Penyandang Difabel	137
I. Kepekaan Batin Penyandang Difabel	138
J. Penyandang Difabel yang Sukses Berwirausaha	138
K. Contoh Usaha yang Cocok untuk Penyandang Difabel	145
L. Kata-kata Hikmah untuk Penyandang Difabel	160

M. Rambu-rambu Penyusunan Rencana Usaha ( <i>business plan</i> )	164
<b>BAB VI</b>	
PENGELOLAAN PENYANDANG DIFABEL DI TEMPAT KERJA	169
A. Dasar Pemikiran Kerja Penyandang Difabel	169
B. Ketentuan-ketentuan Umum Kerja Penyandang Difabel	171
C. Tugas dan dan Tanggung jawab Pihak Berwenang	179
D. Kerangka Pengelolaan Penyandang Difabel di Tempat Kerja	185
E. Perekrutan Tenaga Kerja Penyandang Difabel	188
F. Promosi Kondisi Penyandang Difabel	193
G. Mempertahankan Pekerjaan	195
<b>BAB VII</b>	
PERATURAN STANDAR TENTANG PERSAMAAN KESEMPATAN KERJA BAGI PENYANDANG DIFABEL	201
A. Latar Belakang dan Kebutuhan Masa Kini	201
B. Aksi Internasional Terdahulu	202
C. Menuju Peraturan Standar	203
D. Tujuan dan Isi Peraturan Standar tentang Persamaan	204
E. Konsep Fundamental dalam Kebijakan Mengenai Difabel	206
F. Prasyarat bagi Persamaan Partisipasi	212
G. Sasaran bagi Persamaan Partisipasi	217
H. Upaya-upaya Implementasi	228
I. Mekanisme Pemantauan	238
DAFTAR PUSTAKA	241
GLOSARIUM	249
BIODATA PENULIS	255

# **BAB I**

## **PENYANDANG DIFABEL DAN KEWIRAUSAHAAN**

### **A. Pengertian Penyandang Difabel**

Pendapat Bandi Delphie (2009) difabel berasal dari istilah *different ability* yang kini digunakan untuk menggantikan kata cacat yang berkonotasi negatif menjadi berkebutuhan khusus. Difabel ini baik yang terjadi sejak lahir ataupun karena kecelakaan dan akibat mengidap suatu penyakit tertentu. Tak seorang pun yang menginginkan terlahir cacat ataupun menjadi difabel karena kecelakaan ataupun karena mengidap penyakit tertentu. Tetapi ketika hal itu sudah terjadi tentu sikap dan tindakan yang tepat untuk mengatasinya sangatlah diperlukan.

Hallahan (2009) pada sisi lain penyandang difabel adalah sebutan untuk seseorang yang berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen didiagnosis mereka ternyata mengalami hambatan karena faktor internal dan/atau eksternal pada seseorang, sehingga untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, mereka memerlukan layanan pendidikan khusus.

Hasil dari kegiatan identifikasi adalah mengklasifikasikan penyandang difabel berdasarkan jenis kelainan dan/atau hambatan belajar yang dialami untuk keperluan layanan pendidikan khusus yang sesuai bagi mereka. Klasifikasi penyandang difabel sesuai PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 129 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Penyandang Difabel; meliputi, antara lain: tunanetra; tunarungu wicara; tunagrahita; tunadaksa; tunalaras; berkesulitan belajar; lamban belajar; autisme; memiliki gangguan motorik; korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lain;

Depdiknas (2002) konsep penyandang difabel memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Penyandang difabel adalah mereka yang dalam bidang pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan seseorang pada umumnya. Penyandang difabel ini mengalami hambatan dalam belajar, perkembangan; dan mencari lapangan kerja. Oleh sebab itu, mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan hidup masing-masing penyandang difabel, yaitu pendidikan kewirausahaan.

### **B. Klasifikasi Penyandang Difabel**

Dalam hal klasifikasi penyandang difabel Bandi Dhelphie (2009) berpendapat dalam usaha pelayanan pendidikan kewirausahaan bagi penyandang difabel dapat diklasifikasikan, antara lain: gangguan penglihatan (tunanetra); gangguan pendengaran (tunarungu); gangguan intelektual (tunagrahita); gangguan fisik atau tunadaksa; gangguan perilaku dan emosi (tunalaras); gangguan atau lamban belajar; dan gangguan dalam interaksi atau autisme.

Berbagai jenis dan pengklasifikasian penyandang difabel tersebut untuk lebih mudahnya dalam layanan pendidikan, khususnya pendidikan keterampilan kerja atau kewirausahaan perlu dikenal atau diketahui terlebih dahulu dari masing-masing karakter penyandang difabel misalnya melalui kegiatan identifikasi dan asesmen oleh berbagai disiplin ilmu dan praktisi.

### C. Karakteristik Penyandang Difabel

#### 1. Gangguan penglihatan (tunanetra)

Gangguan penglihatan (tunanetra) adalah mereka yang mengalami gangguan daya penglihatan sedemikian rupa, sehingga membutuhkan layanan khusus dalam pendidikan maupun kehidupannya.

Layanan khusus dalam pendidikan bagi penyandang difabel jenis tunanetra, yaitu dalam membaca menulis dan berhitung diperlukan huruf braille bagi yang buta, dan bagi yang sedikit penglihatan diperlukan kaca pembesar atau huruf cetak yang besar, media yang dapat diraba dan didengar atau diperbesar. Di samping itu, diperlukan latihan orientasi dan mobilitas. Hallahan (2005) untuk mengenali gangguan penglihatan, dapat melihat ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kurang melihat (kabur) tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 m.
- b. Kesulitan mengambil benda kecil didekatnya.
- c. Tidak dapat menulis mengikuti garis lurus.
- d. Sering meraba-raba dan tersandung waktu berjalan,
- e. Bagian bola mata yang hitam berwarna keruh/bersisik kering.
- f. Tidak mampu melihat.
- g. Peradangan hebat pada kedua bola mata,
- h. Mata bergoyang terus.

Pada sisi lain Bandi Delphie (2009) berpendapat, gangguan penglihatan dapat dikelompokkan:

- a. Berdasarkan ukuran ketajaman penglihatan, seseorang tunanetra dapat dibagi menjadi:
  - 1) Mampu melihat dengan ketajaman penglihatan (*acuity*) 20/70 artinya tunanetra melihat dari jarak 20 feet (6 meter) sedangkan orang normal dari jarak 70 feet (21 meter). Mereka digolongkan ke dalam *low vision* (keterbatasan penglihatan)
  - 2) Mampu membaca huruf paling besar di Snellen Chart dari jarak 20 feet (*acuity* 20/200 - *legal blind*) dikategorikan buta. Ini berarti penyandang tunanetra melihat huruf E dari jarak 6 meter, sedangkan orang normal dari jarak 60 meter.

4

- b. Karakteristik penyandang tunanetra yang memiliki keterbatasan pengelihatannya (*low vision*):
  - 1) Mengenal bentuk atau objek dari berbagai jarak.
  - 2) Menghitung jari dari berbagai jarak.
  - 3) Tidak mengenal tangan yang digerakkan.
- c. Kelompok yang mengalami keterbatasan penglihatan berat (buta) :
  - 1) Mempunyai persepsi cahaya (*light perception*).
  - 2) Tidak memiliki persepsi cahaya (*no light perception*).
- d. Dalam perspektif pendidikan, tunanetra dikelompokkan menjadi:
  - 1) Mereka yang mampu membaca huruf cetak standar.
  - 2) Mampu membaca huruf cetak standar, tetapi dengan bantuan kaca pembesar.
  - 3) Mampu membaca huruf cetak dalam ukuran besar (ukuran huruf No. 18.)
  - 4) Mampu membaca huruf cetak secara kombinasi, cetakan reguler, dan cetakan besar.
  - 5) Menggunakan Braille tetapi masih bisa melihat cahaya.
- e. Keterbatasan penyandang tunanetra :
  - 1) Keterbatasan dalam konsep dan pengalaman baru.
  - 2) Keterbatasan dalam berinteraksi dalam lingkungan.
  - 3) Keterbatasan dalam mobilitas.
- f. Kebutuhan pembelajaran penyandang tunanetra.  
Karena keterbatasan penyandang tunanetra seperti tersebut di atas maka pembelajaran bagi mereka mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - 1) Kebutuhan akan pengalaman konkret.
  - 2) Kebutuhan akan pengalaman yang terintegrasi.
  - 3) Kebutuhan dalam berbuat dan bekerja dalam belajar
- g. Media belajar untuk penyandang tunanetra dikelompokkan menjadi dua yaitu:
  - 1) Kelompok buta dengan media penulisan braille.
  - 2) Kelompok *low vision* dengan media tulisan awas yang dimodifikasi (misalnya tipe huruf diperbesar dan penggunaan alat pembesar).

## 2. Difabel dengan gangguan pendengaran (tunarungu)

Difabel gangguan pendengaran adalah mereka yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga mengalami gangguan berkomunikasi secara verbal. Walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar, mereka masih tetap memerlukan layanan pendidikan khusus.

a. Ciri-ciri difabel gangguan pendengaran adalah sebagai berikut:

- 1) Sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar.
- 2) Banyak perhatian terhadap getaran.
- 3) Terlambat dalam perkembangan bahasa.
- 4) Tidak ada reaksi terhadap bunyi atau suara.
- 5) Terlambat perkembangan bahasa.
- 6) Sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi.
- 7) Kurang atau tidak tanggap dalam diajak bicara.
- 8) Ucapan kata tidak jelas, kualitas suara aneh/monoton.

b. Kebutuhan pembelajaran difabel gangguan pendengaran, secara umum tidak berbeda dengan seseorang pada umumnya. Tetapi mereka memerlukan perhatian dalam kegiatan pembelajaran, antara lain:

- 1) Tidak mengajak penyandang gangguan pendengaran dan wicara dengan cara membelakanginya.
- 2) Penyandang gangguan pendengaran dan wicara hendaknya didudukkan paling depan, sehingga memiliki peluang untuk mudah membaca bibir guru.
- 3) Perhatikan postur penyandang gangguan pendengaran dan wicara yang sering memiringkan kepala untuk mendengarkan.
- 4) Dorong mereka untuk selalu memperhatikan wajah guru, bicaralah dengan mereka dengan posisi berhadapan dan bila memungkinkan kepala guru sejajar dengan kepala penyandang gangguan pendengaran dan wicara.
- 5) Guru bicara dengan volume biasa tetapi dengan gerakan bibirnya yang harus jelas (Hallahan, 2005).



### 3. Difabel dengan gangguan intelektual (tunagrahita)

Tunagrahita (*retardasi mental*) adalah penyandang difabel anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental-intelektual di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Mereka memerlukan layanan pendidikan khusus.

Ketunagrahitaan mengacu pada intelektual umum yang secara signifikan berada di bawah rata-rata. Penyandang difabel tunagrahita mengalami hambatan dalam tingkah laku dan penyesuaian diri. Semua itu berlangsung atau terjadi pada masa perkembangannya. Dengan demikian, seseorang dikatakan penyandang tunagrahita apabila memiliki tiga indikator, yaitu: (1) keterhambatan fungsi kecerdasan secara umum atau di bawah rata-rata, (2) ketidakmampuan dalam perilaku sosial, dan (3) hambatan perilaku adaptif terjadi pada usia perkembangan yaitu sampai dengan usia 18 tahun. Tingkat kecerdasan seseorang diukur melalui tes inteligensi yang hasilnya disebut dengan IQ (*Intelligence Quotient*).

### 4. Difabel gangguan fisik atau tunadaksa

Difabel gangguan tunadaksa adalah mereka yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada anggota gerak (tulang, sendi, otot). Mereka mengalami gangguan gerak karena kelayuhan otot, atau gangguan fungsi syaraf otak disebut CP (*Cerebral Palsy*).

Dari segi fungsi fisik, gangguan tunadaksa diartikan sebagai seseorang yang fisik dan kesehatannya terganggu sehingga mengalami kelainan di dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Untuk meningkatkan fungsinya diperlukan program dan layanan pendidikan khusus. Peristilahan dalam kelumpuhan dibagi menurut daerah kelumpuhannya. Kelumpuhan sebelah badan disebut hemiparalise, kelumpuhan kedua anggota gerak bawah disebut paraparalise.

a. Ciri-ciri difabel gangguan fisik dapat dilukiskan sebagai berikut :

- 1) Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam.

- 2) Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap/tidak sempurna/lebih kecil dari biasa.
- 3) Kesulitan dalam gerakan (tidak sempurna, tidak lentur/tidak terkendali, bergetar).
- 4) Terdapat gangguan pada anggota gerak.
- 5) Anggota gerak layu, kaku, lemah/lumpuh.

b. Kebutuhan pembelajaran bagi difabel gangguan fisik.

Guru sebelum memberikan pelayanan dan pembelajaran bagi bagi difabel harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Segi kesehatan difabel gangguan fisik.

Apakah ia memiliki kelainan khusus seperti kencing manis atau pernah dioperasi, kalau digerakkan sakit sendinya, dan masalah lain seperti harus meminum obat dan sebagainya.

2) Kemampuan gerak dan mobilitas.

Apakah anak ke sekolah menggunakan transportasi khusus, alat bantu gerak, dan sebagainya. Hal ini berhubungan dengan lingkungan yang harus dipersiapkan.

3) Kemampuan komunikasi.

Apakah ada kelainan dalam berkomunikasi, dan alat komunikasi yang akan digunakan (lisan, tulisan, isyarat) dan sebagainya.

4) Kemampuan dalam merawat diri.

Apakah penyandang difabel gangguan fisik dapat melakukan perawatan diri dalam aktivitas sehari-hari atau tidak. Misalnya; dalam berpakaian, makan, mandi, dan lain-lain.

5) Posisi difabel gangguan fisik

Bagaimana posisi difabel gangguan fisik tersebut pada waktu menggunakan alat bantu, duduk pada saat menerima pelajaran, waktu istirahat, di kamar kecil (toilet), saat makan dan sebagainya. Sehingga physical therapis sangat diperlukan.

## 5. Difabel dengan gangguan perilaku dan emosi (tunalaras)

Difabel dengan gangguan perilaku dan emosi (tunalaras) adalah gangguan yang berperilaku menyimpang baik pada taraf sedang, berat

8

dan sangat berat, terjadi pada usia anak dan remaja, sebagai akibat terganggunya perkembangan emosi dan sosial atau keduanya, sehingga merugikan dirinya sendiri maupun lingkungan, maka dalam mengembangkan potensinya memerlukan pelayanan dan pendidikan secara khusus.

Di dalam dunia PLB dikenal dengan nama penyandang tunalaras (*behavioral disorder*). Kelainan tingkah laku ditetapkan bila mengandung unsur:

- a. Tingkah laku menyimpang dari standar yang diterima umum.
- b. Derajat penyimpangan tingkah laku dari standar umum sudah ekstrim.
- c. Lamanya waktu pola tingkah laku itu dilakukan.

#### **6. Difabel dengan gangguan lamban belajar**

Lamban belajar (*slow learner*) adalah difabel dengan gangguan yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah orang normal, tetapi tidak termasuk tunagrahita (biasanya memiliki IQ sekitar 80-85). Dalam beberapa hal difabel ini mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon rangsangan dan kemampuan untuk beradaptasi, tetapi lebih baik dibanding dengan yang tunagrahita. Mereka membutuhkan waktu belajar lebih lama dibanding dengan sebayanya. Sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus.

a. Ciri-ciri yang dapat diamati pada difabel dengan gangguan lamban belajar:

- 1) Rata-rata prestasi belajarnya rendah (kurang dari 6),
- 2) Menyelesaikan tugas-tugas akademik sering terlambat dibandingkan teman-teman seusianya.
- 3) Daya tangkap terhadap pelajaran lambat.
- 4) Pernah tidak naik kelas.

b. Difabel gangguan lamban belajar membutuhkan layanan khusus antara lain:

- 1) Waktu yang lebih lama dibanding seseorang pada umumnya.

- 2) Kesabaran petugas untuk tidak terlalu cepat dalam memberikan penjelasan.
- 3) Memperbanyak latihan dari pada hapalan dan pemahaman.
- 4) Menuntut digunakannya media pembelajaran yang variatif oleh guru.
- 5) Diperlukan adanya pengajaran remedial.

### 7. Difabel gangguan dalam interaksi atau autis

Autis dari kata *auto*, yang berarti sendiri, dengan demikian dapat diartikan seorang anak yang hidup dalam dunianya. Menurut (Lovas, 2003) penyandang autis cenderung mengalami hambatan dalam interaksi, komunikasi, perilaku sosial.

a. Penyandang autis memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Mengalami hambatan di dalam bahasa.
- 2) Kesulitan dalam mengenal dan merespon emosi dengan isyarat sosial.
- 3) Kekakuan dan miskin dalam mengekspresikan perasaan.
- 4) Kurang memiliki perasaan dan empati.
- 5) Sering berperilaku di luar kontrol dan meledak-ledak.
- 6) Secara menyeluruh mengalami masalah dalam perilaku.
- 7) Kurang memahami akan keberadaan dirinya sendiri.
- 8) Keterbatasan dalam mengekspresikan diri.
- 9) Berperilaku monoton dan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan.

b. Kebutuhan pembelajaran penyandang autis:

Penyandang autis membutuhkan pembelajaran khusus antara lain sebagai berikut:

- 1) Perlukan adanya pengembangan strategi untuk belajar dalam setting kelompok.
- 2) Perlu menggunakan beberapa teknik di dalam menghilangkan perilaku-perilaku negatif yang muncul dan mengganggu kelangsungan proses belajar secara keseluruhan (*stereotip*).

- 3) Guru perlu mengembangkan ekspresi dirinya secara verbal dengan berbagai bantuan.
- 4) Guru perlu terampil mengubah lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi penyandang autis, sehingga tingkah laku anak dapat dikendalikan pada hal yang diharapkan.

#### **D. Dasar Pemikiran Pendidikan Kewirausahaan**

Pendidikan di Indonesia saat ini cenderung lebih mengedepankan penguasaan aspek keilmuan, kecerdasan, dan mengabaikan pendidikan karakter. Pengetahuan tentang kaidah moral yang didapatkan dalam pendidikan moral atau etika di sekolah saat ini semakin ditinggalkan (Binsar A. Hutabarat, 2010). Kebanyakan pelaksana pendidikan mulai kurang memperhatikan lagi bagaimana pendidikan itu dapat berdampak terhadap perilaku seseorang. Itulah kelemahan terbesar pendidikan yakni gagal untuk menghadirkan generasi anak-anak bangsa yang berkarakter kuat.

Ciri-ciri karakter yang diinginkan dalam tujuan pendidikan untuk membangun jiwa kewirausahaan di sekolah, seperti kejujuran, kesopanan, keberanian, ketekunan, kesetiaan, pengendalian diri, simpati, toleransi, keadilan, menghormati harga diri individu, tanggung jawab untuk kebaikan umum dan lain-lain. Lebih spesifiknya dikemukakan Thomas Zimmers (2001), pendidikan yang mengembangkan karakter adalah upaya yang dilakukan pendidikan untuk membantu anak didik supaya mengerti, kepedulian, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika. Anak didik dapat menilai mana yang benar, sangat memedulikan tentang yang benar, dan melakukan apa yang mereka yakini sebagai yang benar, walaupun ada tekanan dari luar dan godaan dari dalam.

Pada sisi lain, permasalahan yang muncul jumlah angka pengangguran di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Peningkatan angka pengangguran tersebut selalu dikaitkan dengan sekolah (lembaga pendidikan) selaku lembaga yang menghasilkan calon-calon tenaga kerja tersebut. Para pengelola sekolah (kepala sekolah, guru) menjadi sorotan semua pihak baik itu pengamat

pendidikan, politisi, bahkan pemerintah sendiri karena dianggap tidak dapat menghasilkan tamatan-tamatan yang berkualitas. Pengangguran ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak mampu menampung jumlah angkatan kerja yang ada, atau dengan kata lain laju pertumbuhan tenaga kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Penyandang difabel merupakan salah satu dari permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Menurut Hakim, Rusman (1998) masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif. Sementara menurut Robke (2009) menyatakan *social problems* adalah: *Conditions among people leading to social responses that violate some people's values and norms and cause emotional or economic suffering. Examples of social problem include crime, social inequality, poverty, racism, drug abuse, family problems, and maldistribution of limited resources.*

Berdasarkan batasan tersebut maka penyandang difabel/cacat disebut masalah sosial karena sebagai sesuatu kondisi yang mengarah kepada reaksi melanggar nilai-nilai, norma-norma dirasakan banyak orang dan mengakibatkan masalah emosional dan masalah ekonomi. Penyandang difabel yang mereka alami mengakibatkan adanya ketidaksamaan sosial, diskriminasi, dalam permasalahan keluarga, pendistribusian yang salah tentang sumber-sumber yang terbatas dan kemiskinan, permasalahan tersebut menuntut pemecahan.

Penyandang difabel merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, permasalahan penyandang difabel merupakan permasalahan bangsa Indonesia. Mereka hidup sama seperti anggota masyarakat lainnya, ingin dihargai dan menghargai, ingin dicintai dan mencintai, ingin memiliki dan dimiliki, mempunyai karsa dan rasa, mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan sama seperti manusia lainnya. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka permasalahan penyandang difabel akan tetap ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia apabila tidak ditangani secara benar.

World Health Organization (2001) tentang pengelolaan penyandang difabel di tempat kerja adalah sebagai berikut: Para penyandang difabel bukanlah kelompok manusia yang beragam. Mereka ada yang mengalami cacat fisik, cacat sensorik, pikiran atau mental. Mereka ada yang menyandang difabel sejak lahir, atau saat kanak-kanak, remaja atau dewasa ketika masih bersekolah atau bekerja. Kondisi kecacatan mereka mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan mereka untuk bekerja dan berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan atau bantuan dari orang lain.

Di seluruh belahan dunia, para penyandang difabel berpartisipasi dan memberikan sumbangan berarti pada dunia kerja di segala tingkatan. Penelitian Haryanto (2010), banyak penyandang difabel yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan karena berbagai hambatan. Tingkat pengangguran di kalangan 386 juta penyandang difabel di seluruh dunia yang berada pada usia kerja jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran usia kerja umumnya.

Kendati diakui pertumbuhan ekonomi dapat mengarah pada meningkatnya peluang kerja, kaidah menegaskan langkah-langkah terbaik yang memungkinkan para pengusaha untuk memanfaatkan keterampilan dan potensi penyandang difabel sejalan dengan kondisi nasional yang ada. Juga semakin jelas bahwa penyandang difabel tidak hanya memberikan sumbangan berharga bagi perekonomian nasional, tetapi juga menegaskan fakta bahwa dengan mempekerjakan mereka menurunkan biaya jaminan penyandang difabel dan sekaligus mengentaskan kemiskinan. Binsar A. Hutabarat, (2010), ada kecenderungan bisnis yang kuat untuk mempekerjakan penyandang difabel: (1) berdasarkan perkiraan organisasi kesehatan dunia, dari 10 persen penduduk dunia atau 610 juta jiwa adalah penyandang difabel, dan 610 juta di antaranya berusia antara 15 sampai 64 tahun; (2) angka pengangguran yang dilaporkan di Amerika Serikat berkisar mulai dari 13 persen.

Jumlah ini dua kali lipat dari angkatan kerja penyandang difabel, hingga 18 % di Jerman, dan bahkan 80 persen atau lebih di banyak negara berkembang.

Penelitian Ibnu Syamsi (2005) dalam hal angkatan kerja, kurikulum yang diterapkan di sekolah sekarang ini cenderung teoritis, hal ini turut memberikan kontribusi kepada ketidaksiapan lulusan untuk memilih karir kerja mandiri (*self-employment*) atau berwirausaha karena mereka hanya disiapkan untuk melanjutkan atau masuk perguruan tinggi. Demikian pula lulusan perguruan tinggi pada umumnya dipersiapkan untuk bekerja menjadi karyawan. Memilih karir berwirausaha merupakan kasus luar biasa, kecuali bagi mereka yang memiliki latar belakang keluarga wirausaha terutama dari kalangan warga etnis keturunan. Oleh sebab itu, pendidikan kewirausahaan mungkin merupakan bagian dari solusi mengatasi masalah pengangguran.

Sebenarnya angka pengangguran tersebut tidak sepenuhnya diakibatkan dengan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, akan tetapi juga berasal dari faktor internal para calon tenaga kerja itu sendiri. Menurut hemat penulis ada beberapa faktor penyebabnya, yaitu: (1) sebagian besar lulusan sekolah menengah ataupun perguruan tinggi menginginkan pekerjaan-pekerjaan di sektor formal seperti menjadi Pegawai Negeri Sipil. Data dari Departemen Tenaga Kerja (2010) pemerintah telah memprogramkan bahwa pertumbuhan jumlah pegawai negeri adalah 0 persen. Walaupun ada penerimaan dan pengangkatan pegawai negeri baru, itu hanyalah penyisipan untuk menggantikan mereka-mereka yang sudah memasuki usia pensiun, dan itu pun jumlahnya sangat sedikit; (2) sebagian para calon tenaga kerja itu tidak memiliki bekal pendidikan kewirausahaan (*entrepreneurship*), sehingga mereka cenderung mencari atau mengharapkan pekerjaan dari orang lain dan bukan sebaliknya berupaya mengembangkan potensi dirinya serta berusaha menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain.



Berdasarkan fenomena di atas, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk meminimalisasi pengangguran tersebut adalah memberikan pendidikan kewirausahaan (*entrepreneurship*) semenjak dini. Sehingga para siswa memiliki bekal spirit yang tinggi yaitu mandiri, berani menanggung risiko dan mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun serta memiliki jiwa kewirausahaan dan tidak mudah menyerah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah menegaskan bahwa seorang kepala sekolah harus memiliki lima dimensi kompetensi minimal, yaitu: (1) kompetensi kepribadian, (2) manajerial, (3) kewirausahaan, (4) supervisi, dan (5) sosial. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah sehingga ia pun harus memiliki kompetensi yang disyaratkan memiliki kompetensi guru yaitu: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Buchari (2006), dimensi kompetensi kewirausahaan meliputi kegiatan belajar: (1) konsep dan latihan kewirausahaan, (2) konsep dan latihan inovasi, (3) konsep dan latihan bekerja keras, (4) konsep dan latihan motivasi kuat (komitmen) dan pantang menyerah, (5) konsep dan latihan kreativitas untuk selalu mencari solusi terbaik, dan (6) evaluasi diri memiliki naluri kewirausahaan.

Satu di antara dimensi kompetensi kepala atau pengawas sekolah dan guru adalah kewirausahaan. Kewirausahaan di sini dalam makna untuk kepentingan pendidikan yang bersifat sosial bukan untuk kepentingan komersial. Kewirausahaan dalam bidang pendidikan yang diambil adalah karakteristiknya (sifatnya) seperti inovatif, bekerja keras, motivasi yang kuat, pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik, dan memiliki naluri kewirausahaan; bukan mengomersialkan sekolah. Semua karakteristik tersebut bermanfaat bagi kepala atau pengawas sekolah dan guru serta tata usaha dalam mengembangkan sekolah, mencapai keberhasilan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pemimpin, menghadapi kendala sekolah, mengelola kegiatan sebagai sumber belajar siswa.

Dalam keterpurukan ekonomi yang telah melanda bangsa Indonesia sejak bulan Agustus tahun 1997, disadari bahwa perekonomian yang bertumpu pada industri-industri hilir yang bahan bakunya merupakan hasil impor, tidak dapat menahan gejolak ekonomi global. Konsepsi yang dahulu sayup-sayup terdengar bahwa berdiri atas kaki sendiri dalam perekonomian yang bertumpu kepada kekuatan sumber daya alam dan daya manusia sendiri akan mengokohkan keberadaan bangsa Indonesia, pada saat ini terasa lebih bermakna, walaupun didasari bahwa hal itu memerlukan kerja keras dari seluruh bangsa Indonesia yang telah dianugerahi kekayaan alam yang meliputi daratan dan lautan.

Beberapa tahun yang lalu, dalam suasana bangsa yang terpaku pada industri besar yang seolah-olah memberikan harapan dalam peningkatan kesejahteraan menuju masyarakat adil dan makmur, industri-industri kecil nyaris hanya menjadi bagian yang tidak signifikan. Bahkan keberadaannya tergusur oleh produk impor sejenis yang lebih murah dan lebih baik kualitasnya. Industri-industri kecil tidak dapat sepenuhnya didorong untuk sanggup bersaing dengan produk impor atau menjadi partner industri besar sebagai pemasok komponen-komponen produknya, arena keterbatasan kualitas SDM yang dipunyainya dalam penguasaan teknologi dan keahlian pemasaran. Di lain pihak, lulusan perguruan tinggi lebih banyak berorientasi untuk berkarya di industri-industri besar dari pada bekerja di perusahaan kecil menengah atau menjadi pengusaha sendiri. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar oleh industri-industri besar tersebut. Kondisi ini dipertajam pula oleh terlampau sedikitnya usaha menyisipkan pemahaman jiwa kewirausahaan dalam pendidikan di Perguruan Tinggi.

Pada kenyataan selama ini, sebagian besar dari pengusaha Indonesia tumbuh dan berkembang dengan jiwa kewirausahaan turun temurun, bukan melalui pendidikan formal. Budaya wirausaha tumbuh dan berkembang hanya dalam keluarga atau kelompok masyarakat tertentu saja. Pendidikan di Perguruan Tinggi lebih banyak.

Menghasilkan lulusan pekerja yang walaupun berpengetahuan tinggi, bukan wirausahawan yang dengan penguasaan sains dan teknologinya berusaha secara mandiri dalam mensejahterakan diri dan masyarakat. Padahal untuk meningkatkan penciptaan dan pertumbuhan wirausaha baru, dibutuhkan suatu keterpaduan yang sinergik antara penguasaan ilmu dan teknologi (termasuk kejelian menerapkannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat), keuangan (*financial cost*) dan manajemen produksi.

Penelitian Ibnu Syamsi (2009), kecenderungan para peneliti Indonesia terlalu sedikit menaruh minat atau mempunyai jiwa kewirausahaan, mengakibatkan sebagian besar dari hasil-hasil penelitian dan pengembangan hanya bernilai akademis saja, sedikit sekali berlanjut dengan perwujudan produk komersial yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Untuk menghadapi era perdagangan bebas yang telah dibuka pada tahun 2003 dan sebagai salah satu upaya mendorong pembangunan kembali perekonomian yang kini terpuruk, budaya wirausaha harus terwujud sebagai sublimasi dari penguasaan sains, teknologi dan sesuai dengan pengetahuan kewirausahaan dalam diri setiap atau paling tidak sebagian besar lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia. Hal ini merupakan realitas pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencanangkan usaha mencerdaskan bangsa seiring dengan usaha memajukan kesejahteraan bangsa. Dengan demikian, pendidikan di Perguruan Tinggi akan dapat mensinergikan usaha mencerdaskan bangsa dengan usaha mensejahterakan bangsa, sehingga bangsa Indonesia dapat bersaing dengan bangsa lain dalam berkarya, baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Selain itu, jiwa wirausaha lulusan Perguruan Tinggi akan mendorong tumbuhnya industri-industri kecil dan menengah (yang pada saat ini terbukti ketangguhannya) yang sanggup menghasilkan barang produksi dan atau jasa berkualitas tinggi memenuhi standar nasional dan internasional.

Untuk mendukung upaya bangsa Indonesia dalam menata dan membangun kembali perekonomiannya, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ditbinlitabmas) Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (2013) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdiknas), mencanangkan enam wahana kegiatan dalam merelisasikan pengembangan budaya kewirausahaan. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta diundang untuk mengajukan usulan program pengembangan budaya kewirausahaan di masing-masing perguruan tinggi, sebagai upaya memadukan kegiatan pencerdasan dengan kegiatan pensejahteraan bangsa sejalan dengan perwujudan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya.

Program pengembangan budaya kewirausahaan di perguruan tinggi ini pada hakikatnya merupakan titik dari program-program penelitian (seperti penelitian dasar, penelitian dosen muda, dan penelitian hibah bersaing), program penerapan Ipteks dan program Vucer untuk pengabdian kepada masyarakat, yang telah dilaksanakannya selama ini oleh berbagai universitas/institut dan politeknik dengan pendanaan melalui Ditbinlitabmas Dikti. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan program penelitian dalam mewujudkan penguasaan Iptek yang dibuktikan dengan bertumbuhkembangnya beberapa konsep dan produk orisinal serta keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat, yang dicirikan oleh antusiasme masyarakat dalam menanggapi hasil karya penerapan iptek yang dibutuhkannya, memberikan inspirasi kuat diselenggarakannya program pengembangan budaya kewirausahaan di perguruan tinggi ini yang telah berjalan sejak tahun 1997. Diharapkan agar ini dapat mendorong akselerasi pemulihan ekonomi (*economy recovery*) di Indonesia.

Mencermati perkembangan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) DP2M selama 15 tahun terakhir, terasakan keutamaan peranan evaluasi program. Mengacu kepada hasil evaluasi program tersebut, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DP2M) Ditjen Dikti menciptakan berbagai jenis program PPM yang menunjukkan tingkat kepedulian sekaligus keserasian

program DP2M Ditjen Dikti terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Sejak tahun 1994, DP2M merilis Program Vucer yang membantu menemukan solusi teknologi atau manajemen bagi usaha kecil, berdampingan dengan Program Penerapan Ipteks yang fokus pada pembinaan kelompok masyarakat. Pada tahun 1997, DP2M mengembangkan Program Vucer Multi Tahun (VMT) sebagai respon terhadap rendahnya minat usaha kecil untuk berkembang melalui basis teknologi atau manajemen bisnis modern. Pada tahun yang sama dilahirkan Program Pengembangan Budaya Kewirausahaan di Perguruan Tinggi (PBKPT) untuk membantu melahirkan sarjana-sarjana entrepreneur sebagai tanggapan DP2M atas lambatnya perkembangan usaha kecil di Indonesia akibat kurangnya pemahaman ilmu pengetahuan di lingkungan pengusaha kecil. Pada tahun 2000 kembali DP2M merilis program baru sebagai respons atas belum mampunya masyarakat menerima sains-teknologi canggih dari perguruan tinggi, sementara kebutuhan masyarakat akan produk kepakaran termaksud mendesak untuk dipenuhi. Program tersebut diberi nama Unit Usaha Jasa dan Industri (u-UJI). Adanya u-UJI di samping untuk membangun *science and technology park* di kampus-kampus Indonesia, juga sekaligus menunjukkan kepada dunia industri atau investor akan adanya produk-produk intelektual yang dapat dihasilkan di kampus dan dapat menerobos masuk pasar nasional, bahkan global. Respons DP2M atas rendahnya kinerja program Kuliah Kerja Nyata (KKN) PT diwujudkan dalam Program Sinergi Pemberdayaan Potensi Masyarakat atau lebih dikenal dengan nama Sibermas, PT diwajibkan bermitra sekaligus menjadi partner Pemkab/Pemkot dalam melaksanakan RPJM dalam suatu kawasan atau wilayah tertentu. Sibermas dilaksanakan sejak tahun 2001 dan berkembang menjadi suatu program yang sangat diminati Pemkab/Pemkot di Indonesia.

Eksistensi program PPM tersebut di atas telah mampu memberikan peningkatan kinerja bisnis industri mikro, usaha kecil menengah melalui modifikasi proses, peralatan proses, manajemen

bisnis, pemasaran bahkan sampai pada tahap manajemen mutu. Sedangkan program PPM bagi masyarakat baik melalui kemitraan dengan Pemkab/Pemkot maupun langsung pada kelompok-kelompok masyarakat berhasil meningkatkan kemauan bekerja dan kesadaran masyarakat untuk memberdayakan sumber daya alam di lingkungannya bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan, sekaligus memutakhirkan penguasaan sains-teknologi, tidak hanya dalam kemampuan bertani, berkebun, berternak dan berwirausaha, melainkan juga dalam bidang teknologi tepat guna, pendidikan, kesehatan bahkan keagamaan.

Pada tahun 2008, DP2M melihat adanya ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan, di samping keterbatasan kapasitas program dan alokasi dana dalam menangkap seluas serta sedalam mungkin persoalan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, DP2M mencoba melakukan aksi terobosan dengan merintis kegiatan PPM yang berasal dari produk-produk riset, meningkatkan satuan biaya kegiatan, bekerja sama dengan Departemen Teknis atau institusi pemerintah lain, mengekspos kegiatan PPM dan semua jenis produknya langsung ke masyarakat melalui media masa ataupun ke lingkungan yang lebih spesifik seperti Pemerintah Kota/Kabupaten atau KADIN.

Perubahan-perubahan kebutuhan dasar masyarakat yang berlangsung terus menerus sebagai akibat dari dinamika kehidupan dunia, tetap menjadi acuan DP2M dalam merumuskan program-program PPM sehingga dapat diharapkan dampaknya terasa semakin signifikan. Persoalan rendahnya kinerja dan mutu produk usaha mikro, pengangguran, kemalasan, kemiskinan, kebodohan, penyakit dan lain-lain persoalan yang menjadi fokus perhatian program PPM DP2M selama ini, masih harus ditambah lagi dengan permasalahan lulusan perguruan tinggi yang tidak berpenghasilan, pertumbuhan kota yang tidak terkendali, UU BHP, konservasi budaya dan kearifan lokal serta banyak lagi persoalan-persoalan yang harus dihadapi bangsa Indonesia akan sangat memengaruhi aktualitas, kapasitas dan fleksibilitas program PPM di masa mendatang. Mengantisipasi dinamika

masyarakat tersebut, DP2M melakukan reformasi seluruh program PPM yang ada, baik melalui perluasan maupun peningkatan biaya satuan program. Dengan demikian, program PPM DP2M masa kini memiliki tingkat kelenturan tinggi sehingga siap menampung volume persoalan masyarakat yang lebih luas dan mendasar.

Oleh karena seluruh program bersendikan pada penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS), maka penamaan program PPM DP2M tahun 2009 berlandaskan pada kegiatan tersebut dan konteks sasarannya. Program I<sub>b</sub>M misalnya berarti Program Ipteks bagi Masyarakat; I<sub>b</sub>K yaitu Ipteks bagi Kewirausahaan; I<sub>b</sub>W yaitu Ipteks bagi Wilayah; I<sub>b</sub>PE adalah Ipteks bagi Produk Ekspor dan I<sub>b</sub>IKK yaitu Ipteks bagi Inovasi dan Kreativitas Kampus. Reformasi substansi dan juga nama program PPM ini ditujukan bagi kesempurnaan partisipasi Perguruan Tinggi dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat di samping memberi peluang terjadinya pemutakhiran sains, teknologi dan seni di Perguruan Tinggi.

## **E. Program Kewirausahaan di Perguruan Tinggi**

### **1. Ipteks Bagi Masyarakat (I<sub>b</sub>M)**

Ipteks bagi Masyarakat (I<sub>b</sub>M) merupakan salah satu program pengabdian kepada masyarakat (PPM) yang dirumuskan dan dikembangkan DP2M Ditjen Dikti pada tahun 2009. Program I<sub>b</sub>M dibentuk melalui integrasi dua program PPM sebelumnya, yaitu penerapan Ipteks dan Vucer, yang masing-masingnya telah dilaksanakan sebelum tahun 1992 dan sejak 1994.

Sebagaimana telah diketahui bahwa program penerapan Ipteks difokuskan pada penerapan hasil-hasil Ipteks perguruan tinggi untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman Ipteks masyarakat. Program ini dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan pelayanan masyarakat, serta kaji tindak dari Ipteks yang dihasilkan perguruan tinggi. Khalayak sasarannya adalah masyarakat luas, baik perorangan, kelompok, komunitas maupun lembaga, di perkotaan atau perdesaan. Sedangkan program Vucer fokus pada solusi persoalan

teknologi atau manajemen, termasuk pembukuan dan pemasaran untuk khalayak sasaran industri kecil dan koperasi.

Berbeda dengan program Vucer, produk pelaksanaan program penerapan Ipteks pada awalnya tidak menghasilkan luaran yang terukur. Namun sejak sekitar 5 (lima) tahun silam, penerapan Ipteks dituntut agar mampu menghasilkan produk yang terukur pula. Dengan demikian, kegiatan program penerapan Ipteks dalam perkembangannya semakin sulit dibedakan secara jelas dengan program Vucer, kecuali dari sisi mitranya. Keterukuran diutamakan guna membuka peluang DP2M menentukan indikator kinerja kedua program. Di sisi lain, DP2M mencoba menerapkan paradigma baru dalam kegiatan PPM yang bersifat *problem solving*, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (*sustainable*) dengan sasaran yang tidak individual. Hal-hal inilah yang menjadi alasan dikembangkannya program Ipteks bagi Masyarakat (I<sub>b</sub>M).

Dalam program Ipteks bagi Masyarakat (I<sub>b</sub>M), khalayak sasarannya adalah sekelompok masyarakat atau sejumlah pengusaha mikro. Kegiatan I<sub>b</sub>M merupakan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi mitra melalui pendekatan secara terpadu, melibatkan berbagai disiplin ilmu, baik serumpun maupun tidak. Program I<sub>b</sub>M menghasilkan luaran yang terukur, bermakna, dan berkelanjutan bagi kelompok masyarakat atau kelompok pengusaha mikro. Kegiatan I<sub>b</sub>M dapat dilakukan di perkotaan atau pedesaan dari berbagai bidang ilmu, teknologi, seni suatu perguruan tinggi, sesuai kebutuhan mitra sasarannya. Misi program I<sub>b</sub>M adalah membentuk masyarakat produktif yang tenteram dan sentosa.

**1. Tujuan program I<sub>b</sub>M adalah:**

- a. Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomis.
- b. Membantu menciptakan ketenteraman, kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.



c. Meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan.

Luaran program I<sub>b</sub>M dapat berupa: 1) Jasa, 2) Metode, 3) Produk/Barang dan 4) Paten yang memberi dampak pada: (a) *updating* ipteks di masyarakat, (b) peningkatan produktivitas mitra (c) peningkatan atensi akademisi terhadap kelompok masyarakat/industri kecil, (d) peningkatan kegiatan pengembangan ilmu, teknologi dan seni di perguruan tinggi.

Hasil program I<sub>b</sub>M wajib di diseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah dan dipublikasikan melalui Jurnal Nasional. Program I<sub>b</sub>M berlangsung selama 1 (satu) tahun dan dibiayai sepenuhnya melalui DIPA DP2M Ditjen Dikti atau bersama instansi lain. Dukungan dana DIPA DP2M Ditjen Dikti maksimum sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan minimal 8 bulan. Pencairan dana dilakukan melalui dua tahap; tahap I 70% dan II 30%. Tahap II tidak akan dicairkan jika Laporan Akhir belum diterima DP2M.

## **2. Ipteks bagi Kewirausahaan (I<sub>b</sub>K)**

Ipteks bagi Kewirausahaan (I<sub>b</sub>K) merupakan program baru di DP2M Dikti yang dirumuskan pada tahun 2009. Pada prinsipnya program I<sub>b</sub>K mensubstitusi program sejenis sebelumnya, yaitu Pengembangan Budaya Kewirausahaan di Perguruan Tinggi (PBKPT), yang dirumuskan dan direalisasikan sejak tahun 1997. Program PBKPT yang dilaksanakan secara parsial tanpa adanya sinergi di antara setiap program (KWU, K KU, MKU, KBPK dan INWUB), menyebabkan tidak dapat mencapai misinya membentuk wirausaha baru dari kampus. Di samping itu, PT umumnya telah memiliki mata kuliah wajib atau pilihan kewirausahaan dan Unit Penempatan Tenaga Kerja.

Oleh karena itu, DP2M memandang perlu untuk merumuskan suatu program dengan misi yang sama, yaitu menghasilkan wirausaha-wirausaha baru dari kampus, namun melalui program terintegrasi dengan kreasi metode diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara program. I<sub>b</sub>K dikelola sejumlah staf dari berbagai disiplin ilmu dan melaksanakan sejumlah kegiatan kreatif untuk menghasilkan

wirausaha baru yang mandiri. Dalam kegiatannya, I<sub>b</sub>K juga dapat berkolaborasi melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan pengembangan kewirausahaan.

Misi program I<sub>b</sub>K adalah memandu PT menyelenggarakan unit layanan kewirausahaan yang profesional, mandiri dan berkelanjutan, berwawasan *knowledge based economy*. Adapun tujuannya adalah (1) menciptakan wirausaha baru yang mandiri, (2) meningkatkan keterampilan manajemen usaha bagi masyarakat industri, (3) menciptakan metode pelatihan kewirausahaan yang cocok bagi mahasiswa PKMK/mahasiswa wirausaha. Mengingat bahwa I<sub>b</sub>K suatu saat harus mandiri dan operasionalnya berkelanjutan, maka I<sub>b</sub>K diberi akses seperti halnya unit profit.

Dalam upaya menciptakan wirausaha baru mandiri, program I<sub>b</sub>K dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, menempatkan mahasiswa untuk melaksanakan magang pada perusahaan yang mapan dan memfasilitasi mahasiswa berwirausaha. Pelatihan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kewirausahaan, mendorong tumbuhnya motivasi berwirausaha, meningkatkan pemahaman manajemen (organisasi, produksi, keuangan, dan pemasaran) dan membuat rencana bisnis atau studi kelayakan usaha.

Kegiatan magang pada perusahaan dilaksanakan untuk memberikan pengalaman praktis kewirausahaan kepada mahasiswa dengan cara ikut bekerja sehari-hari pada perusahaan tersebut. Mahasiswa yang telah mulai berwirausaha dan mahasiswa PKMK, bisa menyempurnakan kegiatan kewirausahaan yang telah dilakukan sebelumnya, untuk meningkatkan usahanya. Unit layanan program I<sub>b</sub>K setiap tahun wajib membina 20 calon wirausaha yang seluruhnya adalah mahasiswa PKMK/mahasiswa yang merintis usaha baru. I<sub>b</sub>K diharapkan juga bersinergi dengan bidang kemahasiswaan perguruan tinggi untuk merekrut mahasiswa yang mendapatkan Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan dan peserta kegiatan kewirausahaan yang didanai Direktorat Kelembagaan Dikti sebagai

*tenant*. Luaran kegiatan I<sub>b</sub>K adalah (1) wirausaha baru mandiri per tahun yang siap berkompetisi di masyarakat. (2) 80 % dari calon wirausaha tahun pertama menjadi wirausaha baru. Hasil program I<sub>b</sub>K wajib diseminasikan dalam bentuk artikel dan dipublikasikan melalui jurnal internasional.

Kegiatan I<sub>b</sub>K dapat dilaksanakan maksimum 3 (tiga) tahun berurutan. Setiap tahunnya I<sub>b</sub>K wajib mengelola sebanyak 20 tenant. Jika misalnya ada 5 (lima) orang tenant telah menjadi wirausaha pada tahun pertama, maka tahun kedua I<sub>b</sub>K wajib merekrut jumlah tenant yang sama, yaitu 5 (lima) orang. Demikian seterusnya sehingga 80% peserta awal menjadi wirausaha. Rencana kegiatan tahun pertama harus rinci, sedangkan tahun kedua dan ketiga boleh secara garis besarnya saja. Setiap tahun rencana harus dirinci dan dituangkan dalam laporan tahunan kegiatan, untuk dinilai kelayakan kelanjutannya. Dana yang disediakan Dikti adalah maksimum Rp 100.000.000,-, dan PT yang bersangkutan minimal Rp 20 juta (duapuluh juta rupiah), flat selama tiga tahun. Dana PT digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen I<sub>b</sub>K. Dalam kegiatannya juga terbuka peluang bagi lembaga mitra lain untuk bekerja sama dan/atau membiayai kegiatan yang dilaksanakan. Dana kemitraan lain dapat berupa bantuan lembaga perbankan, non-bank, hibah dalam atau luar negeri. Pencairan dana dilakukan dalam 2 tahap; tahap I 70 % dan tahap II 30 %. Tahap kedua baru dapat dicairkan jika laporan akhir/laporan tahunan sudah diterima DP2M Ditjen Dikti tepat pada waktu seperti tersebut dalam Kontrak Kerja sama.

Usulan I<sub>b</sub>K harus telah diterima DP2M Ditjen Dikti paling lambat tanggal 31 Mei setiap tahunnya. Usulan ditulis lengkap sesuai format yang ditentukan DP2M. Usulan yang lolos seleksi tahap satu akan diundang untuk presentasi dan akan dikunjungi ke lapangan (*site visit*) apabila dinilai sebagai usulan yang prospektif. Setelah kunjungan lapangan, usulan yang baik, disarankan untuk didanai.

### 3. Program Ipteks bagi Produk Ekspor (I<sub>b</sub>PE)

Program Ipteks bagi Produk Ekspor (I<sub>b</sub>PE) merupakan jelmaan dari semula Vucer Multi Tahun (VMT) yang dirumuskan dan dilaksanakan sejak tahun 1997-1998. VMT dilaksanakan sebagai tanggung jawab PT atas resesi ekonomi yang dialami Indonesia pada saat itu. Demikian pula ketidaksiapan pengusaha mikro atau kecil untuk berkembang dan mengadopsi teknologi baru menjadi alasan lain direalisasinya VMT. Transformasi VMT menjadi I<sub>b</sub>PE menjadi konsekuensi logis dihapuskannya program Vucer dari program pengabdian kepada masyarakat DP2M.

Program I<sub>b</sub>PE merupakan satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan dan pengembangan hasil riset perguruan tinggi, berlangsung selama 3 (tiga) tahun. Persoalan yang ditangani meliputi seluruh aspek bisnis UKM sejak bahan baku sampai ke pemasaran produk. Demikian juga persoalan produksi dan manajemen perusahaan, menjadi bidang garapan wajib I<sub>b</sub>PE. UKM mitra yang dipilih harus mampu menghasilkan produk atau komoditas yang berpeluang ekspor atau minimal dijual antar pulau. Dengan demikian, pemilihan mitra UKM dan kualifikasi para peserta harus lebih selektif.

Pengusul program harus memahami bahwa (1) UKM mitra berdiri sejajar dengan PT; (2) UKM mitra bukan usaha yang baru tumbuh tetapi yang telah berjalan lancar; (3) Produk yang dihasilkan juga bukan produk yang sama sekali baru; (4) UKM mitra membutuhkan bantuan penerapan sains, teknologi dari PT.

Misi program I<sub>b</sub>PE adalah meletakkan UKM pada posisi sains, teknologi dan ekonomi yang lebih tinggi dan kokoh. Adapun tujuan program I<sub>b</sub>UM adalah untuk: (1) memacu pertumbuhan ekspor produk Indonesia melalui pertumbuhan pasar yang kompetitif; (2) meningkatkan pengembangan UKM dalam merebut peluang ekspor melalui peningkatan kualitas produk dan pemasaran; (3) mempercepat alih teknologi dan manajemen PT ke masyarakat industri; (4) mengembangkan proses *link & match* antara PT, industri, Pemda, dan masyarakat luas. Luaran program yang diharapkan adalah: (1)

meningkatkan nilai aset UKM, (2) terjalinnya kerja sama antara PT dan UKM, (3) bertambahnya jumlah dan mutu produk yang dipasarkan; (4) meningkatnya imbalan jasa bagi semua yang terlibat, (5) meningkatnya jumlah tenaga kerja UKM.

Pendanaan Program I<sub>b</sub>PE berasal dari minimal 2 (dua) sumber, yaitu: (1) DIPA DP2M dan (2) UKM. Komposisi kedua sumber dana adalah flat selama 3 (tiga) tahun, yaitu masing-masing Rp 100 juta DIPA DP2M dan Rp 25 juta,- dana UKM. Sumber dana lain misalnya dari Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah lainnya atau Lembaga Swasta dimungkinkan untuk dijadikan penyerta. Tahap pencairan dana DIPA DP2M adalah sebagai berikut Tahap I 70% dan Tahap II 30% yang dibayarkan setelah Laporan Akhir/Tahunan diterima DP2M tepat waktu. Biaya dari DP2M sudah diperhitungkan termasuk kewajiban yang berkenaan dengan komponen pajak yang harus dibayarkan dan penyusunan artikel untuk publikasi/jurnal/majalah internasional setiap tahunnya.

Usulan I<sub>b</sub>PE harus telah diterima DP2M Ditjen Dikti paling lambat tanggal 31 Mei setiap tahunnya. Usulan ditulis lengkap sesuai format yang ditentukan DP2M. Usulan yang lolos seleksi tahap satu akan diundang presentasi dan akan dikunjungi ke lapangan (*site visit*) apabila dinilai sebagai usulan yang prospektif. Setelah kunjungan lapangan, usulan yang baik, disarankan untuk didanai.

#### **4. Ipteks bagi Inovasi dan Kreativitas Kampus (I<sub>b</sub>-IKK)**

Program Ipteks bagi Bisnis Kampus (I<sub>b</sub>IKK) adalah manifestasi pengembangan Program Unit Usaha Jasa dan Industri (u-UJI). Pada saat dirumuskan dan selanjutnya direalisasikan tahun 2000-2001, UJI terbatas pada aspek bisnis semata. Di lain pihak, tuntutan masyarakat akan terbentuknya wirausaha-wirausaha baru dari kampus secara intens mendorong pihak DP2M untuk menyempurnakan program u-UJI. Dalam hal ini, dilakukan perluasan fungsi u-UJI. Jika pada saat awal pembentukannya, u-UJI difungsikan sebagai unit profit, maka sejak tahun 2009 dengan nama barunya I<sub>b</sub>IKK, unit ini diperluas dengan

fungsi yang relevan, yaitu membantu menciptakan wirausaha-wirausaha baru dari masyarakat kampus dan menjadi infrastruktur penting program Ipteks bagi Kewirausahaan (I<sub>b</sub>K).

Dalam era *knowledge based economy* dan mendukung upaya pengembangan otonomi perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Milik Negara ataupun Badan Hukum Pendidikan (BHP), kemandirian perguruan tinggi, termasuk kemandirian dan penatakelolaan sumber daya keuangan, perlu ditingkatkan. Berkaitan dengan hal itu, upaya pengembangan budaya *knowledge based economy* perguruan tinggi perlu diberi akses dalam wujud mendirikan unit profit yang memanfaatkan hasil pendidikan maupun riset dosen. Dengan menyelenggarakan I<sub>b</sub>IKK, perguruan tinggi berpeluang memperoleh pendapatan dan membantu menciptakan wirausaha baru. Hasil riset perguruan tinggi yang merupakan inovasi baru dan mempunyai nilai ekonomis serta mendapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti hak cipta, paten, merupakan aset yang sangat berharga bagi pertumbuhan dan perkembangan I<sub>b</sub>IKK.

Program I<sub>b</sub>IKK diharapkan mampu mendorong perguruan tinggi dalam membangun akses yang menghasilkan produk jasa dan/atau teknologi hasil ciptaannya sendiri. Wujud I<sub>b</sub>IKK di perguruan tinggi dapat berupa badan usaha atau bermitra dengan industri lainnya dan dapat didirikan serta dikelola kelompok dosen sesuai dengan kompetensinya di level laboratorium, *pilot plant*, bengkel, jurusan/departemen, fakultas/sekolah, UPT, pusat riset dan pengembangan atau lembaga lain yang berada di dalam perguruan tinggi tersebut. Sekali didirikan, I<sub>b</sub>IKK diharapkan terus berkelanjutan sehingga inisiatif awal perlu disusul dengan ketekunan berusaha dan kejelian menangkap peluang pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Misi program I<sub>b</sub>IKK adalah menciptakan *science and technology park* di lingkungan perguruan tinggi dalam kerangka mengembangluaskan budaya *knowledge based economy*. Tujuan program I<sub>b</sub>IKK adalah: (a) mempercepat proses pengembangan budaya kewirausahaan di perguruan tinggi, (b) membantu menciptakan akses

bagi terciptanya wirausaha baru, (c) menunjang otonomi kampus perguruan tinggi melalui perolehan pendapatan mandiri atau bermitra, (d) memberikan kesempatan dan pengalaman kerja kepada mahasiswa, (e) mendorong berkembangnya budaya pemanfaatan hasil riset perguruan tinggi bagi masyarakat dan (f) membina kerja sama dengan sektor swasta termasuk pihak industri dan sektor pemasaran.

Luaran program adalah (a) unit profit di perguruan tinggi berbasis produk intelektual dosen, (b) produk jasa dan/atau barang komersial yang terjual dan menghasilkan pendapatan bagi perguruan tinggi, (c) paten dan/atau (d) wirausaha- wirausaha baru berbasis Ipteks. Luaran ini diharapkan dapat memberi dampak berkembang dan meluasnya budaya kewirausahaan dan pemanfaatan hasil riset maupun pendidikan di perguruan tinggi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Di samping itu juga memberikan peluang (e) *updating* sains dan teknologi di perguruan tinggi. Hasil program IbIKK wajib didesiminasikan dalam bentuk artikel ilmiah dan dipublikasikan di jurnal/majalah Internasional.

Pendanaan Program IbIKK bersumber dari DIPA DP2M Ditjen Dikti sebesar maksimum Rp100.000.000,00 (seratus) juta rupiah dan PT minimum sebesar Rp 25.000.000,00 (duapuluh lima) juta rupiah, flat selama 3 (tiga) tahun. Pencairan dana DIPA DP2M dilakukan melalui dua tahap; Tahap I 70% dan II 30%. Tahap II baru dicairkan jika Laporan Tahunan atau Laporan Akhir sudah diterima DP2M tepat waktu seperti tersebut dalam Kontrak Kerja sama.

Usulan IbIKK harus telah diterima DP2M Ditjen Dikti paling lambat tanggal 31 Mei setiap tahunnya. Usulan ditulis lengkap sesuai format yang ditentukan DP2M. Usulan yang lolos seleksi tahap 1 akan diundang untuk presentasi dan akan dikunjungi ke lapangan (*site visit*) apabila dinilai sebagai usulan yang prospektif. Setelah kunjungan lapangan, usulan yang baik, disarankan untuk didanai.

#### **5. Program Ipteks bagi Wilayah (I<sub>b</sub>W)**

Program Ipteks bagi Wilayah (I<sub>b</sub>W) merupakan jelmaan perluasan Program Sinergi Pemberdayaan Potensi Masyarakat (SIBERMAS).

Program ini disusun, dirumuskan dan disosialisasikan pada tahun 2000-2001, diterapkan sebagai jawaban PT atas diterbitkannya kebijakan pemerintah tentang Otonomi Daerah. Realisasi program ke masyarakat yang tidak bersinergi pada saat itu, mendorong Ditjen Dikti untuk turut berperan aktif mensinergikan semua pihak terkait di dalamnya. Salah satu luaran utama SIBERMAS sampai tahun 2008 adalah tersusunnya Renstra Pemkab atau Pemkot mitra. Pada saat renstra tidak lagi menjadi kendala dalam penyusunannya, dan persoalan Pemkab/Pemkot tidak hanya terbatas pada *social needs* akan tetapi juga fisik kewilayahan, maka SIBERMAS dipandang perlu diperluas. Perluasan persoalan yang dapat ditangani mendorong pembentukan program I<sub>b</sub>W.

Program I<sub>b</sub>W juga dilatarbelakangi berbagai permasalahan yang eksis di masyarakat, antara lain: (1) ketidakmapanan sebagian besar masyarakat terhadap pembangunan kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat dalam era globalisasi; (2) Ipteks perguruan tinggi belum secara sengaja ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat; (3) potensi masyarakat maupun sumber daya alam lingkungannya belum dimanfaatkan dengan baik dan arif, serta (4) penatakelolaan fisik kewilayahan yang belum proporsional dan profesional.

Misi program I<sub>b</sub>W adalah untuk meningkatkan kemandirian, kenyamanan kehidupan, sekaligus kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan aktif publik (inisiatif dan partisipatif), Pemkot/Pemkab (berbasis Rencana Pembangunan Jangka Menengah, RPJM) dan perguruan tinggi (kepakaran).

**Tujuan program I<sub>b</sub>W adalah:**

- 1) Menciptakan kemandirian, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran masyarakat perguruan tinggi (PT), kemampuan dan kebijakan Pemkot/Pemkab seperti tertuang dalam RPJM dan potensi masyarakat.
- 2) Menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi Pemkab/Pemkot dan/atau masyarakat serta secara langsung atau tidak langsung berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat.



Sinergisme dalam I<sub>b</sub>W diwujudkan baik dalam pengintegrasian program maupun pendanaan. Luaran program dapat berupa: a) jasa, b) metode, c) produk/barang atau d) paten yang memberi dampak pada: (1) *updating* ipteks di masyarakat, (2) pertumbuhan ekonomi wilayah, (3) peningkatan atensi PT terhadap kawasan, (4) peningkatan mutu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, (5) peningkatan kegiatan pengembangan ilmu, teknologi dan seni di perguruan tinggi. Hasil program I<sub>b</sub>W wajib didesiminasikan dalam bentuk artikel, dipublikasikan melalui Jurnal/Majalah Internasional.

Pelaksanaan program I<sub>b</sub>W didukung pendanaan yang bersumber dari 2 (dua) pihak, yaitu: APBD Pemkot/Pemkab dan DIPA DP2M Ditjen DIKTI. Mengingat bahwa program I<sub>b</sub>W pada hakikatnya diposisikan sebagai pendukung realisasi RPJM secara maksimal, maka dana APBD disarankan lebih besar dibandingkan dana DIPA DP2M.

Program I<sub>b</sub>W terdiri atas berbagai kegiatan selama 3 (tiga) tahun yang pelaksanaannya tidak perlu berturut-turut atau dimulai pada tahun yang sama. Setiap kegiatan ditetapkan besaran biaya yang diperlukan dan didistribusikan sesuai tahun pelaksanaannya. Alokasi dana DIPA DP2M setiap tahunnya ditetapkan maksimum sebesar Rp100.000.000,00 (seratus) juta rupiah, dan dana Pemerintah Daerah minimum Rp100 (seratus) juta rupiah. Pencairan dana DIPA DP2M dilakukan melalui dua tahap; Tahap I 70% dan II 30%. Tahap II baru dicairkan jika Laporan Tahunan atau Laporan Akhir sudah diterima DP2M tepat waktu seperti tersebut dalam Kontrak Kerja sama.

Sesuai dengan prinsip kewirausahaan yang menitikberatkan kepada kemandirian dan karya dan juga adanya dana pemerintah, program pengembangan budaya kewirausahaan di masing-masing perguruan tinggi ini harus berlanjut untuk melaksanakan usulan program kewirausahaan yang disetujui dibiayai, harus diartikan sebagai daya penggerak mula (*prime mover*) untuk menggerakkan kewirausahaan secara mandiri dan berkelanjutan.

## **F. Tujuan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi**

### **1. Tujuan umum**

Secara umum program kewirausahaan di perguruan tinggi ini bertujuan:

- a. Menumbuhkembangkan budaya kewirausahaan di dalam lingkungan perguruan tinggi untuk mendorong terciptanya wirausaha baru;
- b. Mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan menjadi perangkat yang dapat digunakan oleh masyarakat dan bernilai komersial;
- c. Mewujudkan sinergi potensi perguruan tinggi dengan potensi industri/usaha kecil menengah dapat menumbuhkembangkan industri-industri kecil dan menengah yang mandiri;
- d. Meningkatkan peluang keberhasilan wirausaha baru melalui kegiatan pelayanan konsultasi terpadu;
- e. Mendorong akselerasi pemulihan ekonomi (*economy recover*) Indonesia melalui penanggulangan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja dengan tumbuhnya wirausaha baru yang kuat, baik dari segi kualitas barang produksi dan jasa maupun dari segi pemasarannya;
- f. Menumbuhkembangkan kegiatan-kegiatan yang mendorong terwujudnya *income generating* unit, di perguruan tinggi di Indonesia dalam mengantisipasi diberlakukannya otonomi perguruan tinggi.

### **2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus kegiatan ini baru diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman dan penjiwaan kewirausahaan di kalangan mahasiswa agar mampu menjadi wirausahawan yang berwawasan jauh ke depan dan luas berbasis ilmu yang telah diperolehnya;
- b. Meningkatkan pemahaman manajemen, memperkenalkan cara melakukan akses informasi dan pasar serta teknologi, cara pembentukan jaringan kemitraan usaha strategi dan etika bisnis

32

(termasuk kemampuan bernegosiasi) serta pembuatan rencana bisnis yang diperlukan oleh para mahasiswa agar lebih siap dalam pengelolaan usaha yang sedang atau akan dilaksanakan.

# BAB II

## PENYANDANG DIFABEL DAN MASALAH PEKERJAAN

### A. Penyandang Difabel dan Diskriminasi

Pendapat Bandi Delphie (2009) difabel berasal dari istilah *different ability* yang kini digunakan untuk menggantikan kata cacat yang berkonotasi negatif menjadi berkebutuhan khusus. Difabel ini baik yang terjadi sejak lahir ataupun karena kecelakaan dan akibat mengidap suatu penyakit tertentu. Tak seorangpun yang menginginkan terlahir cacat ataupun menjadi difabel karena kecelakaan ataupun karena mengidap penyakit tertentu. Tetapi ketika hal itu sudah terjadi tentu sikap dan tindakan yang tepat untuk mengatasinya sangatlah diperlukan.

Walaupun Indonesia memiliki UU No. 4 tahun 1997 tentang penyandang difabel/cacat namun dalam pelaksanaannya masih banyak yang belum terealisasi. Paling tidak inilah yang diserukan oleh sebagian kaum difabel dalam rangka memperingati hari difabel internasional pada setiap tanggal 3 Desember, misalnya dengan cara ritual melepaskan burung sebagai simbol kebebasan dan kesamaan hak sebagai warga negara.

Pengamatan penulis di masyarakat, masih adanya kaum difabel yang merasa terdiskriminasi baik di bidang pendidikan, penyediaan sarana publik maupun dalam mencari pekerjaan. Seperti diungkapkan dalam penelitian Haryanto (2010) masih banyak kaum difabel mengalami diskriminasi dalam mencari pekerjaan karena banyak perusahaan yang menolak mereka. Hal tersebut sangat disesalkan karena mereka seharusnya diberi kesempatan yang sama dengan kita yang bukan difabel.

Penyandang difabel harus mendapat dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah dengan memberikan peraturan tentang harus adanya kuota kaum difabel di setiap perusahaan dan juga perusahaan wajib memberikan pelatihan kepada mereka agar mereka dapat mengembangkan potensi dan keahlian mereka dengan baik seperti yang dilakukan oleh sebuah perusahaan konveksi pakaian di kota Yogyakarta yang mempekerjakan penyandang difabel jenis tunarungu wicara.

Menurut pendapat penulis kaum difabel bukan hanya diberi kesempatan untuk dapat bekerja di perusahaan, tetapi didorong untuk menjadi wirausaha karena lapangan kerja yang tersedia tentunya belum dapat menampung semua kaum difabel yang membutuhkan pekerjaan. Untuk kepentingan tersebut perlu adanya pendidikan kewirausahaan bagi penyandang difabel. Pendapat penulis ada dua hal yang menjadi dasar pertimbangan perlunya pendidikan kewirausahaan bagi penyandang difabel yaitu: (1) Saat ini mencari pekerjaan sangat sulit, walaupun mereka mendapat kuota, mereka juga masih harus berkompetisi dengan difabel lainnya untuk mendapat pekerjaan yang terbatas itu dan kesulitan juga dialami oleh orang yang tidak difabel. Lapangan kerja yang tersedia belum tentu dapat menyerap semua kaum difabel yang membutuhkan pekerjaan. Di samping itu, juga masih banyak perusahaan yang belum mempekerjakan kaum difabel di perusahaan mereka. Penelitian Ibnu Syamsi (2009) walaupun pemerintah sudah berusaha menjembatani antara kaum difabel dan perusahaan tetapi masih belum efektif, contohnya di kota Bandung baru 5 Hotel yang mempekerjakan kaum difabel. Menurut data di tahun 2009

untuk wilayah kota Solo lebih kurang 85% kaum difabel yang tidak mempunyai pekerjaan, dan kerja serabutan sekitar 60% persen. Kebanyakan mereka sudah berkeluarga sehingga mereka sangat membutuhkan pekerjaan atau usaha yang dapat menopang hidup sehari-hari. dan menurut aliansi RBM (Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat) pada tahun 2009 terdapat 35,7 juta jiwa kaum difabel (untuk semua jenis difabel) di Indonesia; (2) Kemampuan dan potensi yang dimiliki penyandang difabel tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Tiap-tiap difabel pasti memiliki kemampuan dan keahlian serta minat yang berbeda-beda dan tidak semuanya minat atau cocok untuk bekerja mungkin lebih berminat dan cocok dalam berwirausaha di berbagai bidang sesuai dengan minat dan keterampilan serta keahlian mereka. Dengan berwirausaha justru akan lebih mendorong kreativitas mereka dan juga mereka lebih leluasa dalam pengaturan waktu kerja dan cara kerja mereka sendiri dan tidak terikat dan tergantung pada tempat mereka bekerja.

### **B. Bursa Kerja Bagi Penyandang Difabel**

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta perusahaan-perusahaan milik negara maupun dunia usaha swasta agar memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi para penyandang difabel. Pemerintah mendorong agar perusahaan-perusahaan dapat memberikan kesempatan kerja lebih luas kepada penyandang difabel.

Jenis-jenis lowongan yang tersedia diantaranya adalah juru masak, desain grafis, operator, sewing, guru, tenaga medis, administrasi, tenaga pemasaran, penjahit, dealer produksi, agen kerajinan tangan, manajer koperasi, staf koperasi dan lain sebagainya. Pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk memberikan kesempatan kerja yang lebih luas lagi kepada para penyandang difabel, sesuai dengan ketentuan perundangan dan regulasi pendukung lainnya. Penyelenggaraan bursa kerja khusus ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memfasilitasi pertemuan antara pencari kerja penyandang difabel dengan para perusahaan pengguna.

Diadakannya bursa kerja bagi penyandang difabel ini dapat dijadikan wadah yang mempertemukan pencari kerja dan pengguna tenaga kerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja penyandang difabel secara lebih optimal. Ke depan Kemnakertrans akan lebih menggiatkan penyelenggaraan bursa kerja semacam ini, Bursa kerja khusus bagi penyandang difabel yang merupakan bagian dari gerakan penanggulangan pengangguran di daerah memberi kesempatan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka.

Program sosialisasi kepada publik, khususnya dunia usaha, mengenai aturan dan regulasi yang memberikan mandat kepada perusahaan untuk mempekerjakan penyandang difabel/cacat sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang difabel/cacat dan Peraturan Pemerintah No.43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat telah ditegaskan bahwa penyandang difabel berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya.

Departemen Tenaga Kerja (2010) jumlah perusahaan di Indonesia yang mempekerjakan penyandang difabel dapat dikatakan masih minim. Padahal jumlah idealnya, setiap perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang difabel yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja di perusahaannya untuk setiap 100 orang pekerja perusahaannya.

Data Kementerian Sosial (2010) menyebutkan jumlah penyandang difabel mencapai 11.580.117 orang. Namun, peluang kerja bagi para penyandang difabel sangat terbatas, terutama penyandang difabel yang bekerja secara formal. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, selaku kementerian yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, telah mengeluarkan aturan atau regulasi terkait dengan pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja penyandang difabel, yaitu melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-205/MEN/2010 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

Penyandang difabel, serta mengeluarkan Surat Edaran Menteri No.01.KP.01.15.2010 tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Difabel di Perusahaan. Kemnakertrans juga akan terus dan meningkatkan penyelenggaraan pelatihan bagi para tenaga kerja penyandang difabel guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, baik dari sisi keahlian teknis maupun manajemen/administrasi keuangan, melalui pemanfaatan BLK-BLK yang ada, baik BLK milik Pemerintah Pusat maupun daerah.

Melalui pelatihan ini, para peserta didik juga ditumbuhkembangkan rasa dan minat untuk berwirausaha. Dengan demikian, diharapkan nantinya setelah mereka diikutkan kegiatan ini, mereka dapat membuka usahanya sendiri atau bahkan secara berkelompok, sehingga kehidupannya tidak lagi bergantung atau menjadi beban keluarganya.

### **C. Kesempatan Kerja bagi Penyandang Difabel Masih Minim**

Hingga saat ini jumlah perusahaan di Indonesia yang mempekerjakan penyandang difabel masih sangat minim. Idealnya, setiap perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya satu orang penyandang difabel yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk setiap 100 orang pekerja di perusahaannya. Oleh karena itu, setiap perusahaan baik milik negara maupun swasta agar memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi para penyandang difabel di perusahaannya (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2012). Kesempatan kerja bagi penyandang difabel itu dapat disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya. Sedangkan mengenai jumlah kuota penyandang difabelnya dapat disesuaikan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan.

Sesuai UU No. 4 Tahun 2002 tentang Penyandang difabel telah ditegaskan bahwa penyandang difabel berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak dan mendapat perlakuan yang sama dan tanpa diskriminasi. Untuk ke depannya pemerintah

PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PENYANDANG DIFABEL  
dalam Konteks Pendidikan Karakter Bangsa



mendorong agar perusahaan-perusahaan dapat memberikan kesempatan kerja lebih luas kepada penyandang difabel. Tentunya mereka dapat bekerja disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya.

Menurut data Pusdatin Kemensos sampai dengan tahun 2010 jumlah penyandang difabel mencapai 11.580.117 orang yang terdiri atas tunanetra 3.474.035 orang, tunadaksa 3.010.830 orang, tunarungu 2.547.626 orang, cacat mental 1.389.614 orang dan cacat kronis 1.158.012 orang. Adapun data dari Kementerian tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa jumlah tenaga kerja penyandang difabel pada tahun 2010 mencapai 7.126.409 orang terdiri atas tunanetra 2.137.923 orang, tunadaksa 1.852.866 orang, tunarungu 1.567.810 orang, cacat mental 712.641 orang dan cacat kronis sebanyak 855.169 orang.

Selama ini Kemnakertrans (2010) telah melakukan pembinaan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Penyandang difabel melalui pembekalan teknis kewirausahaan dalam rangka peningkatan perluasan kesempatan kerja baik perorangan maupun kelompok usaha bersama (KUB). Pelaksanaan program di antaranya melalui pemberdayaan tenaga kerja penyandang difabel dalam bidang antara lain bordir, perbengkelan, menjahit, pembekalan teknis kewirausahaan dalam bentuk penguatan dan peningkatan kelompok usaha bersama (KUB) dengan kelompok sasaran. Selain itu, diadakan gelar bursa kerja khusus bagi penyandang difabel serta Temu Konsultasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang difabel dengan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, organisasi penyandang difabel.

Kemnakertrans juga melakukan pemberdayaan Tenaga Kerja Penyandang difabel dengan pendekatan kemitraan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan tanpa diskriminasi. Kemudian, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Untuk kemitraan ini dapat meningkatkan eksistensi para penyandang difabel dari berbagai aspek.

Salah satu wujud nyata dukungan pemerintah adalah melakukan pelatihan keterampilan para penyandang difabel untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas. Hal itu untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupan. Tak hanya itu, dukungan juga diberikan dengan menyediakan aksesibilitas untuk memudahkan mobilitas para penyandang cacat dalam melakukan aktivitas sosial ekonominya. Kemnakertrans (2012) memberikan penghargaan kepada 10 perusahaan yang peduli dan mempekerjakan dengan layak para penyandang difabel. Penghargaan ini sebagai salah satu bentuk apresiasi pemerintah dalam meningkatkan motivasi serta kepedulian dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang difabel.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2010) mengungkapkan perusahaan-perusahaan yang mendapat penghargaan adalah Hyatt Regency dari Provinsi Bali, Laboratorium Klinik Nikki Media, Mandiri Craft, DI Yogyakarta, PDAM Tirta Mayang, Jambi, PKBL Region III Pertamina, Jawa Barat, PT Adi Satria Abadi, DI Yogyakarta, PT Arara Abadi, Riau, PT Kurios Utama, Jawa Tengah, PT Riau Andalan Pulp dan Paper, Riau, Stikom Uyelindo Kupang, NTT.

#### **D. Penyandang Difabel Tidak Ingin Dikasihani**

Cullatta, RA. (2003) mengungkapkan penyandang difabel menghadapi banyak kendala. Selain diskriminasi dalam banyak hal. Juga ketersediaan akses yang memberi kemudahan bagi penyandang difabel. Kesempatan bekerja bagi para penyandang difabel sangat langka meski terdapat jaminan dari para pengusaha.

Perusahaan selalu memiliki dalih untuk tidak mempekerjakan para penyandang difabel, selain sarana dan prasarana yang tidak tersedia bagi penyandang difabel juga peralatan. Adapun pengaturan jam kerja juga tidak dapat dipenuhi berkaitan dengan kesulitan mendapatkan angkutan umum yang memungkinkan penyandang difabel tepat waktu sampai di tempat kerja.

Pengamatan penulis, di Indonesia masih banyak bangunan maupun kantor yang belum memberikan akses yang memudahkan bagi penyandang difabel. Aksesibilitas bagi penyandang difabel merupakan amanah Undang Undang sehingga pengelola gedung wajib menyediakan sarana yang bersahabat bagi penyandang difabel, paparnya sambil menambahkan sarana yang ada bukan untuk memanjakan para penyandang difabel melainkan sebagai pemenuhan hak agar mereka dapat beraktivitas secara wajar.

Dalam penerimaan pegawai selanjutnya, pemerintah harus memberi porsi bagi penyandang difabel. Selama ini yang dikeluhkan syarat sehat jasmani dan ruhani. Penyandang difabel dapat dipekerjakan sesuai kemampuan tanpa harus meminggirkan mereka. Mereka yang difabel/cacat fisik dapat ditempatkan sebagai operator telepon, sedangkan yang tuli dipekerjakan di tempat yang bising.

Sebelumnya Ketua Perhimpunan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) mengungkapkan penyandang masalah sosial, termasuk penyandang difabel/cacat menghadapi banyak kendala. Selain kendala fisik juga sosial budaya. Akses untuk mereka sangat terbatas, bukan saja masalah yang berkaitan dengan keberadaan penyandang difabel melainkan juga berbagai hal yang berkenaan dengan komitmen.

Menurut Suharto (2002) unsur Perhimpunan Penyandang difabel Indonesia mengungkapkan kendala yang dihadapi penyandang difabel sangat banyak. Selain faktor teknis juga dukungan dari pemerintah. Anggaran dari pemerintah selama ini tidak pernah ada, paparnya sambil menambahkan bantuan yang diberikan sebatas untuk kebutuhan dasar.

Padahal para penyandang difabel juga membutuhkan akses untuk berbagai kebutuhan, termasuk lapangan kerja yang sesuai dengan keahlian mereka. Selama ini pemerintah hanya memberikan sedikit bantuan, itupun tidak merata untuk seluruh penyandang masalah sosial termasuk penyandang difabel. Sesuai Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 penyandang cacat meliputi cacat fisik dan mental dan diorganisir menjadi empat kelompok, yakni tunadaksa, tunanetra, tunarungu wicara dan tunagrahita.

Hambatan kultural dan persepsi masyarakat yang menjadi masalah utama saat ini, akibatnya muncul stigma negatif dalam sistem pendidikan. Pada sisi lain terkesan, pendidikan inklusif yang bukan Sekolah Luar Biasa (SLB) justru menolak para penyandang difabel. Penolakan justru datang dari masyarakat sendiri sehingga solusi yang diharapkan masih membutuhkan perjuangan panjang untuk mewujudkannya.

Disarikan dari Depdiknas (2007) anak usia sekolah dari para penyandang difabel hanya 3,76 persen yang bersekolah, selebihnya 96 persen tidak bersekolah. Akibatnya menjadi permasalahan rumit yang membutuhkan penanganan bersama. Menjadi lingkaran hitam kemiskinan yang tidak dapat diputuskan. Penyandang difabel karena keterbatasannya kondisi miskin, ketika berkeluarga juga miskin sehingga anak-anak yang dilahirkan juga miskin. Padahal tidak sedikit dari mereka yang memiliki potensi dan dapat dikembangkan, namun berbagai keterbatasan menjadikan permasalahannya tidak kunjung selesai.

Selain miskin ketika mengalami sakit tidak mampu berobat, tidak memiliki akses ke sumber pelayanan kesehatan sehingga menjadi miskin terus menerus. Untuk itu guna menyelesaikan masalah penyandang difabel, salah satunya melalui pendidikan sesuai sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selama ini para penyandang difabel masih menghadapi stigma negatif dalam masyarakat sehingga untuk mampu mengembangkan diri guna mencapai kesejahteraan menghadapi banyak hambatan. Termasuk ketika seorang penyandang difabel akan menunaikan ibadah, sarana dan prasarana pendukungnya tidak ada sehingga sebagian masyarakat menolaknya. Demikian halnya dengan tempat-tempat umum seperti jalan raya, pasar dan terminal belum seluruhnya memberi akses yang cukup bagi penyandang difabel.

Penyandang difabel menghadapi banyak permasalahan seiring dengan kondisi masyarakat dan bangsa dewasa ini. Penyandang difabel harus menghadapi permasalahan berlapis-lapis, selain kendala yang

melekat pada dirinya juga faktor sosial dan budaya di masyarakat. Berdasarkan WHO penyandang difabel di setiap negara terdapat 10 persen, saat ini terdapat 600 juta penyandang difabel di seluruh dunia. Sebanyak 80 persen atau 480 juta berada di negara-negara Asia.

Data diperoleh dari Direktorat PLB (2012) di negara-negara Asia nasib penyandang difabel kurang beruntung. Perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap penyandang difabel sangat rendah. Kondisi di India misalnya, sekitar 74 persen penduduk yang menderita difabel tidak bekerja, di Filipina tetangga kita dengan tingkat pendidikan penduduk yang cukup tinggi sekitar 20 persen anak-anak difabel tidak pernah sekolah. Sebanyak 20-25 juta penyandang difabel di Indonesia lanjutnya, 10 juta di antaranya lansia. Sebanyak 1,5 juta penyandang difabel anak usia sekolah, 55.836 anak atau 3,72 persen di Sekolah Luar Biasa.

Negara RRC dan Jepang meski sering dituduh sebagai pelanggar HAM namun cukup memberikan perhatian kepada para penyandang difabel Tidak kurang 10 juta buku yang memberikan penjelasan tentang hak-hak penyandang difabel diterbitkan dan disebarkan kepada masyarakat luas. Di negara-negara lain informasi semacam ini sangat langka, bahkan dari kalangan ahli hukum sendiri belum tentu mengetahui konvensi internasional yang berlaku secara universal.

Disparitas yang sangat tinggi antara wacana dan hak yang secara hukum dijamin dengan kenyataan di lapangan. Disparitas itu sangat menonjol dalam akses pelayanan umum bagi penyandang difabel bidang pendidikan dan kesempatan kerja. Secara teoritis menurut hukum dan dalam berbagai wacana politik, kesempatan kerja dijamin dan dijanjikan akan diberikan secara adil kepada seluruh warga negara, ternyata penyandang difabel tidak mendapat perlakuan yang semestinya. Perjuangan keadilan bagi penyandang difabel masih sangat jauh. Penyandang difabel yang belum tentu tidak bisa memberikan sumbangan kepada kemajuan bangsa selalu dihukum sebelum mendapat kesempatan untuk membangun diri dan memberikan sumbangan yang berarti kepada nusa dan bangsa.

### **E. Perusahaan Wajib Berikan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Difabel**

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta seluruh perusahaan baik milik negara maupun swasta untuk selalu memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi para penyandang difabel. Suyana (2003) kesempatan kerja bagi penyandang difabel itu dapat disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya. Adapun mengenai jumlah kuota penyandang difabilitas dapat disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan.

Sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Difabel telah ditegaskan bahwa penyandang difabel berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak dan mendapat perlakuan yang sama serta tanpa diskriminasi.

Dikemukakan Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2012) jumlah perusahaan di Indonesia yang mempekerjakan penyandang difabel dapat dikatakan masih minim. Padahal jumlah idealnya, setiap perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya satu orang penyandang difabel yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100 orang pekerja perusahaannya.

Untuk ke depannya, pemerintah mendorong agar perusahaan-perusahaan dapat memberikan kesempatan kerja lebih luas kepada penyandang difabel. Tentunya mereka dapat bekerja disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya.

Depsos (2010) data jumlah penyandang difabel tahun 2010 mencapai 11.580.117 orang yang terdiri atas tunanetra 3.474.035 orang, tunadaksa 3.010.830 orang, tunarungu 2.547.626 orang, cacat mental 1.389.614 orang dan cacat kronis 1.158.012 orang.

Adapun data dari Kementerian tenaga Kerja dan Transmigrasi (2010) bahwa jumlah tenaga kerja penyandang difabel pada tahun 2010 mencapai 7.126.409 orang terdiri atas tunanetra 2.137.923 orang, tunadaksa 1.852.866 orang, tunarungu 1.567.810 orang, cacat mental 712.641 orang dan cacat kronis sebanyak 855.169 orang.

Selama ini Kemenakertrans mengklaim telah melakukan pembinaan dan pemberdayaan tenaga kerja penyandang difabel melalui pembekalan teknis kewirausahaan dalam rangka peningkatan perluasan kesempatan kerja baik perorangan maupun kelompok usaha bersama.

Pelaksanaan program diantaranya melalui pemberdayaan Tenaga Kerja Penyandang difabel dalam bidang antara lain: bordir, perbengkelan, menjahit. Pembekalan teknis kewirausahaan dalam bentuk penguatan dan peningkatan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dengan kelompok sasaran.

#### **F. Penghargaan Kepada Perusahaan yang Peduli Penyandang Difabel**

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2012) pernah memberikan penghargaan kepada 10 perusahaan yang peduli dan mempekerjakan dengan layak para penyandang difabel. Penghargaan ini sebagai salah satu bentuk apresiasi pemerintah dalam meningkatkan motivasi serta kepedulian dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang difabel.

Pada sisi lain dikemukakan Dirjen Binapenta Kemenakertrans (2012) pernah menyampaikan perusahaan-perusahaan yang mendapat penghargaan adalah: CV Andri Perabot di Sumatra Barat, PT Shima Prima Utama di Palembang, PT Unas Jaya Agrotama di Lampung, PT Candi Mekar di Jawa Tengah, PT Kedaung Surya Industrial di Jawa Timur, PT Omega Plastik di Jawa Timur, CV Cristal Konveksi Yogyakarta, CV Sogan Jaya Abadi di Yogyakarta, PT Sinar Pure Foods International di Sulawesi Utara, PT Yakkum di Bali.

Penghargaan kepada perusahaan yang telah peduli dan mempekerjakan dengan layak para penyandang difabel ini diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diwakili Dirjen Binapenta Kemenakertrans, Sunarno di Jakarta pada tanggal 3 November 2012. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatakan dalam setiap perusahaan baik milik negara maupun swasta harus memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang

difabel dengan mempekerjakan penyandang difabel di perusahaannya. Namun pekerjaan itu harus disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan.

Sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang difabel telah ditegaskan bahwa penyandang difabel berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya. Namun, jumlah perusahaan di Indonesia yang mempekerjakan penyandang difabel dapat dikatakan masih minim. Padahal jumlah idealnya, setiap perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya satu orang penyandang difabel yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100 orang pekerja perusahaannya.

Untuk ke depannya, pemerintah mendorong agar perusahaan-perusahaan dapat memberikan kesempatan kerja lebih luas kepada penyandang difabel. Selama ini Kemenakertrans telah melakukan pembinaan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Penyandang difabel melalui pembekalan teknis kewirausahaan dalam rangka peningkatan perluasan kesempatan kerja baik perorangan maupun kelompok usaha bersama (KUB). Pelaksanaan program diantaranya melalui pemberdayaan Tenaga Kerja Penyandang difabel dalam bidang, antara lain: bordir, perbengkelan, dan menjahit. Pembekalan teknis kewirausahaan dalam bentuk penguatan dan peningkatan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dengan kelompok sasaran.

Selain itu Silvia Herawaty (2008) mengungkapkan, pernah diadakan juga Temu Konsultasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang difabel dengan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, organisasi penyandang difabel. Kemenakertrans pun melakukan pemberdayaan tenaga kerja penyandang difabel dengan pendekatan kemitraan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tanpa diskriminasi, memberikan perlindungan kepada



tenaga kerja penyandang difabel dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Untuk kemitraan ini dapat meningkatkan eksistensi para penyandang difabel dari berbagai aspek.

Salah satu wujud nyata dukungan pemerintah adalah melakukan pelatihan keterampilan para penyandang difabel untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupan. Tak hanya itu, dukungan pun diberikan dengan menyediakan aksesibilitas untuk memudahkan mobilitas para penyandang difabel untuk melakukan aktivitas sosial ekonominya.

#### **G. Pemberdayaan Penyandang Difabel dalam Lapangan Kerja**

Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab ini dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Pengaturan ini menunjukkan sikap diskriminatif pemerintah karena hanya diwajibkan bagi perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, sedangkan perseroan yang tidak terkait dengan sumber daya alam bebas dari kewajiban tersebut. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini kemudian dinamakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Imma Indra Dewi W, (2012) CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial/lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut sesuai dengan kemampuannya. Bentuk tanggung jawab dapat berupa melakukan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum dan sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak,

khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

Di Indonesia terdapat empat model pelaksanaan CSR. Model pertama, perusahaan terlibat langsung dalam penyaluran CSR (*Corporate Social Responsibility*) karena telah memiliki bagian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan sosial perusahaan termasuk CSR. Model kedua, melalui pembentukan yayasan atau organisasi sosial perusahaan dengan menyediakan dana khusus untuk digunakan secara teratur dalam kegiatan yayasan yang dibentuk oleh perusahaan secara khusus. Model ketiga, perusahaan bermitra dengan pihak lain seperti lembaga sosial non pemerintah, lembaga pemerintah, media massa dan organisasi lainnya. Yang terakhir adalah dengan cara mendukung atau bergabung dengan suatu konsorsium.

Mengutip pendapat Imma Indra Dewi W, (2012) pada umumnya terdapat dua alasan perusahaan melakukan CSR yaitu alasan sosial karena sebagai pihak luar yang beroperasi pada wilayah orang lain perusahaan harus memperhatikan masyarakat sekitarnya dan ikut serta menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat serta lingkungan dari kerusakan yang ditimbulkan. Alasan lainnya adalah ekonomi, yaitu menarik simpati masyarakat dengan membangun citra positif bagi perusahaan yang tujuan akhirnya tetap pada peningkatan profit.

Penelitian Haryanto (2010) partisipasi tenaga kerja penyandang difabel/cacat di Yogyakarta tersebar di 4 Kabupaten dan satu Kotamadya. Jumlah penyandang difabel pada tahun 2010 sebanyak 2253 jiwa. Adapun jenis kecacatannya adalah cacat tubuh, cacat mental, dan cacat ganda. Beberapa di antara penyandang difabel tersebut telah mendapat pelatihan, penyediaan fasilitas dan pemberian bantuan. Pelatihan ditujukan untuk peningkatan keterampilan mereka. Penyediaan fasilitas berupa pemberian bantuan kursi roda, alat bantu dengar, bantuan modal usaha, dan kaki palsu ditujukan pada keluarga difabel dan miskin yang harus memenuhi persyaratan administrasi tertentu seperti menunjukkan KMS maupun surat keterangan dokter.

Selain program pemberdayaan berupa pelatihan dan penyediaan fasilitas, juga diberikan bantuan uang berkisar antara Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per tahun. Bantuan ini diambilkan dari dana APBD dan APBN. Pemberian bantuan, pelatihan, dan penyediaan fasilitas diberikan secara bergiliran. Artinya bagi penyandang difabel ataupun keluarganya yang pernah menerima bantuan pada tahun tertentu tidak akan menerima lagi pada tahun yang akan datang sampai semua penyandang difabel mendapatkannya. Hal ini karena terbatasnya anggaran yang dapat disediakan oleh pemerintah. Permasalahan ini dapat diatasi dengan diikutsertakannya sektor usaha swasta untuk turut mengambil bagian.

Berdasar pada alasan perusahaan melakukan CSR (*Corporate Social Responsibility*) maka seharusnya penyaluran CSR juga dapat dilakukan untuk kepentingan pemberdayaan penyandang difabel. Bukankah oleh pemerintah penyandang difabel digolongkan dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sementara tujuan penyaluran dana CSR di antaranya untuk menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jadi, pengalokasian dana CSR untuk peningkatan pemberdayaan penyandang difabel sangat mungkin dilakukan. Sehingga berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan penyandang difabel dapat dieliminir. Di antaranya kendala berupa keterbatasan anggaran dalam pemberdayaan penyandang difabel.

Jika dana CSR dapat disalurkan untuk pemberdayaan penyandang difabel maka kendala keterbatasan anggaran dapat diatasi. Hal ini selaras dengan UU yang mewajibkan perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam punya tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap masyarakat di mana perusahaan itu berada. Permasalahannya mengapa pemerintah hanya mewajibkan penyediaan CSR oleh perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam? Permasalahan lainnya, penyaluran dana CSR selama ini juga belum ditujukan pada pemberdayaan penyandang difabel. Namun begitu pada perkembangannya semua perusahaan berskala nasional dan internasional telah menjalankan program CSR. Dengan demikian, dalam

pemberdayaan penyandang difabel di wilayah Yogyakarta, pemerintah dapat mengajak pihak swasta untuk turut berpartisipasi. Peran serta sektor swasta dalam pemberdayaan penyandang difabel diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Yogyakarta.

Selain kendala keterbatasan penyediaan anggaran, kendala variasi penyediaan program yang sesuai dengan derajat kecacatan diharapkan juga dapat diatasi. Dengan pelibatan sektor swasta diharapkan program yang disediakan dapat lebih bervariasi dan bermanfaat bagi penyandang difabel sesuai derajat kecacatannya. Di antaranya dapat dikembangkan program kewirausahaan bagi penyandang difabel yang derajat kecacatannya memungkinkan. Program ini akan sangat bermanfaat bagi penyandang difabel dan keluarganya, terutama dalam membangun kemandirian secara ekonomi. Jika dana CSR dapat diarahkan untuk pemberdayaan penyandang difabel dalam sektor kewirausahaan maka harapan keberhasilan akan lebih besar karena dalam pelaksanaannya dapat melibatkan perusahaan penyalur CSR sebagai pendamping atau pembimbing.

## **H. Pengembangan Teknik Adaptif dalam Karir Penyandang Difabel**

### **1. Membangun sumber daya penyandang difabel**

Ditemukannya cara untuk membuat orang produktif, akan menguntungkan semua pihak. Tidak hanya pada individu penyandang difabel, tapi juga teman, kerabat, pekerja dan perekonomian secara keseluruhan. Ini adalah cara cerdas memanfaatkan sumber daya. Regulasi menolong penyandang difabel, memberikan hasil tidak terduga dan keuntungan luas. Bunyi bel dan lampu penanda kedatangan lift untuk membantu tunanetra, tunarungu dinikmati semua orang. Demikian juga dengan trotoar landai tidak hanya dinikmati penyandang difabel berkursi roda tapi pendorong kereta bayi, kereta belanja dan sebagainya juga turut menikmati .

Kajian teknologi adaptif difokuskan pada nilai-nilai filosofis rancang bangun, fungsi; teknologi tepat guna dan materi yang

digunakan. Marcer (2009) kajian teknologi adaptif dikemas dalam bentuk riset dan kemitraan dengan unsur industri berbasis perkuliahan praktikum dikembangkan lebih luas melalui mekanisme *need asesment*, pra-desain, presentasi desain produk, dilanjutkan dengan validasi produk dan tahap proses produksi serta pameran produksi teknologi adaptif yang diproyeksikan untuk diproduksi komersial. Berkenaan dengan teknologi adaptif ini, menjadi menarik dikaji sebab banyaknya pilihan dipasaran, baik yang khusus sejak awal disediakan untuk penyandang difabel maupun yang umum. Di sisi lain tersedianya pilihan tersebut menuntut kompetensi dalam memilih teknologi adaptif tersebut agar penggunaannya membantu aktivitas kehidupan sehari-hari termasuk aktivitas belajarnya. Pemilihan teknologi adaptif dengan mempertimbangkan fungsi kompensatoris yang didasarkan *need assesment* dapat meningkatkan kepercayaan diri, semangat hidup dan belajar penyandang difabel. Sebaliknya, jika pemilihan teknologi adaptif ini tidak mempertimbangkan fungsi kompensatoris, selain tidak efektif juga akan menambah persoalan. Karena itu teknologi adaptif di masyarakat memerlukan kajian terus menerus. Hal ini berkaitan dengan keunikan masalah yang dihadapi penyandang difabel.

## **2. Tujuan kajian teknik adaptif dalam karir penyandang difabel**

Secara khusus, kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses desain, dan kualitas produk sehingga memiliki nilai manfaat dan komersial serta memungkinkan untuk *income generating*. Ashman (2004) jenis produk atau hasil dari kajian berbasis kemitraan dalam pengembangan produk teknologi adaptif ini dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis alat yaitu; (1) mengkaji dan mengem-bangkan produk teknologi adaptif berdasarkan kompensatoris penyandang difabel berkaitan dengan kepentingan aktivitas kehidupan sehari-hari atau ADL (*Activity of Daily Living*) seperti berjalan, makan, mandi, kegiatan di kamar mandi, dan sebagainya. Alat ini bisa dikembangkan dari teknologi yang sudah ada atau belum ada sama sekali. Produk kajian ini kemudian diujicobakan efektivitasnya sehingga betul-betul sesuai dengan

kebutuhan para penyandang difabel; (2) mengkaji dan mengembangkan produk teknologi adaptif yang berkaitan dengan kepentingan aktivitas belajar/akademik penyandang difabel di sekolah seperti box pen, reglet low vision, kursi belajar, alas buku, meja miring, sabuk untuk menulis, alat penyangga pensil, meja kursi tunadaksa, papan meja pangku, kursi multiguna, meja kursi bina diri, lampu artikulasi, kursi disiplin, dan sebagainya.

Dari perspektif hasil proses dan produk teknologi akan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, sebab menghasilkan produk teknologi adaptif yang sesuai dengan kompensatoris penyandang difabel. Hal ini dimungkinkan karena desain produk didasarkan pada *need asesment* dan diproses melalui kajian terus-menerus di dalam perkuliahan dan diproduksi secara profesional. Secara kualitatif potensi keberhasilan riset ini sangat besar, dengan adanya riset ini kualitas produksi teknologi adaptif dapat ditingkatkan dan jaringan kemitraan produksi dan pemasarannya dapat dikembangkan secara profesional. Hal ini penting karena untuk melakukan produksi dalam jumlah masal dan bersaing dipasaran diperlukan kerja sama dan kemitraan dengan unsur terkait/profesional.

### **3. Urgensi pengkajian teknif adaptif dalam karir penyandang difabel**

Teknologi didefinisikan sebagai alat yang menggunakan prinsip atau proses penemuan saintifikasi yang baru ditemukan. Ming (2002) adaptif secara etimologi diartikan sebagai organisme mengatasi tekanan lingkungan untuk bertahan, berkaitan dengan aspek manusia dalam perencanaan produk teknologi adaptif berkaitan dengan ergonomi. Yaitu aktivitas penelitian mengenai kemampuan keterbatasan manusia baik secara fisik maupun mental dan interaksinya dalam sistem manusia mesin alat yang integral.

Disadari produk teknologi adaptif yang ada di pasaran baik itu berkaitan dengan aktivitas kehidupan sehari hari, maupun yang berkaitan khusus dengan pembelajaran belum sesuai dengan kebutuhan

penyandang difabel dan harganya mahal sehingga tidak terjangkau. Produk teknologi juga tidak sesuai dengan kebutuhan kompensatoris dan kebanyakan tidak diperuntukan bagi penyandang difabel. Dengan demikian, penulisan buku ini sangat penting, sebab menghasilkan produk teknologi adaptif yang sesuai dengan kompensatoris anak. Hal ini dimungkinkan karena desain produk didasarkan atas proses *need assesment* dan diproses melalui kajian terus-menerus di dalam perkuliahan dan diproduksi secara profesional. Dalam perspektif lebih luas kegiatan ini dapat mendorong semangat kewirausahaan khususnya dalam mengembangkan usaha di bidang teknologi adaptif.

Menurut Santosa (2007) *road map* penelitian dapat ditelusuri dari hasil riset terdahulu dapat dijelaskan sebagai berikut; riset ini sejalan dengan bidang pengembangan program unggulan yang berkaitan dengan keilmuan pendidikan dan berkaitan dengan pendidikan kewirausahaan di Jurusan PLB. Selain itu, program ini juga mendukung program akademik dan administratif, dan mencerminkan keunggulan dalam produk, kualitas, dan kinerja. Produk perkuliahan praktikum teknologi adaptif ini merupakan hasil karya kreatif dan inovatif mahasiswa di jurusan PLB ketika menempuh mata kuliah pendidikan kewirausahaan.

Sementara kemitraan yang dikembangkan akan memberikan dampak dalam meningkatkan citra UNY. memberikan manfaat kepada sivitas akademika dan *stakeholder* UNY. Indikatornya adalah lebih dikenalnya UNY di tingkat regional dan terciptanya peningkatan atmosfer akademik, terciptanya jalinan kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan untuk kedua pihak dalam meningkatkan kinerja lembaga, penjaminan mutu layanan, prosedur kerja dan memungkinkan untuk *income generating*.

Dari perspektif teknologi, indikator produksi dan indikator kinerja dan capaian riset dalam pengembangan dan produksi teknologi adaptif ditunjukkan dengan meningkatkan kualitas desain, dan kualitas produk teknologi adaptif sehingga memiliki nilai komersial. Melalui riset akan diperoleh jenis-jenis teknologi adaptif dan terbangunnya jejaringan

kemitraan baik dengan lembaga internal UNY maupun lembaga eksternal yang terkait saling menguntungkan.

Berikutnya dalam perspektif potensi dan kemungkinan keberlanjutan program kemitraan pengembangan dan produksi teknologi adaptif cukup besar, mengingat di masa datang kesadaran akan peran teknologi untuk kehidupan yang lebih baik semakin tinggi. Adapun dari aspek orang tua penyandang difabel dan lembaga pendidikan juga memberikan respon positif, mereka merupakan konsumen setia dan sangat responsif terhadap produk teknologi adaptif. Dari aspek penyiapan profesionalisasi tenaga kependidikan luar biasa program kemitraan baik dalam pengkajian dan produksi teknologi adaptif ini memberi kesempatan kepada mahasiswa dan dosen untuk memperkuat tujuan perkuliahan praktikum dan membangkitkan jiwa kewirausahaan. Secara kuantitatif dari efektivitas program ini dapat diukur dari indikator wawasan terhadap konsep, prinsip teknologi adaptif yang dibuktikan dengan meningkatnya teknologi adaptif yang memenuhi standar proses dan produk teknologi adaptif.

Melalui riset ini teknologi adaptif yang memenuhi standar proses dan produk dapat diwujudkan. Melalui studi terdahulu tentang kebutuhan teknologi adaptif bagi penyandang difabel bekerja sama dengan 50 guru SLB yang melakukan program PPM Jurusan PLB FIP UNY (2011) diperoleh kesimpulan bahwa selama ini produk-produk yang ada di pasaran baik itu teknologi adaptif yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari, termasuk yang berkaitan khusus dengan pembelajaran belum sesuai dengan kebutuhan anak difabel dan harganya mahal sehingga tidak terjangkau. Berkenaan dengan hal tersebut maka riset lanjutan untuk mengembangkan produk teknologi adaptif berstandar proses dan produk serta sesuai dengan kebutuhan penyandang difabel menjadi penting dan mendesak adanya. Demikian juga dengan pengembangan jejaring pemasaran sekaligus kemitraan produksi dengan unsur profesional diharapkan menjamin tersedianya produk komersial yang siap dipasarkan termasuk pemanfaatan sumber-sumber internal yang dapat mendukung dan melindungi hak kekayaan



intelektual/HAKI produk teknologi adaptif yang akan dikembangkan Jurusan PLB dalam usaha memenuhi kebutuhan media pembelajaran anak difabel.

#### **4. Hakikat teknik adaptif dalam karir penyandang difabel**

Teknologi didefinisikan sebagai alat yang menggunakan prinsip atau proses penemuan saintifikasi yang baru ditemukan. Sedangkan adaptif, secara etimologi diartikan sebagai organisme mengatasi tekanan lingkungan untuk bertahan, berkaitan dengan aspek manusia dalam perencanaan produk teknologi adaptif berkaitan dengan ergonomi yaitu aktivitas penelitian mengenai kemampuan keterbatasan manusia baik secara fisik maupun mental dan interaksinya dalam sistem manusia mesin alat yang integral. Kauffman, J.M. (2005) penyandang difabel dalam melakukan aktivitas motor, sosial, edukasi dan budaya tidak terlepas dari potensi dalam melakukan mobilitasnya. Teknologi dalam bentuk komputer, jaringan informasi, dan multimedia misalnya, akan memberikan akses kepada setiap orang di masyarakat untuk belajar. Dengan demikian, teknologi adaptif pada hakikatnya adalah segala macam benda atau alat yang dengan cara dimodifikasi atau langsung digunakan untuk meningkatkan atau merawat kemampuan penyandang difabel dalam praktik teknologi adaptif dan berwirausaha.

Beberapa jenis teknologi adaptif memungkinkan penyandang cacat dapat mengakses komputer; sebagian lainnya memberikan berbagai peluang pendidikan yang sebelumnya tidak ditawarkan. Coulhoun (2002) di antara teknologi adaptif yang terpenting adalah teknologi yang memberikan akses ke komputer dan teknologi komunikasi modern lain kepada siswa-siswa penyandang difabel. Misalnya keyboardnya dapat dimodifikasi, sehingga orang yang hanya memiliki satu tangan atau satu jari untuk mengetik dapat menggunakannya. Program pengenalan suara memungkinkan siswa dengan berbagai disabilitas fisik untuk memasukkan teks ke dalam komputer dengan berbicara.

Dewasa ini ada berbagai macam perangkat adaptif yang dapat menyediakan berbagai kesempatan pendidikan. Sebagai contoh, tulisan besar dan translasi Braille dengan bantuan komputer dapat membantu komunikasi untuk siswa-siswa yang mengalami hambatan penglihatan. Alcoot, M (2007) software translasi Braille dapat mengonversikan teks menjadi format Braille yang tepat. Software pembesaran layar memperbesar ukuran teks dan grafik, mirip dengan *captioning* dan tampilan *real-time graphics* di televisi, yang menyiarkan dialog dan tindakan di acara atau film televisi melalui teks tercetak.

*Computer speech synthesizers* dapat menghasilkan kata-kata lisan secara artifisial. *Speech recognition software* (software untuk mengenali suara) dapat membantu siswa-siswa yang hanya dapat mengucapkan beberapa bunyi untuk mengerjakan berbagai tugas. Individu diajari beberapa bunyi "token" yang dapat direspons oleh komputer yang diprogram secara khusus. Komputer mengenali suara dan mengerjakan berbagai fungsi sehari-hari dan fungsi-fungsi berbasis-sekolah, seperti menyalakan TV, memainkan rekaman video, atau mengakses kurikulum sekolah di CD-ROM. Peralatan-peralatan canggih lainnya bereaksi terhadap sinyal-sinyal otak yang kemudian mentranslasikannya menjadi perintah dan tindakan digital.

Teknologi-teknologi lain, misalnya peralatan adaptif dan tombol-tombol khusus, memungkinkan siswa dengan disabilitas fisik untuk meningkatkan mobilitas fungsionalnya dengan menghidupkan berbagai peralatan dan mengontrol alat-alat lain seperti lampu atau radio. *Computerized "gait trainers"* dapat membantu individu-individu dengan keseimbangan yang buruk atau mereka yang memiliki pengendalian tubuh yang kurang untuk belajar berjalan. Peralatan-peralatan yang dikendalikan radio dapat membuka pintu dan mengoperasikan mesin penjawab di telepon.

Teknologi yang sangat menarik dirancang untuk siswa-siswa yang sakit dan harus dirawat di rumah sakit. PC Pal, komputer khusus dengan layar LCD, dapat disediakan di ruang-ruang perawatan di rumah sakit. Peralatan ini menyediakan games. Komputer memberikan akses

internet dan memungkinkan siswa yang dirawat di rumah sakit untuk terus mengikuti pekerjaan rumahnya dan untuk tetap berhubungan dengan temannya. Situs-situs web khusus telah diciptakan untuk memudahkan siswa dengan difabel.

Karena semakin banyak siswa dengan difabel yang diinklusiikan di kelas-kelas reguler, sehingga siswa-siswa yang membutuhkan penggunaan teknologi adaptif semakin nyata dan mendesak dilayani. Akan tetapi, untuk mengambil keputusan tentang teknologi tepat guna yang akan digunakan sekolah diharuskan untuk membantu individu-individu dengan disabilitas untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan mempelajari cara penggunaan peralatan adaptif yang tepat. Peralatan-peralatan ini diidentifikasi selama pengembangan IEP siswa. Diharapkan untuk bekerja sama dengan personel yang tepat di sekolah untuk mengembangkan IEP. Setelah siswa diberi peralatan adaptif, personel lain diharapkan untuk membantu siswa yang bersangkutan untuk menggunakannya dengan cara yang semestinya.

#### **5. Pengembangan teknik adaptif dalam karir penyandang difabel**

Teknologi adaptif, disadari sangat spesifik dan bersifat kasuistik, karena didasarkan hasil *needs assesment*. Namun, walaupun begitu kasus-kasus spesifik juga dapat ditarik secara generalis pada kasus-kasus sejenis dan berdekatan, sehingga walaupun ada adaptasi inti seri komersial, tapi perubahannya tidak terlalu banyak. Karena prioritas tetap pada nilai kemaslahatan. Dalam rangka menciptakan produk-produk inovatif dan kreatif serta memberdayakan diri melalui identifikasi, menggali dan memanfaatkan potensi dan sumber yang ada, maka peningkatan kualitas pembelajaran dan kreativitas mahasiswa yang mengikuti perkuliahan teknologi adaptif serta dalam rangka mengembangkan jaringan kerja sama produksi, meningkatkan kualitas produk teknologi adaptif sehingga bernilai komersial, sangat penting dilakukan.

Apalagi produk hasil kajian mahasiswa tiap tahun terus tercipta dan cukup inovatif sehingga telah mendukung keunggulan Laboratorium

Jurusan PLB dan menunjang perkembangannya sebagai Pusat Pengembangan Potensi Penyandang Difabel, yang memberi pelayanan terapi akademis pada masyarakat. Ashman, A. (2004) produk perkuliahan praktikum teknologi adaptif juga sangat menunjang, karena ternyata mendapat respon positif dari orang tua dan SLB. Beberapa produk telah memiliki nilai komersial tinggi, sehingga sekolah berani memproduksi karena ada pesanan orang tua siswa. Selama ini produk yang ada di pasaran baik itu teknologi adaptif berkaitan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari, termasuk yang berkaitan khusus dengan pembelajaran belum sesuai dengan kebutuhan anak dan harganya mahal sehingga tidak terjangkau. Produk teknologi juga tidak sesuai dengan kebutuhan kompensatoris dan baru bersifat terapeutik yang kebanyakan tidak diperuntukkan bagi penyandang difabel.

Jenis produk teknologi adaptif ini dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis alat yaitu; teknologi adaptif yang berkaitan dengan ADL dan teknologi adaptif yang berkaitan dengan pembelajaran (akademik). Selanjutnya kedua jenis produk ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Teknik adaptif berkaitan dengan kepentingan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Teknologi adaptif ini dikembangkan berdasarkan kompensatoris siswa penyandang difabel. Didasarkan atas kebutuhan siswa dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari dari mulai berjalan, makan, mandi, kegiatan di kamar mandi, dan sebagainya. Alat ini bisa dikembangkan dari alat teknologi yang sudah ada atau belum ada sama sekali.

- b. Teknik adaptif dikembangkan berdasarkan kepentingan aktivitas akademik.

Teknik adaptif ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan siswa penyandang cacat sesuai dengan kompensatoris yang dimilikinya dalam berbagai aktivitas akademik di sekolah. Beberapa contoh produksi mahasiswa yang mengikuti perkuliahan teknologi adaptif tahun 2007 yang berkaitan dengan kegiatan akademik adalah box pen, reglet low vision, kursi belajar, alas buku, meja miring, sabuk

untuk menulis, alat penyangga pensil, meja kursi tunadaksa, papan meja pangku, kursi multi guna, meja kursi bina diri, lampu artikulasi, kursi disiplin, dan sebagainya.

Proses produksi melibatkan mitra profesional secara keseluruhan diharapkan menghasilkan produk teknologi berstandar komersial. Mengingat konsep teknologi adaptif relatif baru, maka hakikat teknologi adaptif, konsep dan prinsip-prinsipnya perlu dikaji secara mendalam. Imma Indra Dewi W. (2012) kajian perncanaan produk tidak terlepas dari ergonomis yakni aktivitas penelitian mengenai kemampuan dan keterbatasan manusia baik secara fisik maupun mental dan interaksinya dalam sistem manusia mesin alat secara integral. Dimaklumi penyandang difabel dalam melakukan aktivitasnya tidak terlepas dari *barrier* dalam melakukan mobilitasnya maka potensi pasarnya cukup terbuka.

Meskipun demikian kemaslahatan seyogianya tepat menjadi prioritas dalam mengembangkan teknologi adaptif, sehingga nilai filosofis rancang bangun dan fungsi utamanya merupakan kunci utamanya. Dengan demikian, produksi massal tidak sekedar untuk memenuhi pasar tapi lebih dari itu memiliki misi memenuhi kebutuhan kompensatoris, sehingga produksinya diproses melalui kajian terus menerus.

# **BAB III**

## **KONSEP DASAR KEWIRAUSAHAAN DAN PRAKTIK BAGI DIFABEL**

### **A. Pengertian Kewirausahaan**

Kegiatan wirausaha merupakan pilihan yang tepat bagi orang-orang yang berminat dan bersungguh-sungguh untuk melakukannya, alam, iklim, kondisi yang dimiliki oleh Indonesia ini sangat memungkinkan bagi pembawa kegiatan kewirausahaan, baik dengan modal skala kecil maupun besar, sebab sumber daya alam (SDA) sebagai industri hulunya cukup tersedia dan bervariasi.

Masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan dapat menggali potensi alam lingkungannya. Demikian pula masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pantai. Pantai dapat digali untuk dijadikan kegiatan kewirausahaan. Pantai dan laut Indonesia kaya akan berbagai jenis ikan, batu-batuan, terumbu karang, dan hewan laut, asal saja para wirausahawan tidak merusak potensi tersebut.

Permasalahan sekarang adalah bagaimana untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam bidang kewirausahaan yang mampu menciptakan peluang-peluang usaha yang mengandung unsur kreatif, inovatif dan penuh kemandirian.

Kegiatan kewirausahaan di Indonesia bagai jamur yang tumbuh di musim hujan. Sebagai masyarakat baik yang bertempat tinggal di perkotaan maupun di pedesaan telah sejak lama melakukan kegiatan tersebut secara turun temurun. Ada yang bersifat usaha keluarga, kelompok, ataupun individu.

Di antara wirausaha tersebut ada yang sukses, dan ada tidak sukses pula yang gulung tikar yang disebabkan berbagai faktor, antara lain: terbatasnya modal usaha, tidak memiliki kemampuan manajerial yang memadai, dan ketidak mampuan menciptakan dan melihat peluang usaha yang dapat mendapatkan keuntungan-keuntungan besar.

Dewasa ini, kegiatan wirausaha ini tidak hanya orang-orang dewasa dan telah berkeluarga sebagai aktornya, tetapi juga sudah memasyarakat di kalangan pelajar baik SD, SLTP, SLTA, maupun perguruan tinggi. Hal ini juga dilatar-belakangi oleh keterbatasan ekonomi orang tua dalam menyediakan kebutuhan sekolah. Berkemungkinan pula ada diantara pelajar yang di dorong oleh bakat, minat, dan kemampuan yang dimilikinya.

Pada mulanya pemerintah sangat melarang bagi pelajar untuk melakukan kegiatan usaha atau bekerja dalam rangka memperoleh uang, apalagi mempekerjakan anak di bawah umur. Oleh karena realitas kehidupan dan kehidupan yang tidak bisa dielak bahwa tidak semua anak sekolah berasal dari keluarga mampu ekonomi. Maka pemerintah 1995, memberlakukan kegiatan kewirausahaan di kalangan pelajar. Hanya saja hingga saat ini belum terwujud secara optimal.

Mencerminkan apa yang terjadi di kalangan pelajar khususnya siswa SLTP wilayah pantai di Parangtritis Yogyakarta, yang sehari-harinya digambarkan bergelut dengan kegiatan membantu orangtuanya menambah penghasilan keluarga dan biaya sekolah, menjajakan

makanan atau souvenir di pinggir pantai. Bahan ajar sederhana ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi siswa yang akan mengerjakan kegiatan kewirausahaan dengan memanfaatkan potensi pantai dan laut di mana sekolah itu berbeda.

Pendapat Patel V.G., (2005) *entrepreneurship* (kewirausahaan) adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dan berani mengambil risiko dan mendapatkan keuntungan. Para ahli sepakat bahwa yang dimaksud dengan kewirausahaan menyangkut tiga perilaku yaitu: (1) kreatif, (2) komitmen (motivasi tinggi dan penuh tanggung jawab), dan (3) berani mengambil risiko dan kegagalan. Kewirausahaan adalah proses inovasi dan kreasi. Orang yang berwirausaha disebut wirausahawan (*entrepreneur*). Entrepreneur adalah inovator dan kreator (Kao, 1991). Entrepreneur ialah seorang inovator (Hisrich & Peters, 2002). Kewirausahaan adalah singkatan dari: Kreatif, Enerjik, Wawasan luas, Inovatif, Rencana bisnis, Agresif, Ulet, Supel, Antusias, Hemat, Asa, Antusias, Negosiatif. Buchari, (2006) istilah wirausaha berasal dari kata *entrepreneur* (bahasa Prancis) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan arti *between taker* atau *go-between*. Pendapat Suparman Sumohamijaya (1980) istilah wirausaha sama dengan istilah wiraswasta. Wiraswasta berarti keberanian, keutamaan dan keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan serta memecahkan permasalahan hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri.

Kewirausahaan merujuk pada sifat, watak dan ciri-ciri yang melekat pada individu yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan dan mengem-bangkan gagasan kreatif dan inovatif yang dimiliki ke dalam kegiatan yang bernilai. Jiwa dan sikap kewirausahaan tidak hanya dimiliki oleh usahawan, melainkan pula setiap orang yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari dan memanfaatkan peluang menuju sukses. Menjadi wirausahawan berarti memiliki kemauan dan kemampuan menemukan dan mengevaluasi peluang, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan dan bertindak untuk memperoleh keuntungan dari



peluang itu. Mereka berani mengambil risiko untuk memperoleh keuntungan dari peluang itu. Mereka berani mengambil risiko yang telah diperhitungkan dan menyukai tantangan dengan risiko moderat. Wirausahawan percaya dan teguh pada dirinya dan kemampuannya mengambil keputusan yang tepat. Kemampuan mengambil keputusan inilah yang merupakan ciri keputusan yang tepat.

Dalam buku kewirausahaan Indonesia dengan semangat 17 Agustus 1945 yang diterbitkan oleh PUSLATAKOP yang disahkan penggunaannya di sekolah dengan SK Dikdasmen Depdikbud No. 556/C/KEP/PT/1995/Tgl. 14 Desember 1995, dijelaskan bahwa "*istilah wirausaha*" yang belum lebih sering dipakai daripada istilah *wirausaha* sebagai pendanaan "*enterepreneur*".

Wira berarti utama, gagah luhur, berani, teladan atau pejuang, Swa berarti sendiri. Sta berarti berdiri. Swasta berarti berdiri diatas kaki sendiri, atau dengan kata lain berdiri di atas kemampuan sendiri. Wiraswasta/wirausaha berarti pejuang yang, gagah, luhur, berani, dan pantas menjadikan teladan dalam bidang usaha. Dengan kata lain, wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai mengambil risiko, keutamaan, kreativitas dan keteladanan dalam menangani usaha atau perusahaan dengan berpijak pada kemauan dan kemampuan sendiri.

Menurut Tarsis Tarmudji (1987) wirausaha bila ditujukan dari etimologinya berasal dari kata "wira" dan "usaha". Kata wira berarti "teladan" atau patut dicontoh, sedangkan usaha berarti "kemauan keras" memperoleh manfaat. Seorang wirausaha dapat diartikan sebagai berikut: "seseorang yang berkemauan keras dalam melakukan tindakan yang bermanfaat dan patut menjadi teladan hidup", atau lebih sederhana dapat dirumuskan "seorang yang berkemampuan keras dalam bisnis yang patut menjadi teladan hidup"

Menurut Silvia Herawaty (2008) mengemukakan perilaku kewirausahaan pada dasarnya adalah suatu interaktif antar peran dan sanksi. Peribahan di dalam masyarakat bukan di sebabkan oleh para wiraswasta, akan tetapi justru para wiraswasta meubah, peran mereka dan pola perilaku mereka sesuai dengan perkembangan masyarakat."

Salim Siagian (1995) mendefinisikan kewirausahaan adalah kesatuan terpadu dari semangat, nilai-nilai dan prinsip serta sikap, kiat, dan tindakan nyata yang sangat perlu, tepat dan unggul dalam menangani dan mengembangkan perusahaan atau kegiatan lain yang mengarah pada pelayanan terbaik kepada pelanggan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan termasuk masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam kewirausahaan teori dan peraktek, Arismunandar (2006) mengemukakan bahwa para wirausaha adalah individu-individu yang berorientasi kepada tindakan, dan bermotivasi tinggi yang mengambil risiko dalam mengerjakan tujuannya.

Mencermati pengertian di atas bila diimplementasikan dalam kegiatan kewirausahaan yang dilakukan pelajar, maka tidak mustahil pada masa-masa mendatang, akan muncul manusia-manusia yang dapat berdiri di atas kemampuan sendiri. Sebagai pejuang yang gagah, luhur, berani dan pantas menjadi teladan dalam bidang usaha. Bahkan lebih dari itu, yakni: memiliki keberanian mengambil risiko, keuntungan, keratifitas dan teladan dalam menangani usaha atau perusahaan dengan terpijak pada kemauan dan kemampuan sendiri.

## **B. Peranan dan Fungsi Kewirausahaan**

Tarsis Tarmudji (1987) mengemukakan bahwa peranan wirausaha adalah untuk meresapi aktivitas usaha dengan semangat kewirausahaan dan mengubah semangat itu menjadi energi untuk terjun ke dalam pembaharuan-pembaharuan. Dengan tingginya frekuensi perubahan dewasa ini sudah saatnya baik orang perorang, kelompok maupun masyarakat yang lebih luas untuk melakukan upaya-upaya baru yang inovatif bagi bangsa. Upaya-upaya tersebut senantiasa harus menaruh kepedulian pada peningkatan kapabilitas (*capability*) bangsa. Upaya tersebut hanya akan berhasil melalui sikap kewirausahaan yang memadai.

Diakui pula oleh Tarsis Tarmidji (1987), bahwa dunia kewirausahaan adalah dunia bisnis yang penuh ketidakpastian dan risiko dimana antara keberhasilan dan kegagalan bisa terjadi. Seorang

wirausaha memang mengharap selalu untung dan tidak pernah mengharap rugi. Namun keuntungan yang diperoleh hendaknya jangan dengan cara haram. Maka seorang wirausaha dituntut untuk selalu menggunakan moral dan akhlak dalam batas-batas kewajaran agama yang dianutnya.

Deangan demikian, dapat diperjelas bahwa peranan kewirausahaan adalah dapat mendorong para wirausaha untuk melakukan dan peluang-peluang secara inovatif, kreatif sehingga tidak hanya memberi keuntungan bagi para wirausaha itu sendiri tetapi juga memberi keuntungan bagi masyarakat dan bangsa.

Di samping peranan wirausaha yang dikemukakan di atas, maka ada pula beberapa fungsi kewirausahaan, seperti yang dikemukakan oleh Silvia Herawaty (1998), fungsi kewirausahaan, antara lain: (1) sebagai penanggung risiko yang membantu mendorong kegiatan bisnis. Tanpa fungsi pertanggung risiko tersebut kegiatan bisnis berjalan sangat lamban, (2) menetapkan manusia sebagai fokus utama dalam proses pembangunan ekonomi, (3) fungsi tunggal yang konstruktif dari wirausahawan adalah inovasi yang berperan untuk mendinamisir laju pertumbuhan ekonomi.

Mencari peranan dan fungsi kewirausahaan dalam kehidupan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah inovatif, membantu mendorong kegiatan bisnis, manusia sebagai fokus utama, mendinamisir laju pertumbuhan ekonomi.

### **C. Ciri-ciri Kewirausahaan**

Tarsis Tarmiji (1987) mengemukakan, seorang wirausaha dapat dideskripsikan sebagai seorang yang mempunyai dan memakai atribut: (1) wawasan komersial dan kesadaran akan pasar, (2) kemampuan untuk bekerja secara tekun dan mandiri, (3) pikiran yang inovatif dan kreatif, (4) kemampuan untuk manajemen dan mengarahkan perubahan, (5) kapasitas mengorganisasi dan keterampilan analitik, (6) stamina dan daya tahan, (7) kemampuan untuk bergaul yang baik dengan orang dari segala tingkatan.

Para wirausaha perlu memiliki berbagai sikap yang mengantar ke arah keberhasilan. Silva Herawaty (1998) mengemukakan ada beberapa aspek sikap kewirausahaan yang perlu dimiliki seorang wirausaha yang berhasil, yakni: Aspek sikap kewirausahaan, meliputi: (1) sikap optimis dan percaya diri yang tinggi, (2) bersikap jujur dan dapat dipercaya, (3) sikap ulet, sabar, dan etos kerja keras, (4) adanya motivasi yang lebih kuat, (5) sikap positif dan dinamis, (6) sikap kreatif dan inovatif, (7) sikap lebih menanggung risiko. Aspek kemampuan, meliputi: (a) kemampuan analitis, berpikir jernih dan proporsional, (b) kemampuan komunikasi, (c) kemampuan menajerial.

Selanjutnya, Tarsis Tarmidji (1987) menjelaskan bahwa para wirausaha itu mempunyai ciri, sifat, atau watak, dalam profil sebagai berikut:

<b>Ciri-ciri</b>	<b>Watak</b>
Percaya diri	Keyakinan, tidak ketergantungan, individualis optimisme
Berorientasi tugas dan hasil	Kebutuhan akan prestasi, berorientasi laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energitik, dan inisiatif
Pengambil risiko	Kemampuan mengambil risiko, suka pada tantangan
Kepemimpinan	Bertingkah laku sebagai pemimpin dapat bergaul dengan orang lain. Menanggapi sasaran dan kritik
Keorisinilan	Inovatif dan kreatif, fleksibel, punya banyak sumber, serba bisa, mengetahui banyak
Berorientasi ke masa depan	Pandangan ke depan, perseptif.

Hasil analisis Tarsis Tarmidji (1987), ciri-ciri khusus (yang harus dimiliki) seorang wirausaha adalah sebagai berikut: (1) bekerja keras, (2) optimis, (3) berupaya menghasilkan satu cara yang terbaik, (4)

dorongan untuk berprestasi, (5)mampu mengorganisasikan, (6) bertanggung jawab, (7) orientasi pada uang, (8) orientasi pada imbalan, (9) memperhatikan kualitas.

Silvia Herawaty (1998) mengemukakan bahwa potensi kewirausahaan dapat ditumbuhkan sejak kecil namun perlu mandat asuhan yang baik dari keluarga. Alasannya pendidikan keluarga merupakan faktor tumbuh suburnya bibit kewirausahaan juga mendapat pengaruh dari sistem pendidikan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Bibit kewirausahaan yang perlu dijaga pertumbuhannya antara lain mencakup sikap bebas, merdeka serta percaya diri. Apa yang dikemukakan oleh Silvia sudah cukup jelas bahwa potensi kewirausahaan tidak hanya diperoleh melalui formal di sekolah khusus, namun dapat berawal dari lingkungan keluarga.

#### **D. Prinsip-prinsip Kewirausahaan**

Menurut pendapat Tarsis Tarmidji (1987) bahwa ada 16 prinsip yang perlu diperhatikan oleh para wirausaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, yakni sebagai berikut: (1) rajin dan tekun berusaha, kesalahan berakibat petaka (2) hemat dalam pengeluaran, pemborosan menggerogoti modal (3) ramah pada setiap orang, ketidaksabaran mendatangkan kerugian (4) jangan menyalahgunakan kesempatan penundaan penghilangan peluang (5) lugas dalam transaksi, keraguan membawa pertikaian (6) berhati-hati dalam memberikan kredit. Kemurahan hati yang berlebihan memboros modal (7) periksa semua account dengan cermat, kelalaian menghambat rejeki (8) bedakan yang baik dari yang jahat, ketidakpedulian melumpuhkan usaha (9) kendalikan kesediaan dengan sistematis, kecerobohan menciptakan kekacauan (10) adil dan tidak pilih terhadap karyawan. prasangka menimbulkan kemalasan (11) periksa dengan cermat semua nota pengeluaran dan pemasukan, kealpaan mengakibatkan mahal (12) periksa dagangan sebelum diterima, kesembarangan mendatangkan kemalangan (13) kaji dengan teliti setiap perjanjian, ingkar menghancurkan kepercayaan (14) bijaksana dan jujur dalam usaha,

manajemen yang curang membuka peluang korupsi (15) tunjukan rasa tanggung jawab, karena sikap tidak bertanggung jawab mengundang kesulitan (16) bersikap tenang dan penuh percaya diri, apabila melakukan sikap nekat akan menghambat perkembangan.

Menurut Tarsis Tarmidji (1987) untuk dapat berwirausaha secara berhasil perlu diperhatikan prinsip-prinsip berikut: (1) mengenal potensi diri, (2) berani menghadapi tantangan, (3) mental yang tangguh dan berkemampuan keras, (4) disiplin diri, (5) hemat dan cermat, (6) keterbukaan, (7) wibawa dan jujur, (8) percaya diri, (9) berpegang pada program, (10) modal kecil hasil besar, (11) memperhatikan kebutuhan konsumen, (12) tepat waktu, (13) memperhatikan keadaan pasar, (14) teliti, (15) mandiri (16) berpedoman pada pengalaman, (17) manajemen yang baik, (18) kreatif, (19) bijaksana.

### **E. Kendala-kendala dalam Kegiatan Kewirausahaan**

Dalam menjalankan kegiatan kewirausahaan, seorang wirausaha tidak selalu menempuh jalan mulus atau tidak setiap rencana dicapai dengan sukses. Berbagai kendala sudah barang tentu akan dialami. Hanya saja tidak semua para wirausaha mengalami kendala yang sama. Pada bagian ini akan dibahas sekilas mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh seorang wirausaha.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh seorang wirausaha seperti yang dikemukakan oleh Hakim, Rusman (1998) kendala-kendala itu pada dasarnya terdiri atas dua bagian, yaitu: (1) hambatan mental, (2) hambatan teknis.

#### **1. Hambatan Mental**

Hambatan mental banyak mewarnai kasus kewirausahaan. Menurut Anwang dalam Hakim, Rusman (1998), hambatan mental meliputi: (1) penentuan bidang usaha, (2) bagaimana cara memperoleh modal, (3) bagaimana kita membesarkan produk, dan sebagainya.

##### **a. Masalah motivasi**

Motivasi dari bahasa Inggris "*Motivasi*" berarti "mendorong". Arismunandar (2006) berpendapat bahwa "motivasi dipandang sebagai

dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia". Menurut Siagian, (1989) dalam motivasi terdorong adanya keinginan, harapan, kebutuhan, tujuan, sasaran, dan insentif. Keadaan kejiwaan inilah yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku.

Selanjutnya, dapat pula disimak pendapat Hakim, Rumusan (1998) motivasi adalah "daya dorong" yang muncul dari dalam jiwa seseorang, berfungsi sebagai bahan bakar yang memberi api kehidupan bagi siapa saja yang memilikinya". Pendapat-pendapat di atas disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan mental yang muncul dari seseorang untuk memenuhi keinginan, harapan, kebutuhan, tujuan, sasaran dan insentif.

Seorang wirausahawan tentunya memiliki motivasi dalam menjalankan kegiatan kewirausahaan. Sebenarnya banyak SDM yang dapat melakukan kegiatan kewirausahaan. Yang menjadi masalah adalah tidak semua orang memiliki motivasi dalam kewirausahaan. Oleh karena itu, motivasi menjadi kendala besar dalam mengembangkan aktivitas kewirausahaan. Seringkali dijumpai di tengah-tengah masyarakat, seseorang mau berkiprah dalam kegiatan kewirausahaan bila melihat kesuksesan orang lain. Hal ini berarti motivasi ekstrinsik.

Motivasi yang datang dari biasanya kurang mencapai kepuasan dan hasil yang maksimal, sebab bila menempuh kegagalan maka akan sulit bangun kembali. Seorang wirausaha diharapkan memiliki motivasi dari dalam (*internal motivation*) atau disebut juga motivasi intrinsik.

Bila seorang wirausaha memiliki motivasi intrinsik, maka ia akan memiliki pendirian dalam menjalankan usanya. Untung atau rugi bukanlah pertanyaan pertama yang ia ajukan dalam memulai usahanya, tetapi ia menentukan rencana dan strategi yang tepat agar usahanya sekedar ikut-ikutan atau termotivasi oleh orang lain. Namun demikian, motivasi eksternal tidaklah diabaikan sama sekali sebab motivasi eksternal mempunyai andil juga dalam menjalankan atau mengembangkan kegiatan usahanya.

Dalam melakukan kegiatan kewirausahaan, hendaknya seseorang didorong oleh adanya keinginan, harapan, kebutuhan, tujuan, sasaran, menyalurkan dan mengarahkan sikap dan perilaku kewirausahaan.

**b. Sikap dan perilaku feodalistis dan materialistis**

Bila diamati sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, maka tampak gejala umum yang menghinggapi gaya hidup mereka, yakni *feodalisme* dan *materialisme*

Pertama feodalisme menurut rumusan Hakim, Rusman (1998) "sikap dan perilaku feodalisme merupakan sisa-sisa pengaruh Belanda di masa lalu. Ciri-cirinya mudah dikenal, antara lain dari tingkah laku seorang yang tidak menyukai pekerjaan-pekerjaan kasar, kurang gengsi atau yang terkesan kotor dan mengotori tangan.

Kelompok masyarakat yang memiliki sikap dan perilaku feodalisme lebih menyukai pekerjaan formal (pemerintah) seperti pegawai negeri dan pegawai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kecenderungan mereka ini berpenampilan menarik dan berpakaian rapi, necis dan sangat menyukai pekerjaan di bidang perkantoran. Disamping itu sangat memuja-muja status sosial di tengah-tengah masyarakat di mana mereka hidup bergaul. Status seseorang dilihat dari kelompok feodalisme ini mempunyai kedudukan (pejabat struktural, gelar akademik, kekayaan materi, atau kendaan dan status sosial yang melekat pada diri seseorang).

Sikap dan perilaku feodalisme ini sangat menghambat masyarakat bawah dan menengah dalam menumbuhkembangkan kegiatan kewirausahaan. Adakalanya pula mereka akan terjun pada kegiatan wirausaha bila telah memiliki modal besar. Apakah itu memperoleh pinjaman bank atau bantuan khusus dari pemerintah. Bila modal sedikit mereka belum tertarik melakukan kegiatan wirausaha.

Kedua, *materialisme*, lebih lanjut Hakim, Rusman (1998) mengemukakan materialisme dimaksudkan sebagai orientasi hidup ke arah kekayaan materi (mempercayai segala sesuatu dalam bentuk material serta tidak mempercayai hal-hal spiritual).



Kelompok masyarakat jenis kedua ini adalah sangat mendewakan kekayaan materi. Orang-orang yang memiliki harta yang banyak sebagai ukuran keberhasilannya dalam hidup. Kekayaan materi atau benda yang bertumpuk-tumpuk inilah yang membuat kesenjangan dalam status sosial. Mereka seolah-olah bahkan memang telah menuhankan harta benda.

Sikap materialisme ini tidak hanya menghambat tumbuh kembangkan kegiatan kewirausahaan tetapi juga mematikan kreativitas para wirausaha yang baru saja memulai usahanya secara kecil-kecilan. Para pemilik modal besar tidak menghargai atau tidak mau bekerja sama dengan para wirausaha yang memiliki modal kecil. Hal ini lebih menyakitkan lagi kelompok masyarakat yang menganut paham materialistis ini adalah sangat tidak percaya pada nilai-nilai religius dan nilai-nilai agama. Ketidakpercayaan terhadap nilai-nilai agama inilah yang melatarbelakangi runtuhnya nilai-nilai kebersamaan, senasib sepenanggungan, gotong royong, dan sebagainya.

Sering pula terjadi bahwa para penganut sikap materialisme ini melakukan berbagai cara tidak terpuji dalam melakukan kegiatan wirausaha dengan menumbuhsuburnya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat menghancurkan ekonomi kerakyatan.

#### **F. Masalah Tingkat Pendidikan**

Dalam melakukan kegiatan wirausaha, juga akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Artinya, tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang turut menentukan pula dalam memilih jenis dan bentuk kegiatan wirausaha. Misalnya lulusan perguruan tinggi kadangkala tidak mau melakukan usaha melalui perjuangan hidup dari tingkat paling bawah, seperti yang diungkapkan oleh Hakim, Rumus (1998) bahwa “sungguh sulit bagi orang-orang kalangan menengah ke atas untuk melalui perjuangan hidup dari tingkat paling bawah yang mengharuskan mereka bekerja berkotor-kotor, atau melakukan sesuatu yang kurang “gengsi”. Itu sebabnya jarang sekali ada kalangan menengah pribumi yang dengan rela menggelar dagangan kaki lima

atau warung dari pinggir jalan. Dalam mencari pekerjaan, mereka lebih suka “mengembara” dari satu kantor ke kantor lain membawa map lusuh berisi lamaran, fotokopi ijazah dan daftar riwayat hidup. Sebaiknya bagi calon wirausaha, bagaimana tinggi rendahnya tingkat pendidikan mereka, tidaklah menjadi hambatan dalam memulai kegiatan usahanya apakah perjuangan dari bawah dengan modal kecil atau terbatas maupun modal besar. Baik pekerjaan kasar dan mengotori tangan maupun pekerjaan enteng dan menyenangkan. Jangan terlalu berpegang pada menjaga “gengsi”, sifat demikian membuat para wirausaha lambat memperoleh sukses.

Tingkat pendidikan kadangkala tidak dapat dijadikan patokan utama dalam menentukan keberhasilan wirausaha, namun tinggi rendahnya tingkat pendidikan pelaku wirausaha memberi sumbangan terhadap keberhasilan dan kemajuan namun mereka dapat mencapai puncak kesuksesan atau keberhasilan (*konglemerat*). Hal ini juga dilatarbelakangi antara lain oleh motivasi dan semangat kepeloporan.

#### **G. Kurangnya Semangat Kepeloporan (*Leadership*)**

Hakim Rumusan (1998) mengemukakan semangat kepeloporan atau *leadership* memang mutlak diperlukan bila seseorang ingin merintis karier di jalur kemandirian dalam hal ini kewirausahaan.

Seorang wirausaha dituntut pendewasaan diri secara totalitas, baik menentukan arah, membangun citra, ciri dan corak kepribadian yang pantang menyerah. Hal yang menggambarkan ciri-ciri manusia wirausaha seperti yang telah dikemukakan di muka, juga memiliki *leadership* (kepeloporan), yakni sebagai berikut:

1. Melakukan terobosan-terobosan yang mengejutkan orang lain.
2. Selalu tampil beda namun dapat bekerja sama dengan pihak lain.
3. Mengambil atau membuat keputusan dapat dilakukan dengan mantap.
4. Yakin diri atau percaya diri.
5. Tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.
6. Tidak mudah terpengaruh oleh orang lain yang mudah berkhianat.
7. Mau menerima saran-saran perbaikan dari pihak lain positif.

Beberapa sikap kepeloporan tersebut perlu dimiliki dan diwujudkan dalam kegiatan berwirausaha. Tidak sedikit di antara perilaku wirausaha yang memiliki sikap kepeloporan atau pemimpin (*leadership*), akhirnya mengalami kehancuran.

Kepemimpinan dalam wirausaha bukanlah menyukai sikap ikut-ikutan pada kegiatan orang banyak, akan tetapi adalah kemampuan melihat peluang usaha yang dapat memenuhi kebutuhan pasar atau banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat, artinya kemampuan melihat *trend* (kecenderungan) pasar usaha.

Suatu contoh, pantai Sadeng Gunungkidul dan sekitarnya memiliki berbagai potensi yang dikembangkan pada kegiatan kewirausahaan. Misalnya, mengelola potensi pantai dan laut kaya akan ikan, rumput laut, dan batu-batuan pantai dan sebagainya. Ikan hasil tangkapan para nelayan tidak hanya dijual ikan segar atau ikan basahnya. Ikan asin sangat pula digemari oleh masyarakat luas. Ikan asin dapat dipasarkan dimana saja tidak hanya di pasar-pasar tradisional, tetapi dapat juga dijual di pasar swalayan yang banyak didatangi oleh kalangan menengah ke atas yang perlu dipikirkan adalah bagaimana membuat ikan asin itu mendapat tempat di pasar swalayan. Oleh karena itu, ikan asin harus dikemas dalam tempat atau bungkus yang menarik sehingga pengunjung swalayan tertarik untuk membelinya.

Contoh lain, batu-batuan yang terdapat di sepanjang pantai di wilayah Gunungkidul juga dapat menjanjikan penghasilan yang menggiurkan bila diolah dengan baik dan terampil. Batu-batuan pantai dapat diolah untuk permata cincin, hiasan rumah tangga, gantungan kunci, dan sebagainya. Semua itu dapat dipasarkan mulai dari pasar tradisional, kaki lima hingga toko serba ada (toserba).

Yang jelas bagaimana seorang wirausaha memiliki sikap kepeloporan atau kepemimpinan (*leadership*) dalam menjalankan usahanya. Yang perlu di perhatikan oleh para wirausaha adalah kejujuran dalam menggunakan dana pinjaman, belanjakan sesuai dengan kebutuhan kegiatan usaha. Jangan digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif. Misalnya untuk kepentingan hidup sehari-hari,

makan minum, untuk membeli kendaraan yang barang kali tidak ada hubungannya dengan kepentingan usaha.

#### **H. Perencanaan Usaha, Produksi dan Pemasaran**

Untuk membentuk suatu usaha perlu mengenal terlebih dahulu karakteristik dari usaha yang akan didirikan serta jenis usaha yang dipilih. Seorang yang akan mengembangkan usaha harus memperhatikan kemampuan, keterampilan dan minat yang dimiliki oleh dirinya untuk mengelola usaha tersebut.

Jenis usaha yang ada di dunia ini dapat kita lihat dari karakteristik usaha itu sendiri, seperti ada usaha kecil, menengah sampai besar. Ada usaha yang mempekerjakan beberapa orang saja dan ada juga yang sampai ribuan orang. Ada juga pasaran produk dikonsumsi oleh pasaran dalam negeri atau luar negeri.

Dalam dunia usaha, karakteristik usaha dapat direncanakan mulai dari usaha rumah tangga kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Berdasarkan sumber kepemilikan dan sumber modal, usaha dapat dimulai dari usaha keluarga, usaha kelompok, usaha mitra kerja atau koperasi. Masing-masing usaha ini mempunyai karakteristik tersendiri. Thobi Mutis (1995), karakteristik dari masing-masing jenis usaha adalah sebagai berikut :

1. Usaha rumah tangga ciri-cirinya: diawali dengan modal kecil di rumah 10 juta, bahan baku yang tersedia di lingkungan, tenaga kerja 1-9 orang biasanya anggota keluarga ditambah tenaga kerja lepas setengah hari, tempat penyelenggaraannya di rumah atau di tempat sewaan, produksi belum teratur, dan dipasarkan di sekitar tempat usaha atau daerah setempat, keuntungan masih berbasis untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar upah pekerja.
2. Usaha kecil, ciri-cirinya: membutuhkan modal yang cukup besar (di atas 10 juta rupiah sampai 90 juta rupiah, membutuhkan 10 orang lebih pekerja tetap atau harian, membutuhkan tempat yang cukup luas, perencanaan bahan baku sudah dilaksanakan secara matang, namun masih mengandalkan ketersediaan bahan baku dari daerah

sekitarnya, produksi harian dan mingguan teratur, pemasaran untuk memenuhi kebutuhan lokal, dan sudah dilakukan administrasi yang teratur.

3. Usaha menengah dan besar; ciri-cirinya: mempunyai modal besar (di atas 1 milyar rupiah), kapasitas produksi tinggi, utamanya untuk memenuhi pasar ekspor antar daerah maupun ekspor antar negara, tenaga kerja lebih dari tertib dan teratur, menggunakan tenaga kerja yang handal (tenaga ahli) menggunakan mesin-mesin dan teknologi terbaru, beberapa jenis produksi dipatenkan, pengontrolan mutu terkendali dengan baik, dan perusahaan juga mengem-bangkan sumber daya manusia dan memperbaiki mutu produk terus-menerus.

#### **I. Jenis Usaha dan Cara Mengembangkannya**

Tarsis Tarmudji (1987), karakteristik usaha berdasarkan kepemilikan dan sumber modal dapat dikembangkan melalui usaha keluarga (persero) usaha kelompok (perusahaan), usaha mitra kerja atau koperasi.

##### **1. Usaha keluarga**

Usah dimulai dari usaha rumah tangga, usaha kecil, usaha menengah, maupun usaha besar. Pengelolaan usaha ditangani oleh anggota keluarga yang masing-masingnya menjabat suatu bagian. Modal kerja dapat berasal dari keluarga, pinjaman dari penyandang dana, atau campuran keduanya. Kadang-kadang usaha keluarga juga menggunakan tenaga kerja terdidik untuk mengurus usaha, namun jabatan-jabatan puncak masih diisi oleh anggota keluarga.

##### **2. Usaha kelompok**

Usaha kelompok didirikan oleh sekumpulan orang dan masing-masing mempunyai modal atau saham. Modal tambahan diperoleh dari bank atau penyandang dana lainnya. Pengelola usaha ditangani oleh sejumlah tenaga kerja terdidik dan pemilik modal atau pemegang saham berperan sebagai pegawai atau komisaris.

### 3. Usaha mitra kerja

Usaha ini banyak dikembangkan dalam bidang produksi dan pengolahan hasil produksi. Perusahaan dan pengusaha membentuk suatu jaringan kerja. Perusahaan menyediakan modal seperti: penyedia bibit, pupuk, penampungan hasil dan memasarkan hasil usaha. Sementara mitra lainnya misalnya petani mempunyai modal seperti: tanah dan tenaga kerja yang digunakan sebagai tempat dan memelihara proses produksi. Perusahaan mengontrol produk sehingga akan didapatkan yang bermutu sesuai yang diinginkan perusahaan dan pasar. Usaha ini dikenal dengan usaha *plasma*. Perusahaan sebagai inti dan petani sebagai plasmanya.

Contoh usaha adalah budidaya jamur merang di Cianjur. Perusahaan memberikan bibit jamur, bangunan kubung jamur, bahan-bahan produksi. Petani sebagai pengusaha memiliki tanah dan tenaga kerja dari anggota keluarga. Hasil produksi petani ditampung oleh perusahaan dan dihargai sesuai dengan kualitas yang dihasilkan. Perusahaan juga melakukan pelatihan terhadap petani untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sehingga tercipta suasana saling menguntungkan.

### J. Memilih Jenis Usaha yang Sesuai dengan Minat Siswa

Jenis usaha yang akan dikembangkan, khususnya daerah pantai harus memperhatikan beberapa faktor diantaranya; jenis benda-benda pantai (potensi pantai) yang terdapat di daerah tersebut, minat calon pengusaha, keterampilan yang dimiliki.

Di samping itu juga tingkat usaha yang akan dilakukan, hal ini berdasarkan kepada pemodalannya, jumlah tenaga kerja yang digunakan, keuntungan yang diperoleh dan jangkauan pemasaran, hal ini dapat dimulai dari usaha rumah tangga, usaha kecil dan, usaha menengah atau usaha besar.

#### 1. Analisis dan Perencanaan Usaha

- a. Analisis situasi dan analisis diri, dikemukakan Soesarsono Wijandi, (1987) adalah sebagai berikut:

- 1) Anda harus mengetahui peluang usaha bidang yang akan Anda mulai.
- 2) Anda harus tahu tentang seluk beluk bidang usaha yang akan Anda geluti (cara memulai, cara membuat, cara menjual, cara menyimpan, cara mengambil, cara mengkredit dan lain-lain).
- 3) Anda hendaknya mengetahui persis siapa pesaing dan calon pesaing dalam bidang tersebut (berapa jumlah mereka, berapa luar pasar mereka, dimana letak untuk usaha mereka, bagaimana kemampuan keuangan, pendidikan, dan lain-lain)
- 4) Anda harus mengetahui berapa besar peluang pasar (jumlah penduduk, lokasi, tingkat kepadatan penduduk, perkembangan tuntutan pasar) yang akan Anda layani. Berapa peran kira-kira peluang pasar yang akan dilayani.
- 5) Anda harus mengetahui persis penyandang dana usaha Anda (dimana mereka tinggal, berapa kemampuan maksimal dan minimal, apakah mungkin memberi kredit dan lain-lain), atau adakah penyuplai dana yang lain.
- 6) Anda juga harus menjajaki dimana atau kepada siapa kemungkinan mendapat pinjaman modal, berapa bunganya, dan apa saja persyaratan minimalnya.
- 7) Apakah Anda juga mengetahui cara mendapatkan tenaga yang akan membantu usaha Anda (pendidikan, umur, pengalaman, tempat tinggal, dan lain-lain).
- 8) Apakah Anda sudah dapat menentukan dimana lokasi Anda (mengapa disitu, beberapa biaya dan apa untung ruginya, bagaimana peluangnya).
- 9) Apakah Anda mengetahui seluk beluk peralatan yang Anda perlukan (jenisnya, harganya, daya tahannya, kemungkinan pengantiannya jika rusak, dan jenis peralatan pesaing lain).
- 10) Apakah Anda juga mengetahui segala peraturan yang menyangkut bidang usaha Anda, seperti undang-undang tentang gangguan, izin usaha, pajak kutipan resmi, peraturan tata kota, kebersihan, analisis lingkungan, dan lain-lain).

b. Membuat perencanaan usaha

Perencanaan membuat langkah yang paling penting untuk berbuat saksama, karena dengan rencana yang baik dan matang, akan mengukur tujuan yang akan dicapai, bagaimana pelaksanaan (proses) dapat berjalan dengan baik, dan bagaimana hasil yang optimal, apakah sesuai dengan tujuan/target, bagaimana cara mengevaluasi, setiap berapa lama cara pengembangan usaha yang Anda kembangkan.

2. **Perencanaan Produk**

Kegiatan yang optimal dilaksanakan apabila sudah direncanakan secara matang, untuk merencanakan suatu produksi banyak berkaitan dengan faktor-faktor produksi, yakni: tenaga kerja, mesin-mesin peralatan, bahan mentah, dan sebagainya. Dalam proses transformasi bahan mentah dan tenaga kerja menjadi bagian produk harus disesuaikan dengan apa yang dilaksanakan dan diinginkan oleh konsumen.

Soesarsono Wijandi, (1987), ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk merencanakan dengan mengembangkan produk, yaitu:

b. Pencarian gagasan

Pasar dan teknologi yang telah ada merupakan sumber gagasan produk baru, gagasan pasar merupakan berbagai kebutuhan dari pada konsumen yang belum terpenuhi. Identifikasi kebutuhan-kebutuhan pasar ini dapat mengarah pada pengembangan teknologi dan produk baru untuk memenuhi kebutuhan. Di samping itu, gagasan produk dapat juga berasal dari hasil observasi terhadap produk-produk sekarang, pendapat para penyalur, para ahli, pesaing atau orang pasar.

c. Seleksi produk

Gagasan produk baru memenuhi beberapa kriteria, diantaranya: (1) potensi pasar, (2) kelayakan finansial, (3) kesesuaian produksi. Jadi, gagasan berdasarkan tiga kriteria tersebut, tujuannya adalah untuk



menyaring gagasan-gagasan mana yang tepat, sehingga terhindar dari kerugian.

d. Desain produk pendahuluan

Setelah mendapat gagasan terbaik, maka pada tahap ini berkaitan dengan mengembangkan beberapa alternatif rencana yang memenuhi ciri-ciri konseptual produk terpilih, misalnya: model, kapasitas, ukuran, bentuk, dan sebagainya. Pada tahap ini perusahaan juga perlu menetapkan atribut-atribut kunci produk yaitu frekuensi kerusakan, kemudahan untuk reparasi dan pemeliharaan serta ketahanan dalam penggunaan.

e. Pengujian

Pengujian produk baru ditinjau pada pengujian pemasaran dan kemampuan teknis. Salah satu cara untuk menilai potensi pemasaran adalah dengan melaksanakan uji pasar. Misalnya produk baru diberikan pada beberapa konsumen untuk diuji, guna mengetahui pendapat mereka. Maksud uji pasar adalah untuk mendapatkan data kuantitatif tentang pendapat konsumen terhadap produk baru yang disediakan.

f. Rencana akhir

Pada tahap ini spesifikasi-spesifikasi produk dan penyempurnaan berdasarkan masukan-masukan dari pihak tertentu yang akan berguna untuk meningkatkan produk yang bersangkutan.

### **3. Penjabaran Perencanaan Produk**

Kegiatan selanjutnya, setelah merencanakan produk yakni proses perencanaan dan pengembangan produk dan menentukan lokasi, serta fasilitas-fasilitas produksi yang akan diterapkan. Adapun tahapan yang harus dilalui dalam kegiatan selanjutnya adalah merencanakan implementasi dari rencana-rencana yang telah dibuat, kemudian memberikan informasi umpan balik sehingga rencana-rencana baru yang telah direvisi. Pendapat Soesarsono Wijandi, (1987), dapat diimplementasikan dan disempurnakan, terhadap tahapan tersebut adalah:

- a. Pesanan langganan  
Para pelanggan memasukkan pesanan-pesanan untuk berbagai produk, pesanan tersebut dimasukan pada skedul produksi induk.
- b. Peramalan permintaan  
Produksi dilakukan berdasarkan antisipasi terhadap permintaan, dan tidak hanya melayani perasaan pelanggan tertentu, melainkan produksi untuk persediaan.
- c. Permintaan bagian-bagian pelayanan  
Tahap ini, produksi dilakukan penyediaan bagian-bagian/komponen-komponen pengganti terhadap produksi-produksinya. Produksi komponen-komponen tersebut juga harus dimasukkan pada skedul produksi.
- d. Skedul produksi induksi  
Skedul produksi induksi adalah rencana suatu yang terperinci tentu apa, dan beberapa banyak barang harus diproduksi dari berbagai pelanggan dan permainan untuk setiap periode waktu.
- e. Bills of material (BOM)  
BOM merupakan suatu daftar komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat suatu produksi, yang dilengkapi dengan urutan dari operasi-operasi yang harus dilakukan, juga bahan-bahan yang diperlukan untuk setiap produksi akhir, Wijandi (1987).
- f. Transaksi-transaksi persediaan  
Adalah suatu persediaan pengalaman, dan persediaan sedang dipesan atau sedang diproduksi. Bagaimana transaksi persediaan ini bertanggung jawab atas penentuan jumlah pesanan atau permintaan produksi dalam jumlah yang tepat.
- g. Perencanaan kebutuhan bahan  
Bagaimana ini menghitung kebutuhan-kebutuhan bahan mentah dan komponen-komponen yang dilakukan untuk memenuhi semua kebutuhan yang tercantum dalam skedul produksi induk. Di samping itu, bagian ini juga menentukan seberapa banyak barang diperlukan atas dasar persediaan, data pemesanan dan BOM.

- h. Perencanaan kebutuhan kapasitas  
Bagian ini memperhitungkan tentang segala pesanan produksi dengan kapasitas mesin tenaga kerja yang ada. Maka bagian ini, memperhitungkan permasalahan-permasalahan yang banyak muncul, seperti perlunya kerja lembur, shift ekstra atau sub kontrak dan menyesuaikan skedul produksi induk kapasitas produksi yang ada.
- i. Skedul terperinci  
Setelah skedul produksi induk, disesuaikan dengan kapasitas, baru ditentukan skedulling terperinci yakni mencakup routing mesin, hari penyesuaian pesan dan prioritas-prioritas lainnya.
- j. Dispatching  
Apabila semua sudah siap, perintah-perintah untuk mengerjakan dan pesanan-pesanan yang direncanakan menjadi "order-order" yang harus dikerjakan. Order-order untuk barang-barang yang diproduksi sendiri disampingkan kepada penyedia dengan waktu dan kualitas yang tepat untuk integrasikan ke dalam proses produksi.
- k. Follow-Up  
Setelah dilakukan dispatching, perintah-perintah pengerjaan disampaikan ke pabrik, sistem monitoring kemajuan order-order tersebut sejalan dengan perpindahannya dari proses ke proses, untuk mengecek apakah simulasi sudah berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam skedul induk. Begitu juga para spesialis pembelian memonitor kemajuan-kemajuan order-order yang telah mereka berikan kepada penyedia untuk menentukan keadaan pesanan tepat pada waktunya, atau terlambat, ada masalah kualitas, rusak dan sebagainya.

l. Umpan balik dan tindakan korektif

Dalam tahap ini menemukan informasi-informasi yang diperlukan perbaikan ke bagian yang tepat dalam sistem. Informasi-informasi ini diperlukan untuk mengadakan revisi baik skedul induk, atau bagian-bagian lain yang diperlukan untuk meningkatkan produksi yang dinamik.

## **K. Pemasaran (marketing)**

### **1. Pengertian pemasaran**

Pemasaran (marketing berasal dari kata pasar (*market*) pasar dapat diartikan sebagai tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan tukar menukar barang. Akib, Haedar (2005), pengertian pasar lebih lengkap adalah semua pelanggan yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tertentu, bersedia dan mampu melibatkan diri dalam pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut.

Salim Siagian (1995), syarat-syarat pasar adalah: (1) adanya kelompok individu organisasi (2) adanya pembeli yang mempunyai kemampuan daya beli, (3) adanya kebutuhan dan keinginan, (4) mempunyai perhatian (*interest*) terhadap produk. Dengan demikian, pemasaran adalah suatu proses manajerial dan sosial dari individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran (nilai) produk yang lain.

### **2. Pengertian Manajemen Pemasaran**

Akib Haedar, (2005) manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan koperasi, penetapan harga promosi, dan distribusi gagasan, barang, dan jasa untuk menghasilkan pertukaran yang memuaskan perorangan dan memenuhi tujuan organisasi.

Lebih lanjut Akib, Haedar (2005) menjelaskan bahwa tugas manajemen pemasaran adalah bentuk memengaruhi tingkat, jangkauan waktu, komposisi permintaan, sehingga membantu organisasi mencapai sasarannya.

Konsep pemasaran adalah dasar pemikiran bagaimana cara aktivitas pemasaran dapat dilakukan berdasarkan suatu filsafat yang mantap, yang mengungkapkan pemasaran yang tanggap dan bertanggung jawab.

Steven C Brandt (1991) mengemukakan lima konsep bisnis yang berkembang dan berpengaruh dalam kegiatan pemasaran yaitu konsep : produksi, produk, penjualan, pemasaran, pemasaran sosial.

1) Konsep Produksi

Konsep produksi ini berorientasi pada produksi, dimana para manajer perusahaan memusatkan perhatian. Untuk mencapai efisiensi yang tinggi dan distribusi yang luas, sehingga permintaan lebih banyak dari permintaan.

2) Konsep Produk (hasil)

Konsep produk dimana perusahaan berupaya memproduksi produk yang berkualitas tinggi, hal ini karena konsumen menyukai produk yang berkualitas.

3) Konsep Penjualan

Pada konsep ini pengusaha berorientasi pada produk dengan tingkat penjualan yang tinggi. Konsep ini mengandung tiga dasar pokok, yaitu: (a) perencanaan dan operasi berorientasi kepada produk dengan volume penjualan yang tinggi (b) melakukan promosi yang gencar, sebagai alat untuk meningkatkan penjualan, (c) tujuan adalah mencapai laba (tujuan perusahaan) dengan mengusahakan volume penjualan semaksimal mungkin.

4) Konsep Pemasaran

Hal-hal ini yang menjadi pokok dalam pemasaran yaitu; (a) perencanaan dan operasi berorientasi kepada kebutuhan dan keinginan konsep, (b) semua aktivitas pemasaran dilaksanakan secara terpadu, (c) tujuan akhir dari pemasaran adalah laba, dan berusaha memberikan kepuasan semaksimal mungkin pada konsumen.

#### 5) Konsep Pemasaran Sosial

Pada konsep ini pemimpin perusahaan tidak hanya berupaya memenuhi kepuasan pelanggan atau konsumen dan pencapaiannya tujuan perusahaan (laba), tetapi dapat juga memberikan jaminan sosial bagi sumber daya manusia yang terlibat dalam perusahaan itu, seperti kesejahteraan karyawan (gaji yang layak) dan pencemaran lingkungan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa konsep produksi, produk dan penjualan merupakan filsafat bisnis tidak berorientasi pada konsumen atau permintaan, sedangkan konsep pemasaran dan konsep pemasaran sosial berorientasi pada konsumen.



# **BAB IV**

## **PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DALAM KONTEKS KARAKTER**

### **A. Penerapan Semangat Kewirausahaan di Sekolah**

Berdasarkan trend selama ini dapat dikatakan bahwa di masa mendatang banyak sekolah swasta yang maju dan kualitasnya lebih baik dibanding sekolah negeri, bahkan di kota-kota besar fenomena tersebut sudah mulai terlihat. Sekolah negeri yang selama ini terlalu mengandalkan subsidi pemerintah lambat laun akan mulai ketinggalan apabila cara berpikirnya tidak segera diubah. Pada saat itu, jika ingin maju sekolah negeri harus dikelola secara profesional dan tidak bergantung kepada arahan kebijakan dan alokasi dana pemerintah. Dengan kata lain, sekolah negeri harus mampu "mandiri" seperti sekolah swasta. Oleh karena itu, kepala sekolah harus memahami prinsip kewiraswastaan kemudian menerapkannya dalam mengelola sekolah.



Kepala sekolah yang berjiwa wirausaha adalah orang yang memiliki sikap dan perilaku kreatif dan inovatif dalam memimpin dan mengelola organisasi sekolah dengan cara mencari dan menerapkan cara kerja dan teknologi baru yang bermanfaat bagi terwujudnya prinsip-prinsip "*good school governance*" (pengelolaan sekolah yang baik). Adapun ciri-ciri kepala sekolah yang memiliki jiwa wirausaha juga meliputi minimal ketujuh ciri orang yang memiliki jiwa wirausaha adalah; percaya diri, mengembangkan pikiran positif, pantang menyerah dan berorientasi pada hasil, belajar bagaimana caranya menangani risiko, memiliki jiwa kepemimpinan, mengembangkan sikap kreatif dan inovatif, dan berpikir ke depan.

### **B. Bentuk Kewirausahaan di Sekolah**

Berdasarkan karakteristik *best practice* dan melihat jenis serta bentuk kewirausahaan sekolah berbasis kreativitas dan inovasi, selanjutnya disajikan beberapa bentuk *best practice* di sekolah. *Best practice* --atau kalau boleh penulis katakan *good practice*-- yang disajikan ini bukanlah merupakan kapita selekta yang terbaik, melainkan masih merupakan pilihan dari apa yang ada. Disamping *good practice* tersebut juga disajikan kasus semacam *bad practice* kewirausahaan di lembaga pendidikan.

Contoh yang dapat diberikan dalam hal ini adalah kesuksesan salah seorang pelajar di SLB-B Negeri 3 Yogyakarta yang bernama Sari, ia sibuk melayani teman-teman sekolahnya yang berebutan ingin mencicipi kue kukus buatan timnya. Rupiah demi rupiah berpindah tangan dan senyum kelompok yang dipimpin Sari semakin ceria. Modal yang tadinya cuma Rp50.000 kini bertambah dua kali lipat begitu dagangannya di atas meja ludes.

Sekali hanya simulasi, namun ada keputusan bernuansa kewirausahaan bagi kelompok Sari dan dua grup lainnya. Siang itu, dalam simulasi bisnis yang dilaksanakan Tim PPM Dosen Jurusan Tata Boga UNY. Tiga kelompok murid yang masing-masing terdiri atas lima orang diberi modal Rp 50.000. Mereka diminta untuk memutar

modal tersebut dengan memproduksi makanan berupa kue tradisional. Mulai dari tahap perencanaan produk, perhitungan untung/rugi, membuat kue kukus, promosi hingga laporan keuangannya harus dikerjakan bersama.

Pada prinsipnya, dosen Jurusan Tata Boga UNY hanya ingin memperkenalkan dunia bisnis dan wirausaha dari awal sampai produk pemasaran. Selain itu, ingin membuktikan bahwa wirausaha dapat dilakukan siapa saja baik tua maupun muda, siswa normal dan berkebutuhan khusus, sepanjang ada semangat, kerja keras, kreativitas dan kemampuan melihat kesempatan. Di samping itu, wirausaha dapat menjadi sebuah peluang dan celah lain bagi lulusan SMLB untuk mengembangkan dirinya, sehingga tidak hanya menjadi alternatif bagi lulusan sekolah kejuruan.

Contoh lain adalah tentang pedagang rokok yang menjadikan lembaga pendidikan sebagai segmentasi yang dinilai tidak tepat dalam menjalankan usahanya. Kita semua sama memahami bahwa orang yang menjalankan usaha hanya mempunyai satu tujuan, yaitu sukses. Akan tetapi, mencapai kesuksesan haruslah dengan jalan dan proses yang tepat, dalam artian sukses itu boleh-boleh saja sepanjang tidak merugikan orang lain, singkat cerita harus saling menguntungkan (*win win solution*).

Persoalan yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana pemilihan segmentasi pasar yang tepat dan bukan segmentasi asal-asalan yang tidak memperhitungkan efek lain yang akan ditimbulkan. Contoh kecil dalam kasus ini adalah pengusaha rokok yang dinilai tidak tepat dalam memilih segmentasi karena menjadikan lembaga pendidikan (sekolah dan kampus) sebagai sasaran segmentasinya dan wadah dalam mempromosikan produknya. Di satu sisi ini jelas akan menguntungkan bagi pengusaha dengan asumsi bahwa di kalangan siswa hanya sebagian kecil di antaranya yang tidak merokok, tetapi di sisi lain disadari atau tidak bentuk usaha yang seperti ini akan mengganggu sekaligus merusak generasi.

Kehadiran pengusaha rokok dalam sekolah seperti yang terjadi pada sekolah-sekolah di kota-kota besar pada umumnya dan SLB pada khususnya, di samping sering menjadikan kegiatan siswa sebagai wadah untuk mempromosikan produknya juga untuk saat ini yang terjadi adalah hampir di setiap sudut gedung sekolah terdapat penjual rokok. Keadaan seperti ini akan semakin memberikan peluang yang besar kepada siswa untuk merokok, tetapi kalau tidak, sekalipun sebagian besar siswa di antaranya adalah perokok, setidaknya akan sedikit mengurangi intensitas siswa merokok di dalam sekolah.

Persepsi yang telah melarang rokok masuk sekolah atau kampus adalah bukan larangan bagi wirausahawan yang bergerak di bidang tersebut, hanya saja yang terpenting harus diperhatikan adalah pemilihan segmentasi yang tepat sehingga apa yang dilakukan betul-betul bisa berjalan dengan baik dan lancar.

### **C. Kiat Menerapkan Inovasi dalam Wirausaha**

Untuk menerapkan inovasi dalam wirausaha, ada beberapa jurus yang dapat diterapkan:

#### **1. Eliminasi**

Mengeliminasi semua hal yang sudah tidak produktif lagi dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan.

#### **2. Tangani**

Ketahuilah bahwa semua produk, proses dan strategi apa pun yang ada sekarang ini cepat atau lambat akan dimakan usia.

#### **3. Rencanakan**

Buatlah perencanaan yang baik dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan.

#### **4. Lakukan**

Satu hal yang lebih penting dari ketiga hal di atas adalah melakukan apa yang telah direncanakan, mulai dari persiapan menghadapi tantangan dan menyingkirkan hal-hal yang tidak produktif.

Semua hal di atas tidak akan ada artinya apabila Anda hanya berkuat pada teori tanpa pernah mau menyentuh bumi, kemudian bergerak untuk melakukan apa yang telah disiapkan. Setiap waktu tertentu sebaiknya Anda melakukan evaluasi terhadap rencana Anda, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak.

#### **D. Tindakan Pembelajaran Membangun KWU di Sekolah**

Tindakan untuk memasukkan aspek kewirausahaan di sekolah merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Sebab kemampuan wirausaha membuat seseorang bisa mandiri bahkan dapat menciptakan lapangan kerja. Upaya untuk memasukkan aspek kewirausahaan di sekolah telah lama diusahakan. Banyak sekolah yang telah memasukan aspek kewirausahaan di sekolah sebagai acara puncak dari sebuah tema pembelajaran. Banyak acara bazar atau pasar murah yang berlangsung di sekolah. Sayangnya yang jadi pelaku bisnisnya adalah orang tua siswa. Sementara siswa hanya duduk menonton dan berbelanja, tanpa menjadi pelaku aktif. Padahal saat itu adalah saat yang tepat untuk membuat siswa mempunyai keterampilan menjual dan memasarkan sesuatu.

Jangan pisahkan aspek kewirausahaan dengan pembelajaran di sekolah karena keduanya sebenarnya saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Dalam berwirausaha seseorang butuh untuk menghitung laba dan rugi (keterampilan matematika), meyakinkan pelanggan (keterampilan bahasa), membuat promosi yang menarik dan mengatur barang dagangan agar menarik (keterampilan seni rupa), membuat perhitungan keluar masuk barang (keterampilan komputer).

Dengan menjadikan kewirausahaan ini sebagai bagian dari pembelajaran, membantu para guru untuk mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dan membuat pembelajaran di kelas menjadi bermakna. Bayangkan proses siswa memilih produk yang akan dijual. Siswa juga membuat materi promosi untuk mempromosikan barang dagangan yang telah dipilih, lambang atau logo produk yang seperti apa yang kira-kira cocok. Materi promosi tersebut bisa saja berupa sajak atau naskah

lain yang mendukung usaha agar orang mau membeli produk yang akan dijual. Bentuk promosinya pun bisa selebaran, rekaman suara bahkan rekaman video buatan mereka sendiri.

Berikut adalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru dalam mengembangkan kompetensi jiwa kewirausahaan di sekolah.

1. Rencanakan sebuah perhelatan dimana siswa dapat belajar berdagang dan berbisnis. Waktu yang dipilih bisa saat istirahat agar siswa dari kelas lain dapat berkunjung. Dapat juga dilakukan sebagai puncak dari tema.
2. Produk yang dijual sedapat mungkin yang sesuai dengan minat konsumen yang datang, jika yang datang adalah teman sebaya dapat menjualkan mainan atau makanan kecil yang sehat.
3. Mata dagangannya harus bervariasi, misalnya makanan, alat tulis, mainan atau apa saja tentunya dengan persetujuan kepala sekolah atau guru.
4. Acara pada point No 1. dapat berupa pengumpulan dana untuk korban bencana alam atau lainnya. Dengan demikian, anak didik untuk peduli terhadap sesama.
5. Membuat siswa menggunakan keterampilan matematikanya dengan belajar membuat jadwal atau menghitung takaran saat menjual sebuah produk.
6. Di kelas tingkat atas guru juga dapat memasukkan pelajaran membuat riwayat hidup atau membuat lamaran kerja, serta belajar mewawancarai dalam unit tentang karir.

Seperti dijelaskan di atas bahwa *entrepreneurship* adalah proses menjadi seorang *entrepreneur*, maka pencapaian tujuan pendidikan kewirausahaan mengisyaratkan harus berbasis aktivitas yang mengandung proses pembentukan *entrepreneur*. Henry (2005), menyebutnya sebagai *active approach* tanpa harus mengorbankan aspek teori. Sehingga Fiet (2000) menyarankan penerapan aspek teori dalam melatih kemampuan kognitif agar mahasiswa mampu mengambil keputusan yang *entrepreneurial* melalui pendekatan *theory-based*

*activities*. Heinonen (2006) lebih melihatnya sebagai perpindahan dari mengajar ke belajar dalam lingkungan semirip mungkin dengan kehidupan nyata, sehingga merupakan kombinasi antara teori dan pengalaman nyata. Seperti dikutip oleh Heinonen (2006) hal ini berarti meniru apa yang dilakukan oleh *Entrepreneur* dalam cara belajarnya, yaitu belajar di dunia nyata melalui *adaptive learning*, mereka beorientasi pada tindakan dan sebagian besar belajarnya berdasarkan pengalaman. Mereka belajar dengan melakukan *trial and error*, pemecahan masalah dan penemuan. (Patel, V.G. 1985). Karena itu itu dalam pelaksanaan pendidikan kewirausahaan, mahasiswa sudah selayaknya pihak yang memiliki kegiatan pembelajaran sedangkan guru/dosen bertindak sebagai fasilitator proses Fiet (2000) sebagai fasilitator guru dapat mendatangkan berbagai nasarasumber yang bisa membangun dan memberikan motivasi kepada para peserta didik untuk mempunyai semangat berwirausaha. Smith, A.J., (2006) orang yang memiliki semangat kewirausahaan adalah mereka yang ingin mendapatkan tuntutan pengetahuan dan keterampilan unik dan berbeda dari berbagai macam *entrepreneur*.

Untuk aspek kurikulumnya, Solomon (1991) menyarankan bahwa kurikulum yang dirancang harus memungkinkan siswa memperoleh pengalaman nyata melalui partisipasi aktif di dalam proses pembelajaran. Apabila ingin meningkatkan perilaku kewirausahaan para lulusan sebagai tujuan pendidikan kewirausahaan, maka ubahlah cara mengajar kewirausahaan dengan melibatkan teknik belajar yang sinergis.

## **E. Membangun Jiwa KWU di Sekolah dalam Konteks Karakter**

### **a. Pengertian Karakter**

Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Menurut Ki Tyasno Sudarto (2007), karakter mengacu kepada serangkaian sikap

(*attitudes*), perilaku (*behaviors*), motivasi (*motivations*), dan keterampilan (*skills*). Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia.

Magnis Suseno Frans (1987) karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun, ulet/gigih, teliti, berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, inisiatif, visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat/efisien, menghargai waktu, pengabdian/dedikatif, pengendalian diri, produktif, ramah, cinta keindahan (*estetis*), sportif, tabah, terbuka, tertib. Individu juga memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik atau unggul, dan individu juga mampu bertindak sesuai potensi dan kesadarannya tersebut. Karakteristik adalah realisasi perkembangan positif sebagai individu (intelektual, emosional, sosial, etika, dan perilaku).

Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan YME, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi (pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi dan motivasinya (perasaannya).

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Louck Kenneth (1991) pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai *the deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal*

*character development*. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (pemangku pendidikan) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga sekolah/ lingkungan. Di samping itu, pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam menyelenggarakan pendidikan harus berkarakter.

Menurut Ropke (1989), pendidikan karakter dimaknai sebagai berikut: *character education is the deliberate effort to help people understand, care about, and act upon core ethical values. When we think about the kind of character we want for our children, it is clear that we want them to be able to judge what is right, care deeply about what is right, and then do what they believe to be right, even in the face of pressure from without and temptation from within.*

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu memengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya.

Menurut Maksum (2004) pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya



bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda.

Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia, yang bersumber dari nilai moral universal (bersifat absolut) yang bersumber dari agama yang juga disebut sebagai *the golden rule*. Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak dari nilai-nilai karakter dasar tersebut. Menurut para ahli psikolog, beberapa nilai karakter dasar tersebut adalah: cinta kepada Allah dan ciptaann-Nya (alam dengan isinya), tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli, dan kerja sama, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan; baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan cinta persatuan. Pendapat lain mengatakan bahwa karakter dasar manusia terdiri atas: dapat dipercaya, rasa hormat dan perhatian, peduli, jujur, tanggung jawab; kewarganegaraan, ketulusan, berani, tekun, disiplin, visioner, adil, dan punya integritas. Penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah harus berpijak kepada nilai-nilai karakter dasar, yang selanjutnya dikembangkan menjadi nilai-nilai yang lebih banyak atau lebih tinggi (yang bersifat tidak absolut atau bersifat relatif) sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan lingkungan sekolah itu sendiri.

Dewasa ini banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pendidikan karakter pada lembaga pendidikan formal. Tuntutan tersebut didasarkan pada fenomena sosial yang berkembang, yakni meningkatnya kenakalan remaja dalam masyarakat, seperti perkelahian massal dan berbagai kasus dekadensi moral lainnya. Bahkan di kota-kota besar tertentu, gejala tersebut telah sampai pada taraf yang sangat meresahkan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan formal sebagai wadah resmi pembinaan generasi muda diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam pembentukan kepribadian peserta didik melalui peningkatan intensitas dan kualitas pendidikan karakter.

Para pakar pendidikan pada umumnya sependapat tentang pentingnya upaya peningkatan pendidikan karakter pada jalur

pendidikan formal. Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka tentang pendekatan dan modus pendidikannya. Berhubungan dengan pendekatan, sebagian pakar menyarankan penggunaan pendekatan-pendekatan pendidikan moral yang dikembangkan di negara-negara barat, seperti: pendekatan perkembangan moral kognitif, pendekatan analisis nilai, dan pendekatan klarifikasi nilai. Sebagian yang lain menyarankan penggunaan pendekatan tradisional, yakni melalui penanaman nilai-nilai sosial tertentu dalam diri peserta didik.

Berdasarkan *grand design* yang dikembangkan Kemendiknas (2010), secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Bill Drayton (2007) konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam: olahhati (*spiritual and emotional development*), olahpikir (*intellectual development*), olahraga dan kinestetik (*Physical and kinesthetic development*), dan olahrasa dan karsa (*Affective and Creativity development*). Para pakar telah mengemukakan berbagai teori tentang pendidikan moral. Menurut Hersh Richard (1980) di antara berbagai teori yang berkembang, ada enam teori yang banyak digunakan; yaitu: pendekatan pengembangan rasional, pendekatan pertimbangan, pendekatan klarifikasi nilai, pendekatan pengembangan moral kognitif, dan pendekatan perilaku sosial. Berbeda dengan klasifikasi tersebut, Kao John (1989) mengklasifikasikan berbagai teori yang berkembang menjadi tiga, yakni: pendekatan kognitif, pendekatan afektif, dan pendekatan perilaku. Klasifikasi didasarkan pada tiga unsur moralitas, yang biasa menjadi tumpuan kajian psikologi, yakni: perilaku, kognisi, dan afeksi.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik

memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.

## **2. Eksistensi Sekolah dalam Pembentukan Karakter**

Eksistensi sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam memengaruhi perubahan-perubahan suatu masyarakat. Peran dan fungsi sekolah sebagai implementasi dari tri pusat pendidikan yang menjadi kewajibannya, dapat diwujudkan dalam membangun gerakan pembelajaran masyarakat untuk mendorong terciptanya wirausahawan yang berkarakter.

Sekolah juga dapat mengembangkan model pengembangan kewirausahaan yang benar-benar berbasis pada keilmuan dan sumber daya lokal dalam kerangka sistem nilai karakter dan budaya bangsa. Membangun basis-basis kewirausahaan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka merespon perubahan global yang sangat dinamis. mengembangkan pusat kewirausahaan sekolah dengan memanfaatkan sumber daya dan nilai-nilai lokal yang ada, membantu pengembangan kebijakan kepala sekolah di lingkungan sekolahnya.

Sekolah juga dapat berperan dalam mengembangkan strategi kewira-usahaan, hal tersebut sangat diperlukan dalam membangun peradaban bangsa, terutama untuk membangun nilai-nilai karakter yang sejalan dengan kemajemukan bangsa agar keberagaman diterima sebagai sebuah kekayaan dan tidak dipertentangkan. Oleh karena itu, pengembangan kewirausahaan itu sendiri perlu berbasis pada nilai karakter dan nilai budaya yang sudah melekat dalam jati diri bangsa.

Arismunandar, (2006) lebih panjang merumuskan tentang karakter sebagai konsepsi dari apa yang diinginkan, yang memengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir tindakan. Maksum (2004) mengungkapkan bahwa definisi nilai

karakter memiliki banyak implikasi terhadap pemaknaan nilai-nilai budaya, dalam pengertian lebih spesifik implikasi yang dimaksud adalah: (1) nilai karakter merupakan konstruk yang melibatkan proses kognitif (logis dan rasional) dan proses katektik (ketertarikan atau penolakan menurut kata hati); (2) nilai karakter selalu berfungsi secara potensial, tetapi selalu tidak bermakna apabila diverbalisasi; (3) apabila hal itu berkenan dengan budaya, nilai karakter diungkapkan dengan cara yang unik oleh individu atau kelompok.

Deskripsi kewirausahaan berbasis karakter mencakup keseluruhan dimensi kegiatan proses kewirausahaan. Tujuan pendidikan karakter yang ideal adalah membentuk kepribadian manusia seutuhnya. Tujuan ini diarahkan untuk mencapai manusia seutuhnya yang berimplikasi pada pendidikan karakter sebagai keseluruhan praktik pendidikan di lingkungan satuan pendidikan. Karena itu, pendidikan nilai berarti keseluruhan dimensi pendidikan yang dilakukan melalui kegiatan pengembangan, baik kegiatan kurikulum, ekstrakurikuler, dan bentuk kegiatan belajar mengajar yang dikatakan sebagai upaya penanaman nilai dalam pendidikan.

Pendidikan nilai karakter dapat menjadi sarana penting dalam menangkal pengaruh-pengaruh negatif yang terjadi dalam kehidupan masyarakat global dewasa ini. Sejalan dengan derap laju perkembangan budaya kewirausahaan dan laju perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta arus reformasi sekarang ini, pendidikan nilai karakter semakin dirasa penting sebagai salah satu alat pengendali tercapainya tujuan pendidikan nasional secara utuh.

Kaitannya dengan nilai karakter diartikan sebagai (1) kualitas dan kuantitas reaksi terhadap diri sendiri, orang lain, maupun situasi tertentu; (2) watak, akhlak, ciri psikologis. Magnis Suseno Frans (1987), ciri-ciri psikologis yang dimiliki pelaku wirausaha pada lingkup pribadi, secara evolutif akan berkembang menjadi ciri kelompok dan lebih luas lagi menjadi ciri sosial. Ciri psikologis individu akan memberi warna dan corak identitas kelompok dan pada tatanan makro akan menjadi ciri psikologis atau karakter suatu pelaku

kewirausahaan. Pembentukan karakter suatu bangsa berproses secara dinamis sebagai suatu fenomena sosio-ekologis.

Sebagai identitas atau jati diri suatu bangsa, karakter merupakan nilai dasar perilaku yang menjadi acuan tata nilai interaksi antar manusia (*when character is lost then every thing is lost*). Bygrave (2004) secara universal berbagai karakter dirumuskan sebagai nilai hidup bersama berdasarkan pilar: kedamaian (*peace*), menghargai (*respect*), kerja sama (*cooperation*), kebebasan (*freedom*), kebahagiaan (*happinnes*), kejujuran (*honesty*), kerendahan hati (*humility*), kasih sayang (*love*), tanggung jawab (*responsibility*), kesederhanaan (*simplicity*), toleransi (*tolerance*) dan peratuan (*unity*). Filosofis karakter dikemukakan oleh Ketua Umum Majelis Hukum Taman Siswo Ki Tyasno Sudarto (2007) yaitu: (1) *mahayu hayuning saliro* (bagaimana hidup untuk meningkatkan kualitas diri); (2) *mahayu hayuning bongso* (bagaimana berjuang untuk negara dan bangsa); (3) *mahayu hayuning bawana* (bagaimana membangun kesejahteraan dunia).

Sebagai pelaku kewirausahaan, untuk mencapai tatanan Tri Rahayu tersebut, manusia harus memahami, menghayati, serta melaksanakan tugasnya sebagai manusia yang tercantum dalam Tri Satya Brata: (1) *rahayuning bawono kapurbo waksitaning manungso* (kesejahteraan dunia tergantung pada manusia yang memiliki ketajaman rasa); (2) *dharmaning manungso mahanani rahayuning negara* (tugas utama dalam menjaga keselamatan negara); (3) *rahayuning manungso dumadi karana kemanungsane* (keselamatan manusia ditentukan tata perilakunya). Nilai-nilai karakter pendekatan akademis yang dimaksudkan adalah iman, takwa, berakhlak mulia, berilmu, jujur, disiplin, demokratis, adil, bertanggung jawab, orientasi pada keunggulan, gotong royong, dll.

Dalam upaya untuk mengaktualisasikan nilai karakter, dituntut peran penting dari Kepala Sekolah dalam program peningkatan kapasitas, khususnya perannya sebagai: (1) *character builders*, yaitu membangun kembali karakter positif para pendidik dengan

menjunjung nilai-nilai moral di atas kepentingan sesaat dan menginternalisasikan pada kegiatan dan aktivitasnya sehari-hari; (2) *character enabler*, yaitu pemberdayaan secara terus menerus karakter pendidik dengan bersedia menjadi role model dari pengembangan karakter di lingkungannya; dan (3) *character enginer*, yaitu terus menerus melakukan pembelajaran pengembangan karakter yang menuntut adanya modifikasi dan rekayasa yang tepat disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Mas'ud Machffoedz (2002), program peningkatan kapasitas, khususnya Kepala Sekolah perlu berperan dalam pembangunan karakter aparatur pejabat yang profesional melalui intervensi pada tiga tingkatan, yaitu: (1) tingkat sistem, seperti kebijakan dan pengaturan kerangka kerja yang relevan; (2) tingkat kelembagaan, seperti struktur organisasi, proses pengambilan keputusan dan prosedur lain, sistem informasi manajemen dan hubungan antar organisasi lembaga; (3) tingkat individual, seperti kompetensi, keterampilan dan kualifikasi individu, pengetahuan, sikap, etika dan motivasi personil. Sekolah adalah komponen bangsa yang paling strategis posisinya dalam memainkan proses transformasi karakter dan tata nilai di tengah-tengah derasnya liberalisme era globalisasi.

Dengan mengembangkan jiwa kewirausahaan yang berbasis pada nilai karakter, maka diharapkan dapat terbentuk generasi yang kokoh idiologinya, mantap sikap mentalnya dan memiliki pondasi yang kuat dalam menghadapi serangan nilai luar yang datang bersamaan dengan derasnya arus global ketika mereka berwirausaha. Generasi yang mampu melihat secara tegas tentang apa yang baik dan apa yang buruk, hak dan kewajiban moral (akhlak), mampu mengeja-wantahkan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, serta memegang teguh sistem nilai mengenai benar dan salah yang dianut bangsanya.

Dalam konteks pengembangan kewirausahaan, fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 bab II pasal 3 sebagai

berikut: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Adanya kata-kata mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat tentunya perlu diupayakan melalui formulasi pendidikan nasional yang tepat. Indikator watak dan peradaban bermartabat itu sendiri tentunya adalah ketika terbentuk generasi yang betul-betul menghargai dan menghormati sistem nilai bangsanya pada saat menjalankan usaha atau berwirausaha. Watak dan peradaban yang bermartabat hanya dapat diraih oleh pendidikan yang betul-betul mengintegrasikan sistem nilai yang dianut bangsanya ke dalam seluruh komponen pendidikan termasuk dalam pengembangan jiwa kewirausahaan. Dengan demikian, jelaslah bahwa upaya pengembangan pendidikan kewirausahaan yang berbasis kepada nilai karakter suatu bangsa menjadi sangat penting.

Rusman Hakim (1998) terdapat beberapa pendekatan akademis dalam membangun jiwa kewirausahaan di sekolah melalui nilai karakter yang dapat dijabarkan lebih jauh oleh perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan pendidikan yang berbasis nilai karakter dan budaya: (1) pendekatan perkembangan kognitif; (2) pendekatan analisis nilai; (3) pendekatan klarifikasi nilai; (4) pendekatan pembelajaran berbuat.

Pendekatan ini dikatakan pendekatan perkembangan kognitif karena karakteristiknya memberikan penekanan pada aspek kognitif dan perkembangannya. Pendekatan ini mendorong Kepala Sekolah untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan karakter dalam membuat keputusan-keputusan. Perkembangan karakter menurut pendekatan ini dilihat sebagai perkembangan tingkat berpikir dalam membuat pertimbangan moral, dari suatu tingkat yang

lebih rendah menuju suatu tingkat yang lebih tinggi.

Tujuan yang ingin dicapai oleh pendekatan ini ada dua hal yang utama: (1) membantu Kepala Sekolah dalam membuat pertimbangan moral yang lebih kompleks berdasarkan kepada nilai karakter yang lebih tinggi; (2) mendorong Kepala Sekolah untuk mendiskusikan alasan-alasannya ketika memilih nilai karakter dan posisinya dalam membangun jiwa kewirausahaan di sekolah.

Pendekatan analisis nilai (*values analysis approach*) memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan Kepala Sekolah untuk berpikir logis, dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Jika dibandingkan dengan pendekatan perkembangan kognitif, salah satu perbedaan penting antara keduanya bahwa pendekatan analisis nilai lebih menekankan pada pembahasan masalah-masalah yang memuat nilai-nilai sosial. Adapun pendekatan perkembangan kognitif memberi penekanan pada dilema moral yang bersifat perseorangan.

### **3. Tujuan Pengembangan Karakter dalam Pertumbuhan KWU**

Terdapat dua tujuan utama pendidikan karakter menurut pendekatan ini: (1) membantu Kepala Sekolah untuk menggunakan kemampuan berpikir logis dan penemuan ilmiah dalam menganalisis masalah-masalah membangun jiwa kewirausahaan di sekolah, yang berhubungan dengan nilai karakter tertentu; (2) membantu Kepala Sekolah untuk menggunakan proses berpikir rasional dan analitik, dalam menghubungkan-hubungkan dan merumuskan konsep tentang nilai-nilai karakter mereka dalam membangun jiwa kewirausahaan di sekolah.

Pendekatan klarifikasi nilai (*values clarification approach*) memberi penekanan pada usaha membantu Kepala Sekolah dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri, untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai karakter mereka sendiri. Buchari (2006), tujuan pendidikan nilai karakter menurut pendekatan ini ada tiga: (1) membantu Kepala Sekolah untuk menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai dan



karakter orang lain; (2) membantu Kepala Sekolah, supaya mereka mampu berkamu-nikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain, berhubungan dengan nilai-nilainya sendiri; (3) membantu Kepala Sekolah, supaya mereka mampu menggunakan secara bersama-sama kemampuan berpikir rasional dan kesadaran emosional, untuk memahami perasaan, dan pola tingkah laku mereka sendiri.

Pendekatan pembelajaran berbuat (*action learning approach*) memberi penekanan pada usaha memberikan kesempatan kepada Kepala Sekolah untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Ki Tyasno Sudarto, (2007), terdapat dua tujuan utama pendidikan moral berdasarkan kepada pendekatan ini: (1) memberi kesempatan kepada Kepala Sekolah untuk melakukan perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama, berdasarkan nilai-nilai mereka sendiri; (2) mendorong Kepala Sekolah untuk melihat diri mereka sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam pergaulan dengan sesama, yang tidak memiliki kebebasan sepenuhnya.

Berdasar uraian di muka, terdapat beberapa pendekatan akademis pendidikan karakter yang dapat dijabarkan lebih jauh oleh Kepala Sekolah dalam usaha mengembangkan jiwa kewirausahaan di sekolah yang berbasis nilai karakter.

#### **4. Nilai-nilai karakter dalam membangun KWU**

- a. Nilai Religius; karakter dalam hubungannya dengan Tuhan, pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan/atau ajaran agamanya.
- b. Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri

- 1) Jujur

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri dan pihak lain.

- 2) Bertanggung jawab  
Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara, dan Tuhan YME.
- 3) Bergaya hidup sehat  
Segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan.
- 4) Disiplin  
Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
- 5) Kerja keras  
Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas (belajar/pekerjaan) dengan sebaik-baiknya.
- 6) Percaya diri  
Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya.
- 7) Berjiwa wirausaha  
Sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.
- 8) Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif  
Berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang telah dimiliki.
- 9) Mandiri  
Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

- 10) Ingin tahu  
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan didengar.
  - 11) Cinta ilmu  
Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan.
- c. Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama
- 1) Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain  
Sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik/hak diri sendiri dan orang lain serta tugas diri sendiri serta orang lain.
  - 2) Patuh pada aturan-aturan sosial  
Sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum.
  - 3) Menghargai karya dan prestasi orang lain  
Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui dan menghormati orang lain.
  - 4) Sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilakunya ke semua orang.
  - 5) Demokratis  
Cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
- d. Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan
- 1) Peduli sosial dan lingkungan  
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

- 2) Nilai kebangsaan
  - 1) Cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
    - a) Nasionalis  
Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya.
    - a) Menghargai keberagaman  
Sikap memberikan respek terhadap berbagai macam hal baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku, dan agama.

## **5. Jiwa KWU dalam Konteks Pendidikan Karakter**

### **a. Pendekatan perkembangan kognitif**

Pendekatan ini dikatakan pendekatan perkembangan kognitif karena karakteristiknya memberikan penekanan pada aspek kognitif dan perkembangannya. Pendekatan ini mendorong Kepala Sekolah untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan dalam membuat keputusan-keputusan karakter.

Perkembangan karakter menurut pendekatan ini dilihat sebagai perkembangan tingkat berpikir dalam membuat pertimbangan moral, dari suatu tingkat yang lebih rendah menuju suatu tingkat yang lebih tinggi. Pendekatan ini dikatakan pendekatan perkembangan kognitif karena karakteristiknya memberikan penekanan pada aspek kognitif dan perkembangannya. Pendekatan ini mendorong Kepala Sekolah untuk berpikir aktif tentang masalah nilai karakter dan dalam membuat keputusan-keputusan.

Perkembangan nilai karakter menurut pendekatan ini dilihat sebagai perkembangan tingkat berpikir dalam membuat pertimbangan moral, dari suatu tingkat yang lebih rendah menuju suatu tingkat yang lebih tinggi. Tujuan yang ingin dicapai oleh pendekatan ini ada dua hal

yang utama. Pertama, membantu pelaku kewirausahaan dalam membuat pertimbangan nilai karakter yang lebih kompleks berdasarkan kepada nilai yang lebih tinggi. Kedua, mendorong pelaku kewirausahaan untuk mendiskusikan alasan-alasannya ketika memilih nilai karakter dan posisinya ketika Kepala Sekolah melakukan pembinaan dalam pengembangan budaya kewirausahaan di lingkungan sekolah.

#### **b. Pendekatan analisis nilai karakter**

Pendekatan analisis nilai (*values analysis approach*) memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan Kepala Sekolah untuk berpikir logis, dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan membangun jiwa kewirausahaan di lingkungan sekolah. Jika dibandingkan dengan pendekatan perkembangan kognitif, salah satu perbedaan penting antara keduanya bahwa pendekatan analisis nilai karakter lebih menekankan pada pembahasan masalah-masalah yang memuat nilai-nilai sosial.

Adapun pendekatan perkembangan kognitif memberi penekanan pada dilema moral yang bersifat perseorangan. Terdapat dua tujuan utama pendidikan nilai karakter menurut pendekatan ini; (1) membantu Kepala Sekolah untuk menggunakan kemampuan berpikir logis dan penemuan ilmiah dalam menganalisis masalah-masalah membangun jiwa kewirausahaan, yang berhubungan dengan nilai karakter tertentu; (2) membantu Kepala Sekolah untuk menggunakan proses berpikir rasional dan analitik, dalam menghubungkan dan merumuskan konsep tentang nilai-nilai karakter.

#### **c. Pendekatan klarifikasi nilai karakter**

Pendekatan klarifikasi nilai (*values clarification approach*) memberi penekanan pada usaha membantu Kepala Sekolah dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri, untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri.

Tujuan pendidikan nilai karakter menurut pendekatan ini ada tiga: (1) membantu Kepala Sekolah untuk menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta karakter orang lain; (2) membantu

Kepala Sekolah, supaya mereka mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain, berhubungan dengan karakteristiknya sendiri; (3) membantu Kepala Sekolah, supaya mereka mampu menggunakan secara bersama-sama kemampuan berpikir rasional dan kesadaran emosional, untuk memahami perasaan, nilai-nilai karakter.

#### **d. Pendekatan pembelajaran berbuat**

Pendekatan pembelajaran berbuat (*action learning approach*) memberi penekanan pada usaha memberikan kesempatan kepada Kepala Sekolah untuk melakukan perbuatan-perbuatan nilai karakter, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu kelompok wirausaha.

Terdapat dua tujuan utama pendidikan nilai karakter berdasarkan kepada pendekatan ini. Pertama; memberi kesempatan kepada Kepala Sekolah untuk melakukan perbuatan nilai karakter, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama, berdasarkan nilai-nilai karakter mereka sendiri; Kedua, mendorong Kepala Sekolah untuk melihat diri mereka sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam pergaulan dengan sesama, yang tidak memiliki kebebasan sepenuhnya, melainkan sebagai warga dari suatu masyarakat, yang harus mengambil bagian dalam suatu proses demokrasi.

#### **F. Unsur yang Membentuk Kewirausahaan Kepala Sekolah**

Pendapat Rusman Hakim (1998), ada empat unsur yang membentuk pola dasar kewirausahaan yang benar dan luhur, yaitu: (1) sikap mental, (2) kepemimpinan, (3) ketatalaksanaan dan (4) keterampilan. Dengan demikian, wirausahawan harus memiliki ciri atau sifat tertentu sehingga dapat disebut wirausahawan. Secara umum, seorang wirausahawan perlu memiliki ciri percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, berani mengambil risiko, memiliki jiwa kepemimpinan, orisinalitas dan berorientasi masa depan. Dengan demikian, wirausaha dalam konteks persekolahan adalah seorang pembuat keputusan yang membantu terbentuknya sistem kegiatan suatu lembaga yang bebas dari keterikatan lembaga lain.

Sebagian besar pendorong perubahan, inovasi dan kemajuan dinamika kegiatan di sekolah akan datang dari kepala sekolah yang memiliki jiwa wirausaha. Wirausaha adalah orang yang mempunyai tenaga dan keinginan untuk terlibat dalam petualangan inovatif. Wirausaha juga memiliki kemauan menerima tanggung jawab pribadi dalam mewujudkan keinginan yang dipilih.

Seorang wirausaha memiliki daya inovasi yang tinggi, dimana dalam proses inovasinya menunjukkan cara-cara baru yang lebih baik dalam mengerjakan pekerjaan. Dalam kaitannya dengan tugas kepala sekolah, kebanyakan di antaranya tidak menyadari keragaman dan keluasan bidang yang menentukan tindakannya guna memajukan sekolah. Mencapai kesempurnaan dalam melakukan rencana merupakan sesuatu yang ideal dalam mengejar tujuan, tetapi bukan merupakan sasaran yang realistik bagi kebanyakan kepala sekolah yang berjiwa wirausaha. Bagi kepala sekolah yang realistik hasil yang dapat diterima lebih penting daripada hasil yang sempurna. Setiap orang termasuk kepala sekolah yang kreatif dan inovatif adalah individu yang unik dan spesifik.

Kepala sekolah yang memiliki jiwa wirausaha pada umumnya mempunyai tujuan dan pengharapan tertentu yang dijabarkan dalam visi, misi, tujuan dan rencana strategis yang realistik. Realistik berarti tujuan disesuaikan dengan sumber daya pendukung yang dimiliki. Semakin jelas tujuan yang ditetapkan semakin besar peluang untuk dapat meraihnya.

Dengan demikian, kepala sekolah yang berjiwa wirausaha harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur dalam mengembangkan sekolah. Untuk mengetahui apakah tujuan tersebut dapat dicapai maka visi, misi, tujuan, dan sasarannya dikembangkan ke dalam indikator yang lebih terinci dan terukur untuk masing-masing aspek atau dimensi. Dari indikator tersebut juga dapat dikembangkan menjadi program dan sub-program yang lebih memudahkan implementasinya dalam pengembangan sekolah.

Maksum dan Luluk, YR. (2004), untuk menjadi kepala sekolah yang berjiwa wirausaha harus menerapkan beberapa hal berikut: (1) berpikir kreatif-inovatif, (2) mampu membaca arah perkembangan dunia pendidikan, (3) dapat menunjukkan nilai lebih dari beberapa atau elemen sistem persekolahan yang dimiliki, (4) perlu menumbuhkan kerja sama tim, sikap kepemimpinan, kebersamaan dan hubungan yang solid dengan segenap warga sekolah, (5) mampu membangun pendekatan personal yang baik dengan lingkungan sekitar dan tidak cepat berpuas diri dengan apa yang telah diraih, (6) selalu meng-*upgrade* ilmu pengetahuan yang dimiliki dan teknologi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas ilmu amaliah dan amal ilmiahnya, (7) bisa menjawab tantangan masa depan dengan bercermin pada masa lalu dan masa kini agar mampu mengamalkan konsep manajemen dan teknologi informasi.

Sementara itu, Patel, VG., (1985) menggambarkan delapan anak tangga untuk mencapai puncak karir. Delapan anak tangga ini dapat pula digunakan oleh seorang kepala sekolah selaku wirausaha dalam mengembangkan profesinya. Kedelapan anak kepala sekolah selaku wirausaha dalam mengembangkan profesinya. Kedelapan anak tangga yang dimaksud adalah: (1) mau bekerja keras. (2) bekerja sama dengan orang lain. (3) penampilan yang baik. (4) percaya diri. (5) pandai membuat keputusan. (6) mau menambah ilmu pengetahuan. (7) ambisi untuk maju (8) pandai berkomunikasi.

Kemampuan kepala sekolah yang berjiwa wirausaha dalam berinovasi sangat menentukan keberhasilan sekolah yang dipimpinnya karena kepala sekolah tersebut mampu menyikapi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat akan jasa pendidikan bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, jika Anda ingin sukses memimpin sekolah jadilah individu yang kreatif dan inovatif dalam mewujudkan potensi kreativitas yang dimiliki dalam bentuk inovasi yang bernilai.



### **G. Dimensi Kepala Sekolah dalam Membangun Jiwa KWU**

Depdiknas mengeluarkan Permendiknas No. 13 tahun 2007, tentang standar kepala sekolah permendiknas yang baru tersebut dalam rangka pelaksanaan pasal 38 ayat (5) PP 19/2005 tentang standar nasional pendidikan. Ada 5 dimensi kompetensi kepala sekolah yang diatur dalam Permendiknas tersebut, yaitu: kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. Kami akan mencoba mencermati dan mengurai kompetensi ketiga dari lima dimensi kompetensi kepala sekolah/madrasah yaitu kompetensi kewirausahaan. Lima dimensi kompetensi kewirausahaan yang tertuang dalam peraturan tersebut meliputi:

1. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah.
2. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif.
3. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
4. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala.
5. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah sebagai sumber belajar siswa.

Banyak referensi dan literatur yang membahas pemahaman tentang kewira-usahaan. Dikemukakan Suyana (2003) melalui bukunya yang berjudul kewirausahaan, pedoman praktis, kiat dan proses menuju sukses. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*creatif new and different*) melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang. Bagaimana membangun jiwa kewirausahaan (*interpreneurship*) dapat diuraikan bahwa memahami kewirausahaan maka kepala sekolah harus memahami terlebih dahulu bagaimana muatan konsep kewirausahaan tersebut secara praktis dan menerapkannya secara teknis.

Membangun jiwa kewirausahaan haruslah dimulai dengan kemauan kreatif dan inovatif kepala sekolah untuk mencapai suatu tujuan pada sekolah yang dipimpinnya. Banyak orang yang berhasil dan sukses karena memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Hal tersebut penting untuk dipahami mengingat selama ini dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak orang yang menafsirkan dan memandang bahwa kewirausahaan identik dengan apa yang dimiliki dan dilakukan oleh “usahawan” atau “wiraswasta”. Padahal jiwa kewirausahaan (*interpreneurship*) tidak hanya dimiliki oleh usahawan akan tetapi dapat dimiliki oleh setiap orang yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif baik kalangan pemerintah, mahasiswa, dosen, guru termasuk kepala sekolah.

Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang (*thinking new thing*). Sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang (*doing new thing*). Jadi kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu yang baru dan berbeda. Sesuatu yang baru dan berbeda tersebut dapat dalam bentuk prestasi sekolah, prestasi guru terlebih prestasi peserta didik, dan bisa dalam bentuk proses pembelajaran seperti ide, metode dan cara. Sesuatu yang baru dan berbeda yang diciptakan melalui proses berpikir kreatif dan bertindak inovatif merupakan nilai tambah (*value added*) dan merupakan keunggulan yang dimiliki sekolah yang dipimpinnya. Nilai tambah yang berharga adalah sumber peluang bagi kepala sekolah. Ide kreatif akan muncul apabila kepala sekolah “*look at old and think something new or different*”.

Untuk mendorong berkembangnya jiwa kewirausahaan, maka kepala sekolah haruslah memiliki kompetensi. Kompetensi tersebut merupakan syarat utama bagi kepala sekolah yang ingin melakukan proses perjalanan kreativitas berpikir dan inovasi tentang keinginan yang diharapkannya untuk kemajuan sekolah. Kompetensi adalah seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dan kualitas

individu yang meliputi sikap, motivasi, nilai serta tingkah laku yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan/kegiatan. Mas'ud Machfoedz (2004) beliau memberikan pemahaman wirausaha tidak hanya memerlukan pengetahuan tapi juga keterampilan. Keterampilan tersebut diantaranya keterampilan manajerial (*managerial skill*), keterampilan konseptual (*conceptual skill*) dan keterampilan memahami, mengerti, berkomunikasi dan berelasi (*human skill*) dan keterampilan merumuskan masalah dan mengambil keputusan (*desicion making skill*), keterampilan mengatur dan menggunakan waktu (*time management skill*) dan keterampilan teknik lainnya secara spesifik.

Ide berwirausaha akan menjadi peluang apabila kepala sekolah bersedia melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus menerus melalui proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda, mengamati pintu peluang, menganalisis proses secara mendalam dan memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Oleh karenanya maka kepala sekolah harus memiliki ciri dalam dirinya, yaitu percaya diri (*self confidence*), berorientasi pada tugas dan hasil, keberanian mengambil risiko, berorientasi pada masa depan dan orisinal. Ciri-ciri tersebut perlu dikembangkan secara lebih detail dan terperinci untuk kemajuan sekolah. Bahwa keberhasilan kepala sekolah memimpin sekolah didasari atas sikap dan persepsinya sendiri tentang apa yang dikerjakannya. Jika sikap dan persepsinya positif tentang apa yang dilakukannya, maka dengan sendirinya motivasi dan kreativitas serta inovasi akan muncul seiring dengan harapan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

#### **H. Kepala Sekolah Sebagai Pelaku Wirausaha**

Sebagai bidang yang relatif baru berkembang, masih terdapat sejumlah pendapat yang tidak seragam tentang maksud kewirausahaan sosial dan siapa saja yang dapat disebut sebagai wirausaha sosial. Berbagai pendapat atau rumusan yang sudah ada cenderung menggambarkan suatu jenis wirausaha sosial yang unggul beserta karakteristik peran dan kegiatannya. Berdasarkan analisis adanya

berbagai jenis wirausaha bisnis, dan ada pula sejumlah jenis wirausaha sosial. Dari sejumlah rumusan kewirausahaan sosial yang telah didefinisikan oleh organisasi dan ahli yang menggumuli bidang ini. Misalnya, Ashoka Fellows, yang didirikan oleh Bill Drayton (2008), menyebutkan karakteristik kegiatan wirausaha sosial sebagai berikut:

1. Tugas wirausaha sosial ialah mengenali adanya kemacetan atau kemandegan dalam kehidupan masyarakat dan menyediakan jalan keluar dari kemacetan atau kemandegan itu. Ia menemukan apa yang tidak berfungsi, memecahkan masalah dengan mengubah sistemnya, menyebarluaskan pemecahannya, dan meyakinkan seluruh masyarakat untuk berani melakukan perubahan.
2. Wirausaha sosial tidak puas hanya memberi “ikan” atau mengajarkan cara “memancing ikan”. Ia tidak akan diam hingga “industri perikanan” pun berubah.

Dengan karakteristik tersebut maka sangat relevan bahwa kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru adalah sebagai wirausahawan sosial sejati. Kepala sekolah harus dapat mengenali kemacetan atau kemandegan sekolah yang dipimpinnya dan bagaimana mencari jalan keluar dari kemacetan atau kemandegan tersebut. Kepala sekolah harus dapat menemukan apa yang tidak berfungsi dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi sekolah. Kepala sekolah harus dapat meyakinkan guru dan peserta didik untuk berani melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pada prestasi yang lebih tinggi kepala sekolah harus dapat membangun mata rantai sekolah menjadi sistem yang seimbang (*link and match*) antara wali peserta didik, guru, peserta didik, dan pengguna lulusan sekolah.

### **I. Manfaat Kewirausahaan Bagi Kepala Sekolah**

Depdiknas (2002), manfaat pengembangan kewirausahaan bagi Kepala Sekolah adalah: (1) mampu menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan, (2) bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif, (3) memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai kesuksesan dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi sebagai pemimpin sekolah, (4) pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala sekolah, (5) memiliki naluri kewirausahaan sebagai sumber belajar siswa, dan (6) untuk menjadi teladan bagi para guru khususnya mengenai kompetensi kewirausahaan. Kepala sekolah sebagai seorang wirausaha yang sukses harus memiliki tiga kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sifat kewirausahaan. Ketiga kompetensi tersebut saling berkaitan.

Pengembangan pengetahuan adalah kumpulan informasi yang disimpan di otak dan dapat dipanggil jika dibutuhkan. Keterampilan adalah kemampuan menerapkan pengetahuan. Sifat adalah sekumpulan kualitas karakter yang membentuk kepribadian seseorang. Seseorang yang tidak memiliki ketiga kompetensi tersebut akan gagal sebagai wirausaha yang sukses. Keterampilan-keterampilan (*skills*) yang dibutuhkan oleh seorang wirausaha menurut Hisrich & Patel, V.G. (2005) adalah keterampilan teknis, manajemen bisnis, dan jiwa kewirausahaan personal.

Keterampilan teknis meliputi: mampu menulis, berbicara, mendengar, memantau lingkungan, teknik bisnis, teknologi, mengorganisasi, membangun jaringan, gaya manajemen, melatih, bekerja sama dalam kerja tim (*teamwork*). Manajemen bisnis meliputi: perencanaan bisnis dan menetapkan tujuan bisnis, pengambilan keputusan, hubungan manusiawi, pemasaran, keuangan, pembukuan, manajemen, negosiasi, dan mengelola perubahan. Jiwa wirausaha personal meliputi: disiplin (pengendalian diri), berani mengambil risiko diperhitungkan, inovatif, berorientasi perubahan, kerja keras, pemimpin visioner, dan mampu mengelola perubahan.

Contoh tokoh-tokoh wirausaha yang sukses di bidang pendidikan antara lain adalah Raden Ajeng Kartini dengan Sekolah Kartini, Ki Hajar Dewantoro dengan Taman Siswa, Ciputra dengan Universitas Entrepreneurship, pendiri sekolah Global Jaya.

### J. Pendorong Tumbuhnya Kewirausahaan di Sekolah

Dikemukakan oleh Thomas Zimmerer (2001) ada delapan faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan antara lain sebagai berikut:

1. Wirausahawan sebagai pahlawan.

Faktor di atas sangat mendorong setiap orang untuk mencoba mempunyai usaha sendiri karena adanya sikap masyarakat bahwa seorang wirausaha dianggap sebagai pahlawan serta sebagai model untuk diikuti. Sehingga status inilah yang mendorong seseorang memulai usaha sendiri.

2. Pendidikan kewirausahaan.

Pendidikan kewirausahaan sangat populer di banyak akademi dan universitas di Amerika. Banyak mahasiswa semakin takut dengan berkurangnya kesempatan kerja yang tersedia sehingga mendorong untuk belajar kewirausahaan dengan tujuan setelah selesai kuliah dapat membuka usaha sendiri.

3. Faktor ekonomi dan kependudukan.

Dari segi demografi sebagian besar *entrepreneur* memulai bisnis antara umur 25 tahun sampai dengan 39 tahun. Hal ini didukung oleh komposisi jumlah penduduk di suatu negara, sebagian besar pada kisaran umur di atas. Lebih lagi, banyak orang menyadari bahwa dalam kewirausahaan tidak ada pembatasan baik dalam hal umur, jenis kelamin, ras, latar belakang ekonomi atau apapun juga dalam mencapai sukses dengan memiliki bisnis sendiri.

4. Pergeseran ke ekonomi jasa

Di Amerika pada tahun 2000 sektor jasa menghasilkan 92% pekerjaan dan 85% GDP negara tersebut. Karena sektor jasa relatif rendah investasi awalnya sehingga untuk menjadi populer di kalangan para wirausaha dan mendorong wirausaha untuk mencoba memulai usaha sendiri di bidang jasa.

5. Kemajuan teknologi.

Dengan bantuan mesin bisnis modern seperti komputer, laptop, notebook, mesin fax, printer laser, printer color, mesin penjawab telpon, seseorang dapat bekerja di rumah seperti layaknya bisnis

besar. Pada zaman dulu, tingginya biaya teknologi membuat bisnis kecil tidak mungkin bersaing dengan bisnis besar yang mampu membeli alat-alat tersebut. Sekarang komputer dan alat komunikasi tersebut harganya berada dalam jangkauan bisnis kecil.

6. Gaya hidup bebas.

Kewirausahaan sesuai dengan keinginan gaya hidup orang Amerika yang menyukai kebebasan dan kemandirian yaitu ingin bebas memilih tempat mereka tinggal dan jam kerja yang mereka sukai. Meskipun keamanan keuangan tetap merupakan sasaran penting bagi hampir semua wirausahawan, tetapi banyak prioritas lain seperti lebih banyak waktu untuk keluarga dan teman, lebih banyak waktu senggang dan lebih besar kemampuan mengendalikan stress hubungan dengan kerja. Dalam penelitian yang telah dilakukan bahwa 77% orang dewasa yang diteliti, menetapkan penggunaan lebih banyak waktu dengan keluarga dan teman sebagai prioritas pertama. Menghasilkan uang berada pada urutan kelima dan membelanjakan uang untuk membeli barang berada pada urutan terakhir.

7. Perdagangan on-line

Perdagangan on-line tumbuh cepat sekali, sehingga menciptakan perdagangan banyak kesempatan bagi wirausahawan berbasis internet atau website. Data menunjukkan bahwa 47% bisnis kecil melakukan akses internet sedangkan 35% sudah mempunyai website sendiri. Faktor ini juga mendorong pertumbuhan wirausahawan di beberapa negara.

8. Peluang internasional.

Dalam mencari pelanggan, bisnis kecil kini tidak lagi dibatasi dalam ruang lingkup Negara sendiri. Pergeseran dalam ekonomi global yang dramatis telah membuka pintu ke peluang bisnis yang luar biasa bagi para wirausahawan yang bersedia menggapai seluruh dunia. Kejadian dunia seperti runtuhnya tembok Berlin, revolusi di negara-negara baltik Unisoviet dan hilangnya hambatan perdagangan sebagai hasil perjanjian Masyarakat Ekonomi Eropa,

telah membuka sebagian besar pasar dunia bagi para wirausahawan. Peluang Internasional akan terus berlanjut dan tumbuh dengan cepat pada abad ke 21.

Faktor yang mendukung pembahasan ini adalah faktor pendidikan kewira-usahaan. Di luar negeri banyak universitas mempunyai suatu program khusus dalam mempelajari bidang kewirausahaan, sehingga ada suatu *embrio young entrepreneur*. Peranan lembaga pendidikan hanya sekedar menjadi fasilitator dalam memotivasi, mengarahkan dan penyedia sarana prasarana dalam mempersiapkan sarjana yang mempunyai motivasi kuat, keberanian, kemampuan serta karakter pendukung dalam mendirikan bisnis baru.

Peranan lembaga pendidikan dalam memotivasi peserta didiknya menjadi wirausahawan muda sangatlah penting. Hal ini dilihat dari beberapa pembahasan bidang kewirausahaan yang telah dikemukakan di atas. Masalahnya adalah bagaimana pihak sekolah mampu melakukan peranannya dengan benar dan mampu menghasilkan peserta didiknya yang siap berwirausaha. Peranan pihak sekolah dalam menyediakan suatu wadah yang memberikan kesempatan memulai usaha sejak masa sekolah sangatlah penting, sesuai dengan pendapat Thomas Zimmerer (2002) bahwa memulai bisnis, bisa pada saat masa sekolah berjalan, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana peranan sekolah dalam hal memotivasi peserta didik untuk tergabung dalam wadah tersebut. Karena tanpa memberikan gambaran secara jelas apa saja manfaat berwirausaha, maka besar kemungkinan para siswa tidak ada yang termotivasi untuk memperdalam keterampilan berbisnisnya.

Oleh karena itu, pihak sekolah juga perlu mengetahui faktor yang paling dominan memotivasi peserta didik dalam berwirausaha. Hasil penelitian mengatakan bahwa ada tiga faktor paling dominan dalam memotivasi peserta didik menjadi wirausahawan yaitu faktor kesempatan, faktor kebebasan, faktor kepuasan hidup. Ketiga faktor itulah yang membuat mereka menjadi wirausahawan. Penelitian ini sangat membantu pihak sekolah dalam memberikan informasi kepada peserta didik, bahwa menjadi wirausahawan akan mendapatkan



beberapa kesempatan, kebebasan dan kepuasan hidup. Proses penyampaian ini harus sering dilakukan sehingga para siswa semakin termotivasi untuk memulai berwirausaha. Sebab banyak peserta didik merasa takut menghadapi risiko bisnis yang mungkin muncul membuat mereka membatalkan rencana bisnis sejak dini.

1. Tugas wirausaha sosial ialah mengenali adanya kemacetan atau kemandegan dalam kehidupan masyarakat dan menyediakan jalan keluar dari kemacetan atau kemandegan itu. Ia menemukan apa yang tidak berfungsi, memecahkan masalah dengan mengubah sistemnya, menyebarkan pemecahannya, dan meyakinkan seluruh masyarakat untuk berani melakukan perubahan.
2. Wirausaha sosial tidak puas hanya memberi ikan atau mengajarkan cara memancing ikan. Ia tidak akan diam hingga industri perikanan pun berubah.

Dengan karakteristik tersebut maka sangat relevan bahwa kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru adalah sebagai wirausahawan sosial sejati. Kepala sekolah harus dapat mengenali kemacetan atau kemandegan sekolah yang dipimpinnya dan bagaimana mencari jalan keluar dari kemacetan atau kemandegan tersebut.

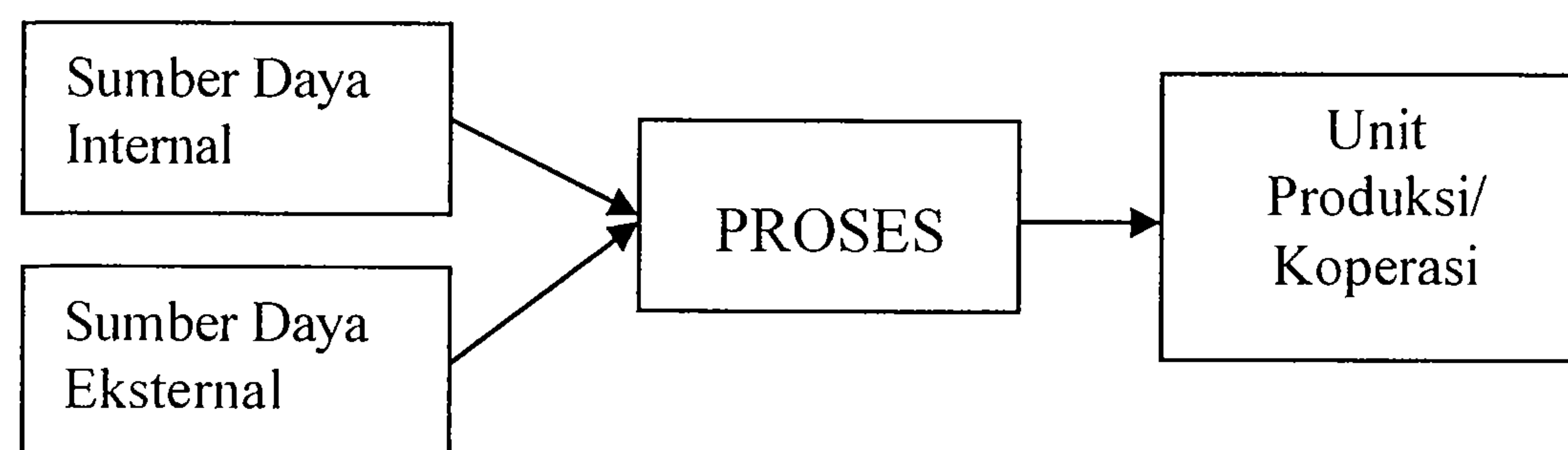
Kepala sekolah harus dapat menemukan apa yang tidak berfungsi dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi sekolah. Kepala sekolah harus dapat meyakinkan guru dan peserta didik untuk berani melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pada prestasi yang lebih tinggi kepala sekolah harus dapat membangun mata rantai sekolah menjadi sistem yang seimbang (*link and match*) antara wali peserta didik, guru, peserta didik, dan pengguna lulusan sekolah.

#### **K. Kiat Menggalang Sumber Daya**

Penggalangan sumber daya sekolah didasarkan atas tuntutan kebutuhan kemandirian sekolah yang tertuang dalam MPMBS. Smith, A.J., (2006), ada beragam cara yang dapat dilakukan untuk menggalang sumber daya yang dimiliki dalam konteks manajemen, di antaranya menggunakan pendekatan analisis SWOT yang mana dasar

penggalangannya dimulai dengan mendeteksi Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weaknesses*).

Kedua hal ini dipersyaratkan untuk faktor internal, kemudian untuk faktor eksternal dideteksi dengan Peluang (*Opportunity*) dan Tantangan/Hambatan (*Threath*). Adapula yang menerapkan pendekatan analisis model *Balanced Score Card* (BSC) yang memberikan skor yang dianggap mendukung misi dan strategi. Kiat-kiat penggalangan sumber daya sekolah dapat disajikan pada skema sebagai berikut:



(Sumber: Smith, A.J., (2006), Modifikasi Ibnu Syamsi, 2013)

Sumber daya internal adalah sumber daya yang ada di dalam lingkungan sekolah baik berupa sumber daya manusia, barang dan jasa yang dapat dioptimalkan dalam membantu pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Sumber daya eksternal adalah sumber daya yang didapat atau diestimasi diperoleh dari luar sekolah.

### 1. Kiat Penggalangan Sumber Daya Internal

Siswa dipandang sebagai aset sekolah, artinya siswa bukan sebagai objek pungutan biaya penyelenggaraan pendidikan semata tetapi sebagai sumber daya yang dapat bermanfaat baik secara ekonomis maupun non-ekonomis. Untuk mengawali kegiatan siswa sebagai aset diperlukan data siswa termasuk hobi serta bakat dan minatnya.

Sebagai ilustrasi apabila sekolah memiliki siswa berjumlah 50 orang, persiswa memiliki rata-rata 4 orang dalam satu keluarga (ayah, ibu, adik/kakak dan siswa itu sendiri) maka ada 200 orang yang mempunyai hubungan dengan sekolah. Dari 200 orang tersebut dapat dilakukan penelitian atas suatu obyek sosial yang ada di masyarakat bekerja sama dengan lembaga terkait yang membutuhkan penyebaran instrumen atau kajian dari penelitian tersebut. Sekolah dapat mengajukan proposal, dalam hal ini apabila dihubungkan dengan strategi pembelajaran maka akan memperoleh keuntungan dan manfaat bagi sekolah.

Guru dan staf sebagai aset sekolah. Paradigma lama yang memandang guru dan staf sekolah sebagai beban biaya penyelenggaraan pendidikan di sekolah sebaiknya mulai diubah, karena di antara para guru banyak yang memiliki keahlian dan bakat tertentu yang dapat "dijual" sekiranya bakat terpendam tersebut dikembangkan melalui wadah yang sesuai.

Tanah dan gedung sebagai aset sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang memiliki lahan luas di daerah-daerah dapat bekerja sama dengan dinas pertanian untuk memperoleh bibit atau bimbingan dan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan tanahnya, atau bekerja sama dan mengadakan MoU dengan pihak swasta untuk memberdayakan tanah tersebut.

## **2. Kiat Penggalangan Sumber Daya Eksternal Sekolah**

Sumber daya eksternal sekolah sebenarnya tidak terbatas jumlah dan tempatnya karena dengan teknologi internet sekolah dapat menjalin hubungan dengan siapa saja di dalam dan di luar negeri. Oleh karena itu, sekolah harus berani mengubah karakternya yang tidak hanya sebagai satuan penyelenggara pendidikan semata tetapi juga memiliki jiwa wirausaha yang selaku kreatif dan inovatif, ulet, proaktif serta memiliki perangkat yang dapat diandalkan untuk go *public*. Dalam mengajak pihak lain bekerja sama sebaiknya memiliki kiat sebagai berikut:

Pertama, AIDA singkatan dari *Attractive, Interest, Desire, Action*. Atraktif berarti ada yang diunggulkan oleh sekolah untuk menarik lembaga lain atau mengadakan kerja sama dengan sekolah. Setelah lembaga lain tertarik akan keunggulan yang dimiliki sekolah maka sekolah harus mampu membangkitkan keinginan yang cenderung pada adanya kepentingan atau minat lembaga eksternal tersebut untuk bekerja sama dengan sekolah. Tahapan berikutnya, keunggulan sekolah harus mampu membangkitkan hasrat/gairah atau semangat untuk terjadinya kerja sama yang saling menguntungkan. Terakhir, sekolah harus proaktif dalam kerja sama ini.

Kedua, pada saat memikirkan atau menggagas keunggulan sekolah yang bisa ditawarkan kepada pihak lain dapat mengklasifikasikan kebutuhan pihak lain dalam tiga tingkatan, yaitu NEED artinya kebutuhan pihak lain yang tidak dapat ditunda-tunda. WANT adalah keinginan yang pemenuhannya dapat ditunda sementara. Sedangkan WISHES adalah harapan yang tentunya masih memerlukan waktu lama untuk dipenuhi. Berdasarkan klasifikasi tersebut dapat diterapkan strategi pemasaran untuk mengubah *want dan wishes* menjadi *need*.

Ketiga, mempelajari peluang karena sesungguhnya peluang tidak harus ditunggu kedatangannya tetapi peluang dapat diciptakan dengan mengamati beberapa hal:

- a. Kalender kegiatan daerah/provinsi, kalender hari besar baik nasional maupun keagamaan yang dapat dimanfaatkan menjadi peluang yang dapat dipersiapkan sebelumnya.
- b. Mengamati dan memikirkan bagian dari tubuh kita mulai ujung rambut sampai ujung kaki, peluang apa saja yang dapat muncul menjadi kegiatan bisnis.
- c. Mengamati daur hidup dari mulai sebelum lahir sampai sesudah mati, peluang apa saja yang dapat dijadikan kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan.

Keempat, mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya melalui warga sekolah dari media cetak maupun elektronik,

kemudian dikelompokkan dan dijadikan beberapa alternatif pilihan, setelah mengerucut berdasarkan ketersediaan sumber daya yang ada di sekolah dipilih yang paling mungkin dilaksanakan.

Kelima, *just do it*, sekecil apapun gagasan yang penting terwujud, jangan terlalu rumit memikirkannya, karena gagasan besar selama hanya menjadi gagasan saja adalah "sebatas mimpi yang indah."

Selanjutnya perlu dibentuk unit produksi di sekolah yang berkedudukan secara hukum yang kepengurusannya terdiri atas Ketua Yayasan, Bendahara dan Sekretaris Yayasan. Pada tataran operasional diangkat personalia sesuai kebutuhan seperti Manajer, Bendahara, Sekretaris, dan Staf Keuangan serta Pemasar. Kegiatan unit produksi biasanya memaksimalkan pemanfaatan sumber daya sekolah yang dihubungkan dengan materi pelajaran praktik yang ada di sekolah.

Nama organisasi sebaiknya memenuhi kriteria yakni mudah diingat dan mendorong semangat untuk mencapai kesuksesan. Misalnya "Mbok Sabar", bahasa Yogyakarta yang berarti seorang ibu yang ulet dengan dilandasi tidak mudah menyerah. Nama ini meskipun domestik tapi terkesan dari mancanegara karena terucap "mbok sabar". Visi perlu dibuat sebagai arah organisasi dan seharusnya dibuat untuk diketahui oleh pelanggan dan warga sekolah. Misi perlu dinyatakan seluruh warga sekolah sampai pada tingkatan bahwa misi unit produksi adalah komitmen bersama. *Value* adalah kesepakatan nilai-nilai perilaku yang dianut dalam menjalankan roda unit produksi.

# BAB V

## KESEMPATAN BERWIRAUSAHA BAGI PENYANDANG DIFABEL

### A. Program Kewirausahaan untuk Penyandang Difabel

Tak ada manusia yang terlahir sempurna, walaupun kita terlahir secara lengkap dengan semua organ tubuh yang berfungsi dengan baik, kitapun pasti memiliki kekurangan. Demikian juga dengan mereka yang terlahir tidak lengkap dan memiliki salah satu organ tubuh yang tidak dapat berfungsi dengan baik atau sering disebut penyandang difabel tetap memiliki kelebihan masing-masing.

Pendapat Bandi Delphie (2009) difabel berasal dari istilah *different ability* yang kini digunakan untuk menggantikan kata cacat yang berkonotasi negatif menjadi berkebutuhan khusus. Difabel ini baik yang terjadi sejak lahir ataupun karena kecelakaan dan akibat mengidap suatu penyakit tertentu. Tak seorangpun yang menginginkan terlahir cacat ataupun menjadi difabel karena kecelakaan ataupun karena mengidap penyakit tertentu. Tetapi ketika hal itu sudah terjadi tentu sikap dan tindakan yang tepat untuk mengatasinya sangatlah diperlukan.

Walaupun Indonesia memiliki UU No. 4 tahun 1997 tentang penyandang difabel/cacat namun dalam pelaksanaannya masih banyak yang belum terealisasi. Paling tidak inilah yang diserukan oleh sebagian kaum difabel dalam rangka memperingati hari difabel internasional pada setiap tanggal 3 Desember, misalnya dengan cara ritual melepaskan burung sebagai simbol kebebasan dan kesamaan hak sebagai warga negara.

Pengamatan penulis di masyarakat, masih adanya kaum difabel yang merasa terdiskriminasi baik dibidang pendidikan, penyediaan sarana publik maupun dalam mencari pekerjaan. Seperti diungkapkan dalam penelitian Haryanto (2010) masih banyak kaum difabel mengalami diskriminasi dalam mencari pekerjaan karena banyak perusahaan yang menolak mereka. Hal tersebut sangat disesalkan karena mereka seharusnya diberi kesempatan yang sama dengan kita yang bukan difabel.

Penyandang difabel harus mendapat dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah dengan memberikan peraturan tentang harus adanya kuota kaum difabel di setiap perusahaan dan juga perusahaan wajib memberikan pelatihan kepada mereka agar mereka dapat mengembangkan potensi dan keahlian mereka dengan baik seperti yang dilakukan oleh sebuah perusahaan konveksi pakaian di kota Yogyakarta yang memperkerjakan penyandang difabel jenis tunarungu wicara.

Akan tetapi menurut pendapat penulis kaum difabel bukan hanya diberi kesempatan untuk dapat bekerja di perusahaan, tetapi didorong untuk menjadi wira usaha karena lapangan kerja yang tersedia tentunya belum dapat menampung semua kaum difabel yang membutuhkan pekerjaan. Untuk kepentingan tersebut perlu adanya pendidikan kewirausahaan bagi penyandang difabel. Pendapat penulis ada dua hal yang menjadi dasar pertimbangan perlunya pendidikan kewirausahaan bagi penyandang difabel yaitu: (1) saat ini mencari pekerjaan sangat sulit, walaupun mereka mendapat kuota, mereka juga masih harus berkompetisi dengan difabel lainnya untuk mendapat pekerjaan yang terbatas itu dan kesulitan juga dialami oleh orang yang tidak difabel.

Lapangan kerja yang tersedia belum tentu dapat menyerap semua kaum difabel yang membutuhkan pekerjaan. Di samping itu juga masih banyak perusahaan yang belum mempekerjakan kaum difabel di perusahaan mereka. Penelitian Ibnu Syamsi (2011) walaupun pemerintah sudah berusaha menjembatani antara kaum difabel dan perusahaan tetapi masih belum efektif, contohnya di kota Bandung baru 5 Hotel yang mempekerjakan kaum difabel. Menurut data di tahun 2011 untuk wilayah kota Solo lebih kurang 85% kaum difabel yang tidak mempunyai pekerjaan, dan kerja serabutan sekitar 60% persen. Kebanyakan mereka sudah berkeluarga sehingga mereka sangat membutuhkan pekerjaan atau usaha yang dapat menopang hidup sehari-hari. dan menurut aliansi RBM (Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat) pada tahun 2011 terdapat 35,7 juta jiwa kaum difabel (untuk semua jenis di fabel) di Indonesia; (2) kemampuan dan potensi yang dimiliki penyandang difabel tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Tiap-tiap difabel pasti memiliki kemampuan dan keahlian serta minat yang berbeda-beda dan tidak semuanya minat atau cocok untuk bekerja mungkin lebih berminat dan cocok dalam berwirausaha diberbagai bidang sesuai dengan minat dan keterampilan serta keahlian mereka. Dengan berwirausaha justru akan lebih mendorong kreativitas mereka dan juga mereka lebih leluasa dalam pengaturan waktu kerja dan cara kerja mereka sendiri dan tidak terikat dan tergantung pada tempat mereka bekerja.

Wirausaha menjadi pilihan yang tepat buat kaum difabel, dan tidak harus tergantung pada lapangan kerja yang ada. Untuk itu pemerintah harus dapat memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana termasuk pelatihan keterampilan, seminar dan juga pelatihan wirausaha termasuk adanya pinjaman lunak untuk modal usaha mereka.

Seperti program wirausaha muda mandiri yang didukung oleh bank yang ditunjuk pemerintah untuk para pemuda dari sejak bangku kuliah dibina dan didorong untuk bisa menjadi wirausahawan muda. Yaitu dengan memberikan pelatihan dan seminar juga aplikasi nyata



dari kewirausahaan, maka untuk kaum difabel juga perlu didukung program sejenis itu. Tentunya setiap kaum difabel juga mempunyai potensi dan minat yang bisa digali dan dikembangkan bila mereka mendapat pelatihan, seminar dan bimbingan serupa.

Dengan adanya program pendidikan wirausaha terpadu mereka tentunya dapat terus dibina sehingga mereka mampu untuk membuka usaha sendiri, ataupun membentuk usaha kelompok yang kesemuanya tergantung dari situasi dan kondisi di lapangan. Wira usaha sebagai alternatif lain untuk mengatasi masalah pekerjaan kaum difabel ini sangat memerlukan dukungan pemerintah dan juga pihak-pihak yang terkait untuk bisa memberikan pemberdayaan, pelatihan keterampilan dan juga pelatihan wirausaha.

Dengan adanya peluang untuk berwira usaha maka mereka tidak lagi bergantung terhadap lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan tetapi bisa menciptakan lapangan kerja sendiri buat mereka sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Sebagai contoh Irma Suryati yang sukses menjadi wirausaha di Kebumen berkat dukungan Bupati setempat. Irma juga mempekerjakan kaum difabel untuk melaksanakan usahanya tersebut. Jadi mereka yang sudah berhasil menjadi wirausaha dapat memberi pekerjaan kepada sesama difabel lainnya.

Banyak contoh kaum difabel yang berprestasi, berkarya bahkan dapat memberikan sumbangsih bagi anak negeri ditengah keterbatasan fisik mereka dan tidak mengandalkan mencari pekerjaan di tempat lain melainkan membuka usaha sendiri bahkan melakukan proyek sosial kemanusiaan di bidang pendidikan. Ade Irawan seorang pianis tunanetra yang sudah manggung di Chicago Amerika dan juga Java Jazz di Jakarta. Irma Suryati yang sukses menjadi wira usaha di Kebumen berkat dukungan Bupati setempat.

Pada suatu acara talk show di sebuah stasiun TV swasta, penulis juga pernah menonton tiga orang difabel yang masih tetap bisa berkarya dan bahkan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Misalnya Muhamad Bakrie, Fitri Nugrahaningrum, dan Angkie

Yudistia yang dengan keterbatasan fisik atau difabel mereka dapat memberikan sumbangsuhnya kepada sesama kaum difabel dan juga membantu mengatasi permasalahan bagi anak-anak yang kurang mampu dan anak jalanan. Mereka bisa mandiri dengan mendirikan sekolah dan perusahaan yang sifatnya non profit untuk membantu sesama kaum difabel.

Dengan memberikan banyak alternatif dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi kaum difabel untuk tetap bisa hidup mandiri, produktif, berkarya dan berprestasi tentunya akan sangat membantu mereka untuk menemukan dan meraih apa yang diimpikan, cita-cita dan juga harapan dan membuat mereka tetap merasa menjadi pribadi yang bermanfaat di tengah keterbatasan fisik mereka. Harapannya kaum difabel tidak lagi merasa mengalami diskriminasi dan eksklusi serta mendapatkan kebebasan yang seluas-luasnya dan kesamaan hak bagi kaum difabel di dalam segala bidang baik itu politik, pendidikan, sarana umum, pekerjaan dan lain sebagainya.

Pada sisi lain, memperhatikan dan menyadari kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh guru pendidikan penyandang difabel dan cukup banyaknya permasalahan penyandang diabel itu sendiri, pendidikan bagi calon guru penyandang diabel perlu ditingkatkan dari sisi kompetensinya. Sejalan dengan kepentingan tersebut tersusun Kurikulum Nasional Jurusan PLB S1 yang salah satunya memuat kurikulum Pendidikan Kewirausahaan dengan kode mata kuliah KMK-PLB 235 bobot SKS 2, maka perlu disiapkan buku-buku teks untuk mahasiswa baik buku teks yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, termasuk salah satunya buku yang berjudul Pendidikan Kewirausahaan bagi Penyandang Difabel dalam Konteks Pendidikan Karakter Bangsa.

## **B. Orientasi Kewirausahaan Untuk Penyandang Difabel**

Salah satu ciri khas dari kegiatan untuk orang difabel adalah orientasinya. Yang perlu ditekankan oleh para penyandang difabel adalah: kegiatan, dan penghasilan. Kegiatan merupakan aktivitas yang

harus mewarnai kegiatan keseharian dari orang difabel yang merupakan kombinasi dari:

1. Pelatihan fisik dan mental.
2. Variasi kegiatan antara kerja produktif dan rekreasi.
3. Sosialisasi.

Pelatihan fisik dan mental merupakan terapi terprogram yang biasanya diberikan kepada orang difabel. Sementara kegiatan produktif adalah aktivitas orang cacat yang ditunjukkan untuk bisa mungkin memperoleh penghasilan yang memadai. Aktivitas rekreasi yang bersifat santai maupun untuk menekuni hobi. Sistem sosialisasi atau bergaul dengan masyarakat ini amat penting untuk mengurangi rasa diabaikan atau rendah diri yang biasanya menghinggapi kaum difabel. Serta menumbuhkan kesadaran di kalangan masyarakat untuk tidak memandang sebelah mata terhadap orang difabel yang bersangkutan.

Penghasilan adalah orientasi kedua dari kegiatan orang difabel. Dari sinilah orang difabel harus mengarah segenap potensi yang ada pada dirinya untuk bekerja produktif dengan harapan maupun mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Kepandaian orang difabel seolah diuji untuk mensiasati keterbatasannya menjadi satu potensi yang bisa dijual. Untuk melengkapi kemampuannya orang difabel seperti yang sudah dikemukakan di muka harus membekali diri dengan kemampuan yang prima dan kreatif yang tinggi agar bisa turut berlaga di tengah dunia kerja. Sudah barang tentu kecacatan tidak akan mengurangi karya secara keseluruhan karena orang akan melihat potensinya.

Sebaliknya semua itu dituangkan dalam jadwal harian dan jadwal pencapaian tertentu sesuai dengan kebutuhan. Dalam jadwal pencapaian harus diketahui kapan mereka dapat dengan baik meningkatkan kemampuan fisiknya dan kapan saatnya mereka menambah pengetahuan sembari melihat dan merencanakan kapan mereka siap tampil di masyarakat. Maksim (2004) sementara jadwal harian bagi penyandang difabel bisa merupakan jadwal baku seperti contoh berikut ini.

Jam 4 pagi	: Bangun dan ibadah subuh
Jam 5-6	: Melatih fisik dan pernafasan
Jam 6-7	: Berjalan-jalan dan menikmati informasi
Jam 7-8	: Makan, mandi dan persiapan kerja
Jam 8-12	: Jam produktif I
Jam 12-13	: Jam istirahat dan shalat
Jam 13-16	: Jam produktif II/shalat
Jam 16-17	: Jam istirahat, mengembangkan hobi
Jam 17-19	: Mandi/shalat dan makan serta bercengkerama dengan keluarga
Jam 19-21	: Jam untuk berpikir pengembangan diri

Bagi para penyandang difabel jam kerja antara 4 jam hingga 6 jam sehari memang sudah cukup. Mereka butuh istirahat ekstra karena kondisi spesifik mereka. Hendaknya orientasi kerja atau kegiatan orang difabel harus tetap serasi dan seimbang sehingga tidak akan mengganggu mekanisme tubuh, rohani dan sosial mereka. Upaya ini tentu tidak berada di tangan orang lain. Karena orang lain hanya bisa menyarankan formula kegiatannya sementara pelaksanaan dan kebutuhan apa yang dirasakan mendesak adalah orang difabel yang bersangkutan yang mengetahuinya.

Kadar orientasinyaapun hendaknya ditentukan sendiri manakah yang lebih dominan dan yang lain karena memang kaum cacat, sekali lagi, membutuhkan pola yang spesifik. Secara khusus di belakang akan kita bahas bagaimana mensiasati agar tidak mudah muncul kejenuhan. Karena keterbatasan gerak, hal ini amat penting bagi kaum difabel agar hidup terasa lebih indah.

Akhirnya seluruh tujuan dari orientasi hanyalah untuk menjawab ke mana anda akan menuju dan kemana hidup ini akan Anda bawa. Maka jadikanlah orientasi untuk mewujudkan segala hal yang ingin Anda capai.

### C. Karena Realita Penyandang Difabel Bekerja

Dalam hidup, kenyataan adalah suatu yang bergerak dan tidak mungkin distop langkahnya. Pahit getir, suka duka, datang silih berganti. Mereka yang berkarya akan meraih bintang gemintang sementara mereka yang diam akan terperosok ke pinggiran sejarah yang gelap dan kelam. Ini sangat mungkin terjadi karena hanya dengan bekerja dan berbuat sesuatu, kenyataan bisa dihadapi. Karena realita itu bekerja, demikianlah sebuah ungkapan yang sangat indah sering dilontarkan.

Menerima realita bagi anda yang difabel pada awalnya selalu dimulai dari menerima dengan ikhlas keadaan dan kekurangan anda tanpa harus menyalahkan siapa-siapa, baik itu keadaan, orang tua atau bahkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam beberapa sudut mungkin anda kurang tetapi dari beberapa sisi anda penuh dengan kelebihan. Ada kisah menarik tentang seorang buta dan profesi sebagai karir guru.

Kemudian guru itu memanggil seorang yang lengkap penglihatannya. Kemudian ia menyuruhnya untuk memejamkan mata. Sepuluh menit, tidak ada masalah, satu jam belum ada reaksi, namun lebih dari itu si waras tadi mulai gelisah, keringat dan kesabarannya seolah habis padahal ia hanya diminta untuk memejamkan mata.

Kemudian ketika ia membuka mata lalu mereka bertiga berjalan bersama maka ia berkali-kali yang awas matanya ini malah berteriak-berteriak.

- Lihat ada orang terseok-seok kakinya penuh nanah.
- Lihat betapa mengenaskan keadaan orang tua itu, dan masih banyak lagi. Kemudian guru itu menepuk.

Kegelapan adalah gelap yang membawa rahmat bagimu. Tuhan telah membuka matamu dari berbagai keadaan yang mau tidak mau harus disaksikan oleh mereka yang memiliki mata awas. Kesedihan dan duka datang silih berganti.

Mungkin cerita kuno itu harus menerima keadaan. Namun apabila pelaku cerita tersebut masih ada sekarang maka sudah barang tentu ia makin bersyukur sekali. Karena di masa kini sudah banyak diciptakan piranti bagi orang buta untuk bisa membantunya hidup wajar. Huruf

Braille untuk membaca. Tongkat sensorik untuk berjalan. dan aneka alat bantu kerja lainnya.

Kalau dahulu orang hanya dituntut untuk pandai bersyukur atas keadaannya. Sekarang orang difabel harus lebih bersyukur karena mereka memiliki banyak sarana serta badan yang sanggup untuk mengantarkannya untuk hidup selayaknya orang normal. Keadaan itu harus selalu diartikan sebagai modal untuk berkarya dan berusaha, agar posisi orang difabel bisa sama tanpa mengundang rasa belas kasihan. Menerima kenyataan adalah sebuah seni yang merupakan paduan:

- Kesadaran kejiwaan yang tinggi.
- Usaha yang terus menerus.
- Mencoba menghasilkan sesuatu.

Karena dengan hasil maka orang akan tidak akan membantah akan keberadaan sesuatu. Bukanlah beribu kata bisa dipatahkan bila kita memiliki bukti bahwa kita sudah berbuat. Meski itu hanya sederhana, meski kerja juga serba terbatas namun ini berarti kita telah siap untuk menjemput realita. Selain kepercayaan diri pekerjaan juga akan membuahkan materi yakni sebuah kenikmatan yang akan mampu secara nyata menopang kebutuhan kita selama hidup dan pada akhirnya juga akan bisa kita gunakan untuk membantu sesama.

Sebagai langkah awal, mantapkanlah hasil saudara, bekali diri dengan kemampuan yang akan meningkatkan daya guna dan daya saing Anda sebagai manusia. Kemudian pikirkan pekerjaan Anda yang sesuai untuk Anda dan lakukan dengan semangat. Karena Tuhan yang kita kenal adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan selalu peduli akan nasib hamba-hambanya terkhusus bagi mereka yang mau berbuat dan bekerja.

#### **D. Pentingnya Membekali Diri Penyandang Difabel**

Belajar adalah sesuatu yang bersifat universal, ia berlaku untuk setiap orang. Dengan belajar orang menjadi tahu akan apa yang dibutuhkan orang serta berusaha untuk mencukupinya. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Keterampilan merupakan bekal yang harus dimiliki

setiap orang termasuk Anda yang difabel. Tentu bagi Anda perlu beberapa penyesuaian. Artinya Anda diharapkan mampu berbuat sesuatu sejauh mungkin dari apa yang bisa Anda perbuat. Hal ini selain bisa ditempuh dengan jalur formal bisa juga ditempuh dengan jalur informasi baik lewat buku maupun pengalaman kerja pelatihan.

Langkah pertama anda harus mengusahakan agar kecacatan Anda bergerak ke arah yang sedekat mungkin dengan keadaan normal. Baik berupa upaya terapi, pengobatan maupun dengan bantuan alat bantu. Kehadiran seorang konselor untuk memberikan saran alat atau jenis terapi apa yang tepat amat anda butuhkan. Patuhilah disiplin penggunaan alat tersebut atau terapi itu dengan benar karena hanya dengan upaya itulah maka Anda bisa dianggap telah turut membantu kesembuhan.

Langkah kedua adalah menggalang kemampuan dalam arti Anda harus bisa menghitung kelebihan dan kekurangan diri sendiri dibandingkan juga dengan orang difabel yang sama dan orang normal sehingga akan muncul satu gambaran utuh yang subjektif tentang diri anda sendiri. Jadikan data itu sebagai bekal untuk menentukan apa yang hendak Anda lakukan di masa depan untuk menopang kehidupan anda. Sebaiknya Anda bersikap objektif dan tidak melebih-lebihkan sesuatu, berikan hasil perhitungan alami sesuai situasi dan kondisi Anda.

Langkah ketiga barulah menengok hal apakah yang perlu anda tambahkan sebagai unsur pelengkapan kemampuan yang bisa dapat di luar baik lewat sekolah maupun kursus atau magang. Berusahalah untuk memasuki lingkungan yang bisa menambah pengetahuan anda tersebut. Kalau kemudian mereka berkeberatan karena belum berpengalaman untuk melatih orang cacat maka jangan malu untuk mempraktikkan sesuatu menyakinkan mereka. Bahwa meski tampak cacat namun Anda memiliki kemampuan dasar untuk bersaing atau bersama berkarya secara sehat dan dengan orang normal kebanyakan. Yang paling utama bukanlah pola pendidikan yang melebar atau bertingkat namun pendidikan yang spesialis yang akan membuat Anda semakin mampu mengerjakan dengan sempurna pekerjaan anda.

Untuk memuluskan jalan sebaiknya Anda banyak berlatih secara pribadi karena hal itu akan amat membantu meningkatkan kemampuan Anda dan lihatlah kenyataan itu sendiri hari ke hari. Bila memang memungkinkan atau diharuskan suatu ketika harus menunjukkan kemampuan Anda maka tak ada salahnya Anda menciptakan aneka macam contoh. Karena karya biasanya akan lebih berbicara kepada kata-kata. Selain itu dengan daya kreasi yang menawan Anda akan mampu memikat simpati orang pada pandangan pertama, dalam bahasan ini tentu Anda telah begitu banyak mendengar betapa sebenarnya orang difabel tetap bermanfaat.

Memang untuk menanggapi posisi mantap bukanlah jalan mulus yang bertabur bunga, namun jalan menanjak yang penuh onak dan duri maka semuanya hanya bisa didaki dan dilalui oleh orang yang siap. Jangan risau akan kesempatan karena kesempatan adalah benda yang hanya tampak bagi mereka mampu melihat. Adalah sesuatu yang muncul hanya dapat orang yang menguasai karena tanpa menguasai sesuatu yang mumpuni orang tidak bakal melihat kesempatan tadi. Mari kita berbicara tentang kesempatan lebih jauh lagi. Namun jangan lupa untuk membekali diri.

#### **E. Sikap Mandiri Bagi Penyandang Difabel**

Kemandirian bagi orang difabel memang harus bisa disikapi secara bijaksana. Karena tidak akan ada yang bisa mandiri seratus persen dan tidak akan pernah ada yang bisa bergantung seratus persen. Inilah hakikatnya kebersamaan dalam kehidupan. Dimana satu pihak akan menolong pihak lain. Oleh sebab itu, kemandirianlah hendaknya bisa dilihat atau dicapai melalui satu makna yakni kelancaran. Atau dengan indikator bahwa suatu dikatakan mandiri apabila ia tidak akan dibuat macet bila tidak ada campur tangan orang lain. Ketergantungan mutlak adalah ciri tidak adanya kemandirian.

Melihat hal tersebut maka seorang manusia siapapun tak boleh mengartikan kemandirian sebagai sendirian tanpa peran serta orang lain. Semangat saling mendukung antara manusia harus selalu



ditumbuhkembang. Harus ada semacam pola yang akan membuat masing-masing pihak merasa terlibat secara sehat.

Suatu contoh: perusahaan besar seperti coca-cola sekalipun tetap tidak akan bisa mundur tanpa kedai dan kios kecil yang akan meningkatkan volumenya dan penjualan. Botol demi botol yang berkurang akan tercatat di komputer induk perusahaan. Sehingga Anda tidak perlu berkecil hati jika pada akhirnya memang untuk menampung hasil kerja Anda dibutuhkan peran serta orang lain.

Dalam pemahaman kewirausahaan kata mandiri bisa diartikan memiliki usaha sendiri yang dikerjakan baik sendiri maupun bersama sejumlah tenaga lain. Tidak perlu besar bahkan bisa pula dimulai dari usaha rumahan atau *home industry*. Banyak hal dan keterampilan yang mudah dan praktis dapat dianggap pembuatan alat rumah tangga sederhana.

Kemudian lewat usaha yang menghasilkan sesuatu merupakan salah satu sikap mulia. Demi menghindari pandangan bahwa orang cacat hanya bisa dengan mengadahkan tangan tanpa mau berbuat secara nyata. Mental seperti ini merupakan ciri mental ketergantungan yang salah bahkan sakit yang sama sekali harus di jauhi oleh para penyandang difabel. Memang cacat tubuh adalah sarana untuk mengiba hati yang efektif namun ini bukan merupakan jalan keluar yang pantas sebab realita hanya bisa dihadapi dengan kerja. Bekerja dengan mandiri merupakan langkah yang harus ditaati. Bagi para penyandang difabel kemandirian harus dijadikan sikap. Karena hanya dengan hal tersebut maka ia tidak akan dipandang sebelah mata oleh siapapun.

Kemandirian dalam bekerja bukanlah sesuatu yang harus diteriakkan namun lebih ke arah yang harus dibuktikan bersama. Baik melalui kerja maupun karya. Jangan terlalu banyak bicara sebelum berbuat, demikian nasihat bijak yang sering kita dengar. Hendaknya pula penyandang difabel tidak menolak terlalu berusaha mencapai tahap demi tahap kesuksesannya tanpa harus memaksakan diri mengingat segala keterbatasannya tersebut. Mungkin diawali dengan

cukup untuk makan minum serta pakaian yang pantas kemudian sisanya tabungan untuk hal yang lebih bermanfaat.

Kemudian menjadi salah satu kunci untuk mempertahankan hidup secara terhormat sembari berupaya meraih kebutuhan sendiri yang harus dipenuhi. Maka untuk itulah kemandirian harus ditopang dengan sikap, perencanaan dan kerja keras. Sebab tanpa hal tersebut maka kemandirian hanya akan menjadi sebuah angan-angan semu tanpa kenyataan. Seni mandiri dikembangkan dengan tantangan.

Demikian nasihat Ardo Johanson seorang terapis yang terkenal dari Amerika: dia berkata pada kenyataan para penyandang difabel harus diberikan tantangan yang lebih sehingga terbakar semangatnya untuk mandiri. Dia harus diberikan kesempatan untuk berpikir pada di bidang kehidupan umum tanpa banyak diberikan dispensasi sehingga mereka akan merasa sebagai orang normal yang mandiri.

#### **F. Bagi Penyandang Difabel Gunakan yang Sempurna**

Mungkin Anda memang ditakdirkan untuk lahir difabel/cacat namun percayalah bahwa ada kelebihan yang tersimpan dan masih ada kesempurnaan organ dan sisi yang bisa dimanfaatkan. Mungkin mata difabel namun mata hati, pikiran dan pendengaran tidak. Mungkin tangan cacat namun kaki dan mata sehat. Sisi yang lain sehat itulah yang harus Anda manfaatkan secara maksimal sehingga hidup lebih bermanfaat. Banyak orang buta yang dengan hatinya dan gerakan tangannya mampu hadir sebagai juru pijat dengan aneka kemampuan untuk menyembuhkan.

Banyak orang bisu tuli bisa bekerja dan berkomunikasi dengan bahasa dan menggunakan tangannya seperti di sebuah yayasan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadikanlah kesempurnaan organ Anda tersebut dengan baik dan jadikanlah hal itu sebagai modal utama Anda untuk berbuat.

Kalua Anda bisa memanfaatkan dengan baik maka secara dini Anda akan merasakan sebagai pribadi yang bermanfaat dan penuh rasa percaya diri. Kepercayaan yang tumbuh akan menjadi penambahan bagi

modal Anda secara keseluruhan. Memang anda harus selalu berpikir positif dan tidak henti-hentinya menggali potensi agar nilai Anda makin bertambah dari hari ke hari.

Setelah Anda menarik organ Anda yang sempurna maka mulailah pula menarik organ Anda yang difabel. Latihan dan kembangkanlah sehingga benar-benar bisa optimal sebagai satu tambahan modal. Keadaan ini cepat atau lambat akan membuat Anda tidak merasa jauh berada dengan normal kebanyakan.

### **G. Menyemangati Hidup Bagi Penyandang Difabel**

Kauffman, JM. (2008) selain kerja yang produktif para penderita difabel harus pandai untuk menyemangati hidup. Mereka harus bisa mengisi. Kesenangan dengan berdagang hal dan aktivitas yang menarik sehingga semua itu akan memberi variasi yang menyehatkan terutama dari sisi kejiwaan para penyandang cacat. Selain rekreasi maka menekuni hobi merupakan salah satu cara untuk menyemangati dunia kehidupan. Tentu itu semua harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi, dan yang paling mengerti justru para penderita itu sendiri.

Selain itu pula menyemangati hidup lewat kegiatan yang positif juga bisa mendukung terjadinya proses sosialisasi. Sungguh amat baik apabila Anda bisa menggabungkan antara pekerjaan dengan hobi hingga Anda akan lebih baik dan lebih terasa ringan dalam mengerjakannya, beberapa contoh misalnya.

Seorang lumpuh kakinya namun lengkap tangannya akan lebih baik apabila menekuni hobi bertanam/membuat bonsai. Seorang yang buta namun memiliki pendengaran yang lengkap bisa menyemangati hidupnya dengan mendengarkan musik, kesemuanya itu agar hidup lebih menarik.

Pilihlah kegiatan yang tidak terlalu menyita waktu dan tenaga. Karena dengan menyita waktu maka konsentrasi Anda akan terbelah dan justru akan mengganggu aktivitas utama Anda, juga jangan terlalu menyita tenaga, sebab akan membuat Anda kelelahan padahal aktivitas

yang menghibur itu justru ditunjukkan untuk mengatasi kelebihan yang derita. Juga jangan terlalu menyita dana untuk hobi karena mungkin Anda akan lebih membutuhkan untuk hal yang lebih membutuhkan untuk hal yang lebih perlu dari itu. Pilihlah hobi yang mudah, murah namun tetap meraih dan tidak gampang membosankan sehingga akan membuat Anda menjadi lebih semangat untuk menjalani kehidupan.

#### **H. Menjaga Kebugaran Bagi Penyandang Difabel**

Tubuh yang bugar dan terpelihara sering diidentifikasi dengan kesiapan untuk menyosong produktifitas yang lebih baik. Karena dengan kebugaran maka kondisi tubuh akan siap dan mantap menjalani semua kegiatan keseharian kita. Kebugaran bukanlah monopoli orang sehat saja namun juga untuk orang difabel. Terutama menjaga agar kondisi yang tidak normal bisa ditingkatkan atau setidaknya tidak terjadi gejala kemunduran.

Memang secara keseluruhan dan dalam stadium tertentu latihan fisik bagi penderita difabel atau kelainan tubuh perlu mendapat pengawasan dari dokter atau terapi yang profesional. Namun untuk kelanjutannya bisa dilakukan sendiri oleh para penyandang difabel dengan porsi dan jenis latihan yang telah ditentukan. Menjaga stamina dengan olahraga sebaiknya pagi atau sore dengan udara dan cuaca yang lebih mendukung sehingga hasilnya maksimal.

Selain itu kepentingan kebugaran diri sendiri maka olahraga orang difabel seperti selayaknya orang normal lainnya bisa dijadikan lahan untuk berprestasi. Beberapa cabang olahraga dan pusat pembinaan orang difabel telah dikonsentrasikan untuk menampung hal itu. Bahkan acara lomba olahraga prestasi orang difabel telah memiliki agenda tersendiri di Indonesia bahkan di seluruh dunia banyak ragam cabang.

Kalau Anda berniat hanya sekedar meraih kebugaran saja maka jangan pilih olahraga yang berisiko tinggi dan berharga mahal secara ekonomi karena itu akan membawa dampak di satu dan banyak hal.

Pilihlah olahraga yang sederhana namun tepat untuk menunjang kebugaran Anda.

### **I. Kepekaan Batin Penyandang Difabel**

Penyandang difabel karena penderita dan kekurangan yang diterimanya dengan ikhlas membuat ia memiliki kepekaan batin yang lebih dibandingkan orang normal. Kepekaan ini tidak saja bermanfaat dalam hidup namun juga dalam berusaha khususnya sikap yang muncul yakni ketelatenan dan sabar. Ketelatenan dan kesabaran membuat hasil pekerjaan jadi lebih baik dan sempurna.

Di samping itu, kepekaan batin akan menumbuhkan semangat tenggang rasa terhadap orang lain sehingga tidak mudah menyalahkan atau menilai buruk seseorang. Sungguh ini bukan karunia yang sederhana namun karunia besar yang patut dipelihara. Karena kelebihan inilah terkadang seseorang penderita difabel dapat dengan lebih tajam membaca tanda-tanda alam sehingga tak jarang muncul satu kesan bahwa mereka memiliki kelebihan dibandingkan manusia bisa dalam segi supranatural.

Memelihara kepekaan batin dapat dilakukan dengan jalan ikhlas dan mendekatkan diri kepada tuhan. Keiklasan membuat segala sesuatu yang kita terima baik itu rizki atau musibah terasa menjadi indah. Kedekatan membuat seseorang menjadi mampu membaca hikmah di balik musibah.

Kepekaan batin juga bisa digunakan dalam memberikan kesan cinta dan rasa sayang akan menembus tajam meski seseorang tidak berbicara. Perasaan bergetar dan mampu menggetarkan ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kepekaan batin yang benar-benar tajam.

### **J. Penyandang Difabel yang Sukses Berwirausaha**

Kalau kisah sukses orang normal itu biasa namun bila orang difabel sukses itu sungguh luar biasa. Anda mau faktanya, berikut penulis nukilkan dari buku karya Marvin Smal dan beberapa kisah juga

dari tanah air. Kesuksesan adalah milik semua orang tanpa melihat ras, suku, bangsa, kemampuan dan hal yang bersifat lahiriah lainnya, sukses itu sebuah kualitas.

### 1. Dari Luar Negeri

**John D Hayes (penderita kebutaan);** ketika usianya menginjak 41 tahun pada tahun 1925 John D Hayes menderita kebutaan pada matanya. Beberapa tahun itu ia membuka sebuah toko kembang gula fanny farner di Rochester New York Amerika Serikat. Sementara di tengah kemajuan usahanya ia malah menjadi buta karena dokter salah mencabut giginya. Berubahlah segala semua semula indah menjadi gelap dan pekat. Namun ia tidak berpangku tangan, ia berpikir keras untuk menciptakan pola manajemen baru sehingga ia dapat mengendalikan usaha meski kecacatan telah menderita fisiknya. Cara yang dikembangkannya terbukti ampuh, ia bisa mengawasi para pegawainya. Pada tahun 1952 ia telah memiliki 262 toko dari 190 toko kekayaan kembang gula senilai 20.000.000 Dollar Amerika. Sehingga rekor fantastis yang justru dicapai oleh orang difabel di bisnis yang amat manis.

**Edward Fellenne (penderita kelainan kulit);** adakalanya sebutan kecacatan membuat dorongan hebat seorang untuk maju. Hal ini bisa disimak pengalaman dari Edward Fellenen. Pada umur 5 tahun ia mendapat luka yang sangat hebat sehingga harus berjalan dengan menggunakan tongkat. Ia tak bisa berdialog dan bergaul dengan anak-anak lain. Bahkan mereka selalu mengejeknya maka ia menjadi seorang yang kurang gaul pada masa remajanya dan dewasanya.

Kenyataan itu semakin memburuk tatkala ia berumur 14 tahun ia menderita exema yang sangat parah. Sebuah penyakit yang sangat fatal bagi seorang pemuda seperti dia. Penyakit ini dideritanya sehingga ia berumur 20 tahun. Namun kelainan dan kekurangan yang dideritanya membuat ia berpikir amat dalam dan menggali potensinya dengan lebih dalam lagi. Akhirnya ia berhasil menyumbangkan sebuah gagasan dan karya yang gemilang dengan menciptakan mesin penawar otomatis. Sehingga ia dapat ikut memberantas kecurangan.

**Arthut Murray (yang rendah diri);** dengan semangat mencari kebutuhan orang lain sembari berusaha untuk memenuhinya maka Arthut Murray menja-lankan segala rencananya. Tersebutlah jaman dahulu kala hanya ada anak petinggi saja yang diajari untuk berdansa maklumlah dansa termasuk salah satu pelajaran kesopanan yang sangat penting. Nah dari hal tersebut maka Arthut Murray harus terlebih dahulu melepaskan rasa rendah diri yang menghinggapinya. Memang pertumbuhan fisik Arthut tidak senormal anak seusianya. Mereka melihat Arthut sebagai anak yang tinggi dan kurus kering sehingga mereka amat gemar untuk mengejeknya. Hingga suatu ketika seorang gadis mengajaknya berdansa dan seperti terkena mukjizat Arthut menjadi hilang rendah diri yang sempat akan mengganggu kesehatan mentalnya.

Sejak itulah Arthut memiliki keterampilan dalam bidang dansa. Sejak itu pulalah ia kemudian rajin mengunjungi pesta dansa di berbagai acara. Sampai suatu ketika ia menggondol untuk menjadi seorang juara dansa sejak itulah ia seolah tak pernah mampu dihentikan oleh siapa saja. Ia kemudian meninggalkan New York dan menetap di Corolina dan bahagia yang gajinya sebesar \$100 seminggu. Kemudian ia kembali berpikir, mungkinkah dilakukan kursus mengajar dansa melalui pos? lalu mulailah ia mengajar dansa Foxtrit dengan menggunakan gambar-gambar sederhana yang kemudian menjadi dasar azas perusahaannya yang sekarang memiliki omset \$ 5.000.000 setiap tahun.

Kursus dansa berkembang pesat sehingga ia harus memperkerjakan 90 gadis untuk mengatur surat-surat yang masuk. Kemudian pergi ke Georgia dan mulai lagi mengajar di sana. Mulailah ia memperkenalkan sistem asisten sehingga ia mampu membuka banyak cabang di kota lain. Sekarang ada kurang 1.500 guru di sekolah Arthur Murray, dan benar... si rendah diri sekarang benar-benar menari.

**Eugene FMC Donald Junior;** adalah seorang yang memiliki kecacatan dalam bidang alat pendengarannya. Bahkan ia nyaris tuli sampai suatu ketika ia penemuan Mc. Donald sebuah alat bantu dengar yang sungguh menakjubkan. Sampai ia berkomentar; cara untuk

mendapatkan kekayaan dan kebahagiaan itu ialah dengan mencintai manusia dan memperkaya hidup orang banyak dengan jalan memperkaya mereka dengan rasa bahagia akibat pertolongan Anda, dan saya tidak akan pernah melihat gagasan itu terlaksana secara konsekuen selain pada diri orang seperti Eugene FMC Donald Junior.

Selam hidupnya Eugene rajin mengumpulkan uang. Hal ini didukung kenyataan bahwasanya rejekinya yang satu didukung dengan rejeki yang lain. Berkat pengalamannya maka ia bisa melihat kebutuhan umum yang harus dipenuhinya. Ketika ia masih muda dan baru lulus sekolah menengah Syracuse New York. Eugene bekerja pada bengkel mesin, pekerjaan itu berjalan dengan lancar. Hingga pada umur 20 tahun ia memiliki ide untuk mandiri sudah maskapai yang menjual mobil secara kredit. Usaha ini berkembang menjadi sebuah toko bekas yang besar di Chicago.

Sejenak kemudian sampai ia berumur 27 tahun ia masuk dinas Al dan pulang dengan membawa pangkat Letnan. Meski semua itu harus ditebusnya dengan mahal, sebuah telinganya menjadi tuli. Hal ini membuat sebuah kenyataan pahit di mana ia menyaksikan betapa alat bantu dengar amat mahal harganya sehingga ia selalu berusaha keras dibantu oleh rekan-rekannya untuk menghasilkan alat bantu dengar yang murah dengan harga tak lebih dari \$40. Dan memberi nama Zenith, banyak sekali orang yang memakainya seperti Elearnor Rosevelt, Charles Edision, Bernard Buruch. Satu lagi bukti manfaat bagi penyandang difabel.

## **2. Dari Dalam Negeri**

Sekedar gambaran penyandang difabel yang berhasil dalam dunia usaha di negara kita Indonesia adalah Irma Suryani. Mereka penyandang difabel yang tinggal di sebuah rumah sederhana dihimpit hamparan sawah yang luas kawasan pedesaan. Irma turun dari sepeda motor roda tiga yang didesain khusus untuk memudahkan mobilitasnya, akhir Desember 2011. Di sepanjang jalan aspal sempit, penunggang sepeda *onthel* yang lalu lalang tak berhenti menyapanya. Di rumah itulah Irma mengembangkan kerajinan tangan dari kain perca. Tak



sembarang kerajinan tangan karena usaha beromset hingga puluhan juta rupiah itu hampir semuanya dibuat oleh para penyandang difabel binaannya.

Setelah menyandarkan kruk di dinding rumahnya, Irma perlahan duduk selonjor dipapah Agus Priyanto, suaminya yang juga mengenakan kaki palsu. Ya, pasangan suami istri itu menggelorakan semangat pantang menyerah bagi sesamanya dari desa Karang Sari, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Komentar mereka, kami ingin menyingkirkan stigma bahwa penyandang difabel tidak dapat mandiri. Kami tidak ingin dikasihani. Kami hanya ingin mendapat kesempatan sama, ujar Irma pemilik Mutiara Handycraft itu.

Selepas lulus dari SMA, Irma tak melanjutkan kuliah. Ia menjalani terapi kaki akibat lumpuh layu sejak kecil di RS Ortopedi Solo. Di tempat itu, Irma jatuh hati dengan sesama pasien yang kini menjadi suaminya. Selesai terapi, Irma kembali ke Semarang. Bersama Agus yang telah menjadi suaminya, mereka menggeluti usaha kerajinan pada 1999. Mereka mulai mengumpulkan para penyandang difabel yang kebetulan adalah kawan-kawan semasa mengikuti pendidikan keterampilan di rumah sakit. Usaha di "Kota Lumpia" itu cukup berhasil dan mampu merekrut 50 penyandang difabel. Usaha saya sejak awal memang fokus membuat pelbagai alat rumah tangga dari kain perca, tutur ibu lima anak itu.

Puncak kejayaan usaha Irma yakni pada 2002, rumah dan mobil mereka miliki dengan omset kerajinan mencapai miliaran rupiah per bulan. Rantai produksi dari manajemen hingga pemasaran tertata rapi. Namun, kebakaran besar di Pasar Karangjati, tempat lokasi usahanya, tahun 2005 melalap habis usaha mereka. Kami nyaris tak punya apa-apa lagi; bahkan semangat pun nyaris hilang, kenangnya. Irma dan suami pun pindah ke tempat asal suaminya di Kebumen untuk memulai usaha baru.

Tonggak bersejarah dalam usaha yang dirintis Irma terjadi kala dirinya berhasil menemui Bupati Kebumen saat itu, Rustriningsih, yang kini Wakil Gubernur Jateng. Gayung pun bersambut, Rustriningsih

mengundang semua penyandang difabel di seluruh Kebumen yang berjumlah sekitar 300 orang. Terbentuklah paguyuban penyandang difabel yang diketuai Irma.

Mereka sepakat membuka usaha kain perca. Pemerintah Kabupaten Kebumen memberi modal dan mengontrakkan sebuah rumah di Sruweng, Kebumen, sebagai tempat usaha. Dengan pengalamannya, Irma unjuk diri. Ia rangkul penyandang difabel di 17 kecamatan dari 26 kecamatan di Kebumen. Setelah usahanya dirasa mulai berkembang, saya memutuskan kembali ke Desa Karang Sari sekalian membangun rumah sendiri, katanya.

Dengan kreativitasnya, kain sisa industri garmen dibentuk menjadi aneka produk keset yang unik. Desain keset berbentuk bunga, karakter kartun, bentuk binatang seperti panda, kupu-kupu, dan katak menjadi sedikit contoh hasil karyanya. Tak sekadar dijual di pasar lokal, keset-keset itu juga dipasarkan ke luar negeri. Khusus desain kupu-kupu bahkan dikirim ke Australia seharga 7 dollar per lembar. Omset usaha Irma setidaknya kini mencapai Rp 50 juta per bulan.

Selain Kebumen, karyawan Irma tersebar di Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, dan Purworejo. Dari sekitar 750 karyawannya, sekitar 150 orang di antaranya penyandang difabel, khusus tunadaksa. Sisanya adalah orang normal. Awalnya mereka diajari bagaimana membuat keset. Kemudian setelah mandiri, Irma memasok bahan baku untuk dibuat sendiri oleh karyawannya di rumah masing-masing. Hasilnya disetor kepada saya untuk dipasarkan, tutur Irma.

Bagi para mitranya, Irma menjual bahan baku keset berupa kain sisa seharga Rp1.000 per kilogram. Lalu para mitra menyettor keset dengan harga Rp3.000 per lembar. Pasar yang masih terbuka membuat Irma bergerilya untuk memperbanyak tenaga kerja. Seperti dicontohkan, kebutuhan keset kain perca dari Jakarta mencapai 60.000 per bulan, tetapi baru mampu dipasok oleh Mutiara Handycraft sekitar 20.000 lembar.

Irma juga memberdayakan ibu-ibu rumah tangga, pekerja seks komersial (PSK), para waria, hingga mantan tenaga kerja Indonesia

(TKI). Dia pun tak pelit ilmu dengan berkeliling Indonesia menjadi instruktur pelatihan bagi penyandang difabel, mantan TKI, dan PS. Apalagi kalau yang meminta adalah penyandang difabel, saya usahakan berangkat, kata Irma. Keinginan Irma sederhana. Dia berharap para penyandang difabel hidup mandiri, termasuk secara ekonomi, sehingga kehidupan para difabel sama dengan orang normal

Irma tak ingin penyandang difabel mendapat perlakuan tidak menyenangkan hanya karena keterbatasan fisik. Irma mengenang, diskriminasi bagi para penyandang difabel masih dirasakan di seluruh sektor, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Saya ingat waktu selalu ditolak bekerja gara-gara berjalan menggunakan bantuan kruk, ujarnya

Semangat, kemandirian, dan dedikasinya memberdayakan para penyandang difabel diakui secara nasional bahkan internasional. Dia pun berperan besar bagi lingkungan dengan mengolah limbah garmen menjadi aneka kerajinan tangan. Berkat usahanya, Irma mampu mengurangi pengangguran sekaligus mengurangi limbah sekitar 5 ton per bulan. Namun, cita-cita Irma tidak berhenti sampai di situ. Ia sedang membangun rumah bagian belakang dengan ukuran sekitar 7 x 9 meter yang hampir selesai dan akan dipakai untuk menampung para penyandang difabel.

Kami sedang menyiapkan tempat bagi penyandang cacat yang bekerja di sini dan rumahnya jauh. Saya ingin punya pabrik yang seluruh karyawannya para penyandang cacat, kata Irma. (Dikutip dari Kompas, Senin, 20 Februari 2012).

Koesbiono Sarmanhudi, SH.MH. yang menjabat ketua umum Yayasan Penyandang Cacat Indonesia. Frans Harsana Sasraningrat, Ed.M. seorang dosen di IKIP Karangmalang Yogyakarta, merekalah yang menepis tanya bahwa orang cacat tak mampu merambah dunia milik orang normal. Bahkan ada yang pernah menghias layar perak seperti Hinayah yang hanya memiliki kaki tanpa tangan. Ia sempat bermain dalam film "kuberikan segalanya". Dari semua itu dapat kita ambil pelajaran bahwa kecacatan bukan halangan untuk berprestasi dan

meraih sukses. Bahkan menjadi pemacu yang alami, sehingga penyandang difabel tidak perlu merasa berkecil hati.

### **K. Contoh Usaha yang Cocok Untuk Penyandang Difabel**

Beberapa contoh usaha untuk penyandang difabel yang produktif sehingga dapat menopang hidupnya untuk mandiri. Beberapa pekerjaan ini di Indonesia sering diajarkan di panti rehabilitasi atau pembinaan penyandang difabel di sekolah formal, antara lain:

#### **1. Industri Kerupuk**

Di industri pembuatan kerupuk para penyandang difabel biasanya dipekerjakan untuk membentuk dari adonan basah menjadi bentuk kerupuk dengan cetakan. Pekerjaan ini dengan dibantu kenek tukang mengambil adonan bisa dilakukan tanpa harus meninggalkan tempat duduk. Untuk beberapa kegiatan memang masih digunakan tangan namun adakalanya juga alat dimodifikasi dengan menggunakan kaki. Keahlian berdasarkan pengalaman banyak digunakan dalam bisnis ini, terutama untuk membuat ukuran yang mendekati sama secara keseluruhan. Biasanya hitungan target sebagai penentu gaji.

#### **2. Stel Nada**

Di industri alat musik mancanegara biasanya para penyandang difabel yang masih memiliki pendengaran sempurna akan dilatih untuk menyetel nada piano, biola bahkan gitar sehingga pas. Ketajaman batin dan perasaan mereka seolah sempurna dengan telinga. Meski orang lain difabel, gerakan mereka membuat pekerjaan itu lebih terjamin mutunya karena ditangani dengan serius dan penuh ketelatenan.

#### **3. Penjahit**

Dengan adanya sistem jahit penggerak tangan maka di mungkin bagi yang kelainan kaki untuk melakukan pekerjaan inipun dengan mereka yang memiliki satu kaki maka masih memungkinkan menggerakkan dengan kaki lewat dinamo pada mesin jahitnya. Hal ini sungguh kenyataan yang menggembirakan. Saya melihat hal ini

di seputar kompleks stadion mendala Krida Yogyakarta disana ada penyandang difabel yang menjadi penjahit dengan kemampuan yang baik dan tidak kalah dengan penjahit normal.

#### **4. Tukang Potong Kue**

Pekerja lain yang bisa dilakukan adalah tukang potong kue. Pekerjaan ini secara teknis tergolong gampang namun memang menghasilkan potongan yang sama membutuhkan kemampuan sendiri, termasuk membuat potongan yang sesuai dengan selera pemesan. Yang tentu seringkali tidak sesuai dengan ukuran standar. Tukang potong kue ini biasanya bekerja di pabrik roti atau pun *home industry* lainnya. Sama dengan pekerja lain maka honor ditentukan dengan berdasar jumlah banyak potongan yang bisa dihasilkan dalam satu hari kerja para penyandang difabel.

#### **5. Pengemas Makanan**

Masih seputar yang berkaitan dengan dunia tata boga maka salah satu bagian yang banyak dipekerjakan oleh para penyandang difabel adalah pengemas makanan sesuai ukuran yang telah ditentukan. Sektor ini memang juga banyak dikerjakan oleh orang normal namun acapkali bisa dilakukan oleh penyandang difabel. Yang dikemas mulai dari kacang, cemilan, aneka permen sehingga berbagai makanan kecil lainnya.

#### **6. Pengisi Blangko**

Jasa penyandang difabel untuk menghasilkan sesuatu memang masih dibutuhkan seperti mengisi blangko baik mengisi dengan mesin ketikan atau tulisan tangan bahkan tulisan kaki yang justru akan membuat atraksi tersendiri. Memang adakalanya yang mengaitkan hal tersebut dengan jasa musiman seperti tatkala mahasiswa mengisi kartu mahasiswanya atau bila ada kesempatan untuk mengisi mengoperasikan alat di samping keindahan tulisan. Mereka yang mengerjakan biasanya mendapat honor biaya perlembar surat.

**7. Tukang Pijat**

Tukang pijat tunanetra di seluruh Indonesia ini berjumlah ribuan, banyak diantaranya yang berijazah. Artinya mereka bukan dukun tiban melainkan orang yang memang dididik dan dibekali dengan keterampilan pijat untuk berbagai penyakit. Bisnis penyandang difabel ini tergolong marak dan banyak peminatnya. Hal ini terjadi karena mereka memang butuh terapi pijat untuk penyakit dan berkunjung ke panti pijat ini dapat menepis anggapan yang negatif. Selain biayanya yang murah, selain biasanya berada di rumah maka pemijat ada juga yang melayani panggilan atau malah ada yang setia menyusuri kota di malam hari seperti pak Atmo Kencreng di kota Yogyakarta.

**8. Penjaga Toko**

Memang pekerjaan ini masih dimungkinkan dikerjakan penyandang difabel bahkan beberapa pengusaha toko terkemuka ini sebagai rangkaian cap kepedulian sosial mereka. Tentu ini mereka yang suka bekerja dengan orang lain. Bagi Anda lebih suka mandiri ini dapat diartikan sebagai legalisasi bahwa penyandang difabel barangkali bisa membuka usaha kios sendiri dan sekaligus menjaganya.

**9. Penuang Adonan**

Salah satu pekerjaan dan para penyandang difabel adalah adonan yang masih berbentuk campuran dituangkan atau dibentuk dengan menggunakan cetakan. Pekerjaan ini membutuhkan keahlian khusus terutama dalam hal kecermatan untuk menghasilkan bentuk. Pekerjaan ini sangat amat tepat dilakukan oleh perempuan karena insting dan naluri kewanitaan lebih akan mewarnai hasil-hasilnya meski tidak tertutupi kemungkinan untuk laki-laki. Penggunaan jasa ini biasanya para pengusaha makan kering mini yang bentuknya banyak mengandalkan pernik-pernik.

**10. Tenaga Restoran**

Di banyak tempat seperti di rumah makan yang ceritanya dapat Anda simak di restoran Jepang. Keberanian orang penyandang

difabel di restoran akan membawa dampak yang khas tentang kehadiran makanan atau restoran tersebut. Memang ada banyak hal yang bisa dilakukan terutama dalam sektor pelayanan. Sehingga turut serta mempekerjakan penyandang difabel merupakan salah satu langkah yang mulia.

#### **11. Percetakan**

Ada cerita di belakang yang terjadi di sebuah panti di Jawa Barat bahwa mereka mempekerjakan penyandang difabel untuk mencetaknya. Memang dengan keterbatasan gerakannya mungkin akan lebih banyak tenaga yang membutuhkan namun dari pada itu bukan berarti tidak dapat dilakukan. Pekerjaan dan pembagiannya memang harus lebih spesifik dan atau memang perlu untuk beberapa sisi harus dikerjakan orang normal. Pengetahuan tentang percetakan mesti dimiliki termasuk seni standar desain atau sablon.

#### **12. Jasa Gravir**

Pengoperasian alat gravir baik gurinda maupun logam sederhana apa lagi ini sudah banyak yang dibantu dengan listrik sehingga lebih mudah dan cocok untuk penyandang difabel tubuh dengan tugas menggravir gelas hasilnya juga tidak mengecewakan. Memang dalam hal ini kemampuan untuk duduk dan bekerja secara normal amat sangat diperlukan. Bila tulisan Anda tergolong bagus dan memiliki sedikit kemampuan desain komposisi yang baik menjadi tukang gravir piring ucapan di pinggir jalan merupakan salah satu profesi yang cukup baik untuk ditekuni.

#### **13. Tukang Angket**

Penyandang difabel yang otomatis telaten berada di suatu tempat tanpa beranjak akan sangat cocok untuk menjadi petugas pengumpulan data keperluan angket. Semisal jumlah pengunjung yang kemudian dikaitkan dengan jumlah transaksi. Jumlah kendaraan yang melaju dan rasio pengisian di pompa bensin serta aneka order lainnya. Baik dengan penghitungan mata maupun suara. Bantuan ini sangat positif dilaksanakan untuk kepentingan para pengusaha, mahasiswa dan lembaga penelitian lainnya. Tentu dan pihak

penyandang difabel dan terutama para penerima angket diperlukan satu kerja sama.

#### **14. Tukang Absen**

Dia hanya bertugas untuk bersiap di mesin absen dan mengontrol tingkat laju pegawai. Baik di saat mereka mengambil ijin untuk meninggalkan pekerjaan. Sikap disiplin yang familiar lebih dihargai daripada sikap kritis dan bergaya polisi. Karena mereka sebagai pekerja harus dinilai sebagai pribadi yang baik tanpa harus terlebih dahulu dicurigai atau bahkan divonis dengan tuduhan beraneka macam.

#### **15. Tukang Lap**

Banyak barang industri yang sebelum berpihak harus dibersihkan dengan lap kering dan ini pekerjaan yang cocok untuk penyandang difabel. Termasuk dalam kategori ini tentu pengertian sederhana tentang pekerjaan mengelap dalam rumah tangga. Seperti memelihara perabot dan aneka barang logam. Yang perlu dipikirkan selain kesempurnaan hasil juga kehati-hatian sehingga tidak banyak rusak atau malah pecah bila materinya berupa gelas atau barang pecah belah yang lainnya. Masih soal mengelap mungkin juga bisa dipakai untuk pekerjaan membersihkan terakhir tangki motor dengan lapisan pemoles di tempat cuci mobil.

#### **16. Tukang Cuci**

Buruh cuci dan setrika masih memungkinkan dikerjakan oleh penyandang difabel/cacat tubuh. Ini sebuah pekerjaan sampingan yang produktif dan cocok mendapatkan tempat di perumahan. Karena di sana banyak tinggal keluarga modern yang hanya memiliki pembantu atau lahan sehingga mereka butuh tenaga khusus untuk mencuci. Termasuk juga dalam pengertian ini adalah membuka usaha kecil dalam bidang binatu baik memakai cara umum maupun dengan bahan kimia untuk order cuci tertentu. Dan mungkin kalau kita mau mengembangkan pengertian cuci ini maka kita akan menemukan sebuah usaha rentang seperti cuci boneka



yang juga termasuk ringan untuk penyandang difabel atau bahkan cuci mobil dan motor.

#### **17. Tukang Kemas**

Setelah di muka kita berbicara tentang tukang mengemas makanan. Maka sekarang kita akan berbicara tentang tukang mengemas parcel atau paket hantaran. Yang membutuhkan kemampuan khusus terutama agar terlihat indah dan eksklusif. Dibanding kemampuan untuk menata barang dalam satu kotak sehingga semua nampak dan tidak terkesan awut-awutan. Bisnis ini cocok untuk penyandang difabel/cacat tubuh.

#### **18. Pembersih Noda**

Jenis pekerjaan sederhana yang lain adalah pembersih noda di atas barang apa saja. Yang perlu diperhatikan adalah penyandang difabel mengenal aneka macam pembersih dengan kegunaan yang spesifik sementara itu penyandang difabel juga harus mengenal sifat khusus dari berbagai bahan sehingga akhirnya tidak malah merusak fungsi dasar dari bahan tersebut. Ukuran dengan tepat dan penuh dosis yang dianjurkan karena terlalu banyak menggunakan bahan pembersih juga bahan sebuah langkah bijaksana. Pembersih noda bisa mengklaim diri sebagai juru bersih segala noda maupun mengembangkan jenis tertentu semisal hanya untuk kain saja.

#### **19. Tukang Anyam**

Buruh penganyam merupakan salah satu aktivitas pekerjaan penyandang difabel di lingkungan industri kerajinan. Baik untuk bahan pelapis maupun untuk bahan jadi seperti pembuat keranjang. Pekerjaan ini selain bisa dikerjakan di tempat untuk beberapa alasan tertentu boleh juga dibawa pulang. Sistemnya bisa borongan atau harian dengan tambahan bila memnuhi target. Keterampilan mengayam sendiri mudah diperoleh bagi training singkat kerja maupun dalam pelajaran di panti penampungan/pendidikan penyandang difabel.

**20. Tukang Keramik**

Aneka bentuk kerajinan tanah liat baik dekoratif untuk keperluan sehari-hari merupakan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh penyandang difabel. Memang seperti halnya menganyam maka untuk inipun perlu pendidikan dan latihan khusus yang semua mudah didapat di pelatihan atau sentra industri. Untuk hasilnya biasanya hitung upah bijian mengingat pekerjaan satu bahan dengan yang lain membutuhkan penanganan dan tenaga yang berbeda. Semakin kreatif penyandang difabel maka harga pekerjaan penyandang difabel akan semakin mahal.

**21. Tukang Ukir**

Mengukir merupakan salah satu pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh penyandang difabel. Bahkan oleh orang yang hanya menggunakan kaki. Ukiran ini bisa dikerjakan dibanyak media terutama kayu. Tentu prinsip dasar mengukir amat mudah dipelajari namun yang paling sulit adalah semangat untuk berlatih sehingga ukirannya menjadi sempurna. Seperti juga kerja seni lainnya maka ukiran juga amat beruntung desain terutama untuk pesanan yang eksklusif. Meski ada juga yang borongan semacam ukiran untuk balai kerajinan.

**22. Kerajinan Kulit**

Dompot, sabuk, tas dan aneka barang lainnya merupakan salah satu cabang kerajinan yang memungkinkan dikerjakan oleh penyandang difabel terutama di pengerjaan seperti mengelem atau menjahit bagian dalam. Keahlian ini sangat bernilai komersial karena kulit termasuk barang eksklusif yang bernilai tinggi.

Selain pendidikan dasar, sekali lagi pengalaman merupakan suatu yang mutlak diperlukan. Karena kerapihan jahitan memang hanya bisa dicapai oleh orang yang memiliki pengalaman cukup di bidangnya. Mengingat bahan bakunya yang masih tergolong relatif murah maka pekerjaan ini memungkinkan untuk dilakukan secara wiraswasta bagi penyandang difabel.

**23. Membuat Gagang Pisau**

Seringkali terlihat bahwa pandai besi atau industri baja untuk pisau dan alat tradisional peralatan pertanian membutuhkan pekerja khusus yakni tukang pembuat dan pemasang gagang pisau. Yaitu mereka yang menyetel agar besi pisau bisa serasi digagang kayu sehingga aman digunakan. Honor pekerjaan ini selain hitungan bijian juga akan semakin mahal bila kerjanya semakin berat seperti untuk gagang cangkul.

**24. Tukang Sulak**

Pembuat sulak, alat pembersih tradisional debu dengan menggunakan bulu ayam atau plastik yang tradisional menjadi salah satu keterampilan penyandang difabel. Hal ini mengingat pekerjaan itu tergolong mudah dan sederhana untuk dilakukan namun memiliki angka kebutuhan tinggi dalam kehidupan kesehatan masyarakat. Baik dikerjakan secara kelompok maupun sendiri masih memungkinkan karena modal yang dibutuhkan relatif kecil.

**25. Kerajinan Keset**

Keset suatu perlengkap standar untuk membersihkan kaki sebelum masuk ke kamar tidur. Yang biasanya berupa sabut atau ijuk. Sekarang ada juga yang anyaman karpet, plastik dan bahan lain, juga merupakan salah satu keterampilan yang biasanya dilakukan oleh penyandang difabel untuk mengais rejeki. Hal ini sekali lagi, menguntungkan karena dekat dengan kebutuhan masyarakat yakni berupa kebersihan yang merupakan sebagian dari iman dan kesehatan.

**26. Kerajinan Tikar**

Tikar sekarang ini tidak hanya beranyam dan berwarna namun seringkali juga menggunakan logo tertentu untuk sebuah keperluan organisasi. Hal ini menjadi satu bisnis praktik yang menawarkan keuntungan menarik. Karena termasuk pekerjaan besar maka sebaiknya dikerjakan secara kelompok. Bahan bakunya bisa berupa pandan, pengolahannya seringkali menjadi agenda pelatihan untuk industri kecil. Yang utama bagi pekerja penyandang difabel adalah :

- Kemudahan pengerjaan amat dibutuhkan dalam kerja penyandang difabel hal ini tentu terkait erat dengan kondisi fisiknya yang memiliki kemampuan serba terbatas. Sehingga tidak bisa dipaksakan untuk menangani pekerjaan rumit, membutuhkan keahlian tinggi dan mobilitas yang cepat. Kesadaran prosedur untuk bekerja sangat dibutuhkan. Sehingga tidak dituntut mengerjakan saja.
- Modal usaha kecil atau bahkan ikut sebuah usaha yang sudah jadi merupakan langkah yang perlu diambil. Mengingat selain meminimalkan risiko juga supaya mereka tidak terbendung hasratnya untuk bekerja hanya sekedar karena halangan modal. Kreasi yang unggul juga merupakan salah satu modal agar karya mereka bisa diperhitungkan.

Selain itu memang perlu ditumbuhkembangkan kesadaran untuk saling membantu dari banyak pihak terkait. Baik oleh pemerintah, para pengusaha dan orang yang dikaruniai fisik normal termasuk juga mereka yang sesama penyandang difabel. Iklim usaha yang teduh di mana akan terjadi kontrak saling asah-asih. Asuh memang perlu ditumbuhkembangkan sehingga semua merasa nyaman perlu dalam berusaha, di samping hasrat usaha ini para penyandang difabel juga harus ditumbuhkan terus menerus agar mereka merasa berguna di tengah keluarga yang ada. Dalam hal ini pasti bahwa penyandang difabel harus turut serta.

### **27. Penghias Kue Dekorasi**

Penghias kue dekorasi dengan krim atau coklat memang sepintas mudah. Namun untuk menghasilkan sesuatu yang sempurna dibutuhkan proses belajar yang lama terutama sampai desain yang eksklusif. Pekerjaan ini cocok untuk penyandang difabel karena tidak membutuhkan banyak tenaga dan dapat dilakukan oleh mereka yang hanya memiliki tangan yang lengkap. Keterampilan ini bisa diperoleh melalui kursus.

**28. Melukis Porselen**

Melukis porselen menjadi gambar yang indah memang bernilai komersial apalagi bentuknya yang halus dan rapi. Melukis porselen juga sering dilakukan sebagai komoditi seni jalanan. Mereka menggunakan potongan keramik lantai sebagai salah satu media untuk berekspresi dengan menuangkannya ke dalam bentuk pemandangan atau objek lainnya. Baik para penyandang difabel yang memiliki bakat melukis menekuni bisnis ini merupakan satu langkah yang tepat bagi penyandang difabel.

**29. Bisnis Letter**

Salah satu perlengkapan standar yang sering ada di depan rumah adalah nama dan nomor rumah yang terbuat dari plastik. Membuat papan nama mini seperti ini merupakan sebuah aktivitas usaha untuk bisa dilakukan oleh penyandang difabel. Karena selain mekanisme kerjanya sederhana, bahan bakunya termasuk murah. Diperlukan ketelitian yang tinggi sehingga komposisinya bisa menarik harga letter ini sering ditentukan berdasarkan jumlah hurufnya.

**30. Jasa Katalog**

Salah satu usaha yang bisa dilakukan oleh penyandang difabel dan dalam rumah adalah proses penyusunan katalog. Penyusunan ini bisa berdasarkan regional maupun kepentingannya. Penawaran dan sistem rekrutmen peserta katalog bisa dilakukan lewat pos dan begitu pula dengan distribusinya. Pengelola katalog memiliki dua kantong uang yang pertama dari para pemasang produk dan kedua dari orang yang membelinya.

**31. Tukang Lem**

Jasa ini tergolong amat mudah namun membutuhkan rutinitas dan mobilitas tinggi. Maka diluar negeri ada kendaraan khusus yang diciptakan untuk penyandang difabel, di Indonesia ada beberapa pencipta khusus barang itu. Yang akan memudahkan pekerjaan sebagai tukang lem promosi. Surat kabar, pengumuman, dan lain-

lain. Honor biasanya sistem borongan namun untuk koran yang tetap maka honor adalah bentuk bulanan.

### **32. Tukang Tempel Merek**

Pernahkan anda berpikir, bahwa merek cap perlu tempelkan merek sirup juga harus ditempelkan dan aneka merek kemasan barang lainnya, tentu hal ini jumlahnya tidak sedikit karena mereka barang tersebut adalah massal. Maka penempel merek adalah jasa yang dibuthkan di industri kecil. Yang paling utama adalah pekerjaan ini bisa dilakukan oleh para penyandang difabel. Pekerjaan ini tidak membutuhkan pengalaman atau keahlian khusus.

### **33. Kupas Buah**

Mengupas buah juga merupakan pekerjaan mudah yang bisa dilakukan oleh penyandang difabel. Baik di restoran, supermaret atau rumah makan. Hal ini merupakan keterampilan yang tidak dibutuhkan ilmu khusus hanya pengalaman untuk meningkatkan serta sikap hati-hati dalam menggunakan pisau. Modal kerjanya pun relatif sederhana yakni pisau buah. Biasanya tenaga honorer sesuai dengan jumlah buah yang bisa dikupasnya. Selain buah dalam hal ini termasuk juga misalnya sayur dan kentang.

### **34. Dunia Hiburan**

Di banyak hal, penyandang difabel sering memeragakan gerakan yang lucu. Hal ini tentu merupakan sebuah keuntungan tersendiri terutama mereka yang ingin berkiprah di sektor hiburan. Batu baterey ABC terkenal dengan badut cebolnya. Begitu juga dengan banyak rombongan hiburan di banyak tempat mereka mempekerjakan penyandang difabel.

### **35. Merangkai Bunga**

Merangkai bunga merupakan kegiatan mengasyikkan yang bernilai komersial yang bisa dijalankan oleh penyandang difabel. Hanya untuk menguasai berbagai gaya bentuk membutuhkan waktu yang cukup guna mempelajarinya. Materi yang beragam mulai bunga, vas dan gaya. Membuat ada memungkinkan untuk mengerjakan bermacam rencana yang sesuai dengan apa yang Anda kreasikan.

Sekarang ini rangkaian bunga kering/plastik kerap kali menjadi standar bagi rumah maupun perkantoran; jadi prospeknya masih sangat cerah.

### **36. Kerajinan Suvenir**

Pembuatan souvenir berbagai bentuk dan bahan bisa dilakukan oleh penyandang difabel terutama di bagian yang mudah. Hal ini tentu sebuah kenyataan yang menarik, hanya saja perlu juga kerja sama dengan orang lain yang memiliki keahlian khusus untuk menghasilkan satu rangkaian yang utuh. Mengingat cinderamata sekarang ini banyak memiliki bagian yang merupakan ragam komposisi yang berbeda.

### **37. Tukang Belanja**

Ini pekerjaan yang menyenangkan dan bisa dibutuhkan oleh penyandang difabel hanya saja hal ini perlu dilihat dari kemampuan dari penderita mengingat pekerjaan ini membutuhkan mobilitas yang lumayan tinggi. Unsur lain yang harus bisa dijaga adalah kepercayaan terutama mereka yang memberi mandat untuk belanja. Segmennya adalah ibu-ibu yang sibuk juga kalangan kantin dan restoran.

### **38. Gerbang Busa**

Di luar negeri para penyandang difabel sering bekerja di sebuah alat yang bertujua menghasilkan busa dengan jalan diputar dan dialirkan dengan udara. Gerbang busa ini amat sering tampil di pentas musik, pameran atau penyambut tamu lainnya, penyandang difabel biasanya dalam bentuk badut justru akan menyemarakkan suasana. Hanya agar tidak terlalu banyak yang keluar busanya maka sekali ditunjukkan agenda yang lucu. Ada semacam himbauan bahwa penyandang difabel/cacat tubuh hendaknya apabila ingin menjadi badut maka akan banyak menunjukkan gerak dari pada berbicara, hal ini lebih menguntungkan dan tidak merangsang adanya pelecehan.

### **39. Juru Ketik**

Profesi juru ketik juga dapat dilakukan oleh para penyandang difabel terutama mereka yang memang suka tulis menulis. Selain menjadi

juru ketik profesional ada baiknya mereka belajar metode mengetik sepuluh jari sehingga hasil kerjanya baik dan cepat. Sukur lagi kalau juga belajar ejaan yang disempurnakan sehingga bisa membenarkan hal yang salah dari segi bahasa. Untuk melengkapi maka bisa pula belajar komputer.

#### **40. Telepati/Hipnotis/Tukang Sulap**

Para penyandang difabel juga bisa belajar hipnotis/telepati/sulap yang bertujuan selain untuk mengasah batin juga keterampilan yang laku untuk dijual. Memang adakalanya permainan sulap hanya tampak sebagai sesuatu yang ganjil dan mistik padahal itu semua adalah trik yang bisa dipelajari. Di beberapa kota besar memang ada kursus seperti ini. Sehingga bagi penyandang difabel yang ingin belajar tentu mesih bisa dilakukan salah satu pengajaran yang terkenal misalnya adalah Mr.Robin.

#### **41. Pemasang Plat Mobil**

Untuk penyandang difabel/cacat tubuh tertentu terutama kaki pemasangan plat mobil merupakan usaha komersial yang mudah dilakukan mengingat mereka tidak perlu membungkuk sebab tinggi badannya pas. Perlengkap standarnya hanya berupa obeng dan pemukul disamping juga beberapa tempat adalah daerah yang cukup strategis untuk usaha ini. Meski pemasangan ini murah namun dalam sehari bisa melakukan puluhan kaki bila ramai sehingga benar-benar lumayan.

#### **42. Pemukul Lonceng**

Pemukul lonceng merupakan salah satu pekerjaan yang cocok untuk penyandang difabel. Mengingat hal itu amat mudah dilakukan dan hanya membutuhkan ketepatan waktu. Pemukul lonceng untuk industri, gereja dan lain sebagainya biasanya memperoleh honor yang lumayan dalam arti ini bukan sekedar kerja sosial.

#### **43. Kerajinan Gips**

Bahan gips ternyata hanya untuk dokter gigi namun juga untuk kepentingan seperti industri cenderamata yang murah dan meriah. Bahan gips yang mudah padat dan gampang dibentuk merupakan



keistimewaan tersendiri. Cara pembuatanyapun mudah tinggal dicampur dengan air saja, memang untuk cetakannya atau bentuk tertentu diperlukan keahlian khusus namun untuk menuangkannya tidak. Tulang-tulang dan bentuk gips inilah pekerjaan yang cocok untuk penyandang difabel. Biasanya honor tentukan seberapa banyak anda dapat melakukannya.

#### **44. Tukang Gunting**

Tanaman d perlu digunting. Kartu ucapan perlu digunting. Kelebihan kemasan perlu digunting. Rambut perlu digunting. Kain perlu digunting. Menggunting kain atau rambut memang memerlukan pendidikan yang khusus namun semua itu tentu bisa dipelajari. Jasa menggunting cocok untuk penyandang difabel tinggal mereka harus pandai mencari dan mensiasatinya.

#### **45. Pemasangan Pagar Batas**

Pusat pertokoan seringkali dipasang pembatas sementara berupa pagar dengan stainless dan rantai plastik. Pekerjaan ini amat cocok untuk penyandang difabel. Hanya hal yang perlu diperhatikan adalah agar supaya itu tidak mengganggu kenyamanan pengunjung dan sesuai dengan ukuran yang telah di tentukan. Bahkan pemasangan pagar dan pemulihan/kontrol di sela-sela pameran juga akan menarik simpati pengunjung. Ada penyelenggara yang suka memberikan kostum formal namun ada pula yang memberikan kostum badut.

#### **46. Tukang Cuci Piring**

Restauran perlu tenaga pencuci setiap hari. Asrama butuh tenaga pencuci setiap hari. Pusat pendidikan dengan sistem asrama juga butuh tukang cuci. Cuci memang salah satu unsur yang cukup komersial. Ini baru di dapur belum di lokasi lain. Seperti mobil pakaian, korden dan aneka barang lainnya. Pekerjaan ini amat dibantu dengan munculnya puluhan jenis sabun cuci yang sudah tentu akan meringankan. Bagi penyandang difabel pekerjaan ini boleh dikatakan cocok apabila ia memang bersedia. Hanya saja perlu dipertimbangkan agar selain yang bertugas spesial mencuci,

hendaknya ada juga yang spesial untuk mengangkut hasil cucian. Agar lebih cepat selesai dan tidak terlalu membawa resiko. Di luar negeri pekerjaan ini lebih mudah dengan hadirnya mesin cuci otomatis.

#### **47. Tukang Balon**

Balon gantung perlu ditiup, balon artistik ditambah pernik-pernik, balon gas perlu diisi. Tukang balon biasanya berjualan di tempat anak sekolah, taman bermain, pusat pertokoan atau perumahan. Balon adalah mainan murah yang menggemari anak-anak namun tidak membuat untuk promosi dan juga untuk keperluan pesta.

#### **48. Penjaga Dispenser Minuman**

Dispenser minuman seperti merk Coca Cola yang pengoperasiannya tinggal menekan saja kemudian menyesuaikan dengan ukuran gelas merupakan sebuah pekerjaan mudah yang masih memungkinkan untuk dikerjakan olah penyandang difabel. Sehingga dengan keberanian tertentu para orang cacat boleh mengajukan diri sebagai penjaga minuman ini. Tidak hanya Coca Cola namun juga dispenser kafetaria biasa juga bisa. Singkat kata jadikan dispenser minuman sebagai salah satu alat usaha anda.

#### **49. Tukang Cap**

Menstempel kertas atau mengecap barang lain memerlukan kecepatan dan ketelitian namun amat mudah dilakukan bahkan oleh penyandang difabel sekalipun. Hal ini menumbuhkan sebuah harapan baru bahwa penyandang difabel meski hanya tenaga honorer masih memiliki peluang untuk bekerja di kantor. Tinggal bagaimana anda sekarang? Mengingat perjalanan ke arah sana bukanlah jalan yang lurus bertabur bunga melainkan jalan yang berliku. Sebagai sumbangan saya telah menyusun satu buku kiat sukses menjadi karyawan yang bisa Anda pesan di penerbit aneka. Di sana saya mengungkap-kapkan bagaimna cara melamar pekerjaan dengan menggunakan sistem proposal.

**50. Tukang Gulung**

Menggulung kain yang tercerai berai merupakan pekerjaan ringan yang bisa dilakukan oleh penyandang difabel. Karena tidak melakukan keahlian khusus hanya kerapihan menata agar ujung-ujungnya rata dan manis. Selain kain bisa pula karpet dan kain. Untuk jasa seperti ini memang anda dituntut untuk pandai menawarkan diri pada kaum pengusaha dan menyatakan niat anda untuk membantu dengan gaji yang mungkin hanya cukup untuk hidup.

**51. Komentator, Kritikus, dan Penulis**

Anda yang penyandang difabel namun memiliki modal pengetahuan yang luas dan memiliki kemampuan untuk mengamati sesuatu dengan baik. Dapat mencoba untuk menjadi komentator, penulis, atau kritikus. Ini adalah sebuah profesi ganda yang tidak hanya menawarkan materi namun juga nama dan ketenaran. Orang cenderung objektif menilai tidak sekedar hanya dari fisik namun terlebih dari pola pikirnya. Demikianlah yang bisa saya ungkapkan sebagai contoh. Ini hanyalah lemparan ide dan gagasan, yang mungkin hanya akan mudah untuk dituliskan namun sebenarnya sangat sukar dilaksanakan Apabila anda tidak memiliki semangat berjuang. Hidup ini adalah perjuangan, jangan patah semangat sebelum berbuah, karena tiada sesuatu usaha yang berbuntut sia-sia. Saya turut berdoa.

**L. Kata-kata Hikmah Untuk Penyandang Difabel****1. Anda tidak sendiri**

Salah satu hal yang harus kita ingat ditengah musibah atau kecacatan yang kita terima adalah bahwa Anda tidak menjalani sendiri. Di dunia ini bukan cuma ada yang buta, bukan cuma ada lumpuh kaki atau bisu atau tuli. Namun beribu yang lain di Indonesia dan seluruh di dunia. Merebaknya panti penampungan dan pendidikan anak difabel merupakan salah satu indikasi akan adanya hal itu.

Di samping juga kenyataan bahwa pemerintah mengemas pendidikan khusus untuk mengatasi persoalan itu dengan Pendidikan Luar Biasa (SLB) yang memiliki beragam golongan. Nah, kalau kemudian ada persoalan yang muncul hal lebih kembali kepada penderita difabel:

- Dapatkah ia ikhlas menerima musibah dan kekurangan?
- Dapatkah ia memanfaatkan potensi yang masih ada?
- Mempukan ia bergaul dengan wajar di masyarakat?
- Dapat secara komersial ia berusaha?

Pertanyaan terbesutnya dijawab dengan penuh perasaan yang optimis mengingat bahwa semua memiliki kesempatan yang sama. Dan perlu diingat oleh setiap penyandang difabel bahwa orang yang normal tubuhnya bukan berarti tanpa masalah. Mungkin kalau keadaan fisik yang sempurna segalanya tentu tak akan ada cerita bahwa seorang pemuda menjadi putus asa atau patah hati kehilangan harapan. Dan koran tak akan dipenuhi berita mereka yang mencari jalan pintas karena kecewa. Ini sebuah kenyataan bahwa selama hidup kita selama bahwa “pelangi selalu berada di atas orang lain”.

Untuk itulah perlu ditumbuhkan semangat untuk setia kawan di kalangan para penyandang difabel dan dengan para manusia normal. Sehingga menjadi modern seperti: kesepian yang mencekam; perasaan diasingkan; dan gelap dalam terang, terang dalam gelap; Semua bisa ditepis habis.

Mungkin saja Anda sering kali terbesit satu pikiran kenapa cobaan seperti ini yang mendera Anda? Namun Anda akan lebih terasa ringan jika dapat membuktikan bahwa Anda dapat melakukan sesuatu di tengah segala keterbatasan. Lewat sebuah humor konselor orang difabel di Yogyakarta berkata kepada saya: Orang difabel itu kan seperti lagu. Yang satu bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Namun sisi lain berkata lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Apa kesimpulannya? Tidak ada sakit yang lebih baik.

Persoalannya adalah bagaimana kita mengobati atau mengatasinya. Ini yang harus ditumbuhkembangkan. Sehingga salah kalau ada pandangan bahwa yang buta lebih nikmat daripada yang tuli,

yang tuli lebih nikmat dari yang pincang. Semua itu terjadi karena masing-masing merindukan sesuatu yang dia tidak miliki. Hanya dengan latihan yang keras maka jarak kerinduan itu diperkecil sehingga semua bisa dinikmati. Yang penting Anda merasa bahwa kemalangan ini bukan milik sendiri dan perintahkanlah pada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Kamilah yang akan memberikan rizki kepadamu. Dan akibat yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.” (QS Thoha 20: 132)

## **2. Jangan paksakan diri untuk hal yang tak mungkin**

Mungkin saya harus mengulanginya berkali-kali bahwa Anda harus pandai menginventarisir potensi dan tidak bersikap untuk memaksakan diri untuk hal yang tidak mungkin. Jangan melompat kalau kaki tidak mampu. Itu merupakan contoh. Karena tanpa memaksakan diri sekalipun, sebenarnya Anda telah memiliki cukup potensi untuk berkembang. Bukankah menggarap sawah ladang sendiri akan lebih aman dan lebih baik daripada kita berniat menggarap hutan namun tenaga kurang. Salah satu rangsangan kenapa anda dan manusia pada umumnya menginginkan tingkat konsumsi dan gaya hidup yang berlebih-lebihan yang belum tentu cocok untuk dia. “Tidak semua yang bergemerlapan itu emas”. Gaya hidup yang salah adalah muara penyakit manusia jaman sekarang baik mental maupun badan. Seperti penyakit kesepian dan keterasingan seolah berlomba dengan darah tinggi dan stres yang merupakan akibat gaya hidup yang salah. Maka meski cacat namun gaya hidup harus benar! Jangan paksakan untuk sekedar beradu gaya dengan orang lain, mengalahlah demi ketentraman dan siapa yang pandai bersyukur menikmatinya akan ditambahkan. Kalau keinginan hidup tidak semua bisa dipenuhi maka sebaiknya Anda berani untuk menawar.

## **3. Bagi Penyandang Difabel Harus Tahan Celaan**

Kita memang harus sabar bahwa ada sisi kurang menyenangkan yang bisa hadir dalam kehidupan seseorang. Seperti munculnya

keusilan dan keisengan yang terkadang mencela cacat orang lain. Mungkin kita sakit hati, tersinggung namun harus bisa menahan diri.

Memang proses menahan emosi bukan sebuah hal yang mudah. Sifat manusia kita, kurang sabaran kita sering memancing munculnya suatu kondisi yang tidak perlu. Kita ingin membalas dengan berusaha menyeimbangkan sakit hati kita. Dengan kembali mengejek, bahkan menghasud. Namun semua itu tidak akan menyelesaikan masalah. Harus ada satu sikap yang pasti bahwa tidak layak seseorang dilukai, jangan mencubit orang lain kalau ternyata ketika dicubit kita merasa sakit.

Selain pengendalian emosi, usaha terbaik untuk menahan celaan adalah dengan cara berbuat yang positif. Melalui sebuah karya kerja nyata. Melalui tingkah laku yang simpatik. Karya akan menjawab tugas siapa kita sementara sikap akan membuat orang lain menjadi segan. Memang seseorang yang sentimen tidak akan berbicara dengan argumen. Hingga hanya melihat sisi kekurangan fisik yang nyata. Hal ini sangat mungkin terjadi karena disebabkan seseorang merasa ini terhadap apa yang telah kita lakukan. Kenyataan ini harus dihadapi dengan lebih banyak merangkul daripada memukul dan lebih banyak mengajak dari pada mengejek. Terhadap celaan hendaknya kita bersikap seperti air dalam menghadapinya. Meski celaan itu ibarat batu namun kita percaya bahwa tetes demi tetes kebaikan kita akan melunakkannya. Kesempatan untuk didera celaan kadang kala juga merupakan anugerah dan jaminan akan mengalirnya pahala karena keikhlasan kita, semoga semangat ini senantiasa ada di hati saudara.

#### **4. Kesenggangan Positif untuk Penyandang Difabel**

Berkebun, bertani, menanam bunga, memelihara binatang, membuat bonsai, bermain drama, melatih organ, menambah pengetahuan, belajar keterampilan, mencoba ide-ide baru, menikmati keidahan alam, memperbanyak ibadah, silaturahmi, beristirahat, menyulam, berkorespondensi, rekreasi, mengikuti arus komunikasi.

**M. Rambu-rambu Penyusunan Rencana Usaha (*Business Plan*)****Pertimbangan Umum**

1. Apa produk yang akan dihasilkan  
Jenis produk/jasa yang ingin dibuat/dijual keistimewaannya secara umum dan khusus.
2. Dimana dan mengapa memilih lokasi usaha.
  - a. Peta tempat usaha.
  - b. Alasan pribadi dan ekonomi memilih lokasi tersebut.

**Rencana Pemasaran**

1. Siapa yang akan menjadi pelanggan dan darimana mereka.
2. Pedagang besar, pengecer, perorangan, rumah tangga, sekolah, rumah sakit, kantor pemerintah dsb.
3. Bagaimana calon pengusaha dapat menjelaskan setiap pelanggan.
4. Jelaskan kelompok pelanggan yang berbeda untuk setiap produk, karakteristik dari anggota-anggota setiap kelompok secara umum, dan siapa saja yang ingin dan mampu membeli produk tersebut.
5. Berapa unit yang akan dibeli oleh pelanggan dalam setahun produk usaha.
  - a. Menetapkan kelompok pelanggan untuk masing-masing produk.
  - b. Perkirakan jumlah mereka.
  - c. Perkirakan berapa sering mereka membeli.
  - d. Perkirakan berapa banyak yang mereka beli dalam satu tahun.
6. Siapa yang akan menjadi pesaing dan berapa unit produk yang dihasilkan tiap tahun.
7. Tentukan para pesaing untuk setiap produk dan perkirakan berapa unit yang mereka dapat jual dalam setahun.
8. Berapa unit produk maksimal yang mungkin dapat dijual.
9. Berdasarkan peluang dan pesaing, perkirakan berapa banyak masing-masing produk yang dapat dijual.
10. Bagaimana mempromosikan produk yang ada.
11. Jelaskan berapa cara mempromosikan produk dan pesan yang tepat untuk calon pelanggan.

12. Bagaimana perkembangan permintaan atas produk di pasar.
  - a. Perkembangan populasi di wilayah pasar.
  - b. Perkembangan jumlah pelanggan.
  - c. Perkembangan keinginan dan kemampuan membeli.
13. Berapa banyak produk yang akan dibuat dan dijual pada setiap tahun,
14. Buatlah perkiraan jumlah unit utama yang akan dibuat dalam jangka tiga tahun pertama operasi usaha.
15. Kualitas produk yang bagaimana yang diinginkan pelanggan.
  - a. Bentuk (*appearance*) : keenakannya dipandang mata.
  - b. Penampilan (*performance*) : punya arti tersendiri.
  - c. Keawetan (*durability*) : tahan lama.
  - d. Keamanan (*safety*) : tidak mencelakakan.
  - e. Kenyamanan (*comfort*) : enak dirasakan.
  - f. Ekonomis (*economy*) : dihubungkan dengan harga.
16. Bagaimana kualitas yang ditawarkan.
17. Perhatikan keunggulan dan kelemahan produk pesaing.
18. Berapa harga jual yang ditentukan.
  - a. Biaya plus tingkat keuntungan tertentu.
  - a. Memperhatikan harga pesaing.
  - b. Harga promosi.

### **Rencana Produksi dan Operasional**

1. Bagaimana langkah-langkah dalam memproduksi setiap produk.
2. Jelaskan langkah-langkah produksi untuk setiap produk dan juga waktu dari setiap langkah tersebut.  
Mesin, alat-alat dan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan
3. Catat semua mesin, alat, perlengkapan yang dibutuhkan dan jelaskan penggunaannya masing-masing.
4. Dimana mesin, alat, dan perlengkapan tersebut didapat/dibeli dan berapa biayanya.
5. Bagaimana perawatan/pemeliharaan mesin dilakukan dan apakah suku cadangnya tersedia di pasar setempat.



6. Jelaskan tugas-tugas perawatan dan siapa yang melaksanakannya.
7. Dimana dan kapan suku cadang didapat.
8. Berapa luas tempat yang dibutuhkan untuk bengkel kerja.  
Gambar sketsa tata ruang dan berapa luas total yang dibutuhkan.
9. Jenis pekerja langsung yang dibutuhkan dan keterampilan apa saja yang dimiliki oleh mereka.
10. Nama jenis pekerjaan yang akan dilakukan dalam setiap langkah produksi/ operasi.
11. Jelaskan kualifikasi dan pengalaman yang harus mereka miliki.
12. Berapa pekerja langsung yang dibutuhkan untuk operasi tahun pertama, kedua, dan ketiga.
13. Tenaga kerja tidak langsung apa yang dibutuhkan dan keterampilan apa yang harus mereka miliki.  
Supervisor, sekretaris, manajer dll.
14. Berapa besar biaya total untuk pekerja langsung dan tidak langsung.  
Biaya total untuk pekerja langsung dan tidak langsung.
14. Jenis bahan/material yang dibutuhkan dan dimana mendapatkannya.  
Yang perlu diperhatikan untuk mencari pemasok adalah: jauh-dekat, tersedia bila dibutuhkan, keragaman sediaan dan syarat pembelian seperti kredit. Selain itu adalah harganya.
15. Berapa banyak bahan langsung yang dibutuhkan dan biaya bahan per unit produksi.
16. Berapa besar biaya bahan langsung tahun pertama, kedua, dan ketiga.
17. Berapa banyak bahan tidak langsung yang dibutuhkan dan biayanya untuk operasi tahun pertama, kedua, dan ketiga.

### **Rencana Organisasi dan Manajemen**

1. Manajemen
  - a. Latar belakang pendiri perusahaan.  
Pribadi para pendiri, kepemilikan saham/modal.
  - b. Manajemen perusahaan.

2. Dewan komisaris dan manajemen, personalia inti, struktur organisasi
  - a. Ketentuan yang menyangkut hukum.
  - b. Perijinan, lisensi, kontrak-kontrak usaha.
  - c. Hubungan dengan lembaga pendukung.
3. Status hubungan bank, jaminan tersedia, jenis dan jumlah kredit yang dibutuhkan.
4. Lingkungan tempat usaha.
5. Daerah industri, perdagangan atau pemukiman.
6. Rencana keuangan.
7. Berapa besar biaya umum untuk tahun pertama, kedua, dan ketiga pekerja tidak langsung, bahan tidak langsung, sewa, listrik, air, servis dan reparasi, telepon dan pos, atk, perjalanan, transportasi, asuransi, penyusutan, bunga pinjaman, dan lain-lain.
8. Berapa besar biaya tenaga kerja langsung per unit produksi.
9. Berapa besar biaya umum per unit produk.
10. Berapa biaya total produk dan harga jual setiap produk.
11. Apa dan berapa besar biaya persiapan sebelum beroperasi.
12. Meliputi sewa tempat usaha, biaya perjalanan, promosi proyek, membuka account bank, izin usaha, biaya proses kredit, biaya.
13. Berapa besar modal kerja yang dibutuhkan.
14. Besarnya uang yang diperlukan untuk menjalankan usaha dari hari-kehari seperti sediaan bahan, sediaan barang, piutang, dan uang tunai.
15. Bagaimana mendanai harta tetap, biaya persiapan dan modal kerja hitung investasi total dan jelaskan kebutuhan pinjaman dan modal sendiri.
16. Jaminan yang dapat ditawarkan ke bank.
17. Jelaskan jaminan yang dapat ditawarkan dan juga nilainya.
18. Bagaimana mengatur jadwal pembayaran kembali pinjaman, hitung bunga dan angsuran tetap per tahun.
19. Berapa besar *break even point* (bep) penjualannya.

168

20. Berapa besar laba yang akan diperoleh pada operasi tahun pertama, kedua, dan ketiga proyeksi rugi-laba sangat diproyeksikan rugi laba sangat diperlukan.
21. Berapa besar uang tunai yang akan dimiliki pada akhir tahun pertama, kedua, dan ketiga
22. Berapakah *return on sales*, *return on equity* dan *return on investment*.
23. Apakah rencana usaha ini layak atau tidak.
24. Berikan komentar tentang kelayakan proyek tersebut.

# BAB VI

## PENGELOLAAN PENYANDANG DIFABEL DI TEMPAT KERJA

### A. Dasar Pemikiran Kerja Penyandang Difabel

Kaidah ILO tahun 2006 tentang Pengelolaan Penyandang Difabel di tempat kerja adalah sebagai berikut: Para penyandang difabel bukanlah kelompok manusia yang seragam. Mereka ada yang mengalami difabel fisik, difabel sensorik, pikiran atau mental. Mereka ada yang menyandang difabel sejak lahir, atau saat kanak-kanak, remaja atau dewasa ketika masih bersekolah atau bekerja. Kondisi kecacatan mereka mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan mereka untuk bekerja dan berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan atau bantuan dari orang lain.

Di seluruh belahan dunia, para penyandang difabel berpartisipasi dan memberikan sumbangan berarti pada dunia kerja di segala tingkatan. Namun, banyak penyandang difabel yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan karena berbagai hambatan. Tingkat pengangguran di kalangan 386 juta

penyandang difabel di seluruh dunia yang berada di usia kerja jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran usia kerja umumnya.

Kendati diakui pertumbuhan ekonomi dapat mengarah pada meningkatnya peluang kerja, kaidah menegaskan langkah-langkah terbaik yang memungkinkan para pengusaha untuk memanfaatkan keterampilan dan potensi penyandang difabel sejalan dengan kondisi nasional yang ada. Juga semakin jelas bahwa para penyandang difabel tidak hanya memberikan sumbangan berharga bagi perekonomian nasional, tetapi juga menegaskan fakta bahwa dengan mempekerjakan mereka menurunkan biaya jaminan penyandang difabel dan sekaligus mengentaskan kemiskinan. Ada kecenderungan bisnis yang kuat untuk mempekerjakan penyandang difabel:

1. Berdasarkan perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia, 10 persen penduduk dunia atau 610 juta jiwa adalah penyandang difabel, dan 610 juta di antaranya berusia antara 15 sampai 64 tahun.
2. Angka pengangguran yang dilaporkan berkisar mulai dari 13 persen di Amerika Serikat. Jumlah ini dua kali lipat jumlah angkatan kerja penyandang difabel, hingga 18 persen di Jerman, dan bahkan 80 persen atau lebih di banyak negara berkembang.

Karena mereka seringkali dianggap memenuhi syarat untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Para pengusaha juga dapat memperbanyak jumlah pekerja yang terampil dengan cara tetap mempekerjakan pekerja penyandang difabel mengingat kecakapan kerja yang diperoleh selama bekerja dan mengikuti pelatihan yang terkait dengan pekerjaan.

Banyak organisasi dan jaringan kerjanya termasuk organisasi pengusaha dan serikat pekerja, serta organisasi para penyandang difabel berperan dalam memperlancar hubungan kerja, jaminan tetap bekerja, dan peluang untuk kembali bekerja bagi pekerja yang menjadi difabel akibat kerja. Berbagai langkah yang diterapkan oleh organisasi-organisasi ini mencakup pernyataan kebijakan dan ketentuan tentang jasa bimbingan dan pemberian dukungan. Kaidah ini disusun untuk menjadi panduan bagi para pengusaha baik perusahaan berskala besar,

menengah atau kecil; di sektor pemerintah atau swasta; di negara berkembang atau industri maju untuk menerapkan strategi positif dalam menangani berbagai masalah yang berkenaan dengan penyandang difabel di tempat kerja.

Walaupun kaidah ini pada dasarnya ditujukan untuk para pengusaha, pemerintah memainkan peranan penting dalam menciptakan kerangka kebijakan peraturan dan sosial yang mendukung, serta memberikan insentif untuk meningkatkan peluang kerja bagi para penyandang difabel. Selain itu, peran serta dan prakarsa dari para penyandang difabel tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan kaidah ini. Isi kaidah ini berdasarkan pada prinsip-prinsip yang mewadahi berbagai perangkat dan prakarsa internasional serta dirancang untuk mempromosikan pekerjaan yang aman dan sehat bagi seluruh penyandang difabel. Kaidah ini bukanlah perangkat yang mengikat secara hukum dan tidak pula dimaksudkan untuk menggantikan perundangan nasional.

Kaidah ini diharapkan ditelaah sesuai konteks kondisi nasional dan diterapkan sesuai dengan peraturan perundangan nasional. Kaidah ini difinalisasi dan diadopsi secara anonim pada pertemuan tripartit para pakar di Jenewa pada 3-12 Oktober 2001, yang dilaksanakan sesuai dengan keputusan Dewan Pengurus ILO pada Sesi ke-277 (Maret 2000). Para pakar dari berbagai negara ditunjuk menyusul dengan pihak pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat dari Dewan Pengurus ILO.

## **B. Ketentuan-ketentuan Umum Kerja Penyandang Difabel**

### **1. Tujuan**

Kaidah ini bertujuan untuk memberikan pedoman praktis tentang penanganan masalah penyandang difabel di tempat kerja dengan maksud untuk:

- a. Memastikan bahwa penyandang cacat memiliki kesempatan yang sama di tempat kerja;

- b. Meningkatkan peluang kerja bagi penyandang difabel dengan memfasilitasi perekrutan, jaminan kembali bekerja, jaminan tetap bekerja dan peluang kenaikan tingkat/jabatan;
- c. Mengusahakan adanya tempat kerja yang aman, mudah dicapai dan sehat;
- d. Memastikan bahwa biaya pengusaha dengan adanya pegawai penyandang difabel di antara para pegawainya, diminimalkan termasuk pemeliharaan kesehatan, dan pembayaran asuransi, misalnya;
- e. Memaksimalkan sumbangan yang dapat diberikan pekerja penyandang difabel kepada perusahaan.

## **2. Prinsip-prinsip**

1. Prinsip-prinsip yang menginformasikan tentang kaidah ini adalah standar-standar ketenagakerjaan internasional mendasar, termasuk Konvensi Rehabilitasi Keterampilan dan Kesempatan Kerja (penyandang difabel) 1983 (No. 159), dan Rekomendasi (No. 168), 1983.
2. Cara penanganan penyandang difabel di tempat kerja berdasarkan bukti, praktik terbaik dan pengalaman memungkinkan pekerja penyandang difabel memberikan sumbangan produktif kepada perusahaan dan mempertahankan kualitas keahlian kerja.
3. Kaidah ini didasarkan pada keyakinan bahwa para pengusaha memperoleh keuntungan dari mempekerjakan penyandang difabel apabila masalah terkait dengan kecacatan ditangani dengan baik. Penyandang difabel dapat memberikan kontribusi penting di tempat mereka bekerja, terutama dalam pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan kemampuan mereka. Berdasarkan bukti yang ada, perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari jaminan tetap bekerja bagi pekerja berpengalaman yang mengalami kecacatan saat bekerja, serta adanya indikasi bahwa penghematan dapat dilakukan dalam hal biaya kesehatan, pembayaran asuransi.

4. Sesuai dengan standar ILO, langkah-langkah khusus yang positif yang ditujukan untuk menjamin kesetaraan peluang dan perlakuan atas penyandang difabel di tempat kerja tidak dianggap sebagai diskriminasi terhadap pekerja lainnya.
5. Pelaksanaan praktik pengelolaan atas pekerja penyandang difabel akan sangat efektif apabila didasarkan pada kerja sama positif antara pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja dan organisasi para penyandang difabel.

### 3. Penerapan

Kaidah ini dirancang untuk bermanfaat bagi:

- 1) Para pengusaha sektor swasta dan publik dari berbagai ukuran, yang berlokasi di daerah perkotaan dan pedesaan di negara-negara industri, berkembang dan dalam peralihan;
- 2) Organisasi pengusaha dalam peran mereka sebagai penyedia informasi, nasihat dan layanan lainnya bagi para anggota mereka, serta advokasi mengenai peluang kerja bagi penyandang difabel;
- 3) Serikat pekerja dalam peran mereka mewakili kepentingan pekerja, termasuk pekerja penyandang difabel, di tempat kerja dan di konsultasi nasional dan proses negosiasi;
- 4) Lembaga sektor swasta yang bertanggung jawab atas kebijakan nasional tentang peningkatan kesempatan kerja bagi penyandang difabel dan untuk pelaksanaannya;
- 5) Penyandang difabel, apa pun penyebab atau sifat kecacatannya;
- 6) Organisasi penyandang difabel dalam peran mereka mempromosikan kesempatan kerja bagi penyandang difabel;
- 7) Pekerja lainnya di tempat kerja dengan memahami tersedianya suatu lingkungan yang menunjang untuk mempertahankan pekerjaan apabila mereka menjadi difabel, apapun penyebabnya.

Ketentuan-ketentuan dari kaidah itu harus dianggap sebagai rumusan dasar bagi manajemen yang efektif terkait masalah penyandang difabel di tempat kerja. Mereka dapat membantu



pengusaha memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh melalui pemberian kerja atau mempertahankan pekerja penyandang difabel. Para penyandang difabel dapat menegaskan keyakinan bahwa pekerja penyandang difabel dapat memberikan sumbangan berharga, dan bahwa mereka mempunyai peluang yang setara dan tidak terkena diskriminasi, sesuai dengan kerangka hukum yang ditentukan oleh kerangka perundang-undangan nasional.

## **2. Definisi terkait dengan penyandang difabel**

- **Penyesuaian atau akomodasi**

Adaptasi terhadap pekerjaan, termasuk penyesuaian dan modifikasi mesin dan peralatan dan/atau modifikasi kandungan pekerjaan, waktu kerja dan organisasi kerja, serta adaptasi lingkungan kerja untuk memberikan akses ke tempat kerja, untuk memfasilitasi pemberian pekerjaan kepada penyandang difabel.

- **Instansi yang berwenang**

Kementerian, departemen atau instansi pemerintah lainnya yang berwenang untuk menerbitkan peraturan, perintah atau instruksi lainnya yang berkekuatan hukum.

- **Penanganan pekerja penyandang difabel**

Sebuah proses di tempat kerja yang dirancang untuk memfasilitasi pemberian kerja kepada para penyandang difabel melalui upaya yang terkoordinasi dan dengan memperhitungkan kebutuhan perorangan, lingkungan kerja, kebutuhan perusahaan dan tanggung jawab hukum.

- **Penyandang difabel**

Seseorang yang prospeknya untuk dapat menjamin, kembali, tetap memegang pekerjaan dan menajak dalam pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya menjadi sangat berkurang akibat berkurangnya kemampuan fisik, indera, intelektual atau mental.

- **Diskriminasi**

Pembedaan, pengucilan atau preferensi berdasarkan alasan-alasan tertentu yang menghapus atau mengurangi kesetaraan

kesempatan atau perlakuan dalam hubungan kerja atau pekerjaan. Standar umum yang menetapkan perbedaan merupakan diskriminasi dalam undang-undang. Sikap tertentu dari pejabat pemerintah atau perorangan yang memberikan perbedaan perlakuan terhadap seseorang atau anggota dari suatu kelompok merupakan praktik diskriminasi. Diskriminasi tak langsung adalah keadaan, peraturan atau praktik yang tampaknya tidak memihak, namun pada kenyataannya menimbulkan perlakuan tidak setara atas orang dengan ciri-ciri tertentu. Perbedaan atau preferensi tertentu yang mungkin timbul dari pelaksanaan tindakan khusus untuk perlindungan dan dukungan untuk memenuhi persyaratan tertentu dari penyandang difabel tidak dianggap sebagai diskriminasi.

- **Pengusaha**

Seorang atau organisasi yang mempekerjakan pekerja berdasarkan kontrak kerja tertulis atau lisan yang menetapkan semua hak dan kewajiban dari kedua pihak, sesuai dengan undang-undang dan prosedur nasional. Pemerintah, pejabat pemerintah dan perusahaan swasta serta perorangan dapat menjadi pengusaha.

- **Program bantuan kepada pegawai**

Suatu program, baik yang dijalankan bersama antara pengusaha dan serikat pekerja, atau oleh pengusaha saja, atau oleh serikat pekerja saja yang menawarkan bantuan kepada pekerja dan seringkali juga pada anggota keluarga untuk menyelesaikan masalah yang dapat menimbulkan kekacauan pribadi yang pada gilirannya dapat memengaruhi kegiatan kerja.

- **Organisasi Pengusaha**

Suatu organisasi yang anggota-anggotanya terdiri atas pengusaha perorangan, ikatan pengusaha atau keduanya, yang dibentuk khusus untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan para anggotanya serta memberikan layanan jasa pada para anggotanya dalam masalah terkait hubungan kerja.

- **Peluang setara**

Akses ke dan peluang setara bagi semua orang dalam kesempatan kerja, pelatihan keterampilan, dan pekerjaan tertentu, tanpa diskriminasi, sesuai dengan Pasal 4 Konvensi No. 159.

- **Berkurangnya kemampuan**

Kehilangan atau keadaan abnormal dari fungsi psikologis, fisiologis atau fisik.

- **Standar ketenagakerjaan internasional**

Prinsip-prinsip dan norma-norma dalam semua hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan yang diadopsi oleh Konferensi Perburuhan Internasional yang bersifat tripartit (pemerintah, pengusaha dan pekerja). Standar-standar ini berbentuk sejumlah Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Melalui ratifikasi oleh negara-negara anggota, Konvensi ini menciptakan kewajiban mengikat untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Rekomendasi merupakan instrumen yang tidak mengikat yang memberikan petunjuk tentang kebijakan, perundangan dan tatacara pelaksanaan.

- **Adaptasi kerja**

Adaptasi atau perancangan kembali alat, mesin, ruang kerja dan lingkungan kerja untuk kebutuhan perorangan. Ini dapat meliputi penyesuaian dalam organisasi kerja, jadwal kerja, urutan kerja dan rincian tugas-tugas kerja sesuai dengan unsur-unsur dasarnya.

- **Analisis pekerjaan**

Membuat daftar rinci tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam pekerjaan tertentu dan keterampilan yang diperlukan. Ini mengindikasikan apa yang harus dilakukan pekerja, mengapa ia harus melakukannya, dan keterampilan apa yang diperlukan untuk melakukannya. Analisis dapat juga meliputi berbagai fakta tentang alat-alat yang digunakan dan mesin-mesin yang dioperasikan. Analisis pekerjaan biasanya menjadi langkah pertama dalam proses penempatan.

- **Jaminan tetap bekerja**  
Tetap bersama pengusaha yang sama, dengan tugas atau kondisi pekerjaan yang sama atau berbeda, termasuk kembali bekerja setelah suatu jangka waktu tidak bekerja dengan atau tanpa gaji.
- **Pengarusutamaan**  
Memasukkan penyandang difabel dalam pekerjaan, pendidikan, pelatihan dan semua sektor masyarakat.
- **Layanan Kesehatan Kerja Bagi Penyandang Difabel**  
Layanan kesehatan yang pada dasarnya mempunyai fungsi pencegahan dan bertanggung jawab dalam memberikan saran kepada pengusaha, serta para pekerja dan perwakilan mereka, tentang syarat untuk mencapai dan mempertahankan lingkungan kerja yang aman dan sehat guna memfasilitasi secara optimal kesehatan fisik dan mental dalam pekerjaan. Layanan kesehatan kerja juga memberikan saran mengenai adaptasi kerja sesuai dengan kemampuan pekerja demi kesehatan fisik dan mental mereka.
- **Organisasi penyandang cacat**  
Organisasi yang mewakili para penyandang difabel dan membela hak-hak mereka. Ini dapat berbentuk organisasi yang terdiri atas atau yang membantu penyandang difabel.
- **Jaminan kembali bekerja**  
Proses di mana seorang pekerja didukung untuk kembali bekerja setelah tidak bekerja karena cedera atau sakit.
- **Rehabilitasi keterampilan**  
Proses yang memungkinkan penyandang difabel untuk menjamin, memper-tahankan dan berkembang dalam hubungan kerja yang sesuai, demi mendorong penyatuan atau penyatuan-kembali mereka dalam masyarakat.
- **Dewan pekerjaan/komite tempat kerja**  
Komite para pekerja dalam perusahaan dengan siapa pengusaha bekerja sama dan menjadi tempat pengusaha berkonsultasi tentang hal-hal yang menjadi perhatian bersama.

- **Pekerja/pegawai**

Orang yang bekerja dengan mendapatkan upah atau gaji dan memberikan layanan bagi pengusaha. Hubungan kerja tunduk pada kontrak kerja tertulis atau lisan.

- **Wakil pekerja**

Orang yang diakui oleh peraturan perundangan atau tatacara negara, sesuai dengan Konvensi Perwakilan Pekerja, 1971 (No.135) apakah bentuknya sebagai wakil serikat pekerja, yaitu wakil yang ditunjuk atau dipilih oleh serikat pekerja; atau (b) wakil yang dipilih, yaitu wakil yang dipilih secara bebas oleh para pekerja untuk tujuan tersebut, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan nasional atau dengan kesepakatan bersama dan yang fungsinya tidak meliputi kegiatan yang diakui sebagai prerogatif eksklusif oleh serikat pekerja di negara yang bersangkutan.

- **Kondisi kerja**

Faktor-faktor yang menentukan keadaan di mana para pekerja bekerja. Ini meliputi jam kerja, organisasi kerja, beban kerja, layanan kesejahteraan dan ukuran yang digunakan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja.

- **Lingkungan kerja**

Sarana dan keadaan di mana pekerjaan dilaksanakan dan faktor-faktor lingkungan yang dapat memengaruhi kesehatan pekerja.

- **Tempat kerja**

Semua tempat di mana orang-orang dalam hubungan kerja perlu hadir untuk melakukan pekerjaan mereka dan yang berada di bawah kendali langsung atau tak langsung oleh pengusaha. Contohnya adalah kantor, pabrik, perkebunan, lokasi pembangunan, kapal dan tempat hunian.

- **Ruang kerja**

Bagian dari kantor atau pabrik di mana seseorang bekerja, termasuk meja atau permukaan kerja yang digunakan, kursi, peralatan, barang-barang lain.

- **Percobaan kerja**

Kegiatan kerja untuk memberikan pengalaman atau untuk menguji kesesuaian kemampuan dalam pekerjaan tertentu.

### **C. Tugas dan Tanggung jawab Pihak Berwenang**

#### **1. Tugas-tugas umum pengusaha**

- a. Untuk mengelola hal-hal yang berhubungan dengan kecacatan di tempat kerja, para pengusaha harus menetapkan strategi untuk mengelola penyandang difabel sebagai bagian integral dari kebijakan kerja secara keseluruhan dan secara khusus sebagai bagian dari strategi pengembangan sumber daya manusia. Strategi pengelolaan penyandang difabel ini dapat dikaitkan dengan bantuan untuk pekerja, apabila program itu ada.
- b. Strategi pengelolaan penyandang difabel harus mencakup ketentuan untuk:
  - 1) Penerimaan pencari kerja penyandang difabel, termasuk mereka yang belum pernah bekerja sebelumnya dan mereka yang ingin bekerja kembali setelah tidak bekerja untuk suatu jangka waktu tertentu;
  - 2) Adanya kesempatan yang sama bagi pekerja penyandang difabel;
  - 3) Jaminan tetap bekerja bagi pekerja yang menjadi cacat akibat kerja.
- c. Strategi pengelolaan penyandang difabel harus dikaitkan dengan kebijakan di tempat kerja mengenai pengembangan tempat kerja yang aman dan sehat, termasuk ketentuan mengenai tindakan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, analisis risiko atas penyesuaian yang harus dilakukan, campur tangan dini dan perujukan ke tempat pengobatan atau rehabilitasi bagi mereka yang menjadi difabel akibat kerja dan adanya sistim mentor untuk memastikan adanya penerimaan pekerja baru. Kaidah ILO tentang pengelolaan penyandang difabel di tempat kerja.

- d. Strategi tersebut harus sesuai dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang memuat prinsip-prinsip kesempatan kerja yang sama, dan mendukung konvensi-konvensi ILO yang terkait, khususnya Konvensi No. 159.
- e. Program yang dimaksud harus dirumuskan bersama-sama dengan wakil pekerja, dikonsultasikan dengan pekerja penyandang difabel, layanan kesehatan kerja, bila ada, dan jika memungkinkan dengan organisasi penyandang cacat. Dalam mengembangkan program, para pengusaha juga dapat memperoleh manfaat dari konsultasi dengan pihak yang berwenang dan lembaga-lembaga pakar di bidang penyandang difabel.
- f. Strategi pengelolaan penyandang difabel di tempat kerja harus dikoordinasikan dengan menggunakan struktur ke perwakilan atau struktur baru yang dibentuk untuk maksud tersebut. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk koordinasi program harus mendapatkan pelatihan mengenai pengelolaan penyandang difabel atau mempunyai akses ke pegawai yang mempunyai kemampuan di bidang itu.
- g. Para pengusaha harus bekerja sama dengan bursa tenaga kerja dalam hal mencarikan pekerjaan bagi para penyandang difabel yang sesuai dengan kemampuan, kapasitas kerja dan minat mereka.
- h. Para pengusaha harus memastikan bahwa, dalam bekerja, para pekerja penyandang difabel mendapatkan manfaat yang sama seperti pekerja yang tidak cacat, misalnya dalam hal tunjangan transportasi dan perumahan.
- i. Organisasi pengusaha harus mendukung pengembangan kesempatan kerja bagi para penyandang difabel dan jaminan untuk bekerja kembali bagi mereka yang menjadi difabel sebagai akibat kerja di antara perusahaan-perusahaan anggota mereka. Mereka dapat melakukan hal ini, misalnya, dengan memberikan informasi praktis dan layanan memberikan nasihat, terutama kepada perusahaan-perusahaan kecil, mengumumkan manfaat bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang difabel,

meningkatkan kemitraan antara para pengusaha dalam hubungan dengan pengelolaan penyandang difabel dan memberikan nasihat mengenai strategi pengelolaan penyandang difabel dalam proses konsultasi di tingkat nasional maupun internasional.

- j. Untuk memperkenalkan strategi pengelolaan penyandang difabel di tempat kerja, organisasi pengusaha harus memulai strategi tersebut di kalangan mereka sendiri.

## **2. Tanggung jawab pihak yang berwenang**

- a. Pihak yang berwenang harus menganjurkan diberlakukannya strategi pengelolaan penyandang difabel di tempat kerja oleh para pengusaha, sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk mengembangkan kesempatan kerja bagi para penyandang difabel di sektor swasta maupun pemerintah.
- b. Pihak yang berwenang harus memasukkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kecacatan dalam kerangka umum peraturan-peraturan dalam bidang perekonomian dan sosial, dengan mempertimbangkan kondisi dan tatacara nasional.
- c. Secara berkala, pihak yang berwenang harus meninjau kembali semua peraturan dan ketentuan yang mengatur kerja, jaminan untuk tetap bekerja, dan jaminan kembali bekerja bagi pekerja yang menjadi difabel akibat kerja di sektor pemerintah maupun swasta, untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut tidak mengandung unsur-unsur diskriminasi terhadap penyandang difabel.
- d. Hal yang sama juga harus dilakukan dalam kaitannya dengan sistem perlindungan sosial pekerja, termasuk ganti rugi kepada pekerja, untuk memastikan adanya dukungan yang memadai sehingga tidak ada hambatan yang tidak perlu ada namun tanpa sengaja ditempatkan menjadi penghambat bagi para penyandang difabel dalam memasuki dunia kerja, mempertahankan pekerjaan atau kembali ke pasar kerja terbuka dan mendapatkan pekerjaan.



- e. Pihak yang berwenang harus mempermudah upaya pengusaha dalam mengelola masalah-masalah penyandang difabel di tempat Kerja, juga dalam hal penerimaan pekerja, jaminan tetap bekerja atau jaminan untuk kembali bekerja bagi pekerja yang menjadi difabel akibat kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan membantu mereka mengetahui adanya layanan-layanan bursa kerja, penasihat-penasihat teknis, pusat rehabilitasi dan layanan penunjang lainnya yang baik, yang diselenggarakan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Dapat juga disarankan pembentukan komite keselamatan dan kesehatan, program bantuan pekerja, unit hubungan industrial dan komite kesetaraan sesuai dengan keadaan dan perundang-undangan nasional.
- f. Pihak yang berwenang harus memastikan bahwa lembaga lembaga tersebut di atas memberikan pelayanan yang baik dan bermutu tinggi.
- g. Pihak yang berwenang harus membuat kriteria untuk menentukan apa yang harus dilakukan dalam hal penyesuaian berdasarkan undang-undang dan tatacara nasional.
- h. Pihak yang berwenang harus memberikan dukungan teknis, subsidi upah dan insentif lain untuk mengembangkan atau mempermudah terciptanya kesempatan kerja dan hak untuk tetap bekerja bagi pekerja penyandang difabel, dan memberitahu para pengusaha tentang adanya insentif ini.
- i. Dalam memberikan nasihat kepada bursa kerja dan jasa terkait lain, pihak yang berwenang harus melibatkan organisasi pengusaha dan bekerja sama dengan mereka, untuk memastikan bahwa layanan-layanan tersebut memadai dan efektif. Mereka juga harus melibatkan organisasi pengusaha untuk ikut serta dalam kampanye mengenai pemahaman tentang penyandang difabel dan kesempatan kerja, atau meminta mereka untuk ikut membiayainya.
- j. Pihak yang berwenang harus mempermudah hubungan antara organisasi pengusaha dan serikat pekerja, serta dengan lembaga

profesional terkait, penyedia jasa dan organisasi penyandang difabel, untuk bertukar informasi tentang pengelolaan penyandang difabel di tempat kerja, termasuk:

- 1) Pengembangan teknik dan teknologi untuk meubah tempat kerja;
- 2) Sistem penempatan tenaga kerja dan pengalaman kerja untuk para penyandang difabel;
- 3) Penyesuaian dalam hal sistem pengiklanan dan wawancara untuk penerimaan pekerja baru dan mempromosikan dipekerjakannya pekerja penyandang difabel;
- 4) Kebiasaan yang berhubungan dengan masalah kepantasan sehubungan dengan terbukanya informasi tentang pekerja penyandang difabel dan pemahaman mengenai kecacatan.
- 5) Dalam mengembangkan kesempatan kerja, jaminan tetap bekerja dan jaminan bagi para pekerja yang menyandang difabel akibat kerja bahwa mereka bisa bekerja kembali, pihak yang berwenang harus memantau dan secara berkala mengadakan evaluasi atas keefektifan sistem pemberian insentif atau jasa pemberian nasihat teknis tentang masalah-masalah penyandang difabel yang berhubungan dengan kerja.
- 6) Untuk memperkenalkan strategi pengelolaan penyandang difabel di tempat kerja, pihak yang berwenang harus melaksanakan strategi tersebut di kalangan mereka sendiri, dan menjadi contoh dalam hal penerimaan pekerja penyandang difabel, memberikan kesempatan kerja yang sama bagi penyandang difabel, memberikan jaminan tetap bekerja dan jaminan untuk kembali bekerja bagi mereka yang menjadi difabel akibat kerja.
- 7) Pihak yang berwenang harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengembangkan kesempatan kerja, jaminan tetap bekerja dan jaminan untuk kembali bekerja bagi mereka yang menjadi difabel akibat kerja, termasuk tindakan khusus

bagi pekerja wanita penyandang difabel. Kaidah ILO tentang Pengelolaan Penyandang Difabel di Tempat Kerja.

### **3. Tugas-tugas umum wakil pekerja**

- a. Dalam mempromosikan kebijakan mengenai kesetaraan kesempatan kerja bagi para pekerja, baik di tingkat pengusaha maupun dalam proses konsultasi dan negosiasi nasional, serikat pekerja harus secara aktif mendukung diberikannya kesempatan kerja dan pelatihan yang sama bagi pekerja penyandang difabel, termasuk jaminan tetap bekerja dan jaminan kembali bekerja bagi mereka yang menjadi difabel akibat kerja.
- b. Serikat pekerja harus secara aktif mendorong para pekerja penyandang difabel untuk menjadi anggota serikat pekerja dan bersedia menjadi pemimpin apabila terpilih.
- c. Serikat pekerja harus secara aktif mewakili kepentingan pekerja penyandang difabel dalam menghadapi manajemen dan dewan kerja apapun, komite keselamatan kerja, dan komite lain di tempat kerja, dan harus secara giat mengambil langkah-langkah positif yang bertujuan untuk mempekerjakan penyandang difabel di tempat kerja, termasuk memberikan pemahaman mengenai penyandang difabel di antara manajer dan staf mengenai setiap penyesuaian atau perubahan yang harus dilakukan.
- d. Serikat pekerja harus memberikan pengertian dan pelatihan kepada para anggota mereka mengenai masalah pekerja penyandang difabel melalui kegiatan-kegiatan pemahaman dan publikasi serikat pekerja yang memuat masalah-masalah kesetaraan bagi penyandang difabel.
- e. Dalam mempromosikan tempat kerja yang sehat dan aman, serikat pekerja harus mendukungnya.
- f. Dengan giat mendukung kepatuhan pada standar-standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku dan memperkenalkan intervensi dini dan prosedur rujukan sesuai dengan kaidah ini;
- g. Bekerja sama dengan pengusaha dan ikut serta dalam menyebarkan informasi mengenai masalah penyandang difabel dan program-

program pencegahan yang ditawarkan pengusaha, dan dengan organisasi-organisasi penyandang difabel demi kepentingan para pekerja penyandang difabel.

- h. Untuk mendukung pengenalan terhadap strategi pengelolaan penyandang difabel di tempat kerja, serikat pekerja harus memperkenalkan dan melaksanakan strategi tersebut bagi anggota mereka sendiri.
- i. Serikat pekerja harus meningkatkan pemahaman pengusaha mengenai undang-undang perburuhan tertentu, konvensi dan dukungan teknologi yang akan mempermudah akses penyandang difabel untuk memperoleh kesempatan kerja.
- j. Serikat pekerja harus mendorong para anggotanya untuk bekerja sama dengan program jaminan kembali bekerja bagi mereka yang menjadi cacat akibat kerja yang diselenggarakan oleh pengusaha, sesuai dengan kaidah ini, agar dapat segera kembali bekerja.

#### **D. Kerangka Pengelolaan Penyandang Difabel di Tempat Kerja**

##### **Pengembangan strategi pengelolaan penyandang difabel di tempat kerja**

- a. Para pengusaha harus menjadikan pengelolaan masalah penyandang difabel di tempat kerja sebagai tugas prioritas yang menyumbang keberhasilan usaha, dan menganggapnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pengembangan sumber daya manusia di tempat kerja.
- b. Strategi penanganan penyandang difabel harus dirumuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan tatacara nasional, dengan memperhitungkan berbagai lembaga dan organisasi nasional di lapangan.
- c. Dalam merumuskan strategi untuk pengelolaan masalah penyandang difabel di tempat kerja, para pengusaha perlu bekerja sama dengan wakil-wakil pekerja dan berkonsultasi dengan para pekerja penyandang difabel serta wakil-wakil mereka.

- d. Strategi di tingkat tempat kerja, perlu melengkapi strategi pengembangan sumber daya manusia dalam tujuannya untuk memaksimalkan kontribusi dan kemampuan semua staf, termasuk mereka yang menjadi penyandang difabel dan mendukung kepatuhan pada standar keselamatan dan kesehatan kerja serta prosedur intervensi dan perujukan awal sesuai dengan prinsip peraturan.
- e. Strategi penanganan penyandang difabel dapat mempertimbangkan ketentuan pegawai yang memikul tanggung jawab keluarga bagi penyandang difabel. Kaidah ILO tentang Pengelolaan Penyandang Difabel di Tempat Kerja.
- f. Strategi penanganan penyandang difabel di tempat kerja harus mencakup ketentuan untuk berkonsultasi bagi jasa penempatan tenaga kerja atau lembaga spesialis lainnya, bila perlu, untuk memastikan bahwa orang yang menjadi penyandang difabel sangat tepat untuk pekerjaan tersebut dari segi kemampuan, kapasitas dan minat bekerja, seperti proses perekrutan biasa.

#### **Komunikasi dan pemahaman**

- a. Strategi pengelolaan penyandang difabel di tempat kerja harus diberitahukan kepada semua pekerja, dalam bahasa yang mudah dimengerti, melalui kerja sama dengan wakil pekerja.
- b. Informasi umum tentang penyandang difabel di tempat kerja harus diberikan kepada semua pegawai, bersama dengan informasi khusus tentang strategi perusahaan, dan tentang adaptasi yang mungkin diperlukan di lingkungan kerja, ruang kerja, dan jadwal kerja agar pekerja penyandang difabel dapat mengoptimalkan efektivitas mereka. Ini dapat menjadi bagian dari pengenalan umum pada pekerjaan bagi para penyelia dan staf atau menjadi sesi khusus untuk sesi pemahaman mengenai penyandang difabel. Sehubungan dengan ini, semua pekerja harus diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan apapun yang mereka ingin ketahui tentang

prospek bekerja dengan rekan kerja yang menjadi penyandang difabel.

- c. Bila perlu, saran dari lembaga-lembaga pakar di bidang penyandang difabel, yang dapat meliputi organisasi penyandang difabel, dimasukkan dalam perencanaan sesi informasi dan pemahaman di tempat kerja tersebut.
- d. Para pengusaha, termasuk manajer seniornya, harus menyatakan komitmen mereka pada strategi pengelolaan penyandang cacat melalui langkah-langkah yang mereka anggap sesuai dalam hal perekrutan tenaga kerja penyandang difabel dan jaminan tetap bekerja bagi pegawai yang menjadi difabel akibat kerja.
- e. Para pengusaha, organisasi pengusaha, serikat pekerja, pihak yang berkepentingan dan organisasi penyandang difabel harus mempertimbangkan untuk bekerja sama dalam mempublikasi strategi tentang masalah-masalah penyandang difabel dan informasi tentang pelaksanaan kebijakan ini.
- f. Pengusaha harus memberitahu para pemasok dan sumber pengadaan mereka tentang strategi pengelolaan penyandang difabel, dengan maksud mendorong pelaksanaannya.
- g. Dalam mempromosikan strategi pengelolaan penyandang difabel di tempat kerja, kelompok-kelompok pengusaha dan organisasi pengusaha harus mempertimbangkan upaya pertukaran informasi dan pelatihan tentang hal ini dengan badan pemerintah yang berkepentingan, lembaga tenaga ahli dan badan lain yang berkompeten.

#### **Evaluasi atas efektivitas**

- a. Para pengusaha harus mengevaluasi efektivitas strategi tempat kerja mereka dalam pengelolaan penyandang difabel secara berkala dan melakukan penyempurnaan bila diperlukan.
- b. Para wakil pekerja di tempat kerja harus diberi akses ke upaya evaluasi dan ikut serta di dalamnya.

- a. Dalam rangka mengadakan penilaian atas efektivitas dukungan mereka pada program ini, bila ada, pihak-pihak yang berwenang dapat meminta informasi dari pengusaha.
- b. Semua informasi tentang program pengelolaan penyandang difabel.
- c. harus bersifat anonim dan dijamin kerahasiannya, sebelum disebarluaskan.

## **E. Perekrutan Tenaga Kerja Penyandang Difabel**

### **1. Persiapan untuk perekrutan**

- a. Prinsip non-diskriminasi perlu dihargai selama proses perekrutan, untuk menjamin manfaat maksimum bagi pengusaha dan peluang yang setara bagi semua calon pegawai baik para penyandang difabel atau tidak. Para pengusaha dapat, misalnya, menyelipkan pernyataan tentang komitmen atas kesetaraan peluang dalam prosedur perekrutan dan dalam iklan lowongan kerja, menggunakan logo untuk menunjukkan bahwa kebijakan demikian berlaku di perusahaan, secara khusus meminta lamaran dari para penyandang cacat, dan menyatakan bahwa semua calon akan dipertimbangkan semata-mata berdasarkan kemampuan mereka.
- b. Pengusaha harus memastikan bahwa proses perekrutan mereka menarik pelamar dari sebanyak mungkin penyandang difabel yang memiliki kemampuan. Mereka dapat melakukan hal ini, misalnya, melalui konsultasi dengan penyedia jasa tenaga kerja untuk penyandang difabel, atau lembaga khusus dengan memastikan bahwa lowongan kerja dipublikasikan dalam suatu format yang dapat diakses oleh pelamar dari berbagai jenis penyandang difabel dalam publikasi di media cetak, radio, internet dengan menyediakan bahan lamaran kerja dalam berbagai format.
- c. Bila pengusaha mengandalkan agen untuk melakukan perekrutan, pihak yang berkepentingan dapat bekerja sama dengan organisasi pengusaha, organisasi yang sesuai untuk penyandang difabel dan asosiasi periklanan yang menarik lamaran dari para pencari kerja penyandang difabel.

- d. Pihak yang berkepentingan harus membantu para pengusaha dengan memfasilitasi perekrutan penyandang difabel melalui penggunaan jasa penempatan tenaga kerja yang efektif. Pihak yang berkepentingan juga perlu memfasilitasi pengaturan jasa teknik, subsidi upah dan insentif lainnya sejauh diperlukan. Kaidah ILO tentang Pengelolaan Penyandang Difabel di Tempat Kerja.
- e. Organisasi pengusaha dan serikat pekerja, serta pihak yang berkepentingan, sejauh diperlukan, dapat menyusun petunjuk pelaksanaan untuk membantu mempekerjakan penyandang difabel di daerah perkotaan dan perdesaan. Petunjuk pelaksanaan ini perlu mencerminkan keadaan di tingkat nasional dan sektoral.
- f. Organisasi pengusaha dapat menunjang perekrutan pekerja penyandang difabel dengan menjalin kerja sama dengan perusahaan jasa, agen tenaga kerja dan organisasi penyandang difabel untuk memastikan bahwa jasa yang diberikan secara efektif memenuhi kebutuhan pengusaha.
- g. Dalam mempertimbangkan calon pekerja penyandang difabel, pengusaha harus terbuka dalam mengadakan penyesuaian di tempat kerja, ruang kerja dan kondisi kerja, apabila diperlukan untuk memaksimalkan kemampuan sang calon pekerja ini melaksanakan pekerjaannya. Nasihat dan bimbingan tentang penyesuaian yang diperlukan dapat diminta dari perusahaan jasa tenaga kerja atau lembaga pakar di bidang penyandang difabel, termasuk organisasi atau orang penyandang difabel. Penyesuaian, apabila diperlukan, perlu disusun dengan berkonsultasi dengan para pekerja penyandang difabel atau non-penyandang difabel, dan dilakukan dengan perjanjian dengan wakil pekerja dan pekerja penyandang difabel yang bersangkutan.

## **2. Wawancara dan tes**

- a. Tes pra-pekerjaan dan kriteria seleksi harus difokuskan pada keterampilan, pengetahuan dan kemampuan khusus yang dianggap penting untuk fungsi-fungsi pekerjaan yang lowong. Perlu



diusahakan agar memilih tes yang formatnya dapat diakses oleh pelamar penyandang difabel. Demikian pula, kriteria pemilihan perlu diperiksa dengan cermat untuk memastikan bahwa tes yang diberikan tidak tanpa sengaja menyingkirkan pelamar penyandang cacat.

- b. Anggota-anggota tim pewawancara dalam sektor swasta dan publik harus dibekali petunjuk tentang proses wawancara dan seleksi mereka yang menjadi penyandang difabel.
- c. Para pengusaha harus mempertimbangkan cara-cara yang memungkinkan para calon mengikuti dan menjalankan wawancara dengan cara yang setara dengan pelamar lainnya, misalnya dengan mengizinkan mereka menggunakan juru bahasa isyarat atau dengan kehadiran pemberi advokasi.
- d. Dalam menerbitkan undangan wawancara, pengusaha harus mendorong para calon untuk, terlebih dahulu mengemukakan kebutuhan atau akomodasi khusus yang mungkin mereka perlukan agar dapat mengikuti wawancara.
- e. Penyesuaian dalam proses perekrutan harus memperhitungkan berbagai kebutuhan dari para pencari kerja, dan rasionalnya penyesuaian itu, apabila perlu, dikomunikasikan kepada para calon dan pegawai.

### **3. Orientasi pekerja pada pekerjaan**

- a. Para pengusaha harus mengadakan orientasi tentang perusahaan atau jasa, lingkungan kerja, dan pekerjaan untuk masing-masing pekerja penyandang difabel yang baru direkrut, dengan cara yang sama seperti bagi para pekerja bukan penyandang difabel.
- 8) Pengusaha harus memastikan bahwa informasi yang penting bagi pekerjaan dan tempat kerja, seperti petunjuk pelaksanaan pekerjaan, buku pedoman pekerjaan, informasi tentang ketentuan staf, prosedur penanganan keluhan, serta prosedur kesehatan dan keselamatan dikomunikasikan kepada para pegawai penyandang difabel dalam suatu format yang memastikan mereka mengerti maksud informasi itu sepenuhnya.

- 9) Dalam menawarkan pekerjaan kepada calon yang berstatus penyandang difabel, pengusaha harus menunjukkan penyesuaian yang berkaitan dengan kecacatan bagi lingkungan kerja, ruang kerja, jadwal atau pelatihan kerja yang diusulkan dan berkonsultasi lebih jauh tentang hal itu dengan calon pekerja. Pelatihan kerja khusus atau dukungan perorangan yang diperlukan perlu dibicarakan pada kesempatan ini. Kaidah ILO tentang Pengelolaan Penyandang difabel di Tempat Kerja.
- 10) Wakil pekerja dan rekan kerja harus dikonsultasikan tentang penyesuaian penting yang dibuat atau direncanakan, guna memperhitungkan kebutuhan khusus pegawai penyandang difabel.
- 11) Pengusaha harus bekerja sama dengan pihak yang berkepentingan atau terkait lainnya dalam memfasilitasi kursus-kursus bagi manajemen, penyelia, atau sesama pekerja yang ingin mempelajari teknik komunikasi alternatif, memper-baiki komunikasi dengan rekan sekerja yang sulit bicara, mendengar atau mengerti bahasa lisan.
- 12) Bila perekrutan penyandang difabel sudah dilaksanakan, layanan lanjutannya mungkin penting dalam upaya memastikan bahwa masalah yang dapat timbul segera diketahui dan dicari pemecahannya. Dalam konteks ini, pengusaha dan pegawai penyandang difabel dapat memperoleh manfaat dari hubungan tetap dengan jasa tenaga kerja dan lembaga terkait lainnya. Para pengusaha perlu berkonsultasi secara langsung dengan para penyedia jasa ini, apabila perlu, dan juga memfasilitasi pekerja penyandang difabel ini untuk tetap melakukan kontak, dalam upaya memuluskan proses penyatuan mereka di tempat kerja.
- 13) Percobaan kerja dan penempatan kerja dengan dukungan
  - a. Pihak yang berkepentingan harus memfasilitasi pengalaman kerja, percobaan kerja dan penempatan kerja dengan dukungan melalui pemberian nasihat teknis kepada pengusaha dan penyandang difabel, sesuai dengan kebutuhan. Juga dengan memberikan informasi kepada mereka tentang adanya program

insentif yang tersedia untuk mensubsidi biaya yang diperlukan, seperti biaya upah atau biaya penyesuaian ke tempat kerja, alat atau peralatan.

- b. Sebagai alternatif dari perekrutan segera atau pemberian kesempatan memperoleh pengalaman kerja, pengusaha dapat mempertimbangkan percobaan kerja kepada penyandang difabel atau penempatan kerja dengan dukungan sesuai dengan undang-undang dan tatacara yang berlaku di negara masing-masing. Dalam hal pengalaman kerja, percobaan kerja akan memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk menilai kemampuan dan kapasitas. Perekrutan dapat menyusul selanjutnya. Percobaan kerja atau penempatan kerja dengan dukungan memberi pengalaman kerja yang berharga kepada penyandang difabel yang sedang mencari kerja karena program ini dapat meningkatkan kecakapan dan kemampuan kerja mereka.
  - c. Dalam hal pekerjaan dengan dukungan, pihak yang berkepentingan dapat memfasilitasi penyediaan jasa pelatih kerja yang terus berjalan hingga adanya penempatan, baik secara langsung melalui layanan penempatan tenaga pemerintah, atau melalui lembaga spesialis.
  - d. Dengan selesainya percobaan kerja, pihak yang berkepentingan atau lembaga spesialis lainnya dapat bersama pengusaha menilai Kaidah ILO tentang Pengelolaan Penyandang Difabel di Tempat Kerja keberhasilan percobaan kerja dan menempuh upaya lain, bila perlu. Ini dapat meliputi pengalihan percobaan kerja ke pekerjaan lain dalam perusahaan yang sama atau di tempat lain, atau mengatur pelatihan tambahan atau dukungan lain kepada penyandang difabel.
- 14) Tinjauan atas kemajuan
- a. Para pengusaha harus tetap meninjau proses perekrutan mereka agar dapat memastikan bahwa cara itu dapat diakses oleh penyandang difabel dari berbagai jenis.

- b. Pihak yang berkepentingan harus secara teratur meninjau efektivitas dukungan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang difabel, dan mengambil langkah untuk menyempurnakan efektivitas dari langkah yang sudah ditempuh, di mana perlu. Tinjauan ini perlu dilaksanakan dalam konsultasi dengan para pengusaha dan wakil pekerja, serta dengan wakil penyandang difabel.

#### **4. Pengalaman kerja**

- a. Apabila pengusaha belum siap mempekerjakan penyandang difabel, mereka dapat mempertimbangkan pemberian kesempatan memperoleh pengalaman kerja bagi para pencari kerja penyandang difabel. Tujuannya agar mereka dapat memperoleh keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang diperlukan untuk sebuah pekerjaan tertentu di tempat kerja. Pengalaman berbasis tempat kerja seperti ini dapat membantu pencari kerja memperoleh keterampilan yang sejalan dengan persyaratan kerja pengusaha. Cara ini juga memberi kesempatan kepada pengusaha untuk mengukur kemampuan dan kapasitas kerja penyandang difabel dan mendorong kemungkinan untuk mempertimbangkan perekrutan ketika masa pelatihan selesai.
- b. Apabila calon pekerja penyandang difabel diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman kerja, pengusaha dapat menugaskan seorang penyuluh atau pekerja senior untuk membantunya. Sebagai alternatif, layanan dari pelatih kerja dapat diberikan melalui jasa tenaga kerja.

### **F. Promosi Kondisi Penyandang Difabel**

#### **1. Pengembangan karier**

- a. Para pekerja penyandang difabel perlu diberikan peluang yang sama dengan pekerja lain di tempat kerja untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk memajukan karier mereka.

- b. Informasi tentang pengembangan karier dan peluang promosi harus disediakan dan dikomunikasikan dalam bentuk format yang dapat diakses bagi pekerja penyandang difabel dari berbagai jenis di dalam perusahaan yang sama. Perhatian khusus perlu diberikan pada aksesibilitas, bila informasi demikian disediakan melalui alat elektronik.
- c. Para pekerja penyandang difabel harus didorong untuk mengajukan lamaran promosi, terutama untuk jabatan di mana mereka tampak ragu-ragu untuk melamarnya, karena kekurangan atau hambatan lain oleh kecacatan mereka, atau yang dilihat sebagai hambatan dalam lingkungan kerja mereka.
- d. Dalam mempertimbangkan promosi pekerja, pengusaha harus memperhitungkan pengalaman mereka sebelumnya, bila ada, kompetensi, kinerja dan kemampuan sekarang, selain kualifikasi formal yang sesuai untuk persyaratan utama pekerjaan.

## **2. Peluang pelatihan**

- a. Peluang bagi pekerja penyandang difabel untuk memperoleh manfaat dari program pelatihan dalam perusahaan, perlu dikembangkan dan dipublikasikan. Penggunaan jasa pembaca, juru bahasa dan bahan yang diadaptasi, perlu difasilitasi, apabila perlu, oleh pihak yang berkepentingan, atau oleh organisasi atau orang penyandang cacat.
- b. Pengusaha harus mempertimbangkan penyesuaian jadwal waktu, tempat dan program untuk memfasilitasi dan memaksimalkan kepesertaan para penyandang difabel dalam langkah-langkah yang bertujuan menunjang pengembangan karier dalam semua hubungan kerja.
- c. Dalam mengembangkan kesempatan kerja, pengusaha atau kelompok pengusaha harus memastikan bahwa dapat diakses oleh penyandang difabel
- d. Buku pegangan dan bahan pelatihan di tempat kerja harus dapat diakses oleh mereka yang sulit berkomunikasi dan yang cacat

intelektual, termasuk, bila timbul kebutuhan, format alternatif untuk bahan cetakan dan penggunaan ilustrasi visual sebagai ganti teks.

### **3. Pelatihan keterampilan di luar perusahaan**

- a. Kebijakan kesempatan kerja yang setara harus diberlakukan dalam penyertaan berbasis-tempat kerja untuk pelatihan keterampilan dengan mengadakan kursus yang tersedia dan yang dapat diakses bagi semua pegawai, termasuk para penyandang difabel dan dengan mengadakan modifikasi pada manual dan bahan pelajaran, bila perlu.
- b. Pihak yang berkepentingan harus memastikan bahwa struktur pendidikan dan pelatihan dapat diakses oleh para penyandang difabel agar mereka dapat memperoleh akses kesempatan kerja yang terbuka.
- c. Dalam memilih jasa dan kesempatan pelatihan di luar perusahaan, para pengusaha harus memperhitungkan aksesibilitas ke tempat pelatihan bagi pekerja penyandang difabel.

### **4. Tinjauan dan penghargaan**

Penghargaan atas kinerja pekerja penyandang difabel harus dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang sama yang diberlakukan bagi pemegang jabatan yang sama.

## **G. Mempertahankan Pekerjaan**

### **1. Kebijakan tentang mereka yang menjadi difabel**

- a. Bila pegawai yang ada menjadi cacat pada masa kerja, pengusaha dapat tetap memperoleh manfaat dari keahlian dan pengalaman yang sudah diperoleh dengan menempuh langkah untuk memungkinkan pekerja tersebut tetap bekerja. Dalam mengembangkan strategi pengelolaan penyandang difabel di tempat kerja, pengusaha harus menyertakan langkah-langkah untuk mempertahankan pekerjaan, termasuk:
  - 1) intervensi dan perujukan dini ke jasa/layanan yang sesuai;
  - 2) langkah untuk berangsur-angsur kembali bekerja;

- 3) peluang bagi pekerja penyandang cacat untuk mencoba suatu pekerjaan atau memperoleh pengalaman dalam pekerjaan alternatif bila tidak mampu melanjutkan kembali pekerjaan lama mereka;
  - 4) penggunaan dukungan dan nasihat teknis untuk mengetahui peluang dan penyesuaian yang mungkin diperlukan.
- b. Dalam upaya memfasilitasi perlindungan pekerjaan bagi pegawai yang menjadi difabel, pengusaha harus mengetahui sejumlah pilihan yang ada. Dalam beberapa hal, pegawai dapat kembali ke jabatan yang sama seperti semula, tanpa perubahan. Dalam hal lain, diperlukan sedikit penyesuaian bagi pekerjaan itu sendiri, bagi ruang kerja atau lingkungan kerja. Dalam kasus lainnya lagi, mungkin orang tersebut harus pindah ke pekerjaan lain di tempat kerjanya. Strategi pengelolaan penyandang difabel perlu meliputi langkah langkah untuk mempromosikan perlindungan pekerjaan dalam setiap bentuk ini. Ini dapat meliputi pelatihan dan pelatihan kembali bagi orang yang bersangkutan, penyediaan informasi kepada para penyelia dan sesama pekerja untuk menggunakan alat dan peralatan, hak atas akses terhadap dukungan lain sejauh diperlukan, serta modifikasi atau opsi alternatif dalam prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan sehingga keadaan yang ada tidak memburuk.
  - c. Dalam mengembangkan langkah-langkah untuk pengerahan kembali pekerja penyandang difabel, pengusaha harus senantiasa memperhitungkan preferensi jabatan dari para pekerja dan berkonsultasi dengan wakil pekerja bila perlu.
  - d. Bila pekerja menjadi cacat, sebelum mengambil langkah lain, pengusaha harus memastikan bahwa upaya-upaya untuk meubah tempat kerja sudah sepenuhnya dilakukan agar dapat memanfaatkan potensi dan keterampilan yang sudah ada dari pegawai yang bersangkutan.
  - e. Pihak yang berwenang harus memberi petunjuk, layanan dan insentif kepada para pengusaha, kelompok pengusaha dan serikat

pekerja, agar dapat memaksimalkan kesempatan bagi penyandang difabel untuk mempertahankan pekerjaannya, dan segera kembali bekerja setelah terjadinya kecelakaan, cedera, menderita sakit perubahan kemampuan atau kondisi menurunnya kemampuan. Ini dapat meliputi langkah-langkah yang memungkinkan konseling perorangan, rencana rehabilitasi perorangan atau program mempertahankan pekerjaan, yang bertujuan meningkatkan peluang para pekerja ini dalam pekerjaan mereka sekarang atau pekerjaan lain, dimana mereka dapat memanfaatkan bakat dan pengalaman mereka, sejauh mungkin tanpa kehilangan penghasilan. Langkah-langkah demikian perlu dikembangkan melalui konsultasi dengan organisasi pengusaha dan serikat pekerja, profesional dan organisasi penyandang difabel yang relevan.

## **2. Penilaian dan rehabilitasi**

- a. Pihak yang berwenang, atas permintaan pengusaha, perlu memfasilitasi pengusaha untuk menilai kemampuan dan pengalaman kerja dari pekerja yang sudah menjadi difabel atau sudah berkurang kemampuannya dalam pekerjaan, dengan maksud agar mereka dapat tetap melakukan pekerjaan yang sama bila perludengan sedikit modifikasi tugas pekerjaan, lingkungan kerja atau jadwal kerja, atau melalui pelatihan kembali.
- b. Pihak yang berwenang perlu mengupayakan adanya kesempatan bagi pekerja yang menjadi difabel, mengalami cedera atau terkena penyakit akibat kerja, untuk tetap aktif secara ekonomis melalui:
  - 1) kesempatan mengikuti pelatihan keterampilan termasuk pelatihan yang sesuai dengan berbagai sektor di pasar kerja terbuka;
  - 2) promosi dan dukungan layanan informasi serta konseling yang berkaitan dengan mempertahankan pekerjaan dan kembali bekerja;
  - 3) pengembangan materi, bila perlu dalam bentuk database elektronik, yang menggambarkan berbagai contoh pelaksanaan dan pengalaman keberhasilan mempertahankan pekerjaan yang



sesuai bagi perempuan dan laki-laki, bagi pekerja yang lebih tua dan lebih muda, dan bagi daerah perkotaan dan pedesaan, serta sesuai dengan kondisi nasional;

- 4) program aktif untuk memfasilitasi masuknya atau masuknya kembali mereka yang mengalami cacat ke dalam pasar kerja;
  - 5) pemantauan kesesuaian sistem jaminan sosial membantu penyandang cacat dengan tujuan untuk mempertahankan pekerjaan dan kembali bekerja.
- c. Pihak yang berwenang harus memastikan bahwa layanan yang sesuai yang diperlukan orang yang menjadi difabel akibat kerja, segera tersedia, bermutu tinggi dan terkoordinasi dengan baik.
  - d. Pihak yang berwenang dapat memberitahu semua pekerja mengenai besaran dan cakupan jaminan, baik dalam bentuk tunai atau bukan dalam bentuk uang, dalam program jaminan sosial mereka yang dimaksud akan menjadi fungsi pencegahan, ganti rugi dan rehabilitasi sehubungan dengan kecacatan.
  - e. Pihak yang berwenang harus menetapkan bentuk dan tatacara pelaksanaan perlindungan pekerjaan di sektor publik.
  - f. Wakil pekerja harus menetapkan kebijakan untuk perlindungan pekerjaan bagi penyandang difabel dalam organisasi mereka sendiri dan dalam usulan mereka untuk perundingan bersama.

### **3. Penyesuaian**

Dalam merekrut atau mempertahankan pekerja yang menjadi penyandang difabel, para pengusaha mungkin memerlukan suatu atau sejumlah penyesuaian dalam beberapa hal untuk memungkinkan orang tersebut melaksanakan pekerjaannya dengan efektif. Untuk memudahkan, ketentuan tentang berbagai jenis kemungkinan penyesuaian dikelompokkan bersama dalam bagian ini. Namun ditekankan bahwa dalam banyak hal, penyesuaian demikian tidak diperlukan.

### **4. Aksesibilitas**

- a. Untuk memfasilitasi perekrutan penyandang difabel dan perlindungan pekerjaan bagi pekerja yang menjadi difabel,

pengusaha perlu mengambil langkah untuk meningkatkan aksesibilitas tempat kerja bagi mereka yang menjadi penyandang difabel dalam berbagai bentuk. Ini meliputi penyediaan gerbang/pintu masuk ke dan kemudahan bergerak di tempat kerja serta kemudahan menggunakan kamar kecil dan kamar mandi.

- b. Aksesibilitas juga dapat dipahami mencakup tanda/tulisan (bahwa sarana itu sedang digunakan), buku pedoman, petunjuk tentang tempat kerja serta informasi elektronik. Apabila perlu, ini harus ditinjau kembali, untuk aksesibilitas bagi mereka yang mempunyai kekurangan dalam penglihatan, dan terutama mereka dengan keterbelakangan intelektual.
- c. Aksesibilitas bagi mereka yang kurang pendengaran meliputi akses ke informasi yang seringkali disampaikan dengan suara seperti bunyi bel, bahaya kebakaran, peluit atau sirene. Sarana demikian perlu ditinjau kembali dan dilengkapi, bila perlu, dengan alat-alat alternatif seperti lampu berkedip-kedip.
- d. Dalam merencanakan peningkatan aksesibilitas, pengusaha perlu berkonsultasi dengan pekerja penyandang difabel dan dengan jasa konsultasi teknis, yang dapat berupa organisasi beranggotakan penyandang difabel, dan dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
- e. Perencanaan meghadapi keadaan darurat perlu memastikan bahwa para penyandang difabel dapat dengan aman dan efektif meninggalkan tempat kerja ke daerah yang aman.

## **5. Adaptasi**

- a. Adaptasi mungkin diperlukan bagi ruang kerja agar pekerja penyandang difabel dapat melakukan pekerjaan dengan efektif. Dalam merencanakan adaptasi, pengusaha harus berkonsultasi dengan pekerja penyandang difabel yang bersangkutan dan dengan wakil pekerja.
- b. Demikian pula, adaptasi mungkin diperlukan untuk alat dan peralatan untuk menjamin kinerja yang optimum. Ini juga perlu

direncanakan melalui konsultasi dengan pekerja penyandang difabel dan wakil pekerja.

- c. Bagi sebagian pekerja penyandang difabel, mungkin diperlukan tinjauan-kembali atas uraian tugas dan perubahan yang sesuai, misalnya dengan menghapus sebagian dari pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh yang bersangkutan dan menggantinya dengan suatu atau sejumlah tugas lain.
- d. Keluwesan jadwal kerja dapat menjadi faktor penting dalam memungkinkan penyandang cacat untuk melaksanakan pekerjaan dengan memuaskan. Ini juga perlu dipertimbangkan, melalui konsultasi dengan pekerja yang bersangkutan dan wakil mereka.
- e. Persyaratan kinerja mungkin perlu ditinjau kembali, melalui konsultasi dengan para penyandang difabel dan wakil-wakil mereka. Terutama pada tahap awal setelah perekrutan, atau setelah salah seorang pekerja menjadi difabel.

#### **6. Insentif dan jasa dukungan**

Apabila perlu, pihak yang berwenang harus menyediakan sejumlah insentif untuk penyesuaian tempat kerja, serta jasa konsultasi teknis yang memberikan nasihat dan informasi terkini tentang penyesuaian pada tempat kerja atau pada organisasi tugas-tugas kerja kepada para pemberi kerja, jika diperlukan.

## **BAB VII**

### **PERATURAN STANDAR TENTANG PERSAMAAN KESEMPATAN KERJA BAGI PENYANDANG DIFABEL (Resolusi PBB No. 48/96 Tahun 1993)**

#### **A. Latar Belakang dan Kebutuhan Masa Kini**

Penyandang difabel terdapat di semua bagian dunia dan pada semua tingkat dalam setiap masyarakat. Jumlah penyandang difabel di dunia ini besar dan senantiasa bertambah. Baik penyebab maupun akibat kecacatan di dunia ini bervariasi. Variasi tersebut diakibatkan oleh perbedaan keadaan sosial ekonomi dan sarana serta prasarana yang dapat disediakan oleh negara untuk kesejahteraan warganya. Kebijakan dalam bidang kecacatan masa kini merupakan hasil perkembangan selama dua ratus terakhir. Dalam banyak hal, keadaan ini mencerminkan kondisi kehidupan pada umumnya dan kebijakan sosial ekonomi dari masa ke masa. Akan tetapi, dalam bidang kecacatan terhadap pula keadaan-keadaan khusus yang telah memengaruhi kondisi kehidupan para penyandang cacat. Kemasabodohan, kurangnya perhatian, takhayul serta rasa takut merupakan faktor-faktor sosial yang sepanjang sejarah difabel telah

PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PENYANDANG DIFABEL  
dalam Konteks Pendidikan Karakter Bangsa

memencilkan para penyandang difabel dan menghambat perkembangannya. Selama tahun-tahun silam, kebijaksanaan perkembangan dari perawatan dasar di lembaga-lembaga pendidikan bagi anak-anak menyandang difabel sampai pada rehabilitasi bagi orang-orang yang mengalami kecacatan pada masa dewasanya. Melalui pendidikan dan rehabilitasi, para penyandang difabel menjadi lebih aktif dan menjadi tenaga pendorong bagi pengembangan lebih lanjut kebijaksanaan dalam bidang difabel.

Organisasi-organisasi para penyandang difabel serta lembaga swadaya masyarakat dalam bidang difabel terbentuk, yang menyuarakan himbauan-himbauan bagi terciptanya kondisi yang lebih baik bagi penyandang difabel. Sesudah perang dunia kedua, konsep-konsep tentang integrasi dan normalisasi diperkenalkan, yang mencerminkan tumbuhnya kesadaran tentang kemampuan para penyandang difabel. Menjelang akhir tahun 1960-an, organisasi-organisasi para penyandang difabel di beberapa negara mulai merumuskan suatu konsep baru tentang difabel. Konsep baru tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara keterbatasan yang dialami oleh individu para penyandang difabel, rancangan bangunan serta struktur lingkungannya dan sikap masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan itu, masalah-masalah difabel di negara-negara berkembangpun makin muncul ke permukaan. Di beberapa negara-negara ini persentase penduduk yang menyandang difabel diperkirakan sangat tinggi, dan di kebanyakan negara berkembang tersebut para penyandang difabel berada jauh di bawah garis kemiskinan.

## **B. Aksi Internasional Terdahulu**

Hak-hak penyandang difabel telah lama menjadi pusat perhatian peserikatan bangsa-bangsa dan organisasi-organisasi Internasional lainnya. Hasil yang paling penting dari tahun penyandang cacat Internasional 1981 adalah program Aksi dunia mengenai para penyandang difabel yang telah ditetapkan oleh sidang umum PBB dalam resolusinya No. 37/52.

Tahun penyandang difabel Internasional dan Program aksi dunia tersebut merupakan tenaga penggerak yang kuat bagi kemajuan dalam bidang difabel ini. kedua hal tersebut memberi tekanan pada hak para penyandang cacat untuk memperoleh hak kesempatan yang sama seperti warga negara lainnya, serta hak untuk memperoleh bagian yang sama dalam perbaikan kondisi kehidupan sebagai hasil pembangunan sosial dan ekonomi. Pertemuan global para ahli untuk meninjau kembali pelaksanaan program aksi dunia mengenai para penyandang difabel pada pertengahan Dekade PBB untuk para penyandang difabel diselenggarakan di stockholm pada tahun 1987. Pada pertemuan tersebut disarankan agar dikembangkan satu filsafat yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan prioritas bagi aksi di tahun-tahun mendatang.

Dasar filsafat tersebut seyogianya berupa pengakuan atas hak-hak para penyandang difabel. Sehubungan dengan hal tersebut, pertemuan itu merekomendasikan untuk merancang konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap para penyandang difabel, yang harus diratifikasi oleh negara-negara menjelang berakhirnya dekade tersebut. Sebuah rencana garis besar konvensi disiapkan oleh Italia dan disajikan kepada sidang umum pada sidang ke-42. Penyajian-penyajian lebih lanjut mengenai rancangan konvensi itu dilakukan oleh swedia pada tahun ke-44. Akan tetapi, dalam kedua bidang tersebut tidak dicapai sebuah konsensus tentang konvensi yang cocok. Banyak perwakilan berpendapat bahwa dokumen-dokumen tentang hak-hak asasi manusia yang telah ada sudah dapat menjamin para penyandang difabel untuk memperoleh hak-hak yang sama dengan orang-orang lain.

### **C. Menuju Peraturan Standar**

Berdasarkan pengarahan dari pidato-pidato dalam sidang umum, dewan ekonomi dan sosial pada sidang pertamanya di tahun 1990 akhirnya sepakat untuk memusatkan perhatian pada usaha menciptakan suatu instrumen internasional yang lain. Dengan resolusi

1990/26. Dewan menugasi komisi pembangunan sosial agar pada sidangnya yang ke-32 mempertimbangkan pembentukan sebuah kelompok kerja ad hoc yang terdiri atas pakar-pakar pemerintah, yang didanai dengan sumbangan-sumbangan sukarela, untuk mengusahakan perumusan peraturan standar tentang kesamaan kesempatan bagi para penyandang difabel anak-anak, Remaja dan Dewasa, dengan menggalang kerja sama yang erat dengan lembaga-lembaga spesialisasi, badan-badan antara pemerintah dan organisasi-organisasi para penyandang difabel.

Dewan juga meminta komisi untuk menyelesaikan naskah peraturan tersebut untuk dipertimbangkan pada tahun 1993 dan diajukan ke sidang umum dalam sidang ke-48. Diskusi-diskusi selanjutnya dalam komite ketiga dari sidang umum pada sidang ke-45 menunjukkan bahwa terdapat dukungan yang luas terhadap prakarsa baru untuk mengusahakan perumusan peraturan standar tentang persamaan kesempatan bagi para penyandang difabel tersebut. Pada sidang ke-32 komisi pembangunan sosial, prakarsa untuk merumuskan peraturan standar itu mendapatkan dukungan dari sejumlah besar perwakilan, dan diskusi-diskusi menghasilkan ditetapkannya resolusi 32/2, yang memutuskan untuk membuat sebuah kelompok kerja ad hoc yang sesuai dengan resolusi 1990/26 Dewan Ekonomi dan Sosial.

#### **D. Tujuan dan Isi Peraturan Standar tentang Persamaan**

Peraturan-peraturan standar tentang Persamaan Kesempatan bagi para penyandang difabel telah dikembangkan atas dasar pengalaman yang diperoleh selama dekade Penyandang difabel PBB (1983-1992). Piagam Internasional Hak-hak Asasi Manusia, yang terdiri atas Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal, Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Perjanjian internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi tentang Hak-hak Anak, dan konvensi tentang penghapusan semua bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, maupun program Aksi dunia mengenai Penyandang Difabel, merupakan landasan politik dan moral bagi peraturan ini. meski peraturan ini tidak

wajib, tetapi dapat menjadi peraturan keluaran internasional jika ditetapkan oleh sejumlah negara dengan tujuan menghormati suatu aturan dalam hukum internasional. Peraturan ini mengandung nilai moral yang tinggi, negara-negara memerlukan komitmen politik yang kuat yang untuk dapat melaksanakan demiter ciptanya persamaan kesempatan itu. Prinsip-prinsip penting untuk bertanggung jawab, berbuat dan berkerja sama terkandung pula didalamnya.

Bidang-bidang yang sangat penting bagi kualitas kehidupan dan demi tercapainya partisipasi penuh dan persamaan pun termuat. Peraturan ini dapat dipergunakan sebagai suatu instrumen bagi pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan tindakan bagi para penyandang difabel serta organisai-organisainya. Peraturan ini dapat pula di pergunakan sebagai dasar kerja sama teknik dan ekonomi di antara negara-negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi internasional lainnya.

Peraturan ini bertujuan untuk menjamin agar para penyandang difabel anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, memperoleh hak dan kewajiban yang sama seperti orang-orang lain sebagai warga masyarakatnya. Di dalam sebuah masyarakat didunia ini masih terdapat hambatan-hambatan yang mengakibatkan para penyandang difabel tidak dapat menggunakan hak dan kebebasannya sehingga sulit bagi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan-kegiatan di masyarakatnya. Hal tersebut merupakan tanggung jawab negara-negara untuk melakukan tindakan yang tepat demi menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. Para penyandang difabel dan organisasi-organisasinya seyogianya memainkan peran aktif sebagai mitra kerja dalam proses menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. Persamaan kesempatan bagi para penyandang difabel merupakan suatu sumbangkan yang sangat penting bagi usaha memobilisasi sumber daya manusia secara umum dan global. Perhatian khusus mungkin perlu diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu seperti wanita, anak-anak, lanjut usia, yang miskin, para pekerja migran, penyandang difabel ganda atau multi, suku terasing dan etnik minoritas.



Disamping itu, terdapat pula sejumlah besar pengungsi penyandang difabel yang mempunyai kebutuhan khusus yang memerlukan perhatian.

### **E. Konsep Fundamental dalam Kebijakan Mengenai Difabel**

Berikut ini adalah konsep-konsep yang dipergunakan dalam peraturan ini. konsep-konsep tersebut pada intinya dibangun atas dasar konsep-konsep yang terdapat dalam program aksi dunia mengenai penyandang difabel. Dalam hal-hal tertentu, konsep-konsep tersebut mencerminkan perkembangan yang telah terjadi dalam PBB bagi penyandang difabel.

#### **1. Disability dan Handicap**

Istilah "disability" mencakup bermacam-macam keterbatasan kemampuan yang terjadi pada suatu populasi di semua negara di dunia. Seseorang mungkin menyandang keterbatasan kemampuan sebagai akibat kekurangan pada fisik, intelektual atau penginderaan, ataupun sebagai akibat dari kondisi-kondisi medis atau penyakit mental tertentu. Kekurangan, kondisi-kondisi atau penyakit mental tertentu.

Kekurangan, kondisi-kondisi atau penyakit tersebut dapat bersifat permanen atau sementara. "handicap" adalah kehilangan atau keterbatasan kesempatan untuk ambil bagian dalam kehidupan di masyarakat pada tingkat yang sama dengan orang lain. Istilah handicap menggambarkan pengalaman pahit seseorang dengan kecacatan dan lingkungannya.

Penggunaan istilah ini bertujuan menonjolkan kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam lingkungan serta kegiatan-kegiatan yang terorganisasi didalam masyarakat, misalnya dalam hal informasi, komunikasi dan pendidikan, yang mengakibatkan para penyandang difabel tidak dapat berpartisipasi atas dasar persamaan. Penggunaan istilah disability dan handicap tersebut atas seyogianya.

Dipandang sebagai suatu perkembangan baru dalam sejarah kecacatan modern. Selama tahun 1970-an terdapat reaksi yang kuat

dari kalangan perwakilan organisasi-organisasi penyandang difabel dan para profesional dalam bidang kecacatan menentang peristilahan yang digunakan pada saat itu. Istilah disability dan handicap sering dipergunakan secara tidak jelas dan membingungkan, yang tidak memberikan pedoman yang baik bagi pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan tindakan politik. peristilahan itu mencerminkan pendekatan medis dan diagnostik, yang mengabaikan ketidaksempurnaan dan kekurangan-kekurangan masyarakat sekitar. Pada tahun 1980, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan klasifikasi internasional tentang impairment, disability, dan handicap yang menggunakan pendekatan yang lebih tepat tetapi juga lebih relativistik. Klasifikasi tersebut menggariskan perbedaan yang jelas antara impairment, disability dan handicap.

Klasifikasi ini telah di pergunakan secara meluas dalam berbagai bidang seperti rehabilitasi, pendidikan, statistik, pembuatan kebijaksanaan, perundang-undangan, kependudukan, sosiologi, ekonomi dan antropologi. Beberapa pengguna menyatakan bahwa klasifikasi tersebut, dalam definisinya mengenai istilah handicap, masih dapat dianggap terlalu medis dan terlalu berpusat pada individu, dan kurang menggambarkan adanya interaksi antara kondisi-kondisi kemasyarakatan atau harapan-harapan serta keberatan-keberatan lain yang diungkapkan oleh para pengguna selama dua belas tahun sejak publikasi klasifikasi ini, akan dikupas dalam revisi mendatang.

Sebagai hasil dari pengalaman yang diperoleh dalam penerapan program Aksi Dunia dan dari diskusi umum yang dilaksanakan selama Dekade PBB bagi para Penyandang difabel, terdapat pendalaman pengetahuan dan perluasan pemahaman mengenai masalah-masalah difabel serta peristilahannya. Peristilahan yang dipergunakan sekarang mengandung implikasi tentang perlunya memenuhi kebutuhan individu (seperti rehabilitasi dan bantuan teknis) meupun pentingnya mengatasi kekurangan-kekurangan masyarakat (seperti terdapatnya berbagai hambatan sosial untuk partisipasi para penyandang difabel dalam kegiatan masyarakat) impairment adalah kehilangan atau

ketidaknormalan struktur atau fungsi psikologis, fisiologis, atau anatomis.

## **2. Pencegahan**

Pencegahan adalah suatu tindakan yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya difabel (*impairment*) fisik, intelektual, psikiatri atau indra (pencegahan primer), atau mencegah agar kecacatan tersebut tidak mengakibatkan keterbatasan kemampuan yang permanen atau disability (pencegahan sekunder).

Pencegahan dapat meliputi berbagai macam tindakan, seperti perawatan kesehatan primer, perawatan anak pada masa prenatal dan posnatal, pendidikan gizi, kampanye imunisasi terhadap penyakit menular, berbagai penanggulangan untuk memberantas penyakit-penyakit endemik, peraturan keselamatan, program pencegahan kecelakaan dalam berbagai macam lingkungan yang menyangkut penyelesaian tempat kerja untuk mencegah terjadinya keterbatasan kemampuan kerja (*occupational disability*) serta penyakit, dan pencegahan kecacatan akibat populasi lingkungan atau perang.

## **3. Rehabilitasi**

Rehabilitasi adalah suatu proses yang ditunjukkan untuk memungkinkan para penyandang difabel mencapai dan mempertahankan tingkat kemampuan fisik, penginderaan, intelektual, psikiatridan atau kemampuan sosialnya secara optimal, sehingga mereka memiliki cara untuk mengubah kehidupan ketingkat kemandirian yang lebih tinggi. Rehabilitasi dapat mencakup upaya-upaya menanamkan dan/atau memulihkan kemampuan-kemampuan, atau memberikan kemampuan lain untuk menggantikan kemampuan yang hilang atau tidak dimiliki atau kemampuan yang terbatas.

Proses rehabilitasi tidak mencakup perawatan medis awal. Proses ini mencakup upaya-upaya dan kegiatan-kegiatan dalam cakupan luas, mulai dari rehabilitasi dasar dan umum sehingga kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada tujuan tertentu, misal rehabilitasi kekarwaan.

#### 4. **Pesamaan Kesempatan**

Persamaan kesempatan yang dimaksud dengan persamaan kesempatan adalah proses yang menyebabkan berbagai sistem yang terdapat di masyarakat dan lingkungan, seperti sistem pelayanan, kegiatan sosial, informasi dapat dinikmati oleh semua orang, khususnya para penyandang difabel. Prinsip persamaan hak mengandung arti bahwa kebutuhan-kebutuhan setiap individu sama pentingnya, bahwa kebutuhan-kebutuhan setiap individu dijadikan sebagai dasar perencanaan masyarakat dan bahwa semua sumber harus dia manfaatkan sedemikian rupa sehingga menjamin agar setiap individu memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

Para penyandang difabel adalah anggota, masyarakat dan mempunyai hak untuk berbeda dalam lingkungan masyarakatnya. Mereka seyogianya mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan melalui sistem pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan pekerjaan, pelayanan sosial yang berlaku umum. Karena para penyandang difabel memiliki hak-hak yang sama pula. Agar hak-hak tersebut dapat diperoleh, masyarakat harus meningkatkan harapannya tentang hal-hal yang dapat dicapai oleh para penyandang difabel. Sebagai bagian dari proses persamaan kesempatan, sarana/prasarana seyogianya disediakan dapat mengemban tanggung jawabnya secara penuh sebagai anggota masyarakat.

Mukadimah mengingat ikrar yang telah dibuat oleh negara-negara di bawah piagam Peserikatan Bangsa Bangsa untuk mengambil tindakan bersama dan sendiri-sendiri dengan bekerja sama organisasi ini untuk meningkatkan standar kehidupan, penyediaan lapangan kerja bagi semua orang, dan memperbaiki kondisi ekonomi dan kemajuan sosial serta pembangunan. Menegaskan kembali komitmen terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang fundamental, keadilan sosial dalam martabat harga diri manusia yang diproklamasikan dalam piagam tersebut. Mengingat terutama Standar internasional tentang Hak-hak asasi manusia, yang telah dicantumkan dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, perjanjian internasional tentang Hak-hak Ekonomi,

Sosial dan Budaya, serta Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Mengingat bahwa instrumen-instrumen tersebut atas menyatakan bahwa hak-hak yang diakui di dalamnya seyogianya diberlakukan secara sama kepada semua individu tanpa diskriminasi. Mengingat dalam ketentuan-ketentuan dalam konvensi tentang hak-hak anak, yang melarang diskriminasi atas dasar kecacatan dan menuntut adanya upaya-upaya khusus untuk. Menjamin hak anak-anak penyandang difabel, dan konvensi Internasional tentang perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang menetapkan beberapa upaya protektif untuk mencegah difabel. Menghargai Deklarasi tentang hak-hak penyandang difabel, Deklarasi tentang hak-hak para tunagrahita, Deklarasi tentang Kemajuan dan Pembangunan sosial, Prinsip-prinsip bagi perlindungan Para Penderita Penyakit Mental dan peningkatan Perawatan Kesehatan Mental, serta instrumen-instrumen lain yang relevan yang ditetapkan oleh sidang umum.

Menghargai pula konvensi-konvensi dan rekomendasi-rekomendasi relevan yang ditetapkan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO), dengan mengacu khusus pada ketentuan tentang partisipasi dalam pekerjaan tanpa diskriminasi bagi para penyandang difabel. Mengingat rekomendasi-rekomendasi dan karya-karya yang relevan dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO), terutama Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Bagi semua, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dana Anak-anak PBB serta organisasi-organisasi yang terkait. Menghargai komitmen yang telah dibuat oleh negara-negara mengenai perlindungan lingkungan. Mengingat kehancuran yang disebabkan oleh konflik bersenjata dan menyesalkan penggunaan sumber-sumber yang sangat terbatas untuk memproduksi senjata.

Mengingat bahwa program Aksi Dunia mengenai Penyandang difabel dan definisi yang terkandung didalamnya tentang "persamaan kesempatan" mencerminkan adanya keinginan yang sungguh-sungguh

dari pihak masyarakat internasional untuk pengejawantahkan berbagai instrumen dan rekomendasi internasional tersebut ke dalam signifikan yang praktis dan konkret. Mengakui bahwa tujuan dekade Penyandang difabel PBB (1983-1992) untuk menerapkan program Aksi dunia masih tetap absah, dan menuntut tindakan yang segera dan berkelanjutan.

Mengingat bahwa Program aksi Dunia didasarkan atas konsep-konsep yang absahnya baik di negara-negara berkembang maupun di negara-negara industri, meyakini bahwa usaha-usaha yang intensif dibutuhkan agar para penyandang difabel dapat memperoleh hak asasi manusianya dan dapat berpartisipasi di masyarakat secara penuh, serta para orang tua, wali, pembela dan organisasi-organisasinya, harus metupakan mitra kerja yang aktif bagi negara dalam perencanaan dan penerapan semua upaya yang berkaitan dengan hak-hak sipil, politik, sosial dan budaya. Dalam melaksanakan resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial tanggal 24 Mei 1990, dan berdasarkan atas butir-butir yang terinci dalam program aksi dunia mengenai upaya-upaya tertentu bagi para penyandang difabel agar mencapai kesamaan dengan orang lain.

Negera-negera yang telah menetapkan Peraturan Standar mengenai Persamaan Kesempatan bagi para Penyandang difabel yang di gariskan di bawah ini, demi: memberi penekanan agar semua tindakan dalam bidang kecacatan didasarkan atas pengalaman dan pengetahuan yang memadai tentang kondisi-kondisi dan kebutuhan-kebutuhan yang khusus para penyandang difabel. Memberi penekanan bahwa proses dimana setiap aspek organisasi kemasyarakatan dapat dimasuki oleh semua orang maupun tujuan dasar dari pembangunan sosial-ekonomi. Mengariskan aspek-aspek kebijaksanaan sosial yang sangat menentukan dalam bidang difabel, yang mencakup pemberian dorongan yang aktif bagi terjalannya kerja sama teknik dan ekonomi, jika dipandang tepat.

Memberi contoh proses pembuatan keputusan politik yang diperlukan untuk terwujudnya kesamaan kesempatan, dengan mengingat: tingkat kemajuan teknik dan ekonomi yang sangat berbeda-beda, kenyataan bahwa proses tersebut harus mencer-minkan

pemahaman yang mendalam tentang konteks budaya dimana proses ini berlangsung, serta peran kunci para penyandang difabel di dalamnya. Menawarkan berbagai mekanisme nasional untuk menjalin kerja sama yang erat dikalangan negara-negara, organ-organ dalam system PBB badan-badan antara pemerintah lainnya serta Organisasi-organisasi para penyandang cacat. Menawarkan suatu mekanisme yang efektif untuk memantaukan proses yang ditempuh oleh negara-negara dalam mewujudkan kesamaan dan kesempatan bagi para penyandang difabel.

## **F. Prasyarat Bagi Persamaan Partisipasi**

### **1. Peningkatan Kesadaran**

Negara-negara seyogianya melakukan suatu aksi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang para penyandang difabel, hak-haknya, kebutuhan-kebutuhannya, potensinya serta kontribusinya.

- a. Negara-negara seyogianya mendorong para pejabat yang berwenang menyebarluaskan informasi yang muktahir tentang program maupun pelayanan yang tersedia kepada para penyandang difabel, keluarganya, para profesional dalam bidang ini serta masyarakat umum. Informasi kepada para penyandang difabel seyogianya di sampaikan dalam bentuk yang dapat mereka akses.
- b. Negara-negara seyogianya mengambil prakarsa dan mendukung penyeleng-garaan kampanye informasi mengenai para penyandang difabel serta kebijaksanaan dalam bidang kecacatan, menyampaikan pesan bahwa para penyandang difabel adalah warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara yang lainnya, serta upaya-upaya perlu dilakukan untuk menghilangkan semua hambatan bagi terlaksananya partisipasi penuh.
- c. Negara-negara seyogianya menjamin agar program pendidikan masyarakat dalam berbagai aspek mencerminkan prinsip partisipasi penuh dan persamaan.

- d. Negara-negara seyogianya mengajak para penyandang cacat beserta keluarga dan organisasinya untuk berpartisipasi dalam program pendidikan masyarakat mengenai masalah-masalah difabel.
- e. Negara-negara seyogianya mendorong perusahaan-perusahaan di sektor swasta untuk memasuki masalah-masalah difabel ke dalam aspek kegiatannya.
- f. Negara-negara seyogianya memulai dan mempromosikan program-program yang di tunjukan untuk mempertinggi tingkat kesadaran para penyandang difabel akan hak-hak dan potensinya. Meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan pribadi akan membantu para penyandang difabel memperoleh manfaat dari kesempatan yang tersedia bagi mereka.
- g. Peningkatan kesadaran seyogianya menjadi bagian yang penting dari pendidikan anak-anak penyandang difabel dan program rehabilitasi. Para penyandang difabel dapat juga saling membantu dalam peningkatan kesadaran ini melalui kegiatan-kegiatan organisasinya sendiri.
- h. Peningkatan kesadaran seyogianya menjadi bagian dari pendidikan bagi semua anak dan seyogianya menjadi komponen dari program pendidikan guru dan peneliti semua profesioal.

## **2. Perawatan Medis**

Negara-negara seyognyanya menjamin penyediaan perawatan medis yang efektif bagi para penyandang cacat.

- a. Negara-negara seyogianya berusaha kearah tersediannya program-program yang dilaksanakan oleh tim profesional multidisipliner untuk melakukan deteksi dini, assesmen dan penanggulangan difabel (impairment). Hal tersebut dapat mencegah, mengurangi atau menghilangkan penyebab difabel lebih lanjut. Program semacam ini seyogianya mengikutsertakan secara penuh para penyandang difabel beserta keluarganya pada tingkat perorangan, dan organisasi-organisasi para penyandang difabel pada tingkat perencanaan dan evaluasinya.



- b. Para pekerja sosial masyarakat setempat seyogianya diberi pelatihan untuk berpartisipasi dalam bidang-bidang seperti diteksi dini mengenai kecacatan, pemberian pertolongan pertama dan perujukan kedinas pelayanan yang tepat.
- c. Negara-negara seyogianya menjamin agar penyandang difabel, terutama bayi dan anak-anak, memperoleh tingkat perawatan medis yang sama didalam sistem yang sama seperti anggota masyarakat lainnya.
- d. Negara-negara seyogianya menjamin agar semua personal medis dan para medis memperoleh pelatihan dan perlengkapan yang memadai untuk memberika perawatan medis kepada para penyandang difabel agar mereka memiliki akses terhadap metode dan teknologi perawatan yang relevan.
- e. Negara-negara seyogianya menjamin agar personal medis, para medis dan pihak-pihak lain yang terkait mendapat pelatihan yang memadai sehingga mereka tidak akan memberikan advis yang tidak tepat kepada orang tua, yang dapat mengakibatkan menyempitnya pilihan mereka terhadap cara-cara penanganan anaknya. Pelatihan tersebut seyogianya didasarkan agar para penyandang difabel mendapatkan perawatan dan obat-obatan yang secara teratur yang mungkin mereka perlukan untuk memelihara atau meningkatkan taraf kemampuannya.

### **3. Rehabilitasi**

Negara-negara seyogianya menjamin tersedianya pelayanan rehabilitasi bagi para penyandang difabel agar mereka dapat mencapai dan mempertahankan tingkat kemandirian dan kemampuan secara optimal.

- a. Negara-negara seyogianya mengembangkan program rehabilitasi nasional bagi semua kelompok penyandang difabel. Program tersebut seyogianya didasarkan atas kebutuhan individu yang sebenarnya dari para penyandang difabel atas prinsip-prinsip partisipasi penuh dan persamaan.

- b. Program tersebut seyogyannya mencakup tentang kegiatan yang luas, seperti latihan keterampilan dasar untuk meningkatkan atau menggantikan kemampuan yang terganggu, penyuluhan kepada para penyandang difabel beserta keluarganya, pengembangan kemandirian, serta pelayanan insidental seperti asesmen dan bimbingan.
- c. Semua penyandang difabel, termasuk mereka yang menyandang kecacatan berat dan/atau difabel ganda, yang membutuhkan rehabilitasi, seyogianya dapat memperolehnya.
- d. Para penyandang difabel beserta keluarganya seyogianya dapat berpartisipasi dalam merancang dan mengatur pelayanan rehabilitasi mengenai diri mereka.
- e. Semua rehabilitasi seyogianya tersedia dalam lingkungan tempat tinggal para penyandang cacat itu. namun demikian, dalam hal-hal tertentu, agar mencapai tujuan pelatihan tertentu, program rehabilitasi khusus, untuk jangka waktu terbatas, dapat diselenggarakan dalam bentuk perpantian, jika hal itu dipandang tepat.
- f. Para penyandang difabel beserta keluarganya seyogianya di dorong untuk terlibat dalam program rehabilitasi, misalnya sebagai guru, instruktur atau penyuluhan, yang terlatih.
- g. Negara-negara seyogianya memanfaatkan keahlian yang terdapat didalam organisasi-organisasi para penyandang difabel bila merumuskan atau mengevaluasi program rehabilitasi.

#### **4. Pelayanan Penunjang**

Negara-negara seyogianya menjamin pengembangan dan penyediaan pelayanan-pelayanan penunjang, termasuk alat-alat bantu khusus bagi penyandang difabel, untuk membantu mereka meningkatkan taraf kemandirian dalam kehidupannya sehari-hari dan untuk melaksanakan hak-haknya.

- a. Negara-negara seyogianya menjamin penyediaan alat-alat bantu khusus, bantuan pribadi dan pelayanan interpreter, menurut

kebutuhan penyandang difabel yang bersangkutan, sebagai langkah yang penting untuk mencapai kesamaan kesempatan.

- b. Negara-negara seyogyannya mendukung pengembangan, produksi, distribusi dan servis alat-alat bantu khusus serta penyebarluasan pengetahuan mengenai peralatan tersebut.
- c. Untuk mencapai hal tersebut, seyogyannya dimanfaatkan teknologi yang sudah tersedia secara umum. Di negara-negara yang memiliki industri teknologi tinggi, hal ini seyogianya memanfaatkan standar dan efektivitas alat-alat bantu khusus tersebut. Stimulasi penting diberikan untuk mendorong pengembangan dan produk alat-alat yang sederhana dan tidak mahal, jika memungkinkan menggunakan bahan lokal dan fasilitas produk setempat. Para penyandang difabel sendiri dapat dilibatkan dalam produk alat-alat tersebut.
- d. Negara-negara seyogianya mengakui bahwa semua penyandang difabel yang membutuhkan alat-alat bantu khusus seyogianya dapat memperolehnya sesuai dengan kebutuhannya. Ini dapat diartikan bahwa alat-alat bantu khususnya seyogianya disediakan tanpa pungutan biaya atau dengan harga yang serendah mungkin sehingga para penyandang difabel atau keluarga mampu membelikan.
- e. Didalam program rehabilitasi, untuk mengadakan alat bantu khusus, negara-negara seyogianya mempertimbangkan tuntutan khusus para remaja penyandang difabel mengenai desain, daya tahan dan kecocokannya berdasarkan usia pemakaian alat bantu khusus tersebut.
- f. Negara-negara seyogianya mendukung pengembangan dan pangsadaan program bantu pribadi dan pelayanan interperter, teruyama bagi para penyandang kecacatan berat dan atau kecacatan ganda. Program semacam ini akan mempertinggi tingkat partisipasi para penyandang difabel dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di tempat kerja, di sekolah dan dalam kegiatan-kegiatan waktu senggang. Bantuan pribadi seyogianya direncanakan sedemikian rupa sehingga para penyandang difabel yang memanfaatkan

program ini dapat turun mengambil keputusan mengenai cara program tersebut dijalankan.

## **G. Sasaran Bagi Persamaan Partisipasi**

### **1. Aksesibilitas**

Negara-negara seyogianya mengakui pentingnya aksesibilitas dalam proses terciptanya kesamaan kesempatan dalam semua kegiatan masyarakat. Bagi para penyandang cacat dari semua jenis kecacatan, negara-negara seyogianya (a) memperkenalkan program aksi untuk menciptakan lingkungan fisiknya terakses; dan (b) mengambil langkah-langkah untuk menyediakan akses terhadap informasi dan komunikasi.

#### **a. Akses Terhadap Lingkungan Fisik**

- 1) Negara-negara seyogianya mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan rintangan-rintangan bagi partisipasi di dalam lingkungan fisik. Langkah-langkah dimaksud seyogianya berupa pengembangan standar dan pedoman serta pertimbangan untuk memberlakukan undang-undang demi menjamin aksesibilitas terhadap berbagai bidang kehidupan di masyarakat, misalnya sehubungan dengan perumahan, bangunan, pelayanan transportasi umum dan alat transportasi lainnya, jalan raya dan lingkungan luar ruangan lainnya.
- 2) Negara-negara seyogianya menjamin agar arsitek, insinyur bangunan dan pihak-pihak lainnya secara profesional terkait dalam perancangan dan pembangunan lingkungan fisik, mendapatkan akses terhadap informasi yang memadai tentang kebijakan mengenai kecacatan serta langkah-langkah untuk menciptakan aksesibilitas.
- 3) Peryaratan aksesibilitas seyogianya termuat di dalam desain dan konstruksi lingkungan fisik dan awal hingga perencanaannya.
- 4) Organisasi-organisasi para penyandang cacat seyogianya dikontribusikan jika akan mengembangkan standar dan norma-

norma bagi aksesibilitas. Organisasi-organisasi ini juga seyogianya dilibatkan secara langsung sejak tahap perencanaan awal, jika proyek-proyek pembangunan sarana umum dirancang, sehingga aksesibilitas yang maksimum dapat terjamin adanya.

**b. Akses Terhadap Informasi dan komunikasi**

- 1) Para penyandang difabel dan bilamana perlu, keluarganya para pembelanya seyogianya memiliki akses terhadap informasi lengkap tentang diagnosis, hak-hak pelayanan serta program yang tersedia, pada semua tahap, informasi semacam ini seyogianya disajikan dalam bentuk yang dapat diakses oleh penyandang difabel.
- 2) Negara-negara seyogianya mengembangkan strategi-strategi agar pelayanan informasi dan dokumentasi dapat diakses oleh semua kelompok penyandang difabel, Braille, rekaman dalam kaset, tulisan besar dan teknologi lainnya yang sesuai, seyogianya dipergunakan untuk memberi akses terhadap informasi dan dokumentasi tertulis bagi para tunanetra. Demikian pula teknologi yang sesuai seyogianya dipergunakan untuk memberikan akses terhadap informasi lisan bagi para tunarungu atau mereka yang mengalami kesulitan dalam hal pemahaman.
- 3) Seyogianya dipertimbangkan penggunaan bahasa isyarat dalam pendidikan anak tunarungu, dalam keluarga dan masyarakat.
- 4) Pelayanan penerjemahan bahasa isyarat seyogianya juga disediakan untuk memudahkan komunikasi antara para tunarungu dengan anggota masyarakat lainnya. Seyogianya dipertimbangkan pula kebutuhan-kebutuhan orang yang mengalami hambatan komunikasi lainnya.
- 5) Negara-negara seyogianya mendorong media massa, terutama televisi, radio dan surat kabar, agar pelayanannya dapat diakses.
- 6) Negara-negara seyogianya menjamin komputerisasi informasi dalam sistem pelayanan yang diperuntukkan bagi umum dapat diakses atau diadaptasikan sehingga dapat diakses oleh para penyandang difabel.

- 7) Organisasi-organisasi para penyandang seyogianya dikonsultasikan jika akan mengembangkan langkah-langkah untuk membuat pelayanan informasi dapat diakses.

## **2. Pendidikan**

Negara-negara seyogianya mengakui prinsip persamaan kesempatan pendidikan bagi anak-anak, remaja dan dewasa penyandang difabel pada tingkat pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi secara integrasi/terpadu. Negara-negara seyogianya menjamin bahwa pendidikan bagi para penyandang difabel merupakan bagian yang integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan.

- 1) Para pejabat pendidikan umum bertanggung jawab atas pendidikan bagi penyandang difabel dilaksanakan dengan sistem integrasi. Pendidikan bagi para penyandang difabel seyogianya merupakan bagian yang integrasi dan perencanaan pendidikan nasional, pengembangan kurikulum dan organisasi sekolah.
- 2) Pendidikan di sekolah umum berarti harus tersedianya interpreter serta bentuk-bentuk pelayanan penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan, aksesibilitas dan bentuk-bentuk pelayanan penunjang yang memadai, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan para penyandang difabel dari berbagai jenis kecacatan, seyogianya tersedia.
- 3) Kelompok-kelompok orang tua siswa dan organisasi-organisasi penyandang cacat seyogianya dilibatkan dalam proses pendidikan dan semua jenjang.
- 4) Di negara-negara yang telah menerapkan kebijaksanaan wajib belajar, wajib belajar tersebut seyogianya mencakup semua anak dari semua jenis dan semua tingkat kecacatan, termasuk yang paling berat.
- 5) Perhatian khusus seyogianya diberikan kepada lingkup-lingkup berikut:
  - a) Anak-anak penyandang difabel yang masih sangat kecil;
  - b) Anak-anak penyandang difabel pra-sekolah;

- c) Orang dewasa penyandang cacat, terutama wanita.
- 6) Untuk melancar proses pendidikan umum bagi para penyandang difabel di sekolah-sekolah umum, negara-negara seyogianya:
    - a) Mengeluarkan kebijaksanaan yang dinyatakan secara jelas, dapat dimengerti dan diterima ditingkat sekolah dan oleh masyarakat luas;
    - b) Mengizinkan adanya fleksibilitas, penambahan dan penyesuaian dalam kurikulum;
    - c) Menyediakan bahan-bahan yang berkualitas, menyelenggarakan pelatihan guru yang berkelanjutan serta menyediakan guru pembimbing khusus.
  - 7) Pendidikan terpadu dan program bersumber daya masyarakat seyogianya di pandang sebagai pendekatan pelengkap dalam memberikan pendidikan dan pelatihan yang hemat dana bagi para penyandang difabel. Program bersumber daya masyarakat tingkat nasional seyogianya mendorong masyarakat untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber-sumber yang tersedia untuk memberikan pendidikan lokal kepada para penyandang difabel.
  - 8) Di dalam situasi dimana sistem persekolahan umum belum dapat memenuhi kebutuhan semua penyandang difabel secara memadai, penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB) dapat di pertimbangkan. Hal ini seyogianya ditujukan untuk mempersiapkan para siswa bagi pendidikan dalam sistem persekolahan umum. Kualitas pendidikan tersebut seyogianya mencerminkan standar dan tujuan yang sama dengan pendidikan dan seyogianya terkait erat dengannya. Sekurang-kurangnya, para siswa penyandang difabel itu seyogianya diberi porsi sumber pendidikan yang sama dengan yang memperoleh siswa yang tidak difabel. Negara-negara seyogianya berangsur-angsur mengintegrasikan pelayanan Pendidikan Luar Biasa (PLB) itu dengan pendidikan umum. Diakui bahwa dalam kasus tertentu untuk saat ini SLB dapat dipandang sebagai bentuk pendidikan yang paling tepat untuk siswa-siswa penyandang difabel tertentu.

- 9) Mengingat kebutuhan komunikasi khusus bagi tunarungu dan tunarungu/ netra, pendidikan mereka mungkin lebih cocok diselenggarakan disekolah-sekolah yang khusus bagi mereka atau kelas dan unit khusus disekolah umum. Terutama pada tahap awal, perhatian khusus perlu difokuskan pada pengajaran yang peka budaya yang akan menghasilkan keterampilan komunikasi efektif dan kemandirian yang maksimal bagi para tunarungu atau tunarungu/netra.

### **3. Penempatan Kerja**

Negara-negara seyogianya mengakui prinsip bahwa para penyandang difabel harus diberi kesempatan untuk menggunakan hak asasinya, terutama dalam bidang penempatan pekerjaan. Baik di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan, mereka harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang tersedia dipasar kerja, yang produksi dan memberi penghasilan.

- a. Undang-undang dan peraturan dalam bidang penempatan kerja tidak boleh mendiskriminasikan para penyandang difabel dan tidak boleh menimbulkan hambatan-hambatan bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan.
- b. Negara-negara seyogianya secara aktif mendukung integrasi para penyandang difabel dalam penempatan kerja umum. Dukungan aktif tersebut dapat mewujudkan melalui berbagai macam langkah, seperti penyelenggaraan latihan kerja, pemberlakuan rancangan kuota yang berorientasi dalam insetif, penciptaan lapangan kerja khusus atau penyisihan bidang pekerjaan tertentu, pemberian pinjaman atau hibah untuk modal usaha kecil, pemberian kontrak-kontrak khusus atau hak produksi berdasarkan prioritas, pemberian kontrak atau bantuan teknik atau keuangan lainnya kepada perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan penyandang difabel. Negara seyogianya seperlunya demi kemudahan para penyandang difabel.



- c. Negara-negara seyogianya menyusun program aksi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Langkah-langkah untuk merancang dan menyesuaikan tempat kerja dan sarana kerja sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh para penyandang difabel dari berbagai jenis kecacatan;
  - 2) Dukungan terhadap penggunaan teknologi baru dan pengembangan serta produksi alat-alat bantu khusus dan langkah-langkah untuk mempermudah mendapatkan alat-alat tersebut oleh para penyandang difabel, sehingga memungkinkan mereka memperoleh dan mempertahankan pekerjaan;
  - 3) Pemberian pelatihan dan penempatan kerja yang tepat serta dukungan yang berkelanjutan seperti pemberian bantuan pribadi dan pelayanan interpreter.
- d. Negara seyogianya memprakarsai dan mendukung kampanye peningkatan kesadaran masyarakat yang dirancang untuk mengatasi sikap-sikap dan praduga negatif terhadap para pekerja difabel.
- e. Dalam kapasitasnya sebagai majikan, negara-negara seyogianya menciptakan kondisi yang mendukung bagi penempatan kerja para penyandang difabel disektor pemerintah.
- f. Negara-negara, organisasi-organisasi pekerja dan para majikan seyogianya bekerja sama untuk menjamin adanya perlakuan yang adil dalam penerimaan pegawai baru dan kebijaksanaan promosi, menciptakan kondisi kerja, menentukan tingkat upah, mengambil mencegah terjadinya kecelakaan dan kecacatan serta langkah-langkah untuk merehabilitasi para pegawai yang mengalami kecelakaan dalam kerja.
- g. Seyogianya selalu menjadi tujuan bahwa para penyandang difabel memperoleh pekerjaan di pasar tenaga kerja umum. Bagi para penyandang difabel yang kebutuhannya tidak dapat dipenuhi dalam penempatan tenaga kerja umum, unit-unit kecil penempatan kerja terlindung atau bersubsidi dapat merupakan suatu alternatif. Kualitas program tersebut relevan dan memadai guna memberikan

kesempatan bagi para penyandang difabel untuk memperoleh pekerjaan di pasar tenaga kerja.

- h. Seyogianya mengambil langkah-langkah untuk mengikuti serta para penyandang difabel dalam program-program pelatihan dan penempatan kerja di sektor swasta dan sektor informal.
- i. Negara-negara, organisasi-organisasi pekerja dan para majikan seyogianya bekerja sama dengan organisasi-organisasi para penyandang difabel mengenai semua langkah untuk menciptakan kesempatan latihan dan penempatan kerja, yang mencakup peraturan jam kerja yang fleksibel, kerja paruh waktu (part time), pembagian kerja, kewiraswastaan, dan pelayanan khusus bagi para penyandang difabel.

#### **4. Tunjangan Penghasilan dan Jaminan Sosial**

Negara-negara bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan sosial dan tunjangan penghasilan bagi para penyandang difabel.

- a. Negara-negara menjamin tersedianya tunjangan penghasilan yang memadai bagi para penyandang difabel, yang karena kecacatannya atau faktor-faktor yang berkaitan dengan kecacatannya, untuk sementara waktu kehilangan atau mendapat pengurangan penghasilan atau tidak diberi kesempatan untuk bekerja. Negara-negara seyogianya menjamin agar penyediaan tunjangan tersebut mempertimbangkan biaya-biaya yang sering harus ditanggung oleh para penyandang difabel dan keluarganya sebagai akibat dari kecacatan itu.
- b. Di negara-negara dimana menjamin sosial, asuransi sosial atau sistem kesejahteraan sosial lainnya terdapat atau sedang dikembangkan untuk warga negara pada umumnya, negara-negara seyogianya menjamin agar sistem-sistem tersebut tidak mengesampingkan atau mendiskriminasikan penyandang difabel.
- c. Negara seyogianya juga menjamin tersedianya tunjangan penghasilan dan perlindungan jaminan sosial bagi orang-orang yang bekerja sebagai parawat penyandang difabel.

- d. Sistem jaminan sosial seyogianya mencakup intensif untuk memulihkan kapasitas perolehan panghasilan para penyandang difabel. Sistem tersebut seyogianya menyediakan atau turut andil dalam penyelenggaraan, pengembangan dan pendanaan latihan kerja. Sistem tersebut seyogianya juga membantu dalam pelayanan penempatan kerja.
- e. Program jaminan sosial seyogianya juga menyediakan inisiatif bagi penyandang difabel untuk mencari pekerjaan demi membina kembali kapasitas perolehan penghasilan.
- f. Tunjangan penghasilan seyogianya terus diberikan selama kondisi-kondisi penghambat masih belum teratasi namun harus dengan cara yang tidak akan menurunkan semangat para penyandang difabel untuk mencari pekerjaan. Tunjangan tersebut seyogianya dikurangi atau diberi hanya bila penyandang difabel itu sudah memperoleh penghasilan yang memadai dan tetap.
- g. Negara-negara, dimana jaminan sosialnya sebagai besar disediakan oleh sektor swasta, seyogianya mendorong masyarakat setempat, organisasi-organisasi sejahtera sosial swadaya dan intensif untuk kegiatan penempatan kerja atau bagian-bagaian yang ada kaitannya dengan penempatan kerja bagi para panyandang difabel.

## **5. Keluarga dan Integrasi Pribadi**

Negara-negara seyogianya mendorong partisipasi penuh para penyandang difabel dalam kehidupan keluarga. Negara-negara seyogianya mempromosikan hak mereka untuk memperoleh integrasi pribadinya, dan menjamin agar perundang-undangan tidak mendiskriminasikan para penyandang difabel dalam hal hubungan seksual, perkawinan dan hak untuk menjadikan orang tua.

- a. Para penyandang difabel seyogianya dimungkinkan untuk hidup bersama keluarganya. Negara-negara seyogianya mendorong pencantuman modul yang tepat dalam paket penyuluhan keluarga mengenal kecacatan dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga. Perhatian khusus seyogianya diberikan kepada keluarga-keluarga

yang didalamnya terhadap anggota keluarga penyandang difabel. Negara-negara seyogianya menghilangkan segala hambatan bagi mereka yang berkeinginan mengasuh atau mengangkat anak penyandang difabel.

- b. Para penyandang difabel tidak boleh dihalangi kesempatannya untuk memperoleh pengalaman seksualitas, menjamin hubungan seksual, dan menjadi orang tua. Menimbang bahwa para penyandang difabel mungkin mengalami kesulitan untuk menikah dan berkeluarga, negara-negara seyogianya mendorong terselenggaranya upaya penyuluhan yang tepat. Para penyandang difabel harus memperoleh akses yang sama seperti warga negara lainnya terhadap metode-metode keluarga berencana, maupun terhadap informasi mengenai fungsi seksual tubuh mereka.
- c. Negara-negara seyogianya meningkatkan usaha untuk mengubah sikap negatif terhadap perkawinan, seksualitas dan peran penyandang difabel sebagai orangtua, terutama terhadap wanita penyandang difabel, yang masih ada di dalam masyarakat, media massa seyogianya didorong untuk memainkan peran yang penting dalam menghilangkan sikap negatif tersebut.
- d. Para penyandang difabel beserta keluarganya perlu diberi informasi yang lengkap agar mereka waspada terhadap kemungkinan pelecehan seksual atau bentuk-bentuk pelecehan lainnya. Para penyandang difabel mudah menjadi sasaran pelecehan dalam keluarga, masyarakat ataupun institusi, dan oleh karenanya perlu mendapat pendidikan tentang cara-cara menghindari terjadinya kecelakaan, mengetahui bila pelecehan telah terjadi dan melaporkan tindakan tersebut.

## **6. Kebudayaan**

Negara-negara akan menjamin bahwa para penyandang difabel terintegrasi dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan budaya atas dasar kesamaan.

- a. Negara-negara seyogianya menjamin agar para penyandang cacat memperoleh kesempatan untuk menyalurkan kreativitas serta potensi seni dan intelek-tualnya, tidak bagi keuntungan mereka sendiri, tetapi juga untuk memperkaya khazanah budaya masyarakatnya, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Contoh kegiatan semacam ini adalah tari, musik, sastra, teater, seni plastik, seni lukis dan seni pahat. Terutama negara-negara berkembang, kegiatan tersebut seyogianya ditekankan pada bentuk-bentuk tari tradisional dan kontemporer seperti pewayangan, deklarasi dan penuturan cerita.
- b. Negara-negara seyogianya meningkatkan aksesibilitas dan penyediaan tempat-tempat untuk pertunjukan dan pelayanan kebudayaan, seperti teater, museum, bioskop dan perpustakaan, bagi para penyandang difabel.
- c. Negara-negara seyogianya mengambil prakarsa untuk mengembangkan dan memanfaatkan pengaturan teknik khusus agar sastra, film dan teater dapat diakses oleh para penyandang difabel.

## **7. Rekreasi dan olahraga**

Negara-negara seyogianya mengambil langkah-langkah untuk menjamin agar para penyandang difabel memperoleh kesempatan yang sama untuk berekreasi dan berolahraga.

- a. Negara-negara seyogianya mengambil prakarsa untuk berupaya agar tempat-tempat rekreasi dan olahraga, hotel, pantai, arena olahraga, pusat kebugaran jasmani dan sebagainya dapat diakses oleh para penyandang difabel. Upaya-upaya tersebut seyogianya mencakup dukungan bagi para petugas dalam bidang rekreasi dan olahraga dalam bentuk penyelenggaraan proyek-proyek untuk mengembangkan metode aksesibilitas, partisipasi, informasi dan program-program latihan.
- b. Para pejabat pariwisata, biro perjalanan, hotel, organisasi sosial dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan rekreasi atau perjalanan seyogianya menawarkan

pelayanan kepada semua orang, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus para penyandang difabel. Pola latihan yang sesuai seyogianya diberikan untuk membantu proses tersebut.

- c. Organisasi-organisasi olahraga seyogianya didorong untuk memberi kesempatan kepada para penyandang difabel untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan olahraga. Dalam hal-hal tertentu, upaya aksesibilitas cukup hanya dengan membuka kesempatan untuk berpartisipasi. Dalam hal-hal lain, diperlukan adanya pengaturan khusus atau penyelenggaraan permainan-permainan khusus. Negara-negara seyogianya mendukung partisipasi para penyandang difabel dalam peristiwa olahraga nasional dan internasional.
- d. Para penyandang difabel yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan olahraga seyogianya memiliki akses terhadap pelatihan dan pengajaran dengan kualitas yang sama seperti yang diberikan kepada para peserta lain.
- e. Para penyelenggara olahraga dan rekreasi seyogianya berkonsultasi dengan organisasi-organisasi para penyandang difabel jika hendak mengembangkan pelayanannya bagi para penyandang difabel.

## **8. Agama**

Negara-negara seyogianya mendorong upaya-upaya untuk partisipasi yang sama oleh para penyandang difabel dalam kehidupan beragama di dalam masyarakat.

- a. Dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan para pemuka agama, negara-negara seyogianya mendorong upaya-upaya untuk menghapuskan diskriminasi dan membuat kegiatan keagamaan dapat diakses oleh para penyandang difabel.
- b. Negara-negara seyogianya mendorong distribusi informasi tentang masalah-masalah difabel kepada lembaga dan organisasi keagamaan. Negara-negara seyogianya juga mendorong para pejabat keagamaan untuk memasukkan informasi tentang kebijakan-kebijakan dalam bidang kecacatan dalam program

- pelatihan bagi profesi keagamaan, juga dalam program pendidikan agama.
- c. Negara-negara seyogianya juga mendorong aksesibilitas terhadap literatur keagamaan oleh orang-orang yang menyandang difabel alat-alat pengindraan.
  - d. Negara-negara dan/atau organisasi keagamaan seyogianya berkonsultasi dengan organisasi penyandang difabel jika mengembangkan upaya-upaya untuk persamaan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.

## **H. Upaya-upaya Implementasi**

### **1. Informasi dan riset**

Negara-negara merupakan penanggung jawab utama dalam hal pengumpulan dan penyebaran informasi tentang kondisi kehidupan para penyandang difabel dalam meningkatkan upaya riset yang komprehensif tentang semua aspek kecacatan, termasuk hambatan-hambatan yang memengaruhi kehidupan para penyandang difabel.

- a. Secara berkala, negara-negara seyogianya mengumpulkan data statistik berdasarkan jenis kelamin dan informasi lain mengenai kondisi kehidupan para penyandang difabel. Pengumpulan data semacam ini dapat dilakukan. Berkaitan dengan sensus nasional dan survei rumah tangga, dan dapat dilaksanakan dengan kerja sama, antara lain dengan universitas-universitas, lembaga-lembaga riset dan organisasi-organisasi para penyandang difabel. Pengumpulan data tersebut seyogianya mencakup jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang program dan pelayanan serta manfaatnya.
- b. Negara-negara sebaiknya mempertimbangkan pandirian bank data tentang masalah-masalah difabel, yang akan mencakup statistik tentang pelayanan dan program yang ada maupun tentang berbagai kelompok penyandang difabel. Seyogianya diingat bahwa negara-negara perlu melindungi kerahasiaan perorangan dan integritas pribadi.

- c. Negara-negara seyogianya memprakarsai dan mendukung program riset mengenai masalah sosial, ekonomi dan partisipasi yang memengaruhi kehidupan para penyandang difabel dan keluarganya. Riset semacam ini seyogianya mencakup studi tentang sebab-sebab, jenis-jenis dan frekuensi kecacatan, ketersediaan dan keberhasilan program serta kebutuhan akan pengembangan dan evaluasi terhadap pelayanan yang ada dan faktor-faktor pendukungnya.
- d. Negara-negara seyogianya mengembangkan dan membakukan peristilahan dan kriteria untuk kebutuhan survei nasional, atas kerja sama dengan organisasi-organisasi para penyandang difabel.
- e. Negara-negara seyogianya memungkinkan partisipasi para penyandang difabel dalam kegiatan pengumpulan dan dan riset. Untuk melaksanakan riset tersebut, negara-negara seyogianya mendorong penggunaan tenaga penyandang difabel yang memenuhi syarat.
- f. Negara-negara seyogianya mendukung pertukaran hasil riset dan pengalaman.
- g. Negara-negara seyogianya mengambil langkah-langkah untuk menyebarluaskan informasi dan pengetahuan menangani masalah-masalah difabel kepada semua jajaran politik dan administrasi tingkat nasional, regional maupun lokal.

## **2. Pembuatan Kebijakan dan Perencanaan**

Negara-negara akan menjamin bahwa aspek-aspek difabel tercakup di dalam semua pembuatan kebijaksanaan dan perencanaan nasional yang relevan.

- a. Negara-negara seyogianya memprakarsai dan merencanakan pembuatan kebijakan yang memadai bagi para penyandang difabel di tingkat nasional, dan merangsang serta mendukung pelaksanaannya di tingkat regional dan lokal.
- b. Negara-negara seyogianya melibatkan organisasi-organisasi para penyandang difabel dalam semua pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan dan program yang menyangkut para



penyandang difabel atau berpengaruh terhadap status ekonomi dan sosialnya.

- c. Tanggung jawab utama yang dibebankan kepada negara-negara menyangkut keadaan para penyandang difabel tersebut tidak berarti membebaskan pihak-pihak lain dari tanggung jawab mereka. Setiap orang yang mengurus pelayanan, kegiatan atau pemberian informasi di dalam masyarakat seyogianya didorong untuk menerima tanggung jawab agar program-program tersebut juga tersedia bagi para penyandang difabel.
- d. Negara-negara seyogianya memberikan kemudahan kepada masyarakat setempat untuk mengembangkan program-program dan mengambil langkah-langkah bagi kepentingan para penyandang difabel. Salah satu cara untuk melakukan hal tersebut adalah dengan menyediakan pertunjuk pelaksanaan atau daftar isian serta penyelenggaraan program-program pelatihan bagi para petugas lokal.

### **3. Perundang-undangan**

Negara-negara bertanggung jawab untuk menciptakan dasar hukum bagi upaya-upaya untuk mencapai tujuan partisipasi penuh dan kesamaan kesempatan bagi para penyandang cacat.

- a. Perundang-undangan nasional, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kawajiban warga negara, seyogianya mencakup hak dan kewajiban para penyandang difabel. Negara-negara berkewajiban untuk memungkinkan para penyandang difabel menggunakan hak-haknya, termasuk hak asasi manusia, hak sipil dan hak politik, atas dasar kesamaan dengan warga negara lainnya. Negara-negara seharusnya menjamin agar organisasi-organisasi para penyandang difabel dilibatkan di dalam pengembangan perundang-undangan nasional yang menyangkut hak-hak para panyandang difabel, maupun dalam kegiatan evaluasi terhadap pemberlakuan perundang-undangan tersebut.

- b. Tindakan legislatif mungkin diperlukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi yang dapat merugikan kehidupan para penyandang difabel, yang mencakup pelecehan dan penganiayaan. Semua peraturan yang mendiskriminasikan para penyandang difabel harus dihapuskan. Perundang-undangan nasional seyogianya membuat ketentuan-ketentuan tentang sanksi yang tepat atas kasus-kasus pelanggaran terhadap prinsip-prinsip non diskriminasi.
- c. Perundang-undangan nasional mengenai penyandang difabel dapat diwujudkan dalam dua bentuk. Hak dan kewajiban mereka dapat dimuat di dalam perundang-undangan yang berlaku umum atau dapat pula dalam perundang-undangan khusus. Perundang-undangan yang khusus bagi para penyandang difabel dapat diundangkan dalam beberapa cara.
  - 1) Dengan memberlakukan undang-undang yang terpisah, yang secara khusus mengatur tentang masalah-masalah difabel;
  - 2) Dengan mencantumkan masalah difabel di dalam perundang-undangan umum pada bagian tertentu;
  - 3) Dengan menyebutkan penyandang difabel secara khusus di dalam naskah penjelasan tentang perundang-undangan yang ada. Gabungan dari pendekatan-pendekatan diatas mungkin lebih baik adanya. Dapat pula dipertimbangan di keluarkannya peraturan pelaksanaan yang mendukung.
- d. Negara-negara dapat mempertimbangkan dibentuknya mekanisme pengaduan formal mengenai masalah-masalah hukum demi melindungi kepentingan-kepentingan penyandang difabel.

#### **4. Kebijakan ekonomi**

Negara-negara yang memiliki tanggung jawab keuangan untuk membiayai program-program dan upaya-upaya untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi para penyandang difabel.

- 1) Negara-negara seyogianya memasukan masalah-masalah kecacatan dalam anggaran belanja tingkat, daerah tingkat I maupun tingkat II.

- 2) Negara-negara, organisasi-organisasi non pemerintahan serta badan-badan lain yang terkait seyogianya berinteraksi untuk menentukan cara-cara yang penting efektif dalam mendukung proyek-proyek dan upaya-upaya yang berkaitan dengan para penyandang difabel.
- 3) Negara-negara seyogianya mempertimbangkan penggunaan langkah-langkah ekonomi (seperti pemberian pinjaman, pengucualian pajak, hibah terarah, dan khusus, dan sebagainya) untuk merangsang dan menunjang persamaan partisipasi para penyandang difabel di dalam masyarakat.
- 4) Di banyak negara dapat dianjurkan pembentukan dana pembangunan bidang kecacatan, yang dapat menunjang berbagai proyek perintis dan program-program swadaya di tingkat paling bawah.

## **5. Koordinasi Kegiatan**

Negara-negara bertanggung jawab untuk membentuk dan memberdayakan komitmen koordinasi nasional, atau badan serupa, yang berfungsi sebagai titik fokus nasional untuk masalah-masalah kecacatan.

- a. Komite koordinasi nasional atau badan serupa seyogianya bersifat permanen dan dibentuk atas dasar undang-undang maupun peraturan pemerintah.
- b. Komite koordinasi nasional tersebut sebaiknya beranggotakan wakil-wakil dari organisasi-organisasi swasta maupun publik sehingga komposisinya dapat berasal dari departemen-departemen terkait, organisasi-organisasi para penyandang difabel dan organisasi-organisasi non pemerintahan lainnya.
- c. Organisasi-organisasi para penyandang difabel seyogianya memiliki pengaruh yang cukup besar dalam komite koordinasi nasional tersebut untuk menjamin agar aspirasi mereka tersalurkan secara tepat.
- d. Komite koordinasi nasional tersebut seyogianya diberi otonomi dan sumber-sumber yang cukup sehingga dapat melaksanakan tanggung

jawabnya sehubungan dengan kapasitasnya untuk membuat keputusan-keputusan, komite tersebut seyogianya melaporkan kepada tingkat pemerintah.

## **6. Organisasi para penyandang difabel**

Negara-negara seyogianya mengakui hak organisasi-organisasi para penyandang difabel untuk mewakilkan para penyandang difabel di tingkat nasional, regional maupun lokal. Negara-negara seyogianya juga mengakui peran organisasi-organisasi para penyandang difabel sebagai pemberi advis dalam pembuatan keputusan mengenai masalah-masalah difabel.

- a. Negara-negara seyogianya mendorong dan memberi dukungan ekonomi serta bentuk-bentuk dukungan lainnya terhadap pembentukan dan pemberdayaan organisasi-organisasi para penyandang difabel, anggota-anggota keluarganya dan/atau para pembelanya. Negara-negara seyogianya mengakui bahwa organisasi-organisasi tersebut dapat memainkan peran dalam pengembangan kebijaksanaan dalam masalah difabel.
- b. Negara-negara seyogianya senantiasa berkomunikasi dengan organisasi-organisasi para penyandang difabel dan menjamin partisipasi mereka dalam pengembangan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.
- c. Peranan organisasi-organisasi penyandang difabel dapat berupa mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan prioritas-prioritas, berpartisipasi dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi pelayanan dan upaya-upaya yang menyangkut kehidupan para penyandang difabel, dan turut andil dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat serta mengupayakan adanya perubahan.
- d. Sebagai alat swadaya, organisasi para penyandang difabel menyediakan dan meningkatkan kesempatann untuk mengembangkan keterampilan dalam berbagai bidang, saling membantu di antaranya sesama anggota, dan berbagai informasi.

- e. Organisasi-organisasi para penyandang difabel dapat memainkan perannya sebagai pemberi advis dalam berbagai cara seperti mempunyai wakil tetap dalam dewan pembina lembaga-lembaga mempunyai wakil tetap dalam dewan pembina lembaga-lembaga yang ditandai pemerintah, duduk dalam komisi-komisi publik dan menyumbangkan pengetahuan keahlian untuk berbagai proyek.
- f. Peran organisasi-organisasi para penyandang difabel sebagai pemberi advis seyogianya berkelanjutan demi mengembangkan dan memperdalam pertukaran pandangan dan informasi antara negara dan organisasi-organisasi tersebut.
- g. Organisasi-organisasi tersebut seyogianya mempunyai wakil tetap dalam komite koordinasi nasional atau badan serupa.
- h. Peran organisasi-organisasi para penyandang difabel tingkat lokal seyogianya dikembangkan dan diberdayakan untuk menjamin agar mereka memiliki pengaruh terhadap masalah-masalah di tingkat kmasyarakat setempat.

## **7. Pelatihan personal**

Negara-negara bertanggung jawab untuk menjamin adanya pelatihan yang memadai bagi para personal, pada semua tingkat, yang terlibat perencanaan dan pelaksanaan program serta pelayanan yang menyangkut para penyandang difabel.

- a. Negara-negara seyogianya menjamin agar semua pejabat penyedia pelayanan dalam bidang kecacatan memberikan pelatihan yang memadai kepada para personalnya.
- b. Dalam pelatihan bagi para profesional dalam bidang difabel, maupun dalam pemberian informasi mengenai masalah-masalah difabel dalam program pelatihan umum, seyogianya tercermin prinsip partisipasi penuh dan persamaan kesempatan para penyandang difabel.
- c. Negara-negara seyogianya mengembangkan program-program pelatihan atas konsultasi dengan organisasi-organisasi para penyandang difabel, dan para penyandang difabel seyogianya

dilibatkan sebagai guru, instruktur atau penasihat dalam program pelatihan bagi para petugas dalam bidang difabel.

- d. Pelatihan bagi para petugas sosial masyarakat merupakan suatu upaya yang sangat penting dalam strategi, terutama di negara-negara berkembang. Pelatihan tersebut seyogianya melibatkan para penyandang difabel, dan materi pelatihan seyogianya mencakup pengembangan nilai-nilai, kemampuan dan teknologi yang tepat di samping keterampilan-keterampilan yang dapat dipraktikkan oleh para penyandang difabel, orang tuanya, keluarganya serta anggota-anggota masyarakat.

#### **8. Pemantauan dan evaluasi program kegiatan penyandang difabel**

Negara-negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan program-program nasional dan pelayanan yang menyangkut persamaan kesempatan bagi para penyandang difabel.

- a. Secara berkala dan sistematis, negara-negara seyogianya mengevaluasi program-program nasional dalam bidang difabel dan menyebarluaskan informasi mengenai dasar-dasar penilaian maupun hasil-hasilnya.
- b. Negara-negara seyogianya mengembangkan dan membakukan peristilahan dan kriteria evaluasi terhadap program dan pelayanan yang berkaitan dengan difabel.
- c. Kriteria dan peristilahan tersebut seyogianya dikembangkan atas kerja sama yang erat dengan organisasi-organisasi para penyandang difabel sejak penkonsepian dan perencanaan awal.
- d. Negara-negara seyogianya berpartisipasi dalam kerja sama internasional demi mengembangkan standar yang sama bagi evaluasi nasional dalam bidang kecacatan. Negara-negara seyogianya mendorong komite koordinasi nasional untuk berpartisipasi pula.
- e. Evaluasi terhadap berbagai program dalam bidang difabel seyogianya dirumuskan sejak tahapan perencanaannya, sehingga

dampak yang dikehendaki setelah tujuan kebijaksanaan dalam bidang ini tercapai, dapat dievaluasi.

## **9. Kerja sama teknik dan ekonomi**

Negara-negara, baik negara-negara industri maupun berkembang, memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dan berupaya dalam meningkatkan kondisi kehidupan para penyandang difabel di negara-negara berkembang.

- a. Upaya-upaya untuk mencapai kesamaan kesempatan bagi para penyandang difabel, termasuk para pengungsi yang menyandang kecacatan, seyogianya diintegrasikan ke dalam program pembangunan umum.
- b. Upaya-upaya tersebut harus terintegrasikan ke dalam semua bentuk kerja sama teknik dan ekonomi, baik bilateral maupun multilateral, antara pemerintah maupun non pemerintah. Negara-negara seyogianya memunculkan masalah-masalah kecacatan dalam diskusi-diskusi tentang kerja sama tersebut mitra kerja samanya.
- c. Dalam merencanakan dan meninjau ulang program-program kerja sama teknik dan ekonomi, keadaan para penyandang difabel seyogianya mendapatkan perhatian khusus. Sangatlah penting bahwa para penyandang difabel dan organisasi-organisasinya dikonsultasikan jika hendak merencanakan proyek-proyek pembangunan yang dirancang bagi para penyandang difabel.
- d. Bidang-bidang prioritas bagi kerja sama teknik dan ekonomi seyogianya mencakup:
  - 1) Pembangunan sumber daya manusia melalui pengembangan keterampilan, kemampuan dan potensi para penyandang difabel serta memprakarsai kegiatan-kegiatan bagi dan dari para penyandang difabel yang menciptakan lapangan kerja.
  - 2) Pengembangan dan penyebarluasan teknologi dan pengetahuan praktis yang ada kaitannya dengan difabel.
  - 3) Negara juga didorong untuk mendukung pembentukan dan pemberdayaan organisasi-organisasi para penyandang difabel.

- 4) Negara-negara seyogianya berupaya meningkatkan pengetahuan mengenai masalah-masalah difabel di kalangan para petugas yang terlibat dalam pengadministrasian program kerja sama teknik dan ekonomi.

### **10. Kerja sama internasional**

Negara-negara seyogianya berpartisipasi secara aktif dalam kerja sama internasional mengenai kebijakan-kebijakan untuk persamaan kesempatan bagi para penyandang difabel.

- a. Di dalam kerangka PBB, lembaga-lembaga spesialisasinya dan organisasi-organisasi antar pemerintah lainnya yang terkait, negara-negara seyogianya berpartisipasi dalam pengembangan kebijaksanaan mengenai masalah-masalah difabel.
- b. Bilamana dipandang tepat, negara-negara seyogianya mengemukakan aspek-aspek difabel dalam negosiasi-negosiasi umum mengenai berbagai standar, pertukaran informasi, program-program pembangunan dan lain-lain.
- c. Negara seyogianya mendorong dan mendukung pertukaran pengetahuan dan pengalaman diantara.
  - 1) Organisasi-organisasi non pemerintahan yang menangani masalah-masalah difabel;
  - 2) Lembaga-lembaga penelitian dan para peneliti perorangan yang terlibat dalam masalah-masalah difabel;
  - 3) Badan-badan perwakilan para petugas lapangan dan kelompok profesional dalam bidang difabel;
  - 4) Organisasi-organisasi para penyandang difabel;
  - 5) Komite koordinasi nasional;
- d. Negara-negara seyogianya menjamin agar PBB beserta lembaga-lembaga spesialisasinya maupun badan pemerintahan dan badan antar parlemen, pada tingkat regional, mengikutsertakan organisasi-organisasi para penyandang difabel tingkat regional maupun global dalam kegiatan-kegiatannya.



## **I. Mekanisme Pemantauan**

Tujuan mekanisme pemantauan adalah meningkatkan efektivitas implementasi peraturan standar. Badan ini akan membantu setiap negara dalam menilai tingkat implementasi peraturan standar tersebut dan mengukur kemajuannya. Mekanisme pemantauan tersebut seyogianya dapat mengungkapkan rintangan-rintangan yang dihadapi dan dapat memberikan sarana-sarana mengenai langkah-langkah yang tepat demi keberhasilan implementasi peraturan standar tersebut. Mekanisme pemantauan ini akan menghargai aspek-aspek ekonomi, sosial dan budaya yang ada di masing-masing negara. Unsur penting lainnya dari badan ini ialah berfungsi sebagai badan penasihat dan media pertukaran pengalaman dan informasi di antara negara-negara.

Peraturan standar tentang persamaan kesempatan bagi para penyandang difabel akan dipantau dalam rangka sidang-sidang komisi pembangunan sosial (*Commission for Social Development*). Akan ditunjuk seorang pelapor khusus yang memiliki pengalaman luas yang relevan dan masalah-masalah kecacatan dan keorgansasian internasional, yang bila dipandang perlu akan didanai dari sumber-sumber anggaran tambahan, untuk masa jabatan tiga tahun guna memantau implementasi peraturan standar.

Organisasi-organisasi para penyandang difabel internasional yang memiliki status konsultatif di Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council*) serta organisasi-organisasi yang mewakili para penyandang cacat yang belum membentuk sebuah panel para pakar, yang mayoritas keanggotaannya akan berdiri dari organisasi-organisasi para penyandang difabel, dengan mempertimbangkan berbagai jenis kecacatan dan distribusi geografis yang adil, yang akan dikonsultasi oleh pelaporan khusus dan, jika pandangan perlu, oleh sekretariat.

Panel para pakar tersebut akan didorong oleh pelapor khusus untuk meninjau ulang, memberi advis dan umpan balik serta saran-saran mengenai peningkatan, implementasi dan pemantauan peraturan standar.

Pelapor khusus anak mengirim seperangkat pertanyaan kepada negara-negara, badan-badan PBB, dan organisasi-organisasi antar pemerintah dan non pemerintah, termasuk organisasi-organisasi para penyandang difabel. Perangkat pertanyaan tersebut akan berfokus pada hal perencanaan implementasi peraturan standar. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan bersifat selektif dan meliputi sejumlah peraturan tertentu untuk evaluasi yang saksama. Dalam mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, pelapor khusus akan berkonsultasi dengan panel para pakar dan sekretariat.

Pelapor khusus dapat melakukan dialog langsung tidak hanya dengan negara-negara tetapi juga dengan organisasi-organisasi non pemerintahan setempat, untuk memperoleh pandangan dan komentar mereka mengenai informasi yang akan dimasukkan ke dalam laporan. Pelapor khusus akan memberi saran mengenai implementasi dan pemantauan peraturan standar dan memberi bantuan dalam mempersiapkan jawaban terhadap perangkat pertanyaan tersebut.

Pusat Pembangunan Sosial dan Masalah-masalah kemanusiaan (*Center for Social Development and humanitarian Affairs*) dari kantor PBB di Wina, sebagai titik fokus PBB untuk masalah-masalah difabel, program pembangunan PBB (UNDP) dan badan-badan PBB lainnya serta mekanisme-mekanisme lain di dalam sistem PBB, pertemuan-pertemuan antar lembaga, akan bekerja sama dengan pelapor khusus dalam implementasi dan pemantauan peraturan standar pada tingkat nasional.

Pelapor khusus, dibantu oleh sekretariat, akan menyiapkan laporan-laporan untuk diserahkan kepada komisi Pembangunan Sosial, pada sidangnya yang ke-34 dan ke-35. Dalam menyiapkan laporan-laporan tersebut, pelapor seyogianya berkonsultasi dengan panel para pakar. Negara-negara seyogianya mendorong komite koordinasi nasional atau badan serupa untuk berpartisipasi dalam implementasi dan pemantauan. Sebagai titik fokus untuk masalah-masalah difabel.



# DAFTAR PUSTAKA

- Alcott, M (2007) *An Introduction to Children with Special Educational Need*, London; Horder & Stoughton education
- Aturan Standar PBB tentang Kesetaraan Peluang bagi Penyandang Cacat (*The United Nations Standard Rules on the Equalization of Opportunities for People with Disabilities*), diadopsi PBB 1993 (<http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissre00.htm>).
- Arismunandar. (2006). *Pengembangan Kewirausahaan Sekolah*, Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Ashman, A. & Elkins, J. (2004). *Educating Children with Special Needs*. New Jersey: Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs.
- Bandi Delphie, (2009), *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi*, Klaten: Intan Sejati
- Buchari, (2006). *Kewirausahaan Sekolah Berbasis Kreativitas dan Inovasi*, Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Binsar A. Hutabarat. (2010). *Karakter bangsa, dulu dan kini*, dari [file:///G/ karakter\\_bangsa\\_dulu\\_dan\\_kini.html](file:///G:/karakter_bangsa_dulu_dan_kini.html). diunduh 27 April 2010.

- Bill Drayton, Hanlon, D. and King, W. (2007), Some research perspectives on entrepreneurship education, enterprise education and education for small business management: a ten-year literature review, *International Small Business Journal*, Vol. 15 No. 3, pp. 56-77.
- Bygrave, William D. (2004). *The Portable MBA in Entrepreneurship*, John Willey & Sons, Inc., New York.
- Coulhoun, Calfrey C & Finch. Alton V. (2002). *Vocational education : Concepts and operational*. Belmont California : Worth Publishing Company.
- Cullatta, R.A. (2003) *Fundamentals of Special Education, What Every teacher Need to Know*. New Jersey
- Depnaker. (2003). *Laporan Tentang Komite Rehabilitasi Vokasional Bagi Orang Cacat Konprensi Perburuhan Internasional 2002 di Geneva Swis*, Jakarta: Dirljend Pembinaan dan Penanganan Tenaga Kerja, Depnaker.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2012). *Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*, Jakarta.
- Departemen Tenaga Kerja. (2010). *Penyaluran dan Penempatan tenaga kerja penyandang cacat*. Laporan hasil penelitian. Jakarta.
- Deklarasi Kopenhagen tentang Pembangunan Sosial (*The Copenhagen Declaration on Social Development*), 1995 (<http://www.earthsummit2002.org/wssd/wssd/wssdr1.htm>).
- Depdiknas. (2002). *Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill Education)*, Dikdasmen, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2013). *Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat: Jakarta*. DP2M Dirjen Pendidikan Tinggi.
- Dep Sos. (2010) *Pemikiran Strategik Permasalahan Kesejahteraan Sosial Bidang Tuga Departemen Sosial RI tahun 2010*, Jakarta: Biro Perencanaan Dep Sos RI.

- Disarikan dari: Depdiknas. 2007. *Kewirausahaan Sekolah. materi diklat pembinaan kompetensi calon kepala sekolah/kepala sekolah*. Jakarta.
- FIET, J.O. (2000), The theoretical side of teaching entrepreneurship, *Journal of Business Venturing* 16, 1-24.
- Hakim, Rusman. (1998). *Dengan Berwiraswasta Menepis Krisis: Konsep Membangun Masyarakat Entrepreneur Indonesia*, Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Hallahan, et.al ( 2005) *Special Education, What It is and Why We Needed It*, New York: Pearson Education, Inc
- Haryanto. (2010), *Model pelayanan keliling pendidikan keterampilan kerja bagi penyandang cacat usia produktif di pedesaan*. Yogyakarta: PLB FIP UNY.
- Hisrich & Peters (2002), It's not an exact science: teaching entrepreneurship in Northern Ireland, *Journal of Education & Training*, 48(5), pp. 322-335, Emerald Group Publishing.
- Henry, C, Hill, F, and Leitch, C., (2005), Entrepreneurship education and training: can entrepreneurship be taught? Part I, *Journal of Education & Training*, Vol. 47 No.2, pp. 98-111.
- Heinonen, J., and Poikkijoki, S.A., (2006), An entrepreneurial-directed approach to entrepreneurship education: mission impossible?, *Journal of Management Development*, Vol. 25 No.1, pp. 80-94.
- Hers. Richard H. et al. (1980). *Model of moral education: An Appraisal*. New York: Longman Inc.
- Imma Indra Dewi W, (2012) *Corporate Social Responsibility (CSR) dan pemberdayaan penyandang cacat di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
- Ibnu Syamsi (2005), *Pengembangan pelatihan kewirausahaan Untuk pemberdayaan masyarakat pengangguran perkotaan*, Yogyakarta: LPB FIP UNY.
- Ibnu Syamsi (2009), *Pendataan dan identifikasi permasalahan sosial ekonomi remaja miskin di pedesaan rawan bencana alam*, Yogyakarta: LPB FIP UNY.

- Johnsen, B & Skjorten, M.D (2003) Pendidikan Kebutuhan Khusus, Sebuah Pengantar, Alih bahasa: Susi Septaviana R, Bandung: PPS
- Kauffman, J.M.. (2008), *Exceptional Children: Introduction to Special Education*, New Jersey: Prentice Hall.
- Kao (1991), The pedagogical side of teaching entrepreneurship, *Journal of Business Venturing* 16, 101-117.
- Kao, John, (1989), *Entrepreneurship, Creativity & Organization*, Harvad Business School, Prentice Hall, Englewood, New Jersey.
- Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional tentang Rehabilitasi dan Ketenagakerjaan (Penyandang Cacat) (*International Labour Organization Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention*), 1983 (No. 159).
- Konvensi tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan (*Employment and Occupation) Convention*, 1998 (No. 111), dan Rekomendasi 1998 (No. 111).
- Konvensi tentang Kebijakan Hubungan Kerja (*Employment Policy Convention*, 1994 (No. 122), dan Rekomendasi, 1994 (No. 122);
- Konvensi Jasa Pekerjaan (*Employment Service Convention*), 1998 (No. 88), dan Rekomendasi, 1998 (No. 83).
- Koeswara, (1989). *Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill Education)*, Dikdasmen, Jakarta.
- Kauffman, J.M. (2005), *Characteristics of Children's Behavior Disorders*. Columbus, Ohio: Charles E. Merril Publishing Company A Bell & Howell Company.
- Ki Tyasno Sudarto. (2007). "Pengembangan nilai-nilai luhur budi pekerti sebagai karakter bangsa" dari file/H./Pengembangan/20Nilai-nilai/20 Luhur/20Budi/Pekerti. Diakses 12 Maret 2010.
- Louck, Kenneth, (1991). *Training Entrepreneurs for Small Business Creation: Lessons from Exprience*, Manajemen Development Series, No. 26, International Labour Office, Geneva.
- Lovaas, O.I. 2007. *Teaching Children through Behavior Management*. Boston: Notes from the lecture series.

- Maksum dan Luluk YR. (2004). *Paradigma pendidikan universal di era modern dan post modern*, Yogyakarta: Penerbit Sarasin.
- Magnis Suseno Frans. (1987). *Etika dasar; masalah-masalah pokok filsafat moral*, Jakarta: Penerbit Kanisius.
- Mas'ud Machfoedz (2004). *Iklim Organisasi Kreatif, Manajemen USAHAWAN Indonesia*, No. 09/TH XXXIII September 2004.
- McBrayer, Kim Fong Poon dan Gon Jon Liang, Ming (2002) *Special Needs Education, Children with Exceptionalities*. Hongkong: The Chinese University Press
- Mercer, Cacil D and Mercer, Anna R (2009) *Teaching Student With Learning Problems*, London; Merrill Publishing Company
- Sterenber, L. dan Taylor, R. L. (1986 ). *Exceptional Children: Integrating Research and Teaching*. New York: Springer-Verlag.
- Organisasi Perburuhan Internasional Kaidah ILO tentang Penanganan Penyandang Cacat di Tempat Kerja Organisasi Perburuhan Internasional, 2002 ISBN 978-92-2-819771-6 (print) 978-92-2-819772-3 (web pdf).
- Patel, V. G., (2005), *Entrepreneurship Development Programme in India and Its Relevance Developing Countries*, *Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad*, in Louck: Training Entrepreneurs for Small Business Creation.
- Pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF, 2001, *5<sup>th</sup> East Asia and Pacific Ministerial Consultation on Shaping the Future Agenda for Children*.
- Pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF, 2010, *National Report on Follow-up to the World Summit for Children (1990-2000)*.
- Pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF, *The Situation of Children and Women in Indonesia 2000*, 2000, Jakarta.
- Rusman, Hakim, (1998). *Dengan Berwiraswasta Menepis Krisis: Konsep Memba-ngun Masyarakat Entrepreneur Indonesia*, Alex Media Komputindo, Jakarta.



- Ropke, (2009), *Introduction: The Study of Business Entrepreneurship in Comparative Perspective* in: TT. Auang (ed); *Burmese entrepreneurship Creative Response in the Colonial Economy*, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, pp vi-xvi.
- Siagian, Salim, (1995), *Kewirausahaan Indonesia dengan Semangat 17-8-45*, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Puslatkop dan PK, Jakarta.
- Soersarsono Wijandi. (1987). *Pengantar Kewirausahaan*. Bandung: Sinar Baru.
- Steven C Brandt. (1991). *Sepuluh tahapan menjadi wirausahawan tangguh*. Semarang: Dahara Prize.
- Smith, A.J. (2006), Embedding new entrepreneurship programmes in UK higher education institutions: Challenges and considerations, *Education & Training* Vol. 48 No. 8/9, pp. 555-567.
- Suparman Sumohamijaya (1980). *Kewirausahaan yang berproses*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Silvia Herawaty, (2008), *Kewirausahaan di Indonesia*, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Puslatkop dan PK, Jakarta.
- Solomon, G.T. and Fernald, L.W. Jr (1991), "Trends in small business management and entrepreneurship education in the United States", *Entrepreneurship Theory and Practice*, Vol. 15 No. 3, pp. 25-39.
- Santosa, (2007). *Interaksi Manusia dan Komputer, Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Smith, R. M., Neisworth, J. T., dan Hunt, F. M. (2003). *The Exceptional Child. A Functional Approach*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Suharto, (2002), *Human Development Strategy: The Quest for Paradigmatic and Pragmatic Intervention for the Urban Informal Sector, Working Paper No.98/2*, Palmerston North: Massey University

- Suyana. (2003). *Pengembangan Kewirausahaan Sekolah*, Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Thoby Mutis. (1995). *Kewirausahaan yang berproses*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Kewirausahaan Sekolah Berbasis Kreativitas dan Inovasi*, Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Tarsis Tarmudji. (1987). *Pengantar Kewirausahaan*. Bandung: Sinar Baru.
- Thomas Zimmers, (2001), Critical evaluation of two models for entrepreneurial education, An improved model through integration, *International Journal of Educational Management, Vol 19 No.5*, pp. 413-427.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002, tentang *Perlindungan Anak*, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999, tentang *Hak Asasi Manusia*, Jakarta.
- World Health Organization. (2001). *Strategic Directions for Improving the Health and Development of Children and Adolescents*.



# GLOSARIUM

No.	Daftar Istilah
1	Difabel berasal dari istilah <i>different ability</i> yang kini digunakan untuk menggantikan kata cacat yang berkonotasi negatif menjadi berkebutuhan khusus, terjadi sejak lahir ataupun karena kecelakaan dan akibat mengidap suatu penyakit tertentu (Bandi Delphi, 2009).
2	Difabel/cacat netra; adalah gangguan penglihatan (tunanetra),
3	Difabel/cacat tunarungu wicara; gangguan pendengaran dan bicara (tunarungu wicara),
4	Difabel/cacat tunagrahita; adalah gangguan kecerdasan (intelektual) di bawah rata-rata
5	Difabel/cacat fisik; adalah gangguan anggota gerak (tunadaksa).
6	Difabel/cacat perilaku; gangguan tingkah laku dan emosi ( <i>tunalaras</i> )
7	Lamban belajar ( <i>slow learner</i> ) adalah difabel dengan gangguan yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah

PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PENYANDANG DIFABEL  
dalam Konteks Pendidikan Karakter Bangsa

	orang normal, tetapi tidak termasuk tunagrahita (biasanya memiliki IQ sekitar 80-85).
8	Gangguan autis dari kata auto, yang berarti sendiri, dengan demikian dapat diartikan seorang anak yang hidup dalam dunianya, cenderung mengalami hambatan dalam interaksi, komunikasi, perilaku sosial. (Lovas, 2003)
9	Job fair adalah wadah/tempat yang mempertemukan pengguna tenaga kerja dengan pencari kerja (termasuk penyandang difabel)
10	BLK (Balai Latihan Kerja) adalah salah satu tempat yang menampung orang berlatih keterampilan kerja, termasuk penyandang difabel
11	KUB (Kelompok Usaha Bersama) bagi penyandang difabel
12	CSR ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial/lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. (Imma Indra Dewi W, 2012)
13	ADL ( <i>Activity of Daily Living</i> ) aktivitas kehidupan sehari-hari bagi penyandang difabel seperti berjalan, makan, mandi, kegiatan di kamar mandi, kerja ringan, dan sebagainya (Ashman, 2004)
14	HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)
15	SDM (Sumber Daya Manusia)
16	SDA (Sumber Daya Alam)
17	<i>Entrepreneurship</i> (kewirausahaan) adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dan berani mengambil risiko dan mendapatkan keuntungan; menyangkut tiga perilaku yaitu: (1) kreatif, (2) komitmen (motivasi tinggi dan penuh tanggung jawab), (3) berani mengambil risiko dan kegagalan. (Patel V.G., 2005)
18	Motivasi dari bahasa inggris " <i>Motivasi</i> " berarti "mendorong", dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia ( Arismunandar, 2006)

19	<i>Feodalisme</i> adalah sikap dan perilaku feodalisme merupakan sisa-sisa pengaruh Belanda di masa lalu. Ciri-cirinya mudah dikenal, antara lain dari tingkah laku seorang yang tidak menyukai pekerjaan-pekerjaan kasar, kurang gengsi atau yang terkesan kotor dan mengotori tangan. (Hakim, Rusman (1998)
20	<i>Materialisme</i> , disini adalah dimaksudkan sebagai orientasi hidup kearah kekayaan materi (mempercayai segala sesuatu dalam bentuk material serta tidak mempercayai hal-hal spiritual). (Hakim, Rusman, 1998)
21	Konglomerat adalah orang yang mencapai puncak kesuksesan atau keberhasilan dalam bidang usaha.
22	<i>Leadership</i> adalah seseorang wirausaha memiliki sikap kepeloporan atau kepemimpinan dalam menjalankan usahanya (Hakim, Rusman, 1998)
23	BOM ( <i>Bills of material</i> ) merupakan suatu daftar komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat suatu produksi, yang dilengkapi dengan urutan dari operasi-operasi yang harus dilakukan, juga bahan-bahan yang diperlukan untuk setiap produksi akhir. (Wijandi, 1987)
24	Karakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Karakter mengacu kepada serangkaian sikap ( <i>attitudes</i> ), perilaku ( <i>behaviors</i> ), motivasi ( <i>motivations</i> ), dan keterampilan ( <i>skills</i> ). Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti "to mark" atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia. (Ki Tyasno Sudarto (2007).
25	<i>Rahayuning bawono kapurbo waksitaning manungso</i> (kesejahteraan dunia tergantung pada manusia yang

	memiliki ketajaman rasa);
26	<i>Dharmaning manungso mahanani rahayuning negara</i> (tugas utama dalam menjaga keselamatan negara);
27	<i>Rahayuning manungso dumadi karena kemanung-sane</i> (keselamatan manusia ditentukan tata perilakunya).
28	<i>Character builders</i> , yaitu membangun kembali karakter positif para pendidik dengan menjunjung nilai-nilai moral di atas kepentingan sesaat dan menginternalisasikan pada kegiatan dan aktivitasnya sehari-hari;
29	<i>Character enabler</i> , yaitu pemberdayaan secara terus menerus karakter pendidik dengan bersedia menjadi role model dari pengembangan karakter di lingkungannya;
30	<i>Character enginer</i> , yaitu terus menerus melakukan pembelajaran pengembangan karakter yang menuntut adanya modifikasi dan rekayasa yang tepat disesuaikan dengan perkembangan jaman. Mas'ud Machffoedz (2002),
31	<i>Creatif new and different</i> kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang usaha (Suyana, 2003)
32	SWOT adalah <i>Strength</i> (kekuatan) <i>Weaknesses</i> (kelemahan) <i>Opportunity</i> (peluang) <i>Threath</i> (tantangan/hambatan)
33	Business plan adalah rambu-rambu penyusunan rencana usaha
34	Bentuk ( <i>appearance</i> ) : keenakannya dipandang mata.
35	Penampilan ( <i>performance</i> ) : punya arti tersendiri.
36	Keawetan ( <i>durability</i> ) : tahan lama.
37	Keamanan ( <i>safety</i> ) : tidak mencelakakan.
38	Kenyamanan ( <i>comfort</i> ) : enak dirasakan.
29	Ekonomis ( <i>economy</i> ) : dihubungkan dengan harga.
30	<i>IEP (Individualized Educational Program)</i> adalah program pendidikan yang diindividualisasikan bagi penyandang

	difabel.
31	<i>Commision for Social Development</i> adalah peraturan standar tentang persamaan kesempatan bagi para penyandang difabel dalam rangka sidang-sidang komisi pembangunan sosial
32	<i>Economic and Social Council</i> adalah organisasi-organisasi para penyandang difabel internasional yang memiliki status konsultatif di dewan ekonomi dan sosial serta organisasi-organisasi yang mewakili para penyandang cacat yang belum membentuk sebuah panel para parkar,
33	PPRBM-YPAC adalah Pusat Pengembangan dan latihan Rehabilitasi para Cacat Bersumberdaya Masyarakat - Yayasan Penyandang Anak Cacat.
34	Prognosis (prediksi penampilan di masa datang) yang eksplisit atau implisit. Prognosis diberikan kepada difabel pada keadaan hidupnya dan lingkungan sekarang ini dan dapat pula pada masa terapinya dan memberikan lingkungan yang remedial.
35	<i>Structured of guided interview</i> (Wawancara terpimpin); adalah interview yang dilakukan berdasarkan pedoman-pedoman berupa kuesioner yang telah disiapkan masak-masak sebelumnya. Sehingga pelaksanaan wawancara tinggal membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada sumber informasi (sasaran). Pertanyaan-pertanyaan di dalam pedoman (kuesioner) tersebut disusun sedemikian rupa sehingga mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan kebutuhan data.
36	ILO (Organisasi Buruh Internasional) dengan mengacu khusus pada ketentuan tentang partisipasi dalam pekerjaan tanpa diskriminasi bagi para penyandang difabel
37	UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan) PBB Deklarsi Dunia tentang Pendidikan Bagi semua

PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PENYANDANG DIFABEL  
dalam Konteks Pendidikan Karakter Bangsa



38	WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) dan anak-anak PBB serta organisasi-organisasi yang terkait.
39	<i>Center for Social Development and humanitarian Affairs</i> adalah Pusat Pembangunan Sosial dan Masalah-masalah kemanusiaan dari kantor PBB di Wina, sebagai titik fokus PBB untuk masalah-masalah difabel.
40	<i>Grand design</i> Kemendiknas (2010), secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat.
41	Bill Drayton (2007) konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural dapat dikelompokkan dalam: olah hati ( <i>spiritual and emotional development</i> ); olah pikir ( <i>intellectual development</i> ); olahraga dan kinestetik ( <i>Physical and kinesthetic development</i> ); dan olahraga dan karsa ( <i>Affective and Creativity development</i> )

## **BIODATA PENULIS**

**Dr. Ibnu Syamsi, M.Pd.** adalah staf pengajar di Jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan UNY. Penulis menyelesaikan studi S1 PLB di Bandung tahun 1984. Gelar Master diperoleh dari UNY pada tahun 2004 dengan konsentrasi pada Pendidikan Luar Sekolah. Gelar Doktor diperoleh dari UPI Bandung Tahun 2008 dengan konsentrasi Pendidikan Luar Sekolah. Beliau memiliki ketertarikan terhadap Pendidikan Kewirausahaan Anak Berkebutuhan Khusus. Selain mengajar dan meneliti, penulis juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat terutama dalam bidang pengembangan Pendidikan Luar Biasa.





Ibnu Syamsi

Pendidikan Kewirausahaan bagi Penyandang Difabel dalam Konteks Pendidikan Karakter Bangsa



Ibnu Syamsi

Istilah difabel merupakan kependekan istilah different abilities (orang dengan kemampuan yang berbeda). Dengan istilah difabel, masyarakat diajak merekonstruksi nilai-nilai sebelumnya, yang semula memandang kondisi cacat atau tidak normal sebagai kekurangan atau ketidakmampuan menjadi pemahaman terhadap difabel sebagai manusia dengan kondisi fisik berbeda yang mampu melakukan aktivitas dengan cara dan pencapaian yang berbeda pula. Dengan pemahaman baru itu masyarakat diharapkan tidak lagi memandang para difabel sebagai manusia yang hanya memiliki kekurangan dan ketidakmampuan. Sebaliknya, para difabel, sebagaimana layaknya manusia umumnya, juga memiliki potensi dan sikap positif terhadap lingkungannya.

Buku ini kiranya dapat menjadi bahan rujukan utama untuk mahasiswa, dosen, guru penyandang difabel, dan praktisi, diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap terhadap penerapan kewirausahaan di masyarakat.

Pendidikan Kewirausahaan Bagi Penyandang Difabel dalam Konteks Pendidikan Karakter Bangsa

Ibnu Syamsi

Pendidikan Kewirausahaan Bagi Penyandang Difabel dalam Konteks Pendidikan Karakter Bangsa

Pendidikan Kewirausahaan bagi Penyandang Difabel dalam Konteks Pendidikan Karakter Bangsa

Ibnu Syamsi

Pendidikan Kewirausahaan Bagi Penyandang Difabel dalam Konteks Pendidikan Karakter Bangsa

Istilah difabel merupakan kependekan istilah different abilities (orang dengan kemampuan yang berbeda). Dengan istilah difabel, masyarakat diajak merekonstruksi nilai-nilai sebelumnya, yang semula memandang kondisi cacat atau tidak normal sebagai kekurangan atau ketidakmampuan menjadi pemahaman terhadap difabel sebagai manusia dengan kondisi fisik berbeda yang mampu melakukan aktivitas dengan cara dan pencapaian yang berbeda pula. Dengan pemahaman baru itu masyarakat diharapkan tidak lagi memandang para difabel sebagai manusia yang hanya memiliki kekurangan dan ketidakmampuan. Sebaliknya, para difabel, sebagaimana layaknya manusia umumnya, juga memiliki potensi dan sikap positif terhadap lingkungannya.

Buku ini kiranya dapat menjadi bahan rujukan utama untuk mahasiswa, dosen, guru penyandang difabel, dan praktisi, diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap terhadap penerapan kewirausahaan di masyarakat.

Ibnu Syamsi



JL.H.Alfandi [Jl.Gejayan], Gg. Alamanda, Kompleks FT-UNY, Kampus Karangmalang, Yogyakarta, Kode Pos: 55281, Telp. (0274)589346, unypress.yogyakarta@gmail.com

